BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Sementara Perubahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dibutuhkan suatu pengaturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688I);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp837.118.199.810,74 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah tujuh puluh empat sen), mengalami pengurangan sejumlah Rp203.741.115.162,26 (dua ratus tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh dua rupiah dua puluh enam sen) dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp1.040.859.314.973,00 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pendapatan Daerah;
    b. Belanja Daerah; dan
    c. Pembiayaan Daerah.
(3) Rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
    a. Pendapatan Daerah semula Rp882.480.955.551,00 berkurang (Rp48.084.817.537,55) jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp834.396.138.013,45
    b. Belanja Daerah semula Rp1.040.859.314.973,00 berkurang (Rp203.741.115.162,26) jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp837.118.199.810,74 (surplus/defisit) setelah perubahan (Rp2.722.061.797,29)

c. Pembiayaan Daerah yang terdiri atas:
   1. Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp158.378.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp2.722.061.797,29
   2. pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00 jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp2.722.061.797,29 sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah semula Rp53.491.122.423,00 berkurang (Rp514.144.763,00) jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp52.976.977.660,00
b. pendapatan transfer semula Rp828.820.943.352,00 berkurang (Rp47.558.651.661,55) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp781.262.291.690,45
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula Rp168.889.776,00 berkurang (Rp12.021.113,00)
d. jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp156.868.663,00

Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah semula Rp25.122.015.531,00 bertambah Rp300.000.000,00 jumlah pajak Daerah setelah Rp.824.360.000,00 berkurang (Rp1.932.681.930,00) jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp4.891.678.070,00
b. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.500.000.000,00
c. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula Rp20.044.746.892,00 bertambah Rp1.118.537.167,00 jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp21.163.284.059,00

Pasal 4

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat semula Rp786.212.377.100,00 berkurang (Rp56.205.808.638,55) jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp730.006.568.461,45
b. pendapatan transfer antar daerah semula Rp42.608.566.252,00 bertambah Rp8.647.156.977,00

jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp51.255.723.229,00

Pasal 5

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
semula Rp168.889.776,00 berkurang (Rp12.021.113,00) jumlah lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp156.868.663,00.

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi semula Rp784.449.005.089,76 berkurang (Rp127.406.884.265,16) jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp657.042.120.824,60
b. belanja modal semula Rp142.215.982.235,72 berkurang (Rp 74.362.308.050,93) jumlah belanja modal setelah perubahan Rp67.853.674.184,79
c. belanja tidak terduga semula Rp8.981.012.988,52 berkurang (Rp372.305.582,17) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp8.608.707.406,35
d. belanja transfer semula Rp105.213.314.659,00 berkurang (Rp1.599.617.264,00) jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp103.613.697.395,00

Pasal 7

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai semula Rp514.949.159.286,14 berkurang (Rp51.511.021.616,09) jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp463.438.137.670,05
b. belanja barang dan jasa semula Rp264.260.065.122,62 berkurang (Rp74.957.212.757,07) jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp189.302.852.365,55
c. belanja hibah semula Rp5.091.985.681,00 berkurang(Rp1.697.025.892,00) jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp3.394.959.789,00
d. belanja bantuan sosial Rp147.795.000,00 bertambah Rp758.376.000,00 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp906.171.000,00

Pasal 8

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah semula Rp 3.808.975.640,00 berkurang (Rp 3.661.975.640,00) jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp147.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin semula Rp 25.919.005.881,97 berkurang (Rp 6.082.221.409,20)

jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 19.836.784.472,77

c. belanja gedung dan bangunan semula Rp 25.619.649.701,74 bertambah Rp 6.664.367.873,14 jumlah belanja gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 32.284.017.574,88
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula Rp 85.907.124.696,01 berkurang (Rp 71.396.344.069,87) jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 14.510.780.626,14
e. belanja modal aset tetap lainnya semula Rp 924.305.280,00 bertambah Rp 113.865.195,00 jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 1.038.170.475,00
f. belanja modal aset lainnya belanja modal aset lainnya tidak mengalami perubahan anggaran semula yaitu Rp36.921.036,00

Pasal 9

Anggaran Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas: belanja tidak terduga semula Rp 8.981.012.988,52 berkurang (Rp372.305.582,17) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp8.608.707.406,35

Pasal 10

Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil semula Rp3.096.467.249,00 bertambah Rp1.502.330.570,00 jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp4.598.797.819,00
b. belanja bantuan keuangan semula Rp102.116.847.410,00 berkurang (Rp3.101.947.834,00) jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp99.014.899.576,00

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp158.378.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71) jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp2.722.061.797,29
b. pengeluaran Pembiayaan Daerah pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00

Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula Rp157.878.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71) jumlah sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp2.222.061.797,29

b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp500.000.000,00.

Pasal 13

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas pemberian pinjaman Daerah Pemberian pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp2.722.061.797,29 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan Daerah terhadap pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp2.722.061.797,29 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen).

Pasal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
    c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib;
    c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Ketentuan mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, antara lain:

| | |
|---|---|
| Lampiran I | ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025; |
| Lampiran II | ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2025; |
| Lampiran III | rincian perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; |
| Lampiran IV | rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2025; |
| Lampiran V | rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| Lampiran VI | rekapitulasi Belanja Daerah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal tahun anggaran 2025; |
| Lampiran VII | sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan perubahan APBD tahun anggaran 2025; |
| Lampiran VIII | sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; |
| Lampiran IX | sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2025; |
| Lampiran X | daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025; |
| Lampiran XI | daftar piutang Daerah tahun anggaran 2025. |

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 107

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 3,29/2025;

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RKPD, KUPA, dan PPAS Perubahan untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.

Sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Daerah” adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “pendapatan transfer” adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “belanja operasi” adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “belanja modal” adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “belanja tidak terduga” adalah pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “belanja transfer” adalah pengeluaran uang dari Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 107

# GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
**NOMOR 935 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus mendapat evaluasi Gubernur Kepulauan Riau sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Anambas;

b. bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

**Memperhatikan :**

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.1.4/0719/SD.I/DIT.I/KEUDA Tanggal 7 Agustus 2025 Hal: Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA** : Bupati Kepulauan Anambas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

**KETIGA** : Bupati Kepulauan Anambas segera menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Kepulauan Riau dan segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**KEEMPAT** : Bupati Kepulauan Anambas segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Agustus 2025

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**ANSAR AHMAD**

**Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 935 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

| RANCANGAN PERATURAN DAERAH | HASIL EVALUASI GUBERNUR | KETERANGAN |
|---|---|---|
| BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>PROVINSI KEPULAUAN RIAU<br><br>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS<br>NOMOR ... TAHUN 2025<br>TENTANG<br>PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH<br>TAHUN ANGGARAN 2025<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan | BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>PROVINSI KEPULAUAN RIAU<br><br>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS<br>NOMOR ... TAHUN 2025<br>TENTANG<br>PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH<br>TAHUN ANGGARAN 2025<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan | |

| | | |
|---|---|---|
| belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;<br>b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;<br>c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dibutuhkan suatu pengaturan;<br>d. bahwa berdasarkan pertimbangan | - | belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;<br>b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;<br>c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; | | perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dibutuhkan suatu pengaturan;<br>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; | |
| Mengingat : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);<br>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);<br>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);<br>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 | Mengingat : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);<br>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);<br>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan | |

| | | |
|---|---|---|
| Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<br>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);<br>8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);<br>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan | Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);<br>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<br>7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah ~~beberapa kali terakhir~~ dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 | |

| | | |
|---|---|---|
| Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);<br>10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);<br>11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);<br>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);<br>13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);<br>14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran | tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<br>8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);<br>9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);<br>10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik | |

| | | |
|---|---|---|
| Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);<br>15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);<br>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);<br>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan | Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);<br>11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);<br>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);<br>13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); | |

| | | |
|---|---|---|
| Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);<br>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);<br>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<br>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);<br>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan | 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);<br>15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688I);<br>16. Peraturan Pemerintah Nomor ~~35~~ 37 Tahun 2023 Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);<br>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);<br>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, | |

| | | |
|---|---|---|
| Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);<br>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);<br>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);<br>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);<br>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan | dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);<br>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);<br>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<br>~~21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi~~ | |

| | | |
|---|---|---|
| Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);<br>26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);<br>27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104). | ~~Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);~~<br>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);<br>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);<br>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| | tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);<br>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);<br>26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);<br>27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun ~~2025~~ 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ~~2024~~ 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 ~~2023~~ Nomor 648);<br>28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| | Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);<br>29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104). | |
| Dengan Persetujuan Bersama<br>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS<br>dan<br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS | Dengan Persetujuan Bersama<br>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS<br>dan<br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS | |
| MEMUTUSKAN:<br>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. | MEMUTUSKAN:<br>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. | |
| BAB I<br>KETENTUAN UMUM | ~~BAB I~~<br>~~KETENTUAN UMUM~~ | |
| Pasal 1 | ~~Pasal 1~~ | |
| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:<br>1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.<br>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun | ~~Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:~~<br>~~1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.~~<br>~~2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.~~<br>~~3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.~~<br>~~4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut APBD~~ | |

| | | |
|---|---|---|
| Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<br>5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.<br>8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disebut PPAS Perubahan adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.<br>9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.<br><br>BAB II<br>RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025<br><br>Pasal 2<br>(1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp837.118.199.810,74 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah | ~~Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.~~<br>~~5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.~~<br>~~6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.~~<br>~~7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.~~<br>~~8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disebut PPAS Perubahan adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.~~<br>~~9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.~~<br><br>~~BAB II~~<br>~~RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025~~<br><br>Pasal 2<br>(1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp837.118.199.810,74 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta seratus | |

| | | |
|---|---|---|
| tujuh puluh empat sen), mengalami pengurangan sejumlah Rp203.741.115.162,26 (dua ratus tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh dua rupiah dua puluh enam sen) dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp1.040.859.314.973,00 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)<br>(2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a. Pendapatan Daerah;<br>b. Belanja Daerah; dan<br>c. Pembiayaan Daerah.<br>(3) Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:<br>a. Pendapatan Daerah semula Rp882.480.955.551,00 berkurang (Rp48.084.817.537,55) jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp834.396.138.013,45<br>b. Belanja Daerah semula Rp1.040.859.314.973,00 berkurang (Rp203.741.115.162,26) jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp837.118.199.810,74 (surplus/defisit) setelah perubahan (Rp2.722.061.797,29)<br>c. Pembiayaan Daerah yang terdiri atas:<br>1. penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp158.378.359.422,00 berkurang(Rp155.656.297.624,71) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp2.722.061.797,29<br>2. pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00 | sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah tujuh puluh empat sen), mengalami pengurangan sejumlah Rp203.741.115.162,26 (dua ratus tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh dua rupiah dua puluh enam sen) dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp1.040.859.314.973,00 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)<br>(2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a. Pendapatan Daerah;<br>b. Belanja Daerah; dan<br>c. Pembiayaan Daerah.<br>(3) Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:<br>a. Pendapatan Daerah Rp882.480.955.551,00 berkurang (Rp48.084.817.537,55) jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp834.396.138.013,45<br>b. Belanja Daerah semula Rp1.040.859.314.973,00 berkurang (Rp203.741.115.162,26) jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp837.118.199.810,74 (surplus/defisit) setelah perubahan (Rp2.722.061.797,29)<br>c. Pembiayaan Daerah yang terdiri atas:<br>1. Penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp158.378.359.422,00 berkurang(Rp155.656.297.624,71) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp2.722.061.797,29 | |

| | | |
|---|---|---|
| jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp2.722.061.797,29 sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah setelah perubahan Rp0,00 | d. pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00 jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp2.722.061.797,29 sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah setelah perubahan Rp0,00 | |
| Pasal 3 | Pasal 3 | |
| Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, bersumber dari:<br>a. pendapatan asli daerah semula Rp53.491.122.423,00 berkurang (Rp514.144.763,00) jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp52.976.977.660,00<br>b. pendapatan transfer semula Rp828.820.943.352,00 berkurang (Rp47.558.651.661,55) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp781.262.291.690,45<br>c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula Rp168.889.776,00 berkurang (Rp12.021.113,00) jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp156.868.663,00 | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~2~~ 1 ayat (3) huruf a, bersumber dari:<br>a. pendapatan asli daerah semula Rp53.491.122.423,00 berkurang (Rp514.144.763,00) jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp52.976.977.660,00<br>b. pendapatan transfer semula Rp828.820.943.352,00 berkurang (Rp47.558.651.661,55) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp781.262.291.690,45<br>c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula Rp168.889.776,00 berkurang (Rp12.021.113,00)<br>d. jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp156.868.663,00 | |
| Pasal 4 | Pasal 4 | |
| Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:<br>a. pajak Daerah semula Rp25.122.015.531,00 bertambah Rp300.000.000,00 jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp25.422.015.531,00<br>b. retribusi Daerah semula Rp6.824.360.000,00 berkurang (Rp1.932.681.930,00) jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp4.891.678.070,00<br>c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~3~~ 2 huruf a bersumber dari:<br>a. pajak Daerah semula Rp25.122.015.531,00bertamba Rp300.000.000,00 jumlah pajak Daerah setelah Rp.824.360.000,00 berkurang (Rp1.932.681.930,00) jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp4.891.678.070,00<br>b. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan dari anggaran semula | |

| | | |
|---|---|---|
| tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.500.000.000,00<br>d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula Rp20.044.746.892,00 bertambah Rp1.118.537.167,00 jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp21.163.284.059,00<br><br>Pasal 5<br><br>Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:<br>a. pendapatan transfer pemerintah pusat semula Rp786.212.377.100,00 berkurang (Rp56.205.808.638,55) jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp730.006.568.461,45<br>b. pendapatan transfer antar daerah semula Rp42.608.566.252,00 bertambah Rp8.647.156.977,00 jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp51.255.723.229,00<br><br>Pasal 6<br><br>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula Rp168.889.776,00 berkurang (Rp12.021.113,00) jumlah lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp156.868.663,00. | yaitu Rp1.500.000.000,00<br>c. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semulaRp20.044.746.892,00 bertambahRp1.118.537.167,00 jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp21.163.284.059,00<br><br>Pasal ~~5~~ 4<br><br>Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~3~~ 2 huruf b, bersumber dari:<br>a pendapatan transfer pemerintah pusat semula Rp786.212.377.100,00berkurang (Rp56.205.808.638,55) jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp730.006.568.461,45<br>b. pendapatan transfer antar daerah Rp42.608.566.252,00 bertambah Rp8.647.156.977,00 jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp51.255.723.229,00<br><br>Pasal ~~6~~ 5<br><br>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~3~~ 2 huruf c, bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br><br>Semula Rp168.889.776,00 berkurang (Rp12.021.113,00) jumlah lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp156.868.663,00. | |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 7<br><br>Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:<br>a. belanja operasi semula Rp784.449.005.089,76 berkurang (Rp127.496.462.512,89)jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp656.952.542.576,87<br>b. belanja modal semula Rp142.215.982.235,72 berkurang (Rp 74.349.748.394,47) jumlah belanja modal setelah perubahan Rp67.866.233.841,25<br>c. belanja tidak terduga semula Rp8.981.012.988,52 berkurang (Rp295.286.990,90) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp8.685.725.997,62<br>d. belanja transfer semula Rp105.213.314.659,00 berkurang (Rp1.599.617.264,00) jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp103.613.697.395,00<br><br>Pasal 8<br><br>Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:<br>a. belanja pegawai semula Rp514.949.159.286,14 berkurang (Rp51.227.834.497,55) jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp463.721.324.788,59<br>b. belanja barang dan jasa semula Rp264.260.065.122,62 berkurang (Rp75.296.403.122,34) jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp188.963.662.000,28<br>c. belanja hibah semula Rp5.091.985.681,00 berkurang (Rp1.697.000.893,00) jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp3.394.984.788,00<br>d. belanja bantuan social semula Rp147.795.000,00 bertambah Rp724.776.000,00 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp872.571.000,00 | Pasal ~~7~~ 6<br><br>Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~2~~ 1 ayat (3) huruf b, terdiri atas:<br>a. belanja operasi semula Rp784.449.005.089,76 berkurang (Rp127.496.462.512,89) jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp656.952.542.576,87<br>b. belanja modal semula Rp142.215.982.235,72 berkurang (Rp 74.349.748.394,47) jumlah belanja modal setelah perubahan Rp67.866.233.841,25<br>c. belanja tidak terduga semula Rp8.981.012.988,52 berkurang (Rp295.286.990,90) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp8.685.725.997,62<br>d. belanja transfer semula Rp105.213.314.659,00 berkurang (Rp1.599.617.264,00) jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp103.613.697.395,00<br><br>Pasal ~~8~~7<br><br>Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~7~~ 6 huruf a, terdiri atas:<br>a. belanja pegawai semula Rp514.949.159.286,14 berkurang (Rp51.227.834.497,55) jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp463.721.324.788,59<br>b. belanja barang dan jasa semul Rp264.260.065.122,62 berkurang (Rp75.296.403.122,34) jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp188.963.662.000,28<br>c. belanja hibah semula Rp5.091.985.681,00 berkurang (Rp1.697.000.893,00) jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp3.394.984.788,00<br>d. belanja bantuan social semula Rp147.795.000,00 bertambah Rp724.776.000,00 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp872.571.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 9<br><br>Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:<br>a. belanja modal tanah semula Rp 3.808.975.640,00 berkurang (Rp 3.661.975.640,00) jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp147.000.000,00<br>b. belanja modal peralatan dan mesin semula Rp 25.919.005.881,97 berkurang (Rp 6.069.661.752,74) jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 19.849.344.129,23<br>c. belanja gedung dan bangunan semula Rp 25.619.649.701,74 bertambah Rp 6.664.367.873,14 jumlah belanja gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 32.284.017.574,8<br>d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula Rp 85.907.124.696,01 berkurang (Rp 71.396.344.069,87) jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 14.510.780.626,14<br>e. belanja modal aset tetap lainnya semula Rp 924.305.280,00 bertambah Rp 113.865.195,00 jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 1.038.170.475,00<br>f. belanja modal aset lainnya<br>belanja modal aset lainnya tidak mengalami perubahan anggaran semula yaitu Rp36.921.036,00<br><br>Pasal 10<br><br>Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas: belanja tidak terduga semula Rp 8.981.012.988,52<br>berkurang (Rp295.286.990,90) jumlah belanja tidak | Pasal ~~9~~ 8<br><br>Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:<br>a. belanja modal tanah semul Rp 3.808.975.640,00 berkuran (Rp 3.661.975.640,00) jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp147.000.000,00<br>b. belanja modal peralatan dan mesin semula Rp 25.919.005.881,97 berkurang (Rp 6.069.661.752,74) jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 19.849.344.129,23<br>c. belanja gedung dan bangunan semula Rp 25.619.649.701,74 bertambah Rp 6.664.367.873,14 jumlah belanja gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 32.284.017.574,88<br>d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula Rp 85.907.124.696,01 berkurang (Rp 71.396.344.069,87) jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 14.510.780.626,14<br>e. belanja modal aset tetap lainnya semula Rp 924.305.280,00 bertambahn Rp 113.865.195,00jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 1.038.170.475,00<br>f. belanja modal aset lainnya belanja modal aset lainnya tidak mengalami perubahan anggaran semula yaitu Rp36.921.036,00<br><br>Pasal ~~10~~ 3<br><br>Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~7~~ 6 huruf c, terdiri atas: belanja tidak terduga semula Rp8.981.012.988,52 berkurang (Rp295.286.990,90) jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp8.685.725.997,62. | |

| | | |
|---|---|---|
| terduga setelah perubahan Rp8.685.725.997,62. | | |
| Pasal 11 | Pasal ~~11~~ ~~10~~ | |
| Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas: | Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~7~~ 1 huruf d, terdiri atas: | |
| a. belanja bagi hasil semula Rp3.096.467.249,00 bertambah Rp1.502.330.570,00 jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp4.598.797.819,00 | g. belanja bagi hasil semula Rp3.096.467.249,00 bertambah Rp1.502.330.570,00 jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp4.598.797.819,00 | |
| b. belanja bantuan keuangan semula Rp102.116.847.410,00 berkurang (Rp3.101.947.834,00) jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp99.014.899.576,00 | h. belanja bantuan keuangan semula Rp102.116.847.410,00 berkurang (Rp3.101.947.834,00) jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp99.014.899.576,00 | |
| Pasal 12 | Pasal ~~12~~ 11 | |
| Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, terdiri atas: | Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~2~~ 1 ayat (3) huruf c, terdiri atas: | |
| a. penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp158.378.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71) jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp2.722.061.797,29 | a. penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp158.378.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71) jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp2.722.061.797,29 | |
| b. pengeluaran Pembiayaan Daerah pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00 | b. pengeluaran Pembiayaan Daerah pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00 | |
| Pasal 13 | Pasal ~~13~~ 12 | |
| Anggaran penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Bersumber dari: | Anggaran penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~12~~ 1 huruf a, Bersumber dari: | |
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula Rp157.878.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71) jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah | a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula Rp157.878.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71) jumlah sisa lebih | |

| | | |
|---|---|---|
| perubahan Rp2.222.061.797,29<br>b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp500.000.000,00.<br><br>Pasal 14<br><br>Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas pemberian pinjaman Daerah Pemberian pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00<br><br>Pasal 15<br><br>(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp2.722.061.797,29 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen).<br>(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan Daerah terhadap pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp2.722.061.797,29 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen).<br><br>Pasal 16<br><br>(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran. | perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp2.222.061.797,29<br>b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp500.000.000,00.<br><br>Pasal 14<br><br>Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas pemberian pinjaman Daerah Pemberian pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00<br><br>Pasal 15<br><br>(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp2.722.061.797,29 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen).<br>(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan Daerah terhadap pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp2.722.061.797,29 (dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen).<br><br>Pasal 16<br><br>(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang | |

| | | |
|---|---|---|
| (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;<br>b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau<br>c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.<br>(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;<br>b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib;<br>c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau<br>d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.<br><br>Pasal 17<br>Ketentuan mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, antara lain:<br>Lampiran I ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Daerah | diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran.<br>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;<br>b. pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau<br>c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.<br>(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;<br>b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib;<br>c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau<br>d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.<br><br>Pasal 17<br>Ketentuan mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, antara lain:<br>Lampiran I ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut kelompok dan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tahun Anggaran 2025; | | jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025; | |
| Lampiran II | ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2025; | Lampiran II | ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2025; | |
| Lampiran III | rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; | Lampiran III | rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025; | |
| Lampiran IV | rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2025; | Lampiran IV | rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2025; | |
| Lampiran V | rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; | Lampiran V | rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan | |
| Lampiran VI | rekapitulasi Belanja Daerah untuk pemenuhan | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | standar pelayanan minimal tahun anggaran 2025; | | | fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; | |
| Lampiran VII | sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD tahun anggaran 2025; | | Lampiran VI | rekapitulasi Belanja Daerah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal tahun anggaran 2025; | |
| Lampiran VIII | sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; | | Lampiran VII | sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD tahun anggaran 2025; | |
| Lampiran IX | sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2025; | | Lampiran VIII | sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; | |
| Lampiran X | daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025; | | Lampiran IX | sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2025; | |
| Lampiran XI | daftar piutang Daerah tahun anggaran 2025. | | Lampiran X | daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025; | |
| | | | Lampiran XI | daftar piutang Daerah tahun anggaran 2025. | |
| Pasal 18 | | | | | |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. | | | | | |
| BAB III<br>KETENTUAN PENUTUP | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 19<br>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br><br>Ditetapkan di Tarempa<br>pada tanggal .....<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>ANENG<br><br>Diundangkan di Tarempa<br>pada tanggal ...<br><br>SEKRETARIS DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>SAHTIAR<br><br>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN .... NOMOR ...<br><br>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN | Pasal 18<br>Ketentuan lebih lanjut mengenai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.<br><br>BAB III<br>KETENTUAN PENUTUP<br><br>Pasal 19<br>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br><br>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br><br>Ditetapkan di Tarempa<br>pada tanggal ...<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>ANENG | |

| | | |
|---|---|---|
| KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: ... , .../2025;<br><br>PENJELASAN<br>ATAS<br>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS<br>NOMOR ... TAHUN ...<br>TENTANG<br>PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH<br>TAHUN ANGGARAN 2025<br><br>I. UMUM<br>Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RKPD, KUPA, dan PPAS Perubahan untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.<br>Sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan | Diundangkan di Tarempa<br>pada tanggal ...<br><br>SEKRETARIS DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br><br><br>SAHTIAR<br>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN .... NOMOR ...<br><br>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: ... , .../2025; | |

| | | |
|---|---|---|
| dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.<br><br>II. PASAL DEMI PASAL<br><br>Pasal 1<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 2<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 3<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 4<br>Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Daerah" adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br><br>Pasal 5<br>Yang dimaksud dengan "pendapatan transfer" adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.<br><br>Pasal 6<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 7<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 8<br>Yang dimaksud dengan "belanja operasi" adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. | PENJELASAN<br>ATAS<br>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS<br>NOMOR ... TAHUN ...<br>TENTANG<br>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH<br>TAHUN ANGGARAN 2025<br><br>I. UMUM<br>APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.<br>Sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan | |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 9<br>Yang dimaksud dengan "belanja modal" adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.<br><br>Pasal 10<br>Yang dimaksud dengan "belanja tidak terduga" adalah pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.<br><br>Pasal 11<br>Yang dimaksud dengan "belanja transfer" adalah pengeluaran uang dari Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.<br><br>Pasal 12<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 13<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 14<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 15<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 16<br>Cukup Jelas | menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.<br><br>II. PASAL DEMI PASAL<br><br>Pasal 1<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 2<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 3<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 4<br>Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Daerah" adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br><br>Pasal 5<br>Yang dimaksud dengan "pendapatan transfer" adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.<br><br>Pasal 6<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 7 | |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 17<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 18<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 19<br>Cukup Jelas<br><br>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR ... | Cukup Jelas<br><br>Pasal 8<br>Yang dimaksud dengan "belanja operasi" adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.<br><br>Pasal 9<br>Yang dimaksud dengan "belanja modal" adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.<br><br>Pasal 10<br>Yang dimaksud dengan "belanja tidak terduga" adalah pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.<br><br>Pasal 11<br>Yang dimaksud dengan "belanja transfer" adalah pengeluaran uang dari Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.<br><br>Pasal 12<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 13<br>Cukup Jelas | |

| | | |
|---|---|---|
| | Pasal 14<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 15<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 16<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 17<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 18<br>Cukup Jelas<br><br>Pasal 19<br>Cukup Jelas<br><br>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR | |

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU.**

**ANSAR AHMAD**

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 935 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

| RANCANGAN PERATURAN BUPATI | HASIL EVALUASI GUBERNUR | KETERANGAN |
|---|---|---|
| BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>PROVINSI KEPULAUAN RIAU<br><br>RANCANGAN<br>PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>NOMOR ... TAHUN ...<br>TENTANG<br>PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja | BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>PROVINSI KEPULAUAN RIAU<br><br>RANCANGAN<br>PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>NOMOR ... TAHUN ...<br>TENTANG<br>PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan | Penyempurnaan rumusan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Daerah Tahun Anggaran 2025; | | dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; | |
| Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);<br>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);<br>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);<br>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 | Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);<br>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);<br>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);<br>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~beberapa kali~~ diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi | Penyempurnaan rumusan |

| | | |
|---|---|---|
| Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<br>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);<br>8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);<br>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);<br>10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); | Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);<br>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);<br>8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);<br>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);<br>10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); | |

| | | |
|---|---|---|
| 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);<br>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);<br>13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);<br>14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);<br>15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);<br>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);<br>13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);<br>14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);<br>15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke | |

| | | |
|---|---|---|
| Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);<br>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);<br>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);<br>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);<br>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);<br>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);<br>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);<br>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);<br>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, | |

| | | |
|---|---|---|
| (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<br>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);<br>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);<br>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);<br>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran | Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<br>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);<br>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);<br>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);<br>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan | |

| | | |
|---|---|---|
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);<br>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);<br>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);<br>26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);<br>27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);<br>28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ....). | dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);<br>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);<br>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);<br>26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);<br>27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);<br>28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor ... , | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ....); |
| MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | |
| Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. | Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. | |
| BAB I<br>KETENTUAN UMUM | BAB I<br>KETENTUAN UMUM | |
| Pasal 1<br>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:<br>1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.<br>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<br>5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. | Pasal 1<br>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:<br>1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.<br>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut APBD Tahun Anggaran 2025 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<br>5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. | |
| BAB II<br>RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 | BAB II<br>RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 | |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 2<br>(1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp837.118.199.810,74 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah tujuh puluh empat sen) mengalami pengurangan sejumlah Rp203.741.115.162,26 (dua ratus tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh dua rupiah dua puluh enam sen) dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp1.040.859.314.973,00 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)<br>(2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a. Pendapatan Daerah;<br>b. Belanja Daerah; dan<br>c. Pembiayaan Daerah.<br>(3) Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:<br>a. Pendapatan Daerah Semula Rp882.480.955.551,00 Berkurang (Rp48.084.817.537,55) jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 834.396.138.013,45<br>b. Belanja Daerah semula Rp1.040.859.314.973,00 berkurang (Rp203.741.115.162,26) jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 837.118.199.810,74 (surplus/defisit) setelah perubahan (Rp2.722.061.797,29)<br>c. Pembiayaan Daerah yang terdiri atas:<br>1. Penerimaan Pembiayaan Daerah semul Rp158.378.359.422,00 berkurang (Rp155.656.297.624,71 )jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp2.722.061.797,29<br>2. pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp 0,00 jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp2.722.061.797,29 sisa lebih pembiayaan anggaran daerah setelah perubahan Rp 0,00 | Pasal 2<br>(1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp837.118.199.810,74 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah tujuh puluh empat sen) mengalami pengurangan sejumlah Rp203.741.115.162,26 (dua ratus tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh dua rupiah dua puluh enam sen) dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang semula berjumlah Rp1.040.859.314.973,00 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)<br>(2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a. Pendapatan Daerah;<br>b. Belanja Daerah; dan<br>c. Pembiayaan Daerah.<br>(3) Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:<br>a. Pendapatan Daerah semula Rp882.480.955.551,00 berkurang (Rp48.084.817.537,55) jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp834.396.138.013,45<br>b. Belanja Daerah semula Rp1.040.859.314.973,00 berkurang (Rp203.741.115.162,26) jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp837.118.199.810,74 (surplus/defisit) setelah perubahan (Rp2.722.061.797,29)<br>c. Pembiayaan Daerah yang terdiri atas:<br>1) penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp 158.378.359.422,00 berkurang(Rp155.656.297.624,71) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp2.722.061.797,29<br>2) pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 3<br><br>Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini antara lain:<br><br>Lampiran I : ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;<br><br>Lampiran II : ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;<br><br>Lampiran IIIa : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025;<br><br>Lampiran IIIb : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025;<br><br>Lampiran IVa : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2025; | jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp2.722.061.797,29 sisa lebih pembiayaan anggaran daerah setelah perubahan Rp0,00<br><br>Pasal 3<br><br>Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini antara lain:<br><br>Lampiran I : ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;<br><br>Lampiran II : ringkasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;<br><br>Lampiran IIIa : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025;<br><br>Lampiran IIIb : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi hibah tahun anggaran 2025;<br><br>Lampiran IVa : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampiran Va | : | daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025; | | SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2025; | |
| Lampiran Vb | : | daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025; | Lampiran Va | : daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025; | |
| Lampiran VIa | : | daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2025; | Lampiran Vb | : daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2025; | |
| | | | Lampiran VIa | : daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2025; | |
| Pasal 4 | | | Pasal 4 | | |
| Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | |
| BAB III<br>KETENTUAN PENUTUP | | | BAB III<br>KETENTUAN PENUTUP | | |
| Pasal 5 | | | Pasal 5 | | |
| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. | | | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Ditetapkan di Tarempa<br>pada tanggal ....<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>ANENG<br><br>Diundangkan di Tarempa<br>pada tanggal ...<br><br>SEKRETARIS DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>SAHTIAR<br><br>BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ... NOMOR .... | Ditetapkan di Tarempa<br>pada tanggal ...<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>ANENG<br><br>Diundangkan di Tarempa<br>pada tanggal ...<br><br>SEKRETARIS DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>SAHTIAR<br><br>BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ... NOMOR ... | |

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU.**

**ANSAR AHMAD**

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 935 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Kepentingan umum;

C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 180 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Gubernur Kepulauan Riau sebelum ditetapkan Bupati Kepulauan Anambas, meliputi:

A. Fokus kebijakan pembangunan daerah tahun 2025:

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

   Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 4,09-5,09%.

2. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

   Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 2,42%.

3. Proyeksi Kemiskinan

   Proyeksi penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 5,7%.

4. Proyeksi Gini Rasio

   Proyeksi gini rasio pada tahun 2025 sebesar 0,25%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD/RPD Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk kedalam rekening kas umum daerah dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehingga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel sebagai berikut:

# Tabel 1

## Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah

| Uraian | APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) | | % | APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp) | | % | APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp) | | % | Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 | Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 | Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 | Rata-Rata Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi (Per 30 Juni 2025) | | (%) | (%) | (%) | (%) |
| PENDAPATAN DAERAH | 1.149.685.355.791,00 | 998.370.281.042,73 | 86,84 | 984.762.634.724,32 | 809.505.443.369,94 | 82,20 | 882.480.955.551,00 | 317.667.834.539,50 | 36,00 | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 0,90 |
| Pendapatan Asli Daerah | 41.958.839.490,86 | 29.362.242.093,73 | 69,98 | 39.179.339.491,00 | 35.544.549.195,94 | 90,72 | 53.491.122.423,00 | 21.142.504.795,50 | 39,53 | 0,93 | 1,37 | 0,99 | 1,10 |
| Pendapatan Transfer | 1.107.726.516.301,00 | 969.008.038.949,00 | 87,48 | 942.803.795.233,32 | 773.804.025.511,00 | 82,07 | 828.820.943.352,00 | 296.450.673.422,00 | 35,77 | 0,85 | 0,88 | 0,94 | 0,89 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 0,00 | 0,00 | - | 2.779.500.000,00 | 156.868.663,00 | 5,64 | 168.889.776,00 | 74.656.322,00 | 44,20 | - | 0,06 | 0,93 | 0,33 |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren target pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas rata-rata sebesar 0,90% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalkan kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

   Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

   Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

   Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

   Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

C. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, diuraikan tren alokasi dan realisasi belanja daerah selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel sebagai berikut:

# Tabel 2
## Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

| Uraian | APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) | | % | APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp) | | % | APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp) | | % | Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 | Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 | Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 | Rata-Rata Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi (Per 30 Juni 2025) | | (%) | (%) | Target | Realisasi |
| BELANJA DAERAH | 1.250.230.911.389,00 | 980.270.183.929,64 | 78,41 | 1.009.212.363.684,00 | 832.217.333.836,00 | 82,46 | 978.646.114.973,00 | 251.720.525.990,00 | 25,72 | 0,81 | 0,97 | 0,86 | 0,88 |
| Belanja Operasi | 803.457.038.265,00 | 683.833.368.630,64 | 85,11 | 753.364.429.755,18 | 631.659.116.114,00 | 83,85 | 634.374.296.137,55 | 201.573.177.187,00 | 31,78 | 0,94 | 0,84 | 1,04 | 0,94 |
| Belanja Modal | 251.278.933.169,00 | 184.291.542.980,00 | 73,34 | 141.992.627.668,31 | 104.420.106.437,00 | 73,54 | 55.845.980.193,20 | 9.370.057.229,00 | 16,78 | 0,57 | 0,39 | 1,22 | 0,73 |
| Belanja Tidak Terduga | 68.799.839.255,00 | 0,00 | - | 1.959.397.381,51 | 0,00 | - | 183.117.023.983,25 | 0,00 | - | 0,03 | 93,46 | 0,05 | 31,18 |
| Belanja Transfer | 126.695.100.700,00 | 112.145.272.319,00 | 88,52 | 111.895.908.879,00 | 96.138.111.285,00 | 85,92 | 105.308.814.659,00 | 40.777.291.574,00 | 38,72 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 0,93 |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas rata-rata sebesar 0,88% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

   Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

   Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Biaya per Layanan Publik

   Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

5. *E-Government* dan *E-Procurement*

   Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

6. *Monitoring* dan Evaluasi Program

   Melakukan *monitoring* dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

D. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, diuraikan tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel sebagai berikut:

# Tabel 3

## Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah

| Uraian | APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp) | | % | APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp) | | % | APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp) | | % | Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 | Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 | Rasio dari Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 | Rata-Rata Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi (Per 30 Juni 2025) | | (%) | (%) | Target | Realisasi |
| PEMBIAYAAN DAERAH | 100.545.555.597,00 | 5.849.631.846,59 | 5,82 | 24.449.728.959,68 | 24.933.952.263,35 | 101,98 | 158.378.359.422,00 | 2.309.500.898,29 | 1,46 | 0,24 | 6,48 | 0,02 | 2,25 |
| Penerimaan Pembiayaan | 102.545.555.597,00 | 7.849.631.846,59 | 7,65 | 24.449.728.959,68 | 24.933.952.263,35 | 101,98 | 158.378.359.422,00 | 2.309.500.898,29 | 1,46 | 0,24 | 6,48 | 0,02 | 2,24 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas rata-rata sebesar 2,25% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

   Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja yang tidak efisien menunjukkan pemborosan.

2. Biaya per Layanan Publik

   Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

3. Evaluasi Kinerja Program

   Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sebanding.

E. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan tahapan jadwal penyusunan Perubahan APBD sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

| No. | Uraian | Penetapan/Persetujuan/Surat | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | Penyampaian Rancangan P-KUA dan Rancangan P-PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD | B/900.1.1/284/KDH/SD/06/2025 | 23 Juni 2025 | Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus) |
| 2 | Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan P-KUA dan Rancangan P-PPAS | P-KUA: 100.3.7/003/Kdh.KKA/MOU/VII/2025 dan 100.3.7/01/DPRD.KKA/MOU/VII/2025<br>P-PPAS: 100.3.7/004/Kdh.KKA/MOU/VII/2025 dan 100.3.7/02/DPRD.KKA/MOU/VII/2025 | 4 Juli 2025 | Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus) |
| 3 | Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD | B/900.1.1/319/KDH/SD/07/2025 | 18 Juli 2025 | Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September) |

| No. | Uraian | Penetapan/Persetujuan/Surat | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Nomor | Tanggal | |
| 4 | Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | PEMKAB : 3/BA/DPRD.KKA/VII/2025 dan DPRD : 4/BA/Kdh.KKA/VII/2025 | 29 Juli 2025 | Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum TA berakhir) |
| 5 | Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi | B/900.1.1.4/335/KDH/SD/07/2025 | 29 Juli 2025 | Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD) |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk selanjutnya agar dapat konsisten pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan P-APBD Tahun Anggaran 2025 mulai dari P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang P-APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. mensinkronisasikan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; dan
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH.

A. Dukungan Alokasi APBD dalam Menunjang Prioritas Nasional Tahun 2025.

1. Penyediaan Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi *Stunting*.

Penyediaan anggaran untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita dari total pagu sub kegiatan Rp55.926.088.732,22 atau 6,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selanjutnya jumlah alokasi berdasarkan perhitungan bobot sub kegiatan Rp15.774.155.497,55 atau 1,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp14.724.185.194,44 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp10.503.463.469,23 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Rp837.383.220,00 pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memperhatikan uraian belanja penunjang dalam mengalokasikan anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan

target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi.

   Dalam rangka pengendalian inflasi, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran pengendalian inflasi Rp13.460.295.999,14 atau 1,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp1.054.150.685,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

   b. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rp1.995.235.164,00 Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

   c. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp5.328.364.174,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

   Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

   Selain itu, penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memperhatikan uraian belanja penunjang dalam mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

   Penyediaan alokasi terhitung dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp54.264.321.014,73 atau 6,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun 2025, selanjutnya alokasi penanganan kemiskinan ekstrem Rp20.864.380.789,27 atau 38,45% dari total alokasi terhitung dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran yang antara lain tercantum pada:

   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp1.054.150.685,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

   b. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp5.929.056.029,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

   c. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp2.615.180.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

   Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memperhatikan uraian belanja penunjang pada dalam mengalokasikan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rangka Makan Bergizi Sehat.

   Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengalokasikan dukungan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

   Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari Transfer Ke Daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari Perubahan APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 terkait pembangunan sumber daya manusia berkualitas melalui penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diperlukan upaya percepatan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memperhatikan Surat Edaran Nomor 400.5.7/4072/SJ Tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah.

5. Dukungan Terhadap Program 3 (Tiga) Juta Rumah

   Penyediaan anggaran Program Tiga Juta Rumah agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pembangunan infrastuktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

   Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengambil langkah-langkah, antara lain:

   a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR;

   b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR;

   c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat;

   d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

6. Swasembada Pangan untuk Mendorong Kemandirian Bangsa

   Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mendukung dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan di daerah antara lain mendorong dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

   Selanjutnya, dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah, antara lain:

   a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
   b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
   c. *Monitoring* harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan;

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

   Penyediaan anggaran Swasembada Energi agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.

   Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi di tingkat daerah.

8. Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat

   Penyediaan anggaran Sekolah Rakyat agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung program Sekolah Rakyat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

   Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengambil langkah-langkah:

   a. penyiapan lahan;
   b. perizinan;
   c. penyiapan guru dan tenaga pendidik;

   dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

9. Alokasi Anggaran Sekolah Garuda

   Penyediaan anggaran Sekolah Garuda agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan pondasi Indonesia Emas 2045 melalui 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Win* yang diawasi langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden terkait pembangunan dan transformasi SMA Unggul Garuda.

   Selanjutnya, penganggaran Sekolah Garuda memiliki 3 (tiga) Pilar:

   a. Penyeimbang: Pemerataan kesempatan untuk berprestasi;

   b. Inkubator Pemimpin: Pembentukan karakter kepemimpinan Indonesia Emas 2045;

   Akademik dan Pengabdian Masyarakat: Pendidikan berkualitas tinggi dan pembinaan jiwa pelayanan.

10. Alokasi Anggaran Program Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Penyediaan anggaran Program Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

11. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

    Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp140.216.242.523,04 atau 54,63% dari total Belanja Barang dan Jasa Rp256.682.919.840,53 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

    Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut, yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

| No | Prioritas Nasional | Pagu P-APBD 2025 (Rp) | Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). | 0,00 | - |
| 2 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 436.861.837,00 | 0,05 |
| 3 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. | 22.846.790.605,25 | 2,73 |
| 4 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. | 440.497.502.649,81 | 52,62 |
| 5 | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri. | 1.635.760.498,03 | 0,20 |
| 6 | Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. | 120.999.155.520,69 | 14,45 |
| 7 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan. | 72.380.936.309,79 | 8,65 |

| No | Prioritas Nasional | Pagu P-APBD 2025 (Rp) | Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) |
|---|---|---|---|
| 8 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. | 328.449.753,74 | 0,04 |
| Total Prioritas Nasional | | 659.125.457.174,31 | 78,74 |
| Total Belanja Daerah dalam R-PAPBD TA 2025 | | 837.118.199.810,74 | |

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas Pemerintah Provinsi Tahun 2025 yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Prioritas Provinsi Tahun 2025

| No | Priortas Provinsi | Pagu P-APBD 2025 (Rp) | Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | 154.297.484.442,52 | 18,43 |
| 2. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | 20.698.767.285,82 | 2,47 |
| 3. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | 484.129.205.445,97 | 57,83 |
| Total Prioritas Provinsi | | 659.125.457.174,31 | 78,74 |
| Total Belanja Daerah dalam R-PAPBD TA 2025 | | 837.118.199.810,74 | |

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024 sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Prioritas Daerah Tahun 2025

| No. | Prioritas Daerah | Pagu P-APBD 2025 (Rp) | Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Peningkatan pemanfaatan Sumber daya ekonomi unggulan daerah | 156.392.436.461,25 | 18,68 |
| 2. | Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berbudaya | 421.454.760.747 | 50,35 |
| 3. | Pemerataan Infrastruktur wilayah yang berkualitas | 130.845.333.327 | 15,63 |
| 4. | Optimalisasi reformasi birokrasi | 128.425.669.275 | 15,34 |
| Total Prioritas Daerah | | 837.118.199.810,74 | 100 |
| Total Belanja Daerah dalam R-PAPBD TA 2025 | | 837.118.199.810,74 | |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2025 dimaksud disesuaikan dengan Lampiran tabel pada dokumen Perubahan KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mempertahankan keselarasan tabel Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah dalam SIPD RI, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(Mandatory Spending)*, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan.

   Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan Rp244.322.459.308,14 atau 29,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan:

   a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp3.524.756.420,00;

   b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rp2.250.175.532,00;

   c. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp233.666.033,43;

   d. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp405.734.380,00;

   e. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp2.615.180.000,00.

   Telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten harus harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Fungsi Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya, sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1436 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:

a. Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp369.290.725,43 yang antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek belanja:

    1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp52.618.464,00 atau 14,25% dari total sub kegiatan;

2) Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp184.438.000,00 atau 49,94% dari total sub kegiatan;

3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp45.608.571,43 atau 12,35% dari total sub kegiatan;

b. Sub Kegiatan Dana BOP PAUD Rp71.850.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek belanja:

1) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp20.700.000,00 atau 28,81% dari total sub kegiatan;

2) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp16.500.000,00 atau 22,96% dari total sub kegiatan;

3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp31.650.000,00 atau 44,05% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran untuk Belanja Infrastruktur Publik

Penyediaan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp149.300.927.897,50 atau 20,35% dari total belanja daerah diluar belanja dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan:

a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp226.956.487,00;

b. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp3.977.745.378,00;

c. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp5.328.364.174,00;

d. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp3.524.756.420,00;

e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp298.994.333,92.

Belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun 2025, paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya,

sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Rp193.220.000,00 yang antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp158.750.000,00 atau 82,16% dari total sub kegiatan pada Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp784.215,00 yang antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp784.215,00 atau 100% dari total sub kegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Alokasi Anggaran untuk Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp463.721.324.788,59 atau 55,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp433.228.042.788,59 atau 51,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Alokasi anggaran tersebut belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Alokasi Anggaran Penandaan Rincian Belanja untuk Pemenuhan Belanja Wajib

   a. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah

      Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum mengalokasikan anggaran atas hasil penerimaan Pajak Air Tanah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan pajak air tanah harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

   b. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

      Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum mengalokasikan anggaran atas hasil penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

c. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

Penyediaan alokasi anggaran atas hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik Rp1.247.849.700,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

d. Alokasi Anggaran untuk Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum mengalokasikan anggaran atas Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari penggunaan hasil penerimaan bagi hasil pajak rokok harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

D. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

PenyediaanT anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikutt:

1. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp15.293.190.141,12 atau 6,32% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp242.106.911.211,65. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah Rp13.005.259.249,10, yang antara lain tercantum pada:
    1) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp100.0000,00;
    2) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp1.869.598.900,00;
    3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp1.958.300.000,00;
    4) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp374.966,00;
    5) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Rp514.480.000,00;
    6) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp157.337.860,00;
    7) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp449.683.943,00;
    8) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp2.256.262.459,00;
    9) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp2.615.180.000,00;
    10) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp3.183.941.121,10;
b. Literasi dan Numerasi Rp1.667.564.588,02, yang antara lain tercantum pada:
    1) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp133.403.200,00;
    2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang PendidikanRp199.332.800,00;
    3) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp100.022.228,00;
    4) Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Rp150.000.000,02;
    5) Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp60.533.220,00;
    6) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp499.300.000,00;
    7) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp405.734.380,00;
    8) Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk Pendidikan Rp6.498.500,00;

9) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp112.740.260,00;

c. Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas Rp117.885.024,00, yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rp101.384.940,00;

2) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp16.500.084,00;

3) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah belum mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

4) Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk Pendidikan belum mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

d. Kekhususan PAUD Rp502.481.280,00, yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan belum mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

2) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp109.434.560,00;

3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Rp369.385.720,00;

4) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp23.661.000,00;

5) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan belum mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan butir 5.2.1.a.1)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya dan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Rp514.480.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota Rp164.304.200,00 atau 31,94% dari total sub kegiatan;

b. Sub Kegiatan Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp100.122.228,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota Rp50.385.000,00 atau 50,32% dari total sub kegiatan;

c. Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Rp369.385.720,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota Rp103.300.000,00 atau 27,97% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan uraian belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp1.516.713.530,00 atau 0,88% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp173.324.765.748,36. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil hanya tercantum pada satu Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp712.962.000,00;
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin hanya tercantum pada satu Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp192.600.000,00;
c. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar hanya tercantum pada satu Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp263.450.000,00;
d. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif hanya tercantum pada satu Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp146.101.530,00;
e. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat hanya tercantum pada satu Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp85.170.000,00;
f. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis hanya tercantum pada satu Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp116.430.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya dan sebagaimana dimaksud pada butir

5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp192.600.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota Rp97.300.000,00 atau 50,52% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan uraian belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, alokasi anggaran kesehatan dimaksud juga diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
    1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
    2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
    3) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
    4) konsumsi TTD ibu hamil;
    5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
    6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
    7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
    8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
    9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting,* dan *stunting*);

10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi;

11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita;

c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
   1) Tuberkulosis (TBC);
   2) Human lmmunodeficiency Virus (HIV);
   3) Malaria;
   4) Penyakit menular lainnya;

d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
   1) Diabetes Melitus;
   2) Hipertensi;
   3) Penyakit tidak menular lainnya;

e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
   1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
   2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Prima dan Posyandu;
   3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
   4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
   5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda);

f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
   1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
   2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
   3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology);
   4) tenaga kesehatan di Labkesda;

5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan

6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Kepuluan Riau Nomor 1433 Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp1.196.429.334,00 atau 4,19% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp28.526.265.627,15 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp1.098.317.134,00 tercantum pada Sub Kegiatan antara lain;

   1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp301.554.000,00;

   2) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan belum mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

   3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan belum mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

   4) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp488.050.234,00;

   5) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp308.712.900,00;

b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota hanya tercantum pada satu Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Rp98.112.200,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari:

a. 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota;

b. 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp2.000.000,00 atau 0,11% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rp1.877.817.539,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

   a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp1.400.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Rp1.400.000,00;

   b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp600.000,00;

   harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan yang tercantum pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Rp1.400.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp1.400.000,00 atau 100% dari total sub kegiatan;

b. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp600.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp600.000,00 atau 100% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp138.029.658,00 atau 2% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp6.906.139.195,64. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- Rehablitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial Rp138.029.658,00, yang hanya tercantum pada sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Rp138.029.658,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp105.217.879,79 atau 0,40 % dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp26.313.343.798,23.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota Rp694.844.000,00, yang antara lain tercantum pada:

   1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp13.865.000,00;

   2) Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Rp2.000.000,00;

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp25.000.000,00;

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Rp3.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:

   1) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Rp1.000.000,00;

   2) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp1.000.000,00;

   3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Rp1.000.000.00;

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp61.352.000,00, yang antara lain tercantum pada:

   1) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp20.952.000,00;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp1.600.000,00;

3) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Rp33.800.000,00;

e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp879,79;

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp13.865.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota Rp11.045.000,00 atau 79,66% dari total sub kegiatan;

b. Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Rp2.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota Rp1.480.000,00 atau 74% dari total sub kegiatan;

c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp25.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota Rp10.000.000,00 atau 40% dari total sub kegiatan;

d. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Rp1.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Rp1.000.000,00 atau 100% dari total sub kegiatan;

e. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp1.000.000.00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja perjalanan dinas dalam kota Rp1.000.000,00 atau 100% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

   Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Rp12.388.366.387,76 atau 1,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

   a. Alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan pada Inspektorat Daerah Rp3.818.586.211,07 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun 2025;

b. Alokasi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada Inspektorat Daerah Rp6.451.117.168,32 atau 0,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pengawasan pada Inspektorat Daerah di luar belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan pegawai ASN Rp2.118.663.008,37 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.33.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp145.227.629,89;

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp289.568.984,32;

c. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp33.006.840,94.

Belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu persen), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari total belanja daerah tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.33.d.1) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. kegiatan pengawasan, yaitu:

   1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;

2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;

3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4) Reviu Laporan Keuangan;

5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP;

c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton;

sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang tercantum pada Inspektorat Daerah Rp3.031.586.000,00 atau 21,49% dari total belanja pada Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp7.242.194.567,10 atau 0,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Alokasi belanja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp5.617.013.437,91 atau 0,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

b. Alokasi belanja pemeliharaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp5.825.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan Rp1.619.356.129,19 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Rp34.953.578,00;

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Rp60.000.000;

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp44.250.000,00;.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mempertahankan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi,

sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Alokasi Anggaran untuk penguatan Posyandu.

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menganggarkan penyedian alokasi anggaran penguatan Posyandu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

   Penguatan Posyandu untuk mendukung pelaksanaan penguatan Posyandu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

   a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung posyandu sebagai bagian dari LKD dalam melaksanakan tugas:

      1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;

      2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

      3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa;

   b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa;

   c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

   berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengalokasikan dan selanjutnya dalam pelaksanaanya memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

   Penyediaan anggaran untuk FKUB Rp39.393.944,00 atau 0,00005% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

   Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten Kepulauan Anambas Rp326.589.247,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Kepulauan Anambas dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Kepulauan Anambas dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan butir 5.3.1.a.4)i). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

   Penyediaan anggaran untuk TP-PKK Rp163.175.300,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

   Dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas melalui:

   a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar.

b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual.

c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian.

d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga.

e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat.

f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:

   1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
   2) gotong royong;
   3) pangan;
   4) sandang;
   5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
   6) pendidikan dan keterampilan;
   7) kesehatan;
   8) pengembangan kehidupan berkoperasi;
   9) kelestarian lingkungan hidup;
   10) perencanaan sehat.

g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Kepulauan Anambas, serta kegiatan lainnya.

i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

   Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten/Kota tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

   Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:

   a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp55.850.000,00;

b. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Rp1.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

8. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum.

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rp637.117.472,93 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

9. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp127.384.626,00;

b. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Rp1.011.979.122,00;

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp427.507.589,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

10. Alokasi Anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Penyediaan anggaran untuk BAZNAS yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sebesar Rp102.730.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasi anggaran untuk BAZNAS dengan berpedoman pada butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

11. Alokasi anggaran dari BLUD.

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

a. Belanja Pegawai BLUD Rp5.938.581.826,50 atau 0,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, tercantum pada Belanja Pegawai BLUD Rp5.938.581.826,50 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp4.630.199.994,50 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp4.630.199.994,50 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp821.585.965,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, tercantum pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp821.585.965,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

12. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOS, antara lain tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS Rp8.527.172.380,00 atau 1,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:

a. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp5.599.444.880,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;

b. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp2.927.727.500,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

## IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8
Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Ranperda dan Ranperkada dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

| No. | Uraian | P-RKPD | | P-KUA dan P-PPAS | | Rancangan P-APBD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Pagu (Rp) | Jumlah | Pagu (Rp) | Jumlah | Pagu (Rp) |
| 1 | Program | 126 | 847.118.199.810,74 | 126 | 837.118.199.810,74 | 126 | 837.118.199.810,74 |
| 2 | Kegiatan | 216 | | 216 | | 216 | |
| 3 | Sub kegiatan | 633 | | 633 | | 633 | |

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Analisis kesesuaian terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan P-RKPD serta P-KUA dan P-PPAS yang diuraikan pada Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan P-KUA serta P-PPAS tetapi tidak terdapat dalam P-RKPD, antara lain tercantum pada:

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, Sub Unit RSUD Tarempa

   a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp30.221.492,70;

   b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp33.925.000,00;

2. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Rp268.372.000,00;

   b. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp308.712.900,00;

   c. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Rp110.700.000,00;

   d. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Rp170.636.000,00.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

   - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Rp2.000.000,00;

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

   - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang antara lain diuraikan pada Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp80.000.000,00;

5. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Sub Unit UPT Pengelolaan Transportasi

   a. Kegiaatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp31.239.933,00;

   b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp10.900.000,00;

6. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Sub Unit UPT Pengelolaan Sampah

   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp16.120.000,00;

7. Inspektorat Darah

   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp9.388.204,00;

8. Kecamatan Palmatak

   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp6.580.000,00;

9. Kecamatan Siantan Tengah

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Rp23.000.000,00;

   b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Daerah yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp31.148.000,00.

Selanjutnya, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belum berpedoman pada P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang P-APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, P-KUA dan P-PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

   Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

   Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp834.396.138.013,45, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Pendapatan Daerah

| Uraian | Target APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp) | Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp) | Selisih +/- | Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%) |
|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN DAERAH** | **882.480.955.551,00** | **834.396.138.013,45** | **(48.084.817.537,55)** | **(5,45)** |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **53.491.122.423,00** | **52.976.977.660,00** | **(514.144.763,00)** | **(0,96)** |
| Pajak Daerah | 25.122.015.531,00 | 25.422.015.531,00 | 300.000.000,00 | 1,19 |
| Retribusi Daerah | 6.824.360.000,00 | 4.891.678.070,00 | (1.932.681.930,00) | (28,32) |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | - |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 20.044.746.892,00 | 21.163.284.059,00 | 1.118.537.167,00 | 5,58 |
| **Pendapatan Transfer** | **828.820.943.352,00** | **781.262.291.690,45** | **(47.558.651.661,55)** | **(5,74)** |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 786.212.377.100,00 | 730.006.568.461,45 | (56.205.808.638,55) | (7,15) |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 42.608.566.252,00 | 51.255.723.229,00 | 8.647.156.977,00 | 20,29 |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **168.889.776,00** | **156.868.663,00** | **(12.021.113,00)** | **(7,12)** |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp52.976.977.660,00 mengalami penurunan sebesar Rp514.144.763,00 atau 0,96% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp53.491.122.423,00.

Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp25.422.015.531,00 mengalami kenaikan sebesar Rp300.000.000,00 atau 1,19% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.122.015.531,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

a) Pajak Hotel Rp5.457.564.279,00 atau 0,65% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

b) Pajak Restoran Rp11.572.998.115,00 atau 1,39% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

c) Pajak Hiburan Rp173.509.307,00 atau 0,02% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

d) Pajak Reklame Rp79.500.000,00 atau 0,01% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

e) Pajak Air Tanah Rp10.000.000,00 atau 0,001% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

f) Pajak Sarang Burung Walet Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp639.975.000,00 atau 0,08% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp556.104.000,00 atau 0,07% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp567.630.000,00 atau 0,07% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

j) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp5.450.590.067,00 atau 0,65% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

k) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp626.369.201,00 atau 0,08% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

l) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp187.775.562,00 atau 0,02% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp4.891.678.070,00 mengalami ppenurunan sebesar Rp1.932.681.930,00 atau 28,32% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.824.360.000,00, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum Rp4.091.678.070,00 atau 0,49% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

b) Retribusi Jasa Usaha Rp500.000.000,00 atau 0,06% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp300.000.000,00 atau 0,04% dari pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah, yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba serta butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan Hasil Penyertaan Modal.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir 3.3.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp21.163.284.059,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.118.537.167,00 atau 5,58% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.044.746.892,00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro Rp1.020.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp299.300.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp20.400.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.841.803.100,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan kembali atas Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi serta realisasi atas target penerimaan atas Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Rp36.720.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5) Pendapatan dari Pengembalian Rp8.322.855.237,00 mengalami penurunan sebesar Rp814.144.763,00 atau 1% dari anggaran semula dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6) Pendapatan BLUD Rp11.427.288.822,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.932.681.930,00 atau 0,23% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp36.720.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan e berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp781.262.291.690,45 mengalami penurunan sebesar Rp47.558.651.661,55 atau 5,74% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp828.820.943.352,00.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp730.006.568.461,45 mengalami penurunan sebesar Rp56.205.808.638,55 atau 7,15% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp786.212.377.100,00 yang diuraikan pada jenis pendapatan Dana Perimbangan yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

   1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp225.046.812.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.496.900,00 atau 0,01% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp225.034.315.100,00, terdapat selisih lebih anggar sebesar Rp85.417.466.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025;

   2) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp372.023.818.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp39.124.361.000,00 atau 9,52% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp411.148.179.000,00 sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

   3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp19.151.454.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.208.639.000,00 atau 54,79% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp42.360.093.000,00, sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

   4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp61.886.112.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.800.000,00 atau 0,04% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp61.863.312.000,00 terdapat selisih sebesar Rp22.800.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

5) Insentif Fiskal Rp13.399.774.461,45 mengalami kenaikan sebesar Rp6.091.894.461,45 atau 83,36% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.307.880.000,00 terdapat selisih sebesar Rp6.091.894.461,45 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

6) Dana Desa Rp38.498.598.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp51.192.723.229,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.647.156.977,00 atau 20,29% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp42.608.566.252,00, yang diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut;

1) Pendapatan Bagi Hasil yang antara lain diuraikan dalam jenis pendapatan:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp7.521.482.670,00;

b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp4.811.864.420,00;

c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp25.670.461.618,00;

d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp1.238.117.985,00;

e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp11.950.796.536,00;

2) Bantuan Keuangan sebesar Rp63.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 100% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada jenis pendapatan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp63.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya, sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.2.1.1, butir 3.3.2.1.2, butir 3.3.2.1.3.1 dan butir 3.3.2.1.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF), pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai serta ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan DBH dan atau DAU melalui rekening TDF dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp156.868.663,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.021.113,00 atau 7,12% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp168.889.776,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun

pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.3.2.1.3.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan itu, pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Kabupaten/Kota digunakan:

a. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB dan SWDKLLJ;
b. kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB serta SWDKLLJ;
c. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor bersama SAMSAT;

mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor bersama SAMSAT;

## VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub

kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Urusan Pemerintah Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp837.118.199.810,74, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Belanja Daerah

| Uraian | APBD TA 2025 (Rp) | Rancangan Perubahan APBD TA 2025 (Rp) | Selisih +/- | (%) |
|---|---|---|---|---|
| **BELANJA DAERAH** | **1.040.859.314.973,00** | **837.118.199.810,74** | **(203.741.115.162,26)** | **(19,57)** |
| **Belanja Operasi** | **784.449.005.089,76** | **656.952.542.576,87** | **(127.496.462.512,89)** | **(16,25)** |
| Belanja Pegawai | 514.949.159.286,14 | 463.721.324.788,59 | (51.227.834.497,55) | (9,95) |
| Belanja Barang dan Jasa | 264.260.065.122,62 | 188.963.662.000,28 | (75.296.403.122,34) | (28,49) |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Belanja Hibah | 5.091.985.681,00 | 3.394.984.788,00 | (1.697.000.893,00) | (33,33) |
| Belanja Bantuan Sosial | 147.795.000,00 | 872.571.000,00 | 724.776.000,00 | 490,39 |
| **Belanja Modal** | **142.215.982.235,72** | **67.866.233.841,25** | **(74.349.748.394,47)** | **(52,28)** |
| Belanja Modal Tanah | 3.808.975.640,00 | 147.000.000,00 | (3.661.975.640,00) | (96,14) |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.919.005.881,97 | 19.849.344.129,23 | (6.069.661.752,74) | (23,42) |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 25.619.649.701,74 | 32.284.017.574,88 | 6.664.367.873,14 | 26,01 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 85.907.124.696,01 | 14.510.780.626,14 | (71.396.344.069,87) | (83,11) |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 924.305.280,00 | 1.038.170.475,00 | 113.865.195,00 | 12,32 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 36.921.036,00 | 36.921.036,00 | 0,00 | - |
| **Belanja Tidak Terduga** | **8.981.012.988,52** | **8.685.725.997,62** | **(295.286.990,90)** | **(3,29)** |
| **BELANJA TRANSFER** | **105.213.314.659,00** | **103.613.697.395,00** | **(1.599.617.264,00)** | **(1,52)** |
| Belanja Bagi Hasil | 3.096.467.249,00 | 4.598.797.819,00 | 1.502.330.570,00 | 48,52 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 102.116.847.410,00 | 99.014.899.576,00 | (3.101.947.834,00) | (3,04) |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp656.952.542.576,87 mengalami Penurunan sebesar Rp127.496.462.512,89 atau 16,25% dari anggaran semula sebesar Rp784.449.005.089,76 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp463.721.324.788,59 mengalami penurunan sebesar Rp51.227.834.497,55 atau 9,95% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp514.949.159.286,14 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp226.128.628.262,20 terdapat penurunan sebesar Rp54.135.405.773,31 atau 19,32% dari anggaran semula Rp280.264.034.035,51 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp15.764.204.139,75 terdapat kenaikan sebesar Rp2.548.329.030,71 atau 19,28% dari anggaran semula Rp13.215.875.109,04 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diperuntukkan bagi ASN, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp17.955.698.806,36 atau terdapat selisih kurang Rp2.191.494.666,61.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp30.874.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp10.000.000 atau 24,46% dari anggaran semula Rp30.874.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp50.865.032,84 atau terdapat selisih kurang Rp19.991.032,84.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp28.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp8.000.000,00 atau 40% dari anggaran semula Rp20.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH seharusnya Rp6.393.228,80 atau terdapat selisih lebih Rp21.606.771,20.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp424.760.970,08;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.128.282.951,16;

belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp389.014.977,64, atau terdapat selisih lebih Rp35.745.992,44;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp1.167.044.932,92, atau terdapat selisih kurang Rp38.761.981,76.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp2.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula;

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.500.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp112.320,00, yang semula belum dianggarkan;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp336.960,00, yang semula belum dianggarkan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

(2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD Rp182.288.600,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kepada:

(1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Sebesar Rp14.002.060,08 terdapat kenaikan sebesar Rp11.709.504,08 atau 510,76% dari anggaran semula Rp2.292.556,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp10.186.197.441,00 terdapat penurunan sebesar Rp622.926.684,00 atau 5,76% dari anggaran semula Rp10.809.124.125,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp469.490.000,00 terdapat penurunan Rp23.800.000,00 atau 4,82% dari anggaran semula Rp493.290.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp663.000.771,00 terdapat penurunan Rp33.369.729,00 atau 4,79% dari angaran semula Rp696.370.500,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp85.096.700,00 terdapat penurunan Rp4.000.000,00 atau 4,49% dari anggaran semula Rp89.096.700,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.520.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp210.000.000,00 terdapat penurunan Rp420.000.000,00 atau 66,67% daria anggaran semula Rp630.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD yang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp3.001.200.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula;

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp3.042.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp202.800.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula, dianggrakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp420.590.625,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp220.767.129.098,89 terdapat kenaikan sebesar Rp1.606.594.845,76 atau 0,73% dari anggaran semula Rp219.160.534.253,13 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp86.981.656.932,24;

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp2.653.373.345,00;

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp11.467.397.105,73;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

a) terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2025;

b) besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS;

c) penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN wajib didasarkan pada kertas kerja dan *evidence* yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem *Monitoring* Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA); dan

d) pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp33.119.702.081,00 terdapat kenaikan Rp13.566.808.057 atau 69,39% dari anggaran semula Rp19.552.894.024,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp23.706.307.000,00 terdapat kenaikan Rp12.834.824.579,00 atau 118,06% dari anggaran semula Rp10.871.482.421,00;

b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp5.696.225.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula;

c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.090.750.000,00 terdapat kenaikan Rp192.250.000,00 atau 21,40% dari anggaran semula Rp898.500.000,00;

d) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp714.259.526,00 terdapat penurunan Rp178.002.798,00 atau 29,95% dari anggaran semula Rp892.262.324,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada:

a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

   Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah serta honorarium yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, honorarium tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

dari aspek teknis penganggaran, penganggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sebagaimana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp188.963.662.000,28 terdapat penurunan sebesar Rp75.296.403.122,34 atau 28,49% dari anggaran semula sebesar Rp264.260.065.122,62 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Pengangaran Belanja Barang Rp64.697.905.341,83 terdapat penurunan sebesar Rp18.228.084.482,59 atau 21,98% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp82.925.989.824,42 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp63.731.953.818,63 terdapat penurunan sebesar Rp17.159.768.676,84 atau 21,21% dari anggaran semula sebesar Rp80.891.722.495,47 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp3.074.752.996,96 terdapat penurunan sebesar Rp485.679.226,91 atau 13,64% dari anggaran semula Rp3.560.432.223,87;

(2) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp48.391.723,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.027.848.933,00 atau 95,50% dari anggaran semula Rp1.076.240.656,00;

(3) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp203.717.799,09 terdapat penurunan sebesar Rp650.539.895,08 atau 76,15% dari anggaran semula Rp854.257.694,17;

(4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp2.387.042.960,13 terdapat penurunan sebesar Rp667.882.093,05 atau 21,86% dari anggaran semula Rp3.054.925.053,18;

(5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.338.827.608,85 terdapat penurunan sebesar Rp887.468.038,98 atau 39,86% dari anggaran semula Rp2.226.295.647,83;

(6) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp10.398.297.548,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.654.955.936,00 atau 34,29% dari anggaran semula Rp7.743.341.612,00;

(7) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp15.429.155.530,65 terdapat penurunan sebesar Rp9.383.759.417,44 atau 37,82% dari anggaran semula Rp24.812.914.948,09;

(8) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp1.200.823.651,00 terdapat kenaikan sebesar Rp673.597.025,00 atau 127,76% dari anggaran semula Rp527.226.626,00;

(9) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp1.550.150.873,04 terdapat penurunan sebesar Rp535.323.699,06 atau 25,67% dari anggaran semula Rp2.085.474.572,10;

(10) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.934.988.230,37 terdapat penurunan sebesar Rp1.263.323.656,47 atau 30,09% dari anggaran semula Rp4.198.311.886,84;

(11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp4.940.001.717,76 terdapat penurunan sebesar Rp2.701.767.655,00 atau 35,36% dari anggaran semula Rp7.641.769.372,76;

(12) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Rp483.929.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp218.080.000,00 atau 82,03% dari anggaran semula Rp265.849.000,00;

(13) Belanja Pakaian Adat Daerah Rp384.493.678,00 terdapat penurunan sebesar Rp742.932.605,25 atau 65,90% dari anggaran semula Rp1.127.426.283,25;

b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp660.181.776,00 terdapat penurunan sebesar Rp903.723.529,60 atau 57,79% dari anggaran semula sebesar Rp1.563.905.305,60 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai Rp197.649.148,00 dari yang semula tidak di anggarkan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan butir 3.4.1.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya penyediaan anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp3.074.752.996,96 terdapat penurunan sebesar Rp485.679.226,91 atau 13,64% dari anggaran semula Rp3.560.432.223,87. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan kembali harga bahan bakar sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesi Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa Rp69.607.066.811,71 terdapat penurunan sebesar Rp23.500.913.735,16 atau 25,24% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp93.107.980.546,87 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor Rp45.835.678.635,15 terdapat penurunan sebesar Rp9.446.666.992,49 atau 17,09% dari anggaran semula sebesar Rp55.282.345.627,64 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp1.743.743.800,00 terdapat penurunan sebesar Rp2.880.579.200,00 atau 62,29% dari anggaran semula Rp4.624.323.000,00;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp2.412.620.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp3.817.004.632,00 atau 61,27% dari anggaran semula Rp6.229.624.632,00;

(3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp4.652.391.362,00 terdapat penurunan sebesar Rp4.235.616.689,00 atau 47,66% dari anggaran semula Rp8.888.008.051,00;

(4) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp468.452.094,01 terdapat kenaikan sebesar Rp180.452.094,01 atau 62,66% dari anggaran semula Rp288.000.000,00;

(5) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp158.004.914,00 dari yang semula tidak di anggarkan;

(6) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp362.348.932,00 terdapat kenaikan sebesar Rp351.877.432,00 atau 3.360,33% dari anggaran semula Rp10.471.500,00;

(7) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp5.902.447.140,00 terdapat kenaikan sebesar Rp5.287.597.827,00 atau 859,98% dari anggaran semula Rp614.849.313,00;

(8) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp4.372.261.644,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.144.707.878,00 atau 20,75% dari anggaran semula Rp5.516.969.522,00;

(9) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp1.320.936.027,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.095.760.470,00 atau 486,62% dari anggaran semula Rp225.175.557,00;

(10) Belanja Jasa Kalibrasi Rp169.613.000,00 dari yang semula tidak di anggarkan;

(11) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp3.283.671.990,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.265.671.988,00 atau 27,82% dari anggaran semula Rp4.549.343.978,00;

(12) Belanja Jasa Operator Kapal Rp184.782.735,00 dari yang semula tidak di anggarkan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp12.168.776.859,05 terdapat kenaikan sebesar Rp1.775.705.259,05 atau 17,09% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp10.393.071.600,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp1.012.598.400,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula;

(2) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp9.105.404.000,01 terdapat kenaikan sebesar Rp1.125.404.000,01 atau 14,10% dari anggaran semula Rp7.980.000.000,00;

(3) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp803.516.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp97.916.000,00 atau 13,88% dari anggaran semula Rp705.600.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.3.1.1.2.c.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp573.401.789,04 terdapat kenaikan sebesar Rp527.374.589,04 atau 1.145,79% dari anggaran semula sebesar Rp46.027.200,00;

(5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp399.379.318,00 terdapat kenaikan sebesar Rp13.723.318,00 atau 3,56% dari anggaran semula sebesar Rp385.656.000,00;

(6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp274.477.352,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.287.352,00 atau 4,29% dari anggaran semula sebesar Rp263.190.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui

perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp3.060.015.336,00 terdapat penurunan sebesar Rp354.464.364,00 atau 10,38 % dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp3.414.479.700,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(a) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp2.620.066.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp57.328.000,00 atau 2,14% dari anggaran semula sebesar Rp2.677.394.000,00;

(b) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp57.600.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp57.600.000,00 atau 50% dari anggaran semula sebesar Rp115.200.000,00;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp4.510.984.344,73 terdapat penurunan sebesar Rp198.732.598,78 atau 4,22% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp4.709.716.943,51 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp2.537.107.506,97 terdapat penurunan sebesar Rp165.906.113,00 atau 6,14% dari anggaran semula Rp2.703.013.619,97.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp2.610.344.445,00 terdapat penurunan sebesar Rp14.871.880.230,72 atau 85,07% dari anggaran semula sebesar Rp17.482.224.675,72 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

   (1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp677.201.380,00 terdapat penurunan sebesar Rp4.149.203.999,69 atau 85,97% dari anggaran semula Rp4.826.405.379,69;

   (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp280.612.900,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.199.387.100,00 atau 81,04% dari anggaran semula Rp1.480.000.000,00;

   (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp99.272.850,00 terdapat penurunan sebesar Rp3.605.327.150,00 atau 97,32% dari anggaran semula Rp3.704.600.000,00;

   (4) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp572.898.730,00 terdapat penurunan sebesar Rp2.112.801.270,00 atau 78,67% dari anggaran semula Rp2.685.700.000,00;

(5) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp40.650.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp3.506.743.496,03 atau 98,85% dari anggaran semula Rp3.547.393.496,03;

(6) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi LingkunganRp647.719.825,00 dari yang semula tidak di anggarkan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP), sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp870.990.547,78 terdapat penurunan sebesar Rp335.851.452,22 atau 27,83% dari anggaran semula sebesar Rp1.206.842.000,00 yang diantaranya diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp645.250.047,78 terdapat penurunan sebesar Rp145.055.952,22 atau 18,35% dari anggaran semula Rp790.306.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap

ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.f.2), butir 3.4.1.2.2.f.3) dan butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.f.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/ *workshop*/ kursus/ lokakarya/ sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid,* sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3) Belanja Pemeliharaan Rp5.136.194.757,93 terdapat penurunan sebesar Rp1.523.047.509,07 atau 22,87% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp6.659.242.267,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.382.473.108,47 terdapat penurunan sebesar Rp1.243.303.081,53 atau 26,88% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp4.625.776.190,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp343.262.098,90 terdapat penurunan sebesar Rp219.757.881,10 atau 39,03% dari anggaran semula Rp563.019.980,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp557.582.100,00 terdapat kenaikan sebesar Rp164.460.160,00 atau 41,83% dari anggaran semula Rp393.121.940,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya Rp766.565.057,00 terdapat penurunan sebesar Rp400.677.665,00 atau 34,33% dari anggaran semula Rp1.167.242.722,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp629.225.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp441.389.000,00 atau 41,23% dari anggaran semula Rp1.070.614.000,00;

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.707.721.649,46 terdapat penurunan sebesar Rp325.744.427,54 atau 16,02% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp2.033.466.077,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang Rp259.380.330,93 terdapat kenaikan sebesar Rp59.380.330,93 atau 29,69% dari anggaran semula Rp200.000.000,00;

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp46.000.000,00 dari yang semula tidak di anggarkan dalam Perda APBD TA 2025 yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya Rp46.000.000,00 yang semula tidak di anggarkan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

4) Belanja Perjalanan Dinas Rp28.525.293.580,31 terdapat penurunan sebesar Rp33.449.202.783,52 atau 53,97% dari total sebesar anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp61.974.496.363,83 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp28.525.293.580,31 terdapat penurunan sebesar Rp33.449.202.783,52 atau 53,97% dari anggaran semula sebesar Rp61.974.496.363,83 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

  (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp19.055.872.938,93 terdapat penurunan sebesar Rp21.830.661.123,48 atau 53,39% dari anggaran semula Rp40.886.534.062,41;

  (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp9.430.035.141,38 terdapat penurunan sebesar Rp11.494.845.936,04 atau 54,93% dari anggaran semula Rp20.924.881.077,42;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional dan butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penambahan pagu anggaran belanja perjalanan dinas diperkenankan sepanjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kepatutan, kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:

a) aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);

b) kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;

c) batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;

d) belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp2.859.171.586,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.036.581.488,00 atau 56,87% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp1.822.590.098,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp438.150.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp403.190.000,00 atau 47,92% dari anggaran semula sebesar Rp841.340.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp109.750.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp411.190.000,00 atau 78,93% dari anggaran semula Rp520.940.000,00;

b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp2.421.021.586,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.439.771.488,00 atau 146,73% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2025 sebesar Rp981.250.098,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp1.820.600.000,00 dari yang semula tidak di anggarkan;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Belanja Hibah

Tren alokasi dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

| Tahun Anggaran | Belanja Hibah (Rp) | Realisasi Belanja Hibah (Rp) | % | Total Belanja Daerah (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 | 5 | 6=2:5 |
| APBD 2023 | 18.616.010.962,00 | 17.149.119.101,00 | 92,12 | 1.250.230.911.389,00 | 1,49 |
| APBD 2024 | 23.314.479.156,00 | 23.100.436.536,00 | 99,08 | 1.009.212.363.684,00 | 2,31 |
| APBD 2025 | 3.965.884.788,00 | 1.593.640.000,00 | 40,18 | 978.646.114.973,00 | 0,41 |
| Rancangan Perubahan APBD 2025 | 5.091.985.681,00 | 1.593.640.000,00 | 31,30 | 1.040.859.314.973,00 | 0,49 |

Penganggaran Belanja Hibah Rp3.394.984.788,00 atau 0,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.040.859.314.973,00. Belanja Hibah Rp3.394.984.788,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.697.000.893,00 atau 33,33% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.091.985.681,00, yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:

- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp2.975.477.199,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.697.000.893,00 atau 36,32% dari anggaran semula sebesar Rp4.672.478.092,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

  a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp2.902.381.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.078.187.000,00 atau 27,09% dari anggaran semula sebesar Rp3.980.568.000,00;

  b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp73.096.199,00 terdapat penurunan sebesar Rp618.813.893,00 atau 89,44% dari anggaran semula sebesar Rp691.910.092,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp5.694.784.665,00, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dan butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d. Belanja Bantuan Sosial

Tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 12
Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

| Tahun Anggaran | Belanja Hibah (Rp) | Realisasi Belanja Hibah (Rp) | % | Total Belanja Daerah (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2 | 5 | 6=2:5 |
| APBD 2023 | 1.446.084.030,00 | 161.614.000,00 | 11,18 | 1.250.230.911.389,00 | 0,12 |
| APBD 2024 | 682.796.000,00 | 629.305.000,00 | 92,17 | 1.009.212.363.684,00 | 0,07 |
| APBD 2025 | 110.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 978.646.114.973,00 | 0,01 |
| Rancangan Perubahan APBD 2025 | 147.795.000,00 | 872.571.000,00 | 590,39 | 1.040.859.314.973,00 | 0,01 |

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Rp872.571.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah sebesar Rp1.040.859.314.973,00. Belanja Hibah Rp872.571.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp724.776.000,00 atau 490,39% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp147.795.000,00, yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:

- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp789.600.000,00 dari yang semula tidak di anggarkan yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja bantuan sosial harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan

mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut:

1) bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan bantuan beras;
2) bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, *top up* bantuan sosial reguler, dan bantuan beras; dan
3) bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);

sebagaimana maksud butir 5.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp67.866.233.841,25 mengalami penurunan sebesar Rp74.349.748.394,47 atau 52,28% dari anggaran semula sebesar Rp142.215.982.235,72, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam

Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan

b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp147.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.661.975.640,00 atau 96,14% dari anggaran semula sebesar Rp3.808.975.640,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

   - Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp147.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp89.700.000,00 atau 37,90% dari anggaran semula sebesar Rp236.700.000,00, yang tercantum pada Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp147.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.849.344.129,23 mengalami penurunan sebesar Rp6.069.661.752,74 atau 23,42% dari anggaran semula sebesar Rp25.919.005.881,97 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp765.030.596,80 mengalami penurunan sebesar Rp608.369.271,50 atau 444,30% dari anggaran semula sebesar Rp1.373.399.868,30, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   a) Modal Alat Besar Darat sebesar Rp37.836.567,30 mengalami penurunan sebesar Rp24.382.528,00 atau 39,19% dari anggaran semula sebesar Rp62.219.095,30, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja yang tercantum pada Belanja Modal Mesin Proses Rp27.660.567,30 pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

   b) Belanja Modal Alat Bantu Rp727.194.029,50 mengalami kenaikan sebesar Rp3.942.916,50 atau 0,55% dari anggaran semula sebesar Rp723.251.113,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja yang tercantum pada Belanja Modal Mesin Pompa Rp4.043.896,50 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp3.507.653.333,02 mengalami penurunan sebesar Rp1.288.732.871,68 atau 26,87% dari anggaran semula sebesar Rp4.796.386.204,70, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp1.104.854.753,02 mengalami penurunan sebesar Rp1.288.425.867,88 atau 53,84% dari anggaran semula sebesar Rp2.393.280.620,90, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      (1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp155.848.810,56, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp79.614.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah;

      (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp5.942,46 yang tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp5.942,46 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

      (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp949.000.000,00 yang tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp949.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp2.798.580,00 mengalami penurunan sebesar Rp307.003,80 atau 9,89% dari anggaran semula sebesar Rp3.105.583,80, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang, yang tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp2.798.580,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pada Kecamatan Siantan Tengah;

3) Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp6.931.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.232.991,82 atau 47,35% dari anggaran semula sebesar Rp13.164.941,82, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Produksi Perikanan Rp6.931.950,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.719.189.830,92 mengalami penurunan sebesar Rp1.527.781.529,83 atau 29,12% dari anggaran semula sebesar Rp5.246.971.360,75, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp183.275.881,00 mengalami penurunan sebesar Rp117.717.223,74 atau 39,11% dari anggaran semula sebesar Rp300.993.104,74, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp177.342.751,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp86.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp3.050.743.315,92 mengalami penurunan sebesar Rp1.143.536.125,15 atau 27,26% dari anggaran semula sebesar Rp4.194.279.441,07, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Mebel Rp2.371.063.229,07, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Mebel Rp893.383.001,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(2) Belanja Modal Alat Pendingin Rp413.411.778,10, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Pendingin Rp170.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya pada Sekretariat Daerah;

(3) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp264.268.308,75, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp264.267.428,96 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp485.170.634,00 mengalami penurunan sebesar Rp266.528.180,94 atau 35,46% dari anggaran semula sebesar Rp751.698.814,94, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp164.198.750,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp119.148.750,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Inspektorat Daerah;

(2) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp241.054.665,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp149.265.015,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(3) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp67.417.219,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp30.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah;

5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp22.502.602,25 mengalami kenaikan sebesar Rp1.218.542,75 atau 5,14% dari anggaran semula sebesar Rp23.721.145,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp22.502.602,25 mengalami kenaikan sebesar Rp9.491.352,25 atau 72,95% dari anggaran semula sebesar Rp3.011.250,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp22.502.602,25, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp22.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp5.331.710.868,60 mengalami kenaikan sebesar Rp19.000.000,00 atau 0,36% dari anggaran semula sebesar Rp5.312.710.868,60, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp5.321.336.852,60 mengalami kenaikan sebesar Rp95.000.000,00 atau 1,82% dari anggaran semula sebesar Rp5.226.336.852,60, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja

Modal Alat Kedokteran Umum Rp2.121.840.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp10.374.016,00 mengalami penurunan sebesar Rp76.000.000,00 atau 87,99% dari anggaran semula sebesar Rp86.374.016,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga Rp10.374.016,00, yang tercantum pada Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga Rp10.374.016,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp178.517.412,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.524.281,56 atau 48,77% dari anggaran semula sebesar Rp119.993.130,44, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Photo and Film Equipment Rp178.517.412,00, yang tercantum pada Belanja Modal Photo and Film Equipment Rp171.317.412,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Sekretariat DPRD;

8) Belanja Modal Komputer sebesar Rp2.510.835.518,64 mengalami penurunan sebesar Rp2.513.645.795,92 atau 50,03% dari anggaran semula sebesar Rp5.024.481.314,56, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp1.790.788.473,42 mengalami kenaikan sebesar Rp1.825.594.661,23 atau 50,48% dari anggaran semula sebesar Rp3.616.383.134,65, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Personal Computer yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Personal Computer Rp746.833.066,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

b) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp720.047.045,22 mengalami penurunan sebesar Rp688.051.134,69 atau 48,86% dari anggaran semula sebesar Rp1.408.098.179,91, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp21.975.578,47, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp14.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(2) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp17.719.494,25, yang tercantum pada Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp17.719.494,25 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

(3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp680.351.972,50, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp456.151.500,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

9) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp198.326.712,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.630.522,80 atau 11,84% dari anggaran semula sebesar Rp224.957.234,80, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga, yang tercantum pada Belanja Modal Peralatan Permainan Rp198.326.712,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp32.284.017.574,88 mengalami kenaikan sebesar Rp6.664.367.873,14 atau 26,01% dari anggaran semula sebesar Rp25.619.649.701,74 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp32.284.017.574,88 mengalami kenaikan sebesar Rp6.874.367.873,14 atau 27,05% dari anggaran semula sebesar Rp25.409.649.701,74, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp194.880.000,00 dari yang semula tidak di anggarkan, yang tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp11.286.760.022,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.779.418.566,00 atau 32,67% dari anggaran semula sebesar Rp8.507.341.456,00, yang antara lain tercantum pada:

- Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp7.931.341.456,00 Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp20.153.055.591,88 mengalami kenaikan sebesar Rp12.428.747.346,14 atau 160,90% dari anggaran semula sebesar Rp7.724.308.245,74, yang tercantum pada:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp2.497.742.187,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp2.185.865.532,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp3.110.191.121,10 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp1.008.543.627,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp1.273.366.771,10 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

(6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp1.606.145.136,27 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp352.283.208,00 dari semula tidak di anggarkan, yang tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

e) Belanja Modal Bangunan Terbuka Rp198.302.033,00 dari semula tidak di anggarkan, yang tercantum pada Belanja Modal Bangunan Terbuka pada Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp14.510.780.626,14 mengalami penurunan sebesar Rp71.396.344.069,87 atau 83,11% dari anggaran semula sebesar Rp85.907.124.696,01 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp13.164.893.196,14 mengalami penurunan sebesar Rp69.712.154.979,87 atau 84,12% dari anggaran semula sebesar Rp82.877.048.176,01, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp11.416.708.192,14 mengalami penurunan sebesar Rp61.760.241.247,86 atau 84,40% dari anggaran semula sebesar Rp73.176.949.440,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      (1) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp10.097.999.503,14 mengalami penurunan sebesar Rp30.720.268.096,86 atau 75,26% dari anggaran semula sebesar Rp40.818.267.600,00, yang antara lain tercantum pada:

         (a) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp5.259.460.562,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

         (b) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp3.456.662.613,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

         (c) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp965.129.768,14 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

      (2) Belanja Modal Jalan Desa Rp1.318.708.689,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.039.973.151,00 atau 95,92% dari anggaran semula sebesar Rp32.358.681.840,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Jalan Desa Rp966.397.900,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

   b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp1.748.185.004,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.951.913.732,01 atau 81,98% dari anggaran semula sebesar Rp9.700.098.736,01, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Rp1.718.521.004,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp1.345.887.430,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.684.189.090,00 atau 55,58% dari anggaran semula sebesar Rp3.030.076.520,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp1.058.349.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp198.349.000,00 atau 23,06% dari anggaran semula sebesar Rp860.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp478.349.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp150.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp760.444.565,00 atau 83,52% dari anggaran semula sebesar Rp910.444.565,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp150.000.000,00 dari semula tidak anggarkan, yang tercantum pada:

  - Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi Rp150.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp137.538.430,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.122.093.525,00 atau 89,08% dari anggaran semula sebesar Rp1.259.631.955,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Bangunan Air Kotor yang tercantum pada Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp137.538.430,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.038.170.475,00 mengalami kenaikan sebesar Rp113.865.195,00 atau 12,32% dari anggaran semula sebesar Rp924.305.280,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga sebesar Rp113.865.195,00 dari semula tidak di anggarkan, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- Belanja Modal Alat Musik Rp113.865.195,00 dari semula tidak dianggarkan, yang tercantum pada Belanja Modal Alat Musik Rp113.865.195,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja modal harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan butir 3.4.2.h dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp8.685.725.997,62 mengalami penurunan Rp295.286.990,90 atau 3,29% dari anggaran semula sebesar Rp8.981.012.988,52 atau 0,83%

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4. Belanja Transfer

   Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp103.613.697.395,00 mengalami penurunan Rp1.599.617.264,00 atau 1,52% dari anggaran semula sebesar Rp105.213.314.659,00 atau 9,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan pada:

   a. Belanja Bagi Hasil Rp4.598.797.819,00 mengalami kenaikan Rp1.502.330.570,00 atau 48,52% dari anggaran semula sebesar Rp3.096.467.249,00;

   b. Belanja Bantuan Keuangan Rp99.014.899.576,00 mengalami penurunan Rp3.101.947.834,00 atau 3,04% dari anggaran semula sebesar Rp102.116.847.410,00;

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.4.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. Pendanaan Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan.

   Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

   1. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

   2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp289.030.374,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Pakaian Adat Daerah" Rp289.030.374,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp90.300.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya" Rp60.720.000,00 pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp1.421.044.899,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp1.076.792.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Rp921.484.588,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" Rp908.118.000,00 pada SKPD Sekretariat DPRD diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

F. Pendanaan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp1.463.059.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan" Rp1.463.059.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp2.700.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia" Rp2.700.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Sub Kegiatan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp606.852.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia" Rp606.852.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

terdapat sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar tetap mempertahankan dan konsisten terhadap pendanaan sub kegiatan tersebut mengingat penyediaan alokasi anggaran dimaksud tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja sub kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

G. Penggunaan Alokasi Pagu Belanja yang Tidak Sesuai Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp83.214.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp1.500,00 pada SKPD Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
2. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp69.020.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam

sub rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp5.101.779,39, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Modal Personal Computer" Rp181,42, "Belanja Modal Peralatan Personal Computer" Rp876,47 dan "Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya" Rp721,50 pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp151.767.540,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Jasa Tenaga Administrasi" Rp240,00 pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp301.554.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover" Rp815,50 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Rp375.926.631,21, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi" Rp6.600 pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

dari aspek teknis penganggaran, penyediaan alokasi pagu belanja dimaksud belum disusun berdasarkan pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan alokasi pagu belanja dimaksud.

H. Sub Rincian Obyek yang Tidak Menggambarkan Satuan Terkecil Sub Rincian Obyek Belanja Daerah yang Akan Ditransaksikan Sesuai Anggaran Berbasis Kinerja

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp0,01, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Natura dan Pakan-Natura" Rp0,01 pada SKPD Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup;
2. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp879,79, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran" Rp879,79 pada SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp1.887, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer" Rp1.887, pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

4. Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Rp100.050, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Kursus Singkat/PelatihanRp100.050, pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
6. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp100.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp100.000,00, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
7. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp150.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota" Rp150.000,00, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

tidak menggambarkan satuan terkecil sub rincian obyek belanja daerah yang akan ditransaksikan sesuai anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan.

I. Pendanaan Sub Kegiatan dan Uraian Belanja yang Tidak Menggambarkan Keluaran Sesuai Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja yang Diharapkan Apabila Ditinjau Dari Aspek Indikator, Tolok Ukur dan Target Kinerja

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp1.958.300.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Rp1.958.300.000,00, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Penyediaan anggaran pada sub kegiatan dan uraian belanja dimaksud tidak menggambarkan keluaran sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja yang diharapkan, apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan.

## VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

### A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 13
Pembiayaan Daerah

| Uraian | APBD TA 2025 | Rancangan P-APBD TA 2025 (Rp) | Selisih Lebih/Kurang | (%) |
|---|---|---|---|---|
| **PEMBIAYAAN DAERAH** | **158.378.359.422,00** | **2.722.061.797,29** | **155.656.297.624,71** | **98,28** |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **158.378.359.422,00** | **2.722.061.797,29** | **155.656.297.624,71** | **98,28** |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 157.878.359.422,00 | 2.222.061.797,29 | 155.656.297.624,71 | 98,59 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |

C. Analisis Akun Pembiayaan sampai dengan Sub Rincian Objek

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan Rp2.722.061.797,29 mengalami penuruna sebesar Rp155.656.297.624,71 atau 98,28% dari anggaran semula sebesar Rp158.378.359.422,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp2.222.061.797,29 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp500.000.000,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp837.118.199.810,74.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VIII. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:
1. Swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

C. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain melalui:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;

3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam neger melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas;
4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program upskilling dan *reskitting* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan butir 4.1.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan anggaran untuk:

1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

F. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Pasal 187 huruf b

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

G. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

H. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

I. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

J. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

K. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan

Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN;
2. apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai;

sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN.

M. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

N. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan

aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

O. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*;
3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Q. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan/atau masyarakat.

R. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.
2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
4. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Anambas dalam bentuk belanja hibah sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. nama kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

T. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor

3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, untuk:

1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

U. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:

1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON;

sebagaimana dimaksud pada butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

V. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan *monitoring* sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus Barang Milik Daerah bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;

W. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional untuk menyusun standar harga satuan yang selanjutnya digunakan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

X. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat memperhatikan tindak lanjut dari penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun bentuk dukungan dimaksud melalui:

1. Komitmen Dukungan Anggaran, yang dialokasikan secara memadai dalam Perubahan APBD guna mendukung kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini penting untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, seiring dengan diberlakukannya kebijakan opsen.
2. Komitmen terhadap Pelaksanaan Kegiatan Strategis seperti Razia kendaraan bermotor dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak, Penagihan aktif terhadap tunggakan pajak kendaraan, dan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat membayar pajak kendaraan bermotor.

Y. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Z. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

AA. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**ANSAR AHMAD**

Lampiran I
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025

# KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
## RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERKURANG/BERTAMBAH |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **53.491.122.423,00** | **52.976.977.660,00** | **-514.144.763,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 25.122.015.531,00 | 25.422.015.531,00 | 300.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 6.824.360.000,00 | 4.891.678.070,00 | -1.932.681.930,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 20.044.746.892,00 | 21.163.284.059,00 | 1.118.537.167,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **828.820.943.352,00** | **781.262.291.690,45** | **-47.558.651.661,55** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 786.212.377.100,00 | 730.006.568.461,45 | -56.205.808.638,55 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 42.608.566.252,00 | 51.255.723.229,00 | 8.647.156.977,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **168.889.776,00** | **156.868.663,00** | **-12.021.113,00** |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 168.889.776,00 | 156.868.663,00 | -12.021.113,00 |
| | **Jumlah Pendapatan** | **882.480.955.551,00** | **834.396.138.013,45** | **-48.084.817.537,55** |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **784.449.005.089,76** | **657.042.120.824,60** | **-127.406.884.265,16** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 514.949.159.286,14 | 463.438.137.670,05 | -51.511.021.616,09 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 264.260.065.122,62 | 189.302.852.365,55 | -74.957.212.757,07 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 5.091.985.681,00 | 3.394.959.789,00 | -1.697.025.892,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 147.795.000,00 | 906.171.000,00 | 758.376.000,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **142.215.982.235,72** | **67.853.674.184,79** | **-74.362.308.050,93** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 3.808.975.640,00 | 147.000.000,00 | -3.661.975.640,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.919.005.881,97 | 19.836.784.472,77 | -6.082.221.409,20 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 25.619.649.701,74 | 32.284.017.574,88 | 6.664.367.873,14 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 85.907.124.696,01 | 14.510.780.626,14 | -71.396.344.069,87 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 924.305.280,00 | 1.038.170.475,00 | 113.865.195,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 36.921.036,00 | 36.921.036,00 | 0,00 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **8.981.012.988,52** | **8.608.707.406,35** | **-372.305.582,17** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 8.981.012.988,52 | 8.608.707.406,35 | -372.305.582,17 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **105.213.314.659,00** | **103.613.697.395,00** | **-1.599.617.264,00** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 3.096.467.249,00 | 4.598.797.819,00 | 1.502.330.570,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 102.116.847.410,00 | 99.014.899.576,00 | -3.101.947.834,00 |
| | **Jumlah Belanja** | **1.040.859.314.973,00** | **837.118.199.810,74** | **-203.741.115.162,26** |
| | **Total Surplus/(Defisit)** | **-158.378.359.422,00** | **-2.722.061.797,29** | **155.656.297.624,71** |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **158.378.359.422,00** | **2.722.061.797,29** | **-155.656.297.624,71** |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERKURANG/BERTAMBAH |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 157.878.359.422,00 | 2.222.061.797,29 | -155.656.297.624,71 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Pembiayaan Netto** | **158.378.359.422,00** | **2.722.061.797,29** | **-155.656.297.624,71** |
| **6.3** | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati

ANENG

Lampiran II
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 0,00 | 11.950.625.485,00 | 453.019.850.300,43 | 415.467.965.772,83 | 126.470.969.541,95 | 63.570.648.230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.490.819.842,38 | 479.038.614.003,63 | -100.452.205.838,75 |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 0,00 | 0,00 | 219.227.329.482,19 | 214.339.371.365,77 | 15.611.715.791,74 | 27.768.664.845,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.839.045.273,93 | 242.108.036.211,65 | 7.268.990.937,72 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0,00 | 0,00 | 219.227.329.482,19 | 214.339.371.365,77 | 15.611.715.791,74 | 27.768.664.845,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.839.045.273,93 | 242.108.036.211,65 | 7.268.990.937,72 |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 0,00 | 11.650.625.485,00 | 157.574.146.382,42 | 149.901.432.353,16 | 21.810.526.357,48 | 23.423.333.395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.384.672.739,90 | 173.324.765.748,36 | -6.059.906.991,54 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 11.650.625.485,00 | 139.349.584.454,71 | 129.362.192.291,67 | 20.501.842.672,75 | 22.517.557.830,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.851.427.127,46 | 151.879.750.122,37 | -7.971.677.005,09 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0001 | RSUD Tarempa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.321.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.321.552,00 | 944.321.552,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0001 | RSUD Tarempa | 0,00 | 0,00 | 3.746.556.652,00 | 4.469.154.970,20 | 320.000.000,00 | 204.043.896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.066.556.652,00 | 4.673.198.866,70 | 606.642.214,70 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0002 | RSUD Jemaja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.368.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.368.624,00 | 493.368.624,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0002 | RSUD Jemaja | 0,00 | 0,00 | 821.080.109,00 | 402.661.485,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921.080.109,00 | 402.661.485,00 | -518.418.624,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0003 | RSUD Palmatak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.965.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.965.739,00 | 501.965.739,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0003 | RSUD Palmatak | 0,00 | 0,00 | 2.743.106.740,27 | 2.259.651.864,00 | 418.510.862,73 | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161.617.603,00 | 2.489.651.864,00 | -671.965.739,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0004 | Puskesmas Siantan Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.313.008,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.313.008,75 | 551.313.008,75 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0004 | Puskesmas Siantan Tengah | 0,00 | 0,00 | 1.296.352.657,00 | 894.663.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.352.657,00 | 894.663.654,00 | -401.689.003,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0005 | Puskesmas Letung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.840.000,00 | 214.840.000,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0005 | Puskesmas Letung | 0,00 | 0,00 | 1.156.588.474,00 | 1.036.539.839,00 | 80.787.642,00 | 215.676.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237.376.116,00 | 1.252.216.384,00 | 14.840.268,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0006 | Puskesmas Jemaja Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.479.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.479.600,00 | 26.479.600,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0006 | Puskesmas Jemaja Timur | 0,00 | 0,00 | 757.607.010,00 | 751.127.410,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.607.010,00 | 801.127.410,00 | -6.479.600,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0007 | Puskesmas Palmatak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.222.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.222.298,00 | 153.222.298,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0007 | Puskesmas Palmatak | 0,00 | 0,00 | 1.448.376.184,00 | 1.659.153.886,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478.376.184,00 | 1.659.153.886,00 | 180.777.702,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0008 | Puskesmas Tarempa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.626.000,00 | 55.626.000,00 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0008 | Puskesmas Tarempa | 0,00 | 0,00 | 1.725.223.820,00 | 1.841.213.847,00 | 210.391.059,00 | 125.909.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935.614.879,00 | 1.967.123.267,00 | 31.508.388,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang | |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0009 | Puskesmas Siantan Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.245,00 | 20.000.245,00 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0009 | Puskesmas Siantan Selatan | 0,00 | 0,00 | 1.376.576.174,44 | 1.221.886.164,00 | 36.921.036,00 | 36.921.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.497.210,44 | 1.258.807.200,00 | -154.690.010,44 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0010 | Puskesmas Siantan Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.785.000,00 | 44.785.000,00 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0010 | Puskesmas Siantan Timur | 0,00 | 0,00 | 1.142.307.163,00 | 1.045.118.163,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.307.163,00 | 1.045.118.163,00 | -128.189.000,00 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0011 | Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.591.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.591.208,00 | 99.591.208,00 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0011 | Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | 0,00 | 0,00 | 168.536.768,00 | 56.945.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.536.768,00 | 56.945.560,00 | -111.591.208,00 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0012 | Puskesmas Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.624.000,00 | 133.624.000,00 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0012 | Puskesmas Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 576.571.400,00 | 408.458.750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.571.400,00 | 408.458.750,50 | -168.112.649,50 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0013 | Puskesmas Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.227.829,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.227.829,04 | 119.227.829,04 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0013 | Puskesmas Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 502.026.976,00 | 379.647.565,00 | 11.681.085,00 | 14.832.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.708.061,00 | 394.480.232,00 | -119.227.829,00 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0014 | Puskesmas Kute Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.036.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.036.000,00 | 38.036.000,00 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0014 | Puskesmas Kute Siantan | 0,00 | 0,00 | 763.651.800,00 | 725.615.800,00 | 19.392.000,00 | 19.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783.043.800,00 | 745.007.800,00 | -38.036.000,00 | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 300.000.000,00 | 36.516.312.383,74 | 18.357.621.376,71 | 87.831.752.078,81 | 11.973.861.789,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.348.064.462,55 | 30.331.483.166,15 | -94.016.581.296,40 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 5.362.136.000,00 | 559.108.850,00 | 32.358.681.840,00 | 1.318.708.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.720.817.840,00 | 1.877.817.539,00 | -35.843.000.301,00 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 300.000.000,00 | 30.058.161.502,55 | 17.531.551.044,01 | 55.414.724.120,00 | 10.620.560.583,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.472.885.622,55 | 28.152.111.627,15 | -57.320.773.995,40 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0001 | UPTD SPAM SIANTAN | 0,00 | 0,00 | 1.096.014.881,19 | 266.961.482,70 | 58.346.118,81 | 34.592.517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.361.000,00 | 301.554.000,00 | -852.807.000,00 | |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 33.459.710.500,08 | 26.033.391.748,75 | 973.359.807,92 | 334.788.200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.433.070.308,00 | 26.368.179.949,03 | -8.064.890.358,97 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0,00 | 0,00 | 8.268.950.742,08 | 7.173.107.365,25 | 953.160.797,92 | 334.788.200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.222.111.540,00 | 7.507.895.565,53 | -1.714.215.974,47 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0,00 | 0,00 | 12.406.999.543,00 | 9.206.331.841,00 | 20.199.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.427.198.553,00 | 9.206.331.841,00 | -3.220.866.712,00 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0,00 | 0,00 | 12.783.760.215,00 | 9.653.952.542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.783.760.215,00 | 9.653.952.542,50 | -3.129.807.672,50 | |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 0,00 | 0,00 | 6.242.351.552,00 | 6.836.148.928,44 | 243.615.506,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.485.967.058,00 | 6.906.148.928,44 | 420.181.870,44 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.0.00.03.0000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0,00 | 0,00 | 6.242.351.552,00 | 6.836.148.928,44 | 243.615.506,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.485.967.058,00 | 6.906.148.928,44 | 420.181.870,44 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 0,00 | 561.080.000,00 | 87.668.816.865,29 | 62.681.627.178,44 | 11.818.169.332,80 | 2.115.401.469,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.486.986.198,09 | 64.797.028.648,43 | -34.689.957.549,66 |
| 2 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 0,00 | 0,00 | 9.408.330.956,77 | 6.846.560.874,77 | 0,00 | 21.007.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.408.330.956,77 | 6.867.567.890,77 | -2.540.763.066,00 |
| 2 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0,00 | 0,00 | 9.408.330.956,77 | 6.846.560.874,77 | 0,00 | 21.007.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.408.330.956,77 | 6.867.567.890,77 | -2.540.763.066,00 |
| 2 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 2.884.142.000,00 | 2.343.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884.142.000,00 | 2.343.942.000,00 | -540.200.000,00 |
| 2 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0,00 | 0,00 | 2.884.142.000,00 | 2.343.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884.142.000,00 | 2.343.942.000,00 | -540.200.000,00 |
| 2 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 0,00 | 0,00 | 237.974.350,00 | 170.636.000,00 | 373.895.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.869.990,00 | 170.636.000,00 | -441.233.990,00 |
| 2 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 237.974.350,00 | 170.636.000,00 | 373.895.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.869.990,00 | 170.636.000,00 | -441.233.990,00 |
| 2 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0,00 | 0,00 | 1.025.690.000,00 | 850.727.948,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.690.000,00 | 850.727.948,20 | -174.962.051,80 |
| 2 | 06 | 1.06.2.08.0.00.03.0000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0,00 | 0,00 | 1.025.690.000,00 | 850.727.948,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.690.000,00 | 850.727.948,20 | -174.962.051,80 |
| 2 | 06 | 1.06.2.08.0.00.03.0001 | UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 0,00 | 10.479.359.194,59 | 7.832.567.727,15 | 331.735.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.811.094.828,00 | 7.832.567.727,15 | -2.978.527.100,85 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 0,00 | 10.479.359.194,59 | 7.832.567.727,15 | 331.735.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.811.094.828,00 | 7.832.567.727,15 | -2.978.527.100,85 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 | 0,00 | 5.421.113.326,00 | 4.782.794.326,70 | 249.268.797,00 | 86.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670.382.123,00 | 4.869.084.326,70 | -801.297.796,30 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 | 0,00 | 5.421.113.326,00 | 4.782.794.326,70 | 249.268.797,00 | 86.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670.382.123,00 | 4.869.084.326,70 | -801.297.796,30 |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 200.000.000,00 | 20.485.034.158,04 | 12.162.501.751,10 | 10.407.257.915,01 | 2.002.934.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.892.292.073,05 | 14.165.436.555,10 | -16.726.855.517,95 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 810.163.872,03 | 761.832.093,95 | 192.574.661,62 | 147.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.738.533,65 | 908.832.093,95 | -93.906.439,70 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 200.000.000,00 | 18.560.558.270,39 | 10.814.910.465,15 | 9.788.658.587,43 | 1.855.934.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.349.216.857,82 | 12.670.845.269,15 | -15.678.371.588,67 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0001 | UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI | 0,00 | 0,00 | 592.046.538,62 | 256.782.004,00 | 16.024.665,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.071.204,58 | 256.782.004,00 | -351.289.200,58 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0002 | UPT PENGELOLAAN SAMPAH | 0,00 | 0,00 | 522.265.477,00 | 328.977.188,00 | 410.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.265.477,00 | 328.977.188,00 | -603.288.289,00 |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 0,00 | 0,00 | 14.686.217.677,85 | 11.624.291.466,19 | 331.716.502,38 | 5.169.649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.017.934.180,23 | 11.629.461.116,18 | -3.388.473.064,05 |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 0,00 | 0,00 | 196.431.896,00 | 64.702.809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.431.896,00 | 64.702.809,60 | -131.729.086,40 |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 0,00 | 0,00 | 14.301.653.781,85 | 11.552.388.656,59 | 331.716.502,38 | 5.169.649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.633.370.284,23 | 11.557.558.306,58 | -3.075.811.977,65 |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 0,00 | 0,00 | 188.132.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.132.000,00 | 7.200.000,00 | -180.932.000,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 0,00 | 361.080.000,00 | 11.470.653.263,04 | 7.382.813.657,46 | 70.452.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.541.105.345,04 | 7.382.813.657,46 | -4.158.291.687,58 |
| 2 | 17 | 2.17.2.07.3.30.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0,00 | 361.080.000,00 | 9.819.502.759,00 | 6.645.970.433,46 | 70.452.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.889.954.841,00 | 6.645.970.433,46 | -3.243.984.407,54 |
| 2 | 17 | 2.17.2.07.3.30.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0,00 | 0,00 | 1.411.100.420,37 | 714.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411.100.420,37 | 714.870.000,00 | -696.230.420,37 |
| 2 | 17 | 2.17.2.07.3.30.01.0001 | UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR | 0,00 | 0,00 | 240.050.083,67 | 21.973.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.050.083,67 | 21.973.224,00 | -218.076.859,67 |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 0,00 | 0,00 | 5.760.080.421,00 | 4.598.993.625,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.080.421,00 | 4.598.993.625,08 | -1.161.086.795,92 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang | |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | |
| 2 | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0,00 | 0,00 | 5.760.080.421,00 | 4.598.993.625,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.080.421,00 | 4.598.993.625,08 | -1.161.086.795,92 | |
| 2 | 23 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 0,00 | 0,00 | 4.736.111.307,00 | 4.025.368.301,79 | 53.842.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.789.954.070,00 | 4.025.368.301,79 | -764.585.768,21 | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0,00 | 0,00 | 161.627.161,00 | 106.286.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.627.161,00 | 106.286.336,00 | -55.340.825,00 | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0,00 | 0,00 | 4.574.484.146,00 | 3.919.081.965,79 | 53.842.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.628.326.909,00 | 3.919.081.965,79 | -709.244.943,21 | |
| 2 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 0,00 | 0,00 | 208.393.531,00 | 3.579.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.393.531,00 | 3.579.500,00 | -204.814.031,00 | |
| 2 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 0,00 | 0,00 | 208.393.531,00 | 3.579.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.393.531,00 | 3.579.500,00 | -204.814.031,00 | |
| 2 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 0,00 | 0,00 | 865.716.680,00 | 56.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.716.680,00 | 56.850.000,00 | -808.866.680,00 | |
| 2 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 0,00 | 0,00 | 865.716.680,00 | 56.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.716.680,00 | 56.850.000,00 | -808.866.680,00 | |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 0,00 | 0,00 | 30.654.975.153,27 | 18.406.384.131,48 | 169.443.655,50 | 427.296.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.824.418.808,77 | 18.833.680.484,48 | -11.990.738.324,29 | |
| 3 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 0,00 | 0,00 | 1.091.274.437,77 | 577.952.308,19 | 0,00 | 80.208.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.274.437,77 | 658.160.908,19 | -433.113.529,58 | |
| 3 | 17 | 2.17.2.07.3.30.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0,00 | 0,00 | 463.135.778,00 | 103.329.150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.135.778,00 | 103.329.150,80 | -359.806.627,20 | |
| 3 | 17 | 2.17.2.07.3.30.01.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0,00 | 0,00 | 528.775.592,77 | 458.063.653,39 | 0,00 | 80.208.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.775.592,77 | 538.272.253,39 | 9.496.660,62 | |
| 3 | 17 | 2.17.2.07.3.31.01.0002 | UPT METROLOGI LEGAL | 0,00 | 0,00 | 99.363.067,00 | 16.559.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.363.067,00 | 16.559.504,00 | -82.803.563,00 | |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 22.579.680.577,50 | 12.556.594.889,29 | 134.844.991,50 | 40.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.714.525.569,00 | 12.597.394.889,29 | -10.117.130.679,71 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 0,00 | 0,00 | 1.253.927.430,00 | 86.726.380,00 | 3.431.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.358.914,00 | 86.726.380,00 | -1.170.632.534,00 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 0,00 | 0,00 | 21.325.753.147,50 | 12.469.868.509,29 | 131.413.507,50 | 40.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.457.166.655,00 | 12.510.668.509,29 | -8.946.498.145,71 | |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 0,00 | 0,00 | 6.984.020.138,00 | 5.271.836.934,00 | 34.598.664,00 | 306.287.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.018.618.802,00 | 5.578.124.687,00 | -1.440.494.115,00 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 0,00 | 0,00 | 6.984.020.138,00 | 5.271.836.934,00 | 34.598.664,00 | 306.287.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.018.618.802,00 | 5.578.124.687,00 | -1.440.494.115,00 | |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 0,00 | 0,00 | 84.766.911.624,00 | 70.123.033.535,31 | 1.345.965.668,00 | 960.624.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.112.877.292,00 | 71.083.657.824,31 | -15.029.219.467,69 | |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 49.190.302.898,00 | 42.585.989.742,31 | 948.041.197,00 | 763.032.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.138.344.095,00 | 43.349.022.063,31 | -6.789.322.031,69 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 49.190.302.898,00 | 42.585.989.742,31 | 948.041.197,00 | 763.032.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.138.344.095,00 | 43.349.022.063,31 | -6.789.322.031,69 |
| 4 | 02 | | SEKRETARIAT DPRD | 0,00 | 0,00 | 35.576.608.726,00 | 27.537.043.793,00 | 397.924.471,00 | 197.591.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.974.533.197,00 | 27.734.635.761,00 | -8.239.897.436,00 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD | 0,00 | 0,00 | 35.576.608.726,00 | 27.537.043.793,00 | 397.924.471,00 | 197.591.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.974.533.197,00 | 27.734.635.761,00 | -8.239.897.436,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 882.480.955.551,00 | 821.884.432.528,45 | 60.492.590.200,24 | 38.140.622.464,82 | 1.121.925.315,00 | 354.613.862,00 | 8.981.012.988,52 | 8.608.707.406,35 | 105.213.314.659,00 | 103.584.697.395,00 | 175.808.843.162,76 | 150.688.641.128,17 | -25.120.202.034,59 |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | 0,00 | 0,00 | 16.003.630.353,25 | 11.304.118.955,60 | 534.697.149,00 | 86.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.538.327.502,25 | 11.390.118.955,60 | -5.148.208.546,65 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 14.194.515.740,25 | 10.954.018.955,60 | 534.697.149,00 | 86.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.729.212.889,25 | 11.040.018.955,60 | -3.689.193.933,65 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 1.809.114.613,00 | 350.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809.114.613,00 | 350.100.000,00 | -1.459.014.613,00 |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | 882.480.955.551,00 | 821.884.432.528,45 | 30.749.182.161,99 | 16.338.051.387,81 | 399.887.864,00 | 88.700.000,00 | 8.981.012.988,52 | 8.608.707.406,35 | 105.213.314.659,00 | 103.584.697.395,00 | 145.343.397.673,51 | 128.620.156.189,16 | -16.723.241.484,35 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 882.480.955.551,00 | 821.884.432.528,45 | 30.749.182.161,99 | 16.338.051.387,81 | 399.887.864,00 | 88.700.000,00 | 8.981.012.988,52 | 8.608.707.406,35 | 105.213.314.659,00 | 103.584.697.395,00 | 145.343.397.673,51 | 128.620.156.189,16 | -16.723.241.484,35 |
| 5 | 03 | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0,00 | 0,00 | 9.602.595.710,00 | 7.212.942.567,10 | 61.787.296,00 | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664.383.006,00 | 7.242.192.567,10 | -2.422.190.438,90 |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0,00 | 0,00 | 944.375.812,00 | 34.953.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.375.812,00 | 34.953.578,00 | -909.422.234,00 |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0,00 | 0,00 | 8.658.219.898,00 | 7.177.988.989,10 | 61.787.296,00 | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720.007.194,00 | 7.207.238.989,10 | -1.512.768.204,90 |
| 5 | 06 | | PENGELOLAAN PERBATASAN | 0,00 | 0,00 | 4.137.181.975,00 | 3.285.509.554,31 | 125.553.006,00 | 150.663.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.262.734.981,00 | 3.436.173.416,31 | -826.561.564,69 |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 4.137.181.975,00 | 3.285.509.554,31 | 125.553.006,00 | 150.663.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.262.734.981,00 | 3.436.173.416,31 | -826.561.564,69 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 0,00 | 0,00 | 14.946.889.241,87 | 12.239.949.987,76 | 390.112.109,13 | 148.416.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.337.001.351,00 | 12.388.366.387,76 | -2.948.634.963,24 |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 14.946.889.241,87 | 12.239.949.987,76 | 390.112.109,13 | 148.416.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.337.001.351,00 | 12.388.366.387,76 | -2.948.634.963,24 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT DAERAH | 0,00 | 0,00 | 14.946.889.241,87 | 12.239.949.987,76 | 390.112.109,13 | 148.416.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.337.001.351,00 | 12.388.366.387,76 | -2.948.634.963,24 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 0,00 | 0,00 | 45.519.037.854,82 | 33.288.495.741,96 | 737.094.277,18 | 164.973.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 46.256.132.132,00 | 33.482.469.321,96 | -12.773.662.810,04 |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | 0,00 | 0,00 | 45.519.037.854,82 | 33.288.495.741,96 | 737.094.277,18 | 164.973.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 46.256.132.132,00 | 33.482.469.321,96 | -12.773.662.810,04 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KECAMATAN SIANTAN | 0,00 | 0,00 | 6.017.376.234,00 | 4.223.667.307,41 | 6.673.001,00 | 33.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.024.049.235,00 | 4.256.767.307,41 | -1.767.281.927,59 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | KELURAHAN TAREMPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.410.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | 689.410.799,00 | 689.410.799,00 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | KELURAHAN TAREMPA | 0,00 | 0,00 | 2.213.542.644,00 | 66.046.471,00 | 19.987.152,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233.529.796,00 | 66.071.471,00 | -2.167.458.325,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN JEMAJA | 0,00 | 0,00 | 6.141.834.815,00 | 5.032.680.555,80 | 46.700.201,00 | 61.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188.535.016,00 | 5.094.330.555,80 | -1.094.204.460,20 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0001 | KELURAHAN LETUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0001 | KELURAHAN LETUNG | 0,00 | 0,00 | 881.452.428,00 | 767.085.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.452.428,00 | 767.085.688,00 | -114.366.740,00 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | KECAMATAN PALMATAK | 0,00 | 0,00 | 5.722.815.551,00 | 4.278.725.103,11 | 78.143.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.958.785,00 | 4.278.725.103,11 | -1.522.233.681,89 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KECAMATAN SIANTAN TIMUR | 0,00 | 0,00 | 3.477.529.667,00 | 2.238.785.639,38 | 124.247.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.601.777.086,00 | 2.238.785.639,38 | -1.362.991.446,62 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | KECAMATAN SIANTAN SELATAN | 0,00 | 0,00 | 3.033.678.243,00 | 2.438.107.217,91 | 114.005.830,00 | 63.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147.684.073,00 | 2.501.307.217,91 | -646.376.855,09 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | KECAMATAN JEMAJA TIMUR | 0,00 | 0,00 | 3.559.415.819,82 | 2.752.829.036,71 | 127.481.486,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686.897.306,00 | 2.752.829.036,71 | -934.068.269,29 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | KECAMATAN SIANTAN TENGAH | 0,00 | 0,00 | 3.814.313.314,00 | 2.846.531.355,88 | 23.545.286,00 | 2.798.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.837.858.600,00 | 2.849.329.935,88 | -988.528.664,12 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | KECAMATAN SIANTAN UTARA | 0,00 | 0,00 | 3.278.527.209,00 | 2.337.489.852,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278.527.209,00 | 2.337.489.852,05 | -941.037.356,95 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | KECAMATAN JEMAJA BARAT | 0,00 | 0,00 | 3.149.827.639,00 | 2.099.920.790,63 | 86.221.223,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236.048.862,00 | 2.104.120.790,63 | -1.131.928.071,37 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | KECAMATAN KUTE SIANTAN | 0,00 | 0,00 | 4.228.724.291,00 | 3.546.215.925,08 | 110.089.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338.813.736,00 | 3.546.215.925,08 | -792.597.810,92 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 0,00 | 0,00 | 7.379.933.849,84 | 6.694.042.012,00 | 162.302.336,16 | 111.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.542.236.186,00 | 6.805.742.012,00 | -736.494.174,00 |
| 8 | 05 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0,00 | 0,00 | 7.379.933.849,84 | 6.694.042.012,00 | 162.302.336,16 | 111.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.542.236.186,00 | 6.805.742.012,00 | -736.494.174,00 |
| 8 | 05 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0,00 | 0,00 | 7.379.933.849,84 | 6.694.042.012,00 | 162.302.336,16 | 111.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.542.236.186,00 | 6.805.742.012,00 | -736.494.174,00 |
| | | | **TOTAL** | **882.480.955.551,00** | **834.396.138.013,45** | **784.449.005.089,76** | **657.042.120.824,60** | **142.215.982.235,72** | **67.853.674.184,79** | **8.981.012.988,52** | **8.608.707.406,35** | **105.213.314.659,00** | **103.613.697.395,00** | **1.040.859.314.973,00** | **837.118.199.810,74** | **-203.741.115.162,26** |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati



ANENG

Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025

# KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

## RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

## TAHUN ANGGARAN 2025

| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 882.480.955.551,00 | 834.396.138.013,45 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 53.491.122.423,00 | 52.976.977.660,00 | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 25.122.015.531,00 | 25.422.015.531,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 6.824.360.000,00 | 4.891.678.070,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 20.044.746.892,00 | 21.163.284.059,00 | |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 828.820.943.352,00 | 781.262.291.690,45 | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 786.212.377.100,00 | 730.006.568.461,45 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 42.608.566.252,00 | 51.255.723.229,00 | |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 168.889.776,00 | 156.868.663,00 | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 168.889.776,00 | 156.868.663,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | |
| Program | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.271.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 181.376.369.459,00 | 174.133.680.779,82 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000.000,00 | 1.599.767.280,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000,00 | 25.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Operasional Kantor | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | 148.768.250,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 271.033.971,00 | 276.530.374,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 731.504.491,00 | 12.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.800.000,00 | 111.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 324.882.326,00 | 306.882.326,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 444.430.000,00 | 186.004.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 305.664.911,78 | 201.803.411,78 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 188.774.937,00 | 188.774.937,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.300.000,00 | 90.300.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 3.081.672.450,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 316.027.602,00 | 315.967.602,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 164.061.756,00 | 164.061.756,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 193.739.600,00 | 48.939.600,00 | |
| Program | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya pengelolaan pendidikan dasar | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 437.670.525,20 | 0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 200.000.000,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 158.107.801,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 72.068.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 148.382.781,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.680.123.009,00 | 224.610.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.510.196.739,97 | 3.300.146.420,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.300.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 499.856.835,40 | 324.641.344,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.213.500,00 | 53.652.866,98 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 199.544.970,10 | 255.121.733,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 143.953.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 374.621.410,25 | 321.544.970,10 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 136.410.370,00 | 64.310.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 598.104.558,22 | 2.185.865.532,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 278.498.146,00 | 267.898.146,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.789.481.082,00 | 1.789.481.082,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 113.865.195,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.774.705,00 | 233.666.033,43 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 171.085.900,00 | 112.740.260,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 379.218.703,00 | 390.284.380,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.084,00 | 16.500.084,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.279.444.880,00 | 5.599.444.880,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.850.218.840,00 | 1.850.218.840,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 462.143.280,00 | 462.143.280,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.310.000,00 | 60.533.220,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.498.500,00 | 6.498.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.310.000,00 | 150.000.000,02 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 267.876.780,00 | 157.337.860,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 243.566.145,00 | 162.733.145,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.429.923,00 | 100.022.228,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 182.352.000,00 | 101.384.940,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 489.404.320,00 | 2.331.197.665,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.374.016,00 | 10.374.016,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 449.683.943,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 247.905.000,00 | 199.332.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 236.212.500,00 | 73.750.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.104.234.468,42 | 3.110.191.121,10 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.982.339.900,00 | 2.472.624.013,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 499.300.000,00 | 499.300.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya pengelolaan pendidikan dasar | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.000.000,00 | 230.000.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 455.546.758,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 54.918.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 160.837.421,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.400.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 391.600.000,00 | 1.008.543.627,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 543.614.915,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.250.000,00 | 14.025.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 199.677.558,12 | 296.877.558,12 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 682.106.090,01 | 838.514.642,14 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.210.116.050,63 | 1.934.960.742,31 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.400.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 774.518.715,55 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 489.584.800,00 | 22.800.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 483.011.372,10 | 1.865.196.632,10 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 849.800.000,00 | 638.900.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 793.170.588,00 | 793.170.588,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.890.800.800,00 | 2.113.577.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.211.935,00 | 135.624.692,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 197.354.910,00 | 144.437.910,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 374.621.081,00 | 289.583.651,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.221.477.500,00 | 2.927.727.500,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 915.840.500,00 | 915.840.500,00 | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 462.162.000,00 | 462.162.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 285.583.311,00 | 194.046.311,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 226.042.290,00 | 140.862.290,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 208.698.000,00 | 129.114.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 229.626.960,00 | 1.901.716.435,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 133.400.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 199.544.970,33 | 557.944.970,33 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 398.600.000,00 | 398.600.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pengelolaan PAUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 859.110.749,00 | 1.277.423.128,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 795.691.511,20 | 2.157.310.374,27 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.178.831,00 | 1.178.831,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 482.922.977,00 | 387.049.853,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 653.845.313,20 | 612.045.313,20 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 289.589.772,00 | 396.063.342,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.958.800.000,00 | 1.958.300.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 374.966,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.316.000,00 | 23.661.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.904.560,00 | 109.434.560,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.000.000,00 | 71.850.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.131.359.210,00 | 1.869.598.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 369.385.720,00 | 369.385.720,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 569.820.469,00 | 904.394.985,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000.000,00 | 1.054.075.693,40 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 424.866.592,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 200.500.000,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 314.480.000,00 | 313.980.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Program | : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kurikulum | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 394.633.000,00 | 284.971.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 395.674.000,00 | 285.094.000,00 | |
| Program | : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Kegiatan Pengelolaan pendidikan dan sarana prasarana penunjang lainnya | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | 133.403.200,00 | |
| Program | : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 124.950.000,00 | 17.189.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.760.500,00 | 2.720.250,00 | |
| Bidang Urusan | : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.940.213,93 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 95.045.333.035,30 | 88.264.371.619,35 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.308.300.000,00 | 1.463.059.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.545.700,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.375.480,00 | 7.818.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 132.031.849,15 | 112.271.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.028.636,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 153.624.300,00 | 109.860.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.846.753,88 | 51.307.980,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 311.313.000,00 | 155.656.500,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 119.186.380,33 | 29.996.050,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 104.488.940,00 | 104.488.940,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.730.000,00 | 8.080.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.735.742.526,00 | 5.450.909.761,04 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan opemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.834.600,00 | 52.853.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 298.994.333,92 | 298.994.333,92 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.522.800,00 | 2.700.000,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan kesehatan<br>Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.998.034.469,00 | 1.034.767.994,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.466.056.585,00 | 6.803.044.033,10 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 8.707.341.456,00 | 11.286.760.022,00 | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 860.000.000,00 | 1.058.349.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 303.428.907,00 | 21.055.013,91 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.226.336.852,60 | 3.226.336.852,60 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 669.614.000,00 | 169.613.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000,00 | 827.525.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.998.178.622,00 | 14.713.592.194,44 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 34.075.930,00 | 10.593.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | | | |
| Indikator Keluaran | : 0 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.599.337.000,00 | 3.599.337.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.486.000,00 | 140.616.500,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 192.600.000,00 | 192.600.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 146.101.530,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | 129.160.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.171.200,00 | 48.171.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 310.013.500,00 | 252.249.997,78 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 137.042.000,00 | 137.042.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.140.000,00 | 79.140.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 303.774.000,00 | 264.864.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 76.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.133.131.125,22 | 10.503.463.469,23 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.700.000,00 | 27.700.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 67.268.074,13 | 26.239.350,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 20.203.923,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 68.550.952,00 | 68.550.952,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.866.798,00 | 93.866.798,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.665.000,00 | 68.665.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 243.607.000,00 | 243.607.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : 0 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.268.108,00 | 9.268.108,00 | |
| Program | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : -<br>Persentase sdmk yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan | | | |
| Kegiatan | : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0001 RSUD Tarempa | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 466.621.552,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 390.000.000,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 87.700.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0002 RSUD Jemaja | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 257.904.224,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 235.464.400,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0003 RSUD Palmatak | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 245.139.739,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 256.826.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0004 Puskesmas Siantan Tengah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 505.411.138,75 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah<br>undefined | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 45.901.870,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0005 Puskesmas Letung | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 32.570.000,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 28.420.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 19.040.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 21.280.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 59.100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 25.870.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 28.560.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0006 Puskesmas Jemaja Timur | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 26.479.600,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0007 Puskesmas Palmatak | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 90.822.298,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 62.400.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0008 Puskesmas Tarempa | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 55.626.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0009 Puskesmas Siantan Selatan | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 20.000.245,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0010 Puskesmas Siantan Timur | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 44.785.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0011 Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 99.591.208,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0012 Puskesmas Jemaja Barat | | | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 51.000.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 82.624.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0013 Puskesmas Siantan Utara | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 5.699.829,04 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 55.000.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 58.528.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0014 Puskesmas Kute Siantan | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 9.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 29.036.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.1 RSUD Tarempa | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 26.177.596,20 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 120.000.000,00 | 4.043.896,50 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 266.621.552,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 293.700.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 33.925.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 222.000.000,00 | 222.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.308.686.704,00 | 2.584.223.643,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.549.548.396,00 | 1.552.828.731,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.10 Puskesmas Siantan Timur | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 213.164.000,00 | 140.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.785.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.240.000,00 | 10.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 167.283.581,50 | 167.283.581,50 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 136.283.581,50 | 167.283.581,50 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 31.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : -<br>Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.100.000,00 | 97.100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 153.205.000,00 | 153.205.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.335.000,00 | 12.335.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.565.000,00 | 85.565.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.498.000,00 | 25.498.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.098.000,00 | 34.098.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.794.000,00 | 1.794.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.856.000,00 | 11.856.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.11 Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.408.220,00 | 1.408.220,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.928.140,00 | 7.928.140,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.228.000,00 | 8.228.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.851.200,00 | 10.851.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.591.208,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.490.000,00 | 10.490.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.12 Puskesmas Jemaja Barat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.894.000,00 | 5.894.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.989.500,00 | 5.989.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.883.060,00 | 21.848.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.997.053,00 | 11.595.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.054.987,00 | 10.054.987,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.010.000,00 | 23.358.463,50 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.425.000,00 | 38.425.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.705.000,00 | 101.705.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 51.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.024.000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.678.800,00 | 12.678.800,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.13 Puskesmas Siantan Utara | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.222.325,00 | 1.182.572,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 7.423.254,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.681.085,00 | 14.832.667,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.680.011,00 | 6.341.831,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.100.000,00 | 15.097.411,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 2.499.510,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 24.074.748,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.275.940,00 | 28.542.239,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.472.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.962.700,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.800.000,00 | 74.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.040.000,00 | 14.040.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.231.000,00 | 72.231.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.340.000,00 | 63.340.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 55.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.328.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.880.000,00 | 11.880.000,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.735.000,00 | 5.735.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.14 Puskesmas Kute Siantan | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 16.964.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM<br>Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.720.000,00 | 82.720.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.045.000,00 | 111.905.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.560.000,00 | 10.560.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.670.000,00 | 31.670.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 37.902.372,00 | 24.931.574,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.954.428,00 | 313.925.226,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.392.000,00 | 19.392.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 990.000,00 | 990.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.840.000,00 | 39.980.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.2 RSUD Jemaja | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 75.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.748.984,00 | 18.748.984,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 225.188.224,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.100.000,00 | 25.050.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.692.901,00 | 36.646.401,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.700.000,00 | 6.566.100,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 60.000.000,00 | 95.000.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 215.000.000,00 | 205.000.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.3 RSUD Palmatak | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.577.864,00 | 6.577.864,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.489.137,27 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 118.510.862,73 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 270.289.739,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 231.676.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.024.000,00 | 33.024.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.234.425.168,00 | 914.425.168,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 865.574.832,00 | 1.255.574.832,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 300.000.000,00 | 230.000.000,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.4 Puskesmas Siantan Tengah | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 355.787.133,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah<br>undefined | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.901.870,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 85.390.584,00 | 150.390.584,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 186.034.376,00 | 121.034.376,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.400.000,00 | 95.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.956.000,00 | 161.956.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.570.000,00 | 12.570.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.510.000,00 | 25.510.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.199.000,00 | 74.199.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 84.042.000,00 | 84.042.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.040.000,00 | 80.040.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.325.000,00 | 4.325.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.785.000,00 | 22.785.000,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.771.694,00 | 9.771.694,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.5 Puskesmas Letung | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.991.116,00 | 57.991.116,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.570.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 189.212.358,00 | 289.003.723,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 80.787.642,00 | 215.676.545,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.140.000,00 | 43.140.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.980.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.360.000,00 | 15.360.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.320.000,00 | 10.320.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 206.270.000,00 | 193.255.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.800.000,00 | 23.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.040.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.800.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.660.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 63.767.000,00 | 63.767.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.198.000,00 | 1.783.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.880.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.160.000,00 | 1.720.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.640.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.240.000,00 | 45.240.000,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.6 Puskesmas Jemaja Timur | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.148.000,00 | 69.148.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.479.600,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 91.178.631,00 | 111.178.631,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.225.779,00 | 87.225.779,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.880.000,00 | 38.880.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.040.000,00 | 29.040.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.830.000,00 | 16.830.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.770.000,00 | 98.770.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.040.000,00 | 7.040.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.756.000,00 | 81.756.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.890.000,00 | 10.890.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.120.000,00 | 21.120.000,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.349.000,00 | 7.349.000,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.7 Puskesmas Palmatak | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.822.298,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.400.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 382.850.000,00 | 660.585.016,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 402.850.000,00 | 489.114.984,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.600.000,00 | 105.600.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.490.000,00 | 5.490.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.320.000,00 | 5.320.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.970.000,00 | 11.970.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 136.835.000,00 | 136.835.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.140.000,00 | 12.140.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 88.910.000,00 | 88.910.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.520.000,00 | 31.520.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.245.000,00 | 4.245.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.271.000,00 | 3.271.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.192.886,00 | 5.192.886,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.8 Puskesmas Tarempa | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.888.000,00 | 38.888.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.626.000,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 452.000.000,00 | 786.631.159,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.000.000,00 | 336.984.868,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 210.391.059,00 | 125.909.420,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.250.000,00 | 66.250.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.400.000,00 | 75.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.925.000,00 | 120.925.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.750.000,00 | 12.750.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.500.000,00 | 54.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.700.000,00 | 75.700.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.630.000,00 | 22.630.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.450.000,00 | 70.450.000,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.604.820,00 | 15.604.820,00 | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.9 Puskesmas Siantan Selatan | | | |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 234.689.765,44 | 100.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.245,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 198.864.044,00 | 198.864.044,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 126.149.120,00 | 126.149.120,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 36.921.036,00 | 36.921.036,00 | |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | | | |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.647.000,00 | 70.647.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.750.000,00 | 72.750.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.290.000,00 | 28.290.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.830.000,00 | 16.830.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 207.110.000,00 | 207.110.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.790.000,00 | 20.790.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.985.000,00 | 14.985.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.780.000,00 | 12.780.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 94.245.000,00 | 94.245.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 104.376.000,00 | 104.376.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.755.000,00 | 11.755.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.230.000,00 | 10.230.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.460.000,00 | 53.460.000,00 | |
| Program | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| Organisasi | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Program | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan pemerintahan | | | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.050.683.317,02 | 9.699.146.679,75 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.061.760.000,00 | 606.852.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 583.874.773,00 | 599.256.855,35 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 10.600.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.440.476.700,00 | 535.730.755,98 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 214.323.264,00 | 255.759.663,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 235.900.324,00 | 56.502.300,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 197.413.837,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 29.542.650,00 | |
| Program | : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0051 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0068 Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Breakwater yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 107.750.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 142.650.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 310.444.565,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 118.372.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 150.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0124 Pembangunan Polder/Kolam Retensi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.002.506.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 3.198.380.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 308.712.900,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.699.000,00 | 488.050.234,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase peningkatan ketersediaan sarpras pengelolaan persampahan | | | |
| Kegiatan | : 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 187.778.000,00 | 150.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.228.000,00 | 25.040.000,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 250.000.000,00 | 73.072.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0027 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 190.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.259.631.955,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 243.551.298,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 137.538.430,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | | | |
| Indikator Hasil | : Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau<br>Persentase Penambahan panjang Jalan Lingkungan yang dibangun | | | |
| Kegiatan | : 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.07.2.01.0009 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.07.2.01.0015 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.07.2.01.0019 Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.07.2.01.0021 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 270.000.000,00 | 209.536.230,93 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 675.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 281.850.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.537.656.000,00 | 3.782.865.378,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 8.303.000.000,00 | 194.880.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 193.263.613,00 | 120.620.000,00 | |
| Program | : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 449.141.298,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 200.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | |
| Kegiatan | : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana trasportasi darat | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 551.390.000,00 | 9.300.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 101.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 986.289.200,03 | 68.903.612,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 10.881.490.800,00 | 5.259.460.562,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Direkonstruksi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.203.262.200,00 | 53.915.100,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 22.231.776.800,00 | 3.456.662.613,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Dibangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 725.858.400,00 | 28.900.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 7.255.000.000,00 | 965.129.768,14 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.150.000,00 | 49.900.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 450.000.000,00 | 315.346.560,00 | |
| Program | : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 160.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data SHP Peta Dasar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 142.671.413,50 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.03.1.04.2.10.01.0001 UPTD SPAM SIANTAN | | | |
| Program | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.074.448,49 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 30.685.551,51 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.240.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan | | | |
| Kegiatan | : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | :<br>Meningkatkan cakupan distribusi air bersih; | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 826.700.432,70 | 266.961.482,70 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.660.567,30 | 34.592.517,30 | |
| Bidang Urusan | : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Organisasi | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Program | : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | 1.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 600.000,00 | |
| Program | : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000,00 | 150.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 200.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | |
| Indikator Hasil | : Meningkatnya Pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman<br>Persentase penanganan PSU pada Perumahan komersil | | | |
| Kegiatan | : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | |
| Indikator Keluaran | :<br>Meningkatnya Pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.137.136.000,00 | 356.958.850,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 32.358.681.840,00 | 1.318.708.689,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | | |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.395.059.246,00 | 6.068.727.090,17 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.800.000,00 | 101.240.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.788.000,00 | 14.384.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.475.648,00 | 62.482.553,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.050.000,00 | 5.100.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 86.384.165,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 64.981.434,08 | 82.786.434,08 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.238.800,00 | 29.288.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 268.780.000,00 | 151.767.540,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48.105.592,92 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 59.424.564,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.222.685,00 | 49.511.569,07 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 177.085.505,00 | 211.483.925,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.068.129,00 | 72.993.129,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.586.800,00 | 48.586.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 158.004.914,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.640.000,00 | 65.462.180,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.997.180,00 | 10.150.000,00 | |
| Program | : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | |
| Indikator Hasil | : Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran | | | |
| Kegiatan | : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 26.393.820,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.400.000,00 | 90.650.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 700.629.971,00 | 285.276.631,21 | |
| Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan pemerintahan | | | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Perencanaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.021.500,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 10.538.764.897,00 | 7.755.133.950,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 226.068.000,00 | 205.705.500,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.465.130,00 | 8.465.130,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.904.715,00 | 266.869.107,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.310.660,00 | 70.468,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.219.150,00 | 8.478.399,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.324.000,00 | 30.404.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 169.461.188,00 | 29.030.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 221.064.004,00 | 196.835.775,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 8.094.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.210.510,00 | 0,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.310.000,00 | 68.310.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 359.109.432,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Peersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 182.367.410,00 | 60.589.080,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.100.000,00 | 11.800.000,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 186.685.230,00 | 25.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100,00 | 1.000.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.988.500,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.211.600,00 | 1.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.509.359,00 | 6.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.514.500,00 | 1.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.400.100,00 | 1.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000,00 | 33.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.800.000,00 | 20.952.000,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.173.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.930.000,00 | 17.114.000,00 | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 119.795.000,00 | 82.971.000,00 | |
| Organisasi | : 1.05.8.01.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.05.8.01.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | |
| Program | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.877.000,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.950.000,00 | 100.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.324.853.534,00 | 8.434.662.268,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.280.000,00 | 77.060.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.564.000,00 | 16.782.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 156.678.000,00 | 15.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.250.924,00 | 101.568,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.645.031,00 | 43.943.810,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.270.284,00 | 2.379.697,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.560.500,00 | 26.475.680,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.887.900,00 | 4.574.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 219.715.000,00 | 34.712.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 353.105.325,00 | 353.105.325,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.350.000,00 | 36.414.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 492.386.238,01 | |
| Kegiatan | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.906.378,00 | 29.845.311,92 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.670.000,00 | 292.944,57 | |
| Program | : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Hasil | : Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan | | | |
| Kegiatan | : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.740.000,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.083.103,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.186.096,00 | 13.865.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.493.140,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.940.000,00 | 100.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase PPNS yang aktif | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.104.000,00 | 40.052.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.650.000,00 | 29.700.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| Organisasi | : 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan pemerintahan<br>undefined | | | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.619.632,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.556.427.024,96 | 4.973.309.223,46 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 135.120.000,00 | 134.170.000,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.550.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.760.000,00 | 16.260.000,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.278.920,00 | 11.862.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 243.615.506,00 | 70.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.875.822,00 | 1.983.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.423.424,00 | 13.215.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.411.200,00 | 4.113.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 433.400.313,03 | 129.107.828,18 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.226.330,00 | 113.226.330,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.781.236,00 | 82.103.490,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 40.747.581,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.520.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.270.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 3.850.000,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 180.245.458,00 | 138.029.658,00 | |
| Program | : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 189.687.650,01 | 39.560.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 28.950.000,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.000.000,00 | 230.960.417,80 | |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 28.000.000,00 | 823.200.000,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 51.450.000,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.754.542,00 | 51.000,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | |
| Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | |
| Program | : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi dibagi target per tahun | | | |
| Kegiatan | : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlakasananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.070.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja | | | |
| Kegiatan | : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : persentase jumlah masyarakat masyarakat pencari kerja yang terlayani dengan baik | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.730.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase besaran kasus yang diselesaikan | | | |
| Kegiatan | : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya regulasi yang tersusun | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 944.618.000,00 | 714.870.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 393.682.420,37 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Organisasi | : 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| Program | : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase perangkat daerah memiliki focal poin aktif | | | |
| Kegiatan | : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kantor Pemerintah dan Fasilitas umum di Kabupaten Kepulauan Anambas yan Responsif Gender | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 3.998.300,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia<br>Jumlah Peserta yang Mendapatkan Kemampuan dan Keterampilan dari Kegiatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 295.969.648,20 | |
| Program | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.240.000,00 | 115.240.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 88.400.000,00 | 88.400.000,00 | |
| Program | : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 370.000.000,00 | 14.868.000,00 | |
| Program | : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 272.050.000,00 | 202.252.000,00 | |
| Organisasi | : 1.06.2.08.0.00.03.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| Unit Organisasi | : 1.06.2.08.0.00.03.0001 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak | | | |
| Program | : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| Organisasi | : 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | | | |
| Unit Organisasi | : 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | | | |
| Program | : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | |

| | |
|---|---|
| Indikator Hasil | : Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan |
| Kegiatan | : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |
| Indikator Keluaran | : Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun |
| Sub Kegiatan | : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.265.700,00 | 3.179.500,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |
| Indikator Hasil | : Persentase penanganan kerawanan pangan |
| Kegiatan | : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan |
| Sub Kegiatan | : 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.567.931,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
| Indikator Hasil | : Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan |
| Kegiatan | : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar |
| Sub Kegiatan | : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.559.900,00 | 400.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Bidang Urusan | : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN |
| Organisasi | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| Unit Organisasi | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program | : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.05.2.01.0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 126.156.350,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 373.895.640,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.10.06.2.02 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.06.2.02.0002 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.08.2.02.0003 Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.818.000,00 | 170.636.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Organisasi | : 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Unit Organisasi | : 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Program | : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | | | |
| Kegiatan | : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aksi pemantauan kualitas lingkungan yang dilaksanakan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.412.000,00 | 14.747.400,00 | |
| Program | : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Perlindungan Lingkungan Hidup | | | |
| Kegiatan | : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | |
| Indikator Keluaran | : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.276.829,08 | 15.931.418,95 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.874.661,62 | 0,00 | |
| Program | : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | |
| Kegiatan | : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan penaatan lingkungan hidup yang dilaksanakan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 379.967.017,80 | 18.960.900,00 | |
| Program | : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Peran Serta Sekolah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | |
| Kegiatan | : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penghargaan sekolah Adiwiyata yang diberikan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 180.620.025,15 | 17.325.155,00 | |
| Program | : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan | | | |
| Kegiatan | : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penanganan Pengaduann Lingkungan Hidup | | | |
| Kegiatan | : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaduan Lingkungan Hidup | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pengelolaan Persampahan Yang Berwawasan Lingkungan | | | |
| Kegiatan | : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aksi pengelolaan sampah yang dilaksanakan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.051.178,00 | 4.484.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.836.822,00 | 690.383.220,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 186.700.000,00 | 147.000.000,00 | |
| Organisasi | : 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Unit Organisasi | : 2.15.2.11.0.00.01.2 UPT PENGELOLAAN SAMPAH | | | |
| Program | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 743.270,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.432.390,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 400.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.655.000,00 | 10.195.238,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.281.751,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.017.756,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.732.000,00 | 1.800.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.427.360,00 | 2.790.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.345.750,00 | 6.940.750,00 | |
| Kegiatan | : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 403.390.200,00 | 291.131.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.240.000,00 | 16.120.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| Organisasi | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| Unit Organisasi | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| Program | : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.100.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.100.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100% | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 8.473.406.230,00 | 6.842.443.022,57 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.560.000,00 | 138.496.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.100.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.169.780,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.964.048,00 | 12.964.048,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.263.846,59 | 24.967.368,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 331.735.633,41 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.998.922,00 | 12.998.922,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.801.000,00 | 19.801.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.623.560,00 | 40.955.665,58 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.370.000,00 | 3.450.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 314.227.658,00 | 127.113.829,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 98.838.060,00 | 41.081.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 196.000.000,00 | 171.046.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 158.956.830,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.000.000,00 | 6.187.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.810.000,00 | 11.735.778,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.830.740,00 | 47.822.600,00 | |
| Program | : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.906.800,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 176.378.250,00 | 35.854.073,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 181.300.000,00 | 73.342.291,00 | |
| Kegiatan | : 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.518.900,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran 0 -18 Tahun (%) | | | |
| Kegiatan | : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000,00 | 24.014.000,00 | |
| Program | : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 175.105.000,00 | 22.411.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 2.790.000,00 | |
| Program | : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase publikasi Profil Kependudukan | | | |
| Kegiatan | : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Buku profil Kependudukan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.986.400,00 | 14.135.200,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| Organisasi | : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| Unit Organisasi | : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| Program | : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Kegiatan | : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas<br>Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.477.896.368,00 | 2.495.672.439,70 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.948.000,00 | 149.798.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.946.494,00 | 935.812,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 249.268.797,00 | 86.290.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.000.000,00 | 58.816.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.588.000,00 | 17.088.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 277.788.000,00 | 166.297.400,00 | |
| Kegiatan | : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.854.602,00 | 74.956.102,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.624.000,00 | 21.624.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 28.893.140,00 | |
| Kegiatan | : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.881.944,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.310.000,00 | 7.310.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program | : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal<br>Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri<br>Persentase Penataan Desa | | | |
| Kegiatan | : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 363.168.733,00 | 292.321.733,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Desa yang melakukan kerjasama | | | |
| Kegiatan | : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase pembinaan pemerintahan desa | | | |
| Kegiatan | : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Desa yang mendapat pembinaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.029.498.400,00 | 1.029.948.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.428.000,00 | 60.378.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.080.000,00 | 2.600.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.428.000,00 | 1.050.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.100.000,00 | 1.050.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 5.050.000,00 | |
| Program | : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | | |
| Kegiatan | : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.960.000,00 | 5.830.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 438.612.785,00 | 163.175.300,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Program | : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | | | |
| Kegiatan | : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | |
| Program | : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB | | | |
| Kegiatan | : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 343.000.000,00 | 343.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah IMP (Institusi masyarakat pedesaan) yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 972.200.000,00 | 432.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Peserta KB aktif modern | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.660.000,00 | 11.660.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 104.968.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 162.550.000,00 | 57.582.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.332.000,00 | 19.332.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 145.600.000,00 | 145.600.000,00 | |
| Program | : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan | | | |
| Kegiatan | : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | |
| Indikator Keluaran | : Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 208.800.000,00 | 208.800.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | |
| Organisasi | : 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Unit Organisasi | : 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Program | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.792.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.208.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.451.711.460,00 | 8.698.408.279,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 356.904.000,00 | 238.428.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.420.985,00 | 7.164.061,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.970.212,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33.578.079,42 | 55.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.853.511,00 | 99.485.929,21 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.978.000,00 | 28.246.828,94 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.750.000,00 | 27.206.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 304.771.581,00 | 110.684.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.935.715,00 | 56.081.683,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.686.000,00 | 50.042.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.442.315,00 | 19.029.464,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 574.137.770,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 447.267.530,00 | 325.715.625,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.920.000,00 | 66.887.441,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang dilengkapi Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.178.000,00 | 111.702.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 54.981.772,00 | 15.349.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.038.228,00 | 117.691.524,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Manajemen Rekayasa lalu Lintas | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketersediaan Angkutan Sekolah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.837.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.965.000,00 | 30.672.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN |
| Indikator Hasil | : Persentase ketersedian sarana dan prasarana transportasi angkutan laut |
| Kegiatan | : 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana angkutan laut |
| Sub Kegiatan | : 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.553.734.669,39 | 240.114.160,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 36.600.000,00 | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 9.610.098.736,01 | 1.718.521.004,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.700.000,00 | 13.148.200,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 90.000.000,00 | 29.664.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.15.03.2.12.0005 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 828.494.064,00 | 65.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Organisasi | : 2.15.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| Unit Organisasi | : 2.15.2.11.0.00.01.1 UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI |
| Program | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.243.479,00 | 2.528.799,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.859.540,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 16.024.665,96 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.104.820,00 | 3.104.820,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 309.379.940,00 | 125.388.172,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.360.479,62 | 16.380.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.306.000,00 | 10.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.918.000,00 | 31.239.933,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.834.280,00 | 12.834.280,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.600.000,00 | 39.516.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.780.000,00 | 4.890.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.660.000,00 | 10.900.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| Organisasi | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | |
| Unit Organisasi | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | |
| Program | : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, DOKUMEN LAPORAN KINERJA DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU DAN HASIL PENGENDALIAN EVALUASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.200.000,00 | 11.870.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.700.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.404.566.759,00 | 4.781.913.299,46 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 203.040.000,00 | 285.860.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.625.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.564.000,00 | 47.549.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.934.962,00 | 9.934.962,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.684.380,00 | 4.684.380,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.752.152,00 | 14.752.152,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.118.632,00 | 44.319.732,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.768.854,00 | 52.979.722,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.020.000,00 | 10.001.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 400.278.000,00 | 316.260.652,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 54.654.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.223.712,00 | 25.223.712,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 23.490.135,24 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.948.295,00 | 62.948.295,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.701.546,00 | 57.701.546,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 60.708.817,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.782.081,00 | 16.723.181,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.110.000,00 | 10.110.000,00 | |
| Program | : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : PERSENTASE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | | | |
| Kegiatan | : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.647.299.627,20 | 2.812.000.000,13 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.384.308,00 | 9.787.300,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.908.081,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.110.857,09 | 115.991.888,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 31.138.142,91 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.995.922,44 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | |
| Indikator Hasil | : PERSENTASE LAYANAN SPBE PEMERINTAH DAERAH YANG DITERAPKAN OLEH PERANGKAT DAERAH | | | |
| Kegiatan | : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.028.367,77 | 127.511.028,00 | |
| Kegiatan | : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.095.152,66 | 18.526.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.842.000,00 | 10.546.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.734.800,00 | 53.196.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.551.236.292,69 | 2.591.288.590,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 222.434.224,23 | 5.169.649,99 | |

| | |
|---|---|
| Bidang Urusan | : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |
| Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| Unit Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| Program | : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasiTersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.506.000,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Persentase Layanan Administrasi Keuangan |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.954.595.436,00 | 5.951.465.526,37 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 230.150.000,00 | 149.993.600,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.652.000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi umum kantor | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.401.380,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.441.705,00 | 54.593.240,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.084.713,00 | 11.656.395,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.996.915,00 | 24.357.745,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.020.540,00 | 11.744.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 641.763.000,00 | 167.670.045,29 | |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan BMD | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 70.452.082,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.170.010,00 | 9.106.355,80 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.361.800,00 | 62.157.440,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 95.242.712,00 | |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan BMD | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.697.785,00 | 10.620.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.940.000,00 | 7.270.000,00 | |
| Program | : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif | | | |
| Kegiatan | : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.307.500,00 | 6.450.000,00 | |
| Program | : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan | | | |
| Kegiatan | : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi pendidikan dan pelatihan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.781.000,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
| Indikator Hasil | : Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil |
| Kegiatan | : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi |
| Sub Kegiatan | : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 527.632.975,00 | 83.642.574,00 | |

| | |
|---|---|
| Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| Unit Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0001 UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR |
| Program | : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah |
| Kegiatan | : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi umum kantor |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.988.115,67 | 1.931.400,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
| Indikator Keluaran | : Persentase tingkat pelayanan BLUD |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
| Indikator Hasil | : Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan |
| Kegiatan | : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan |
| Sub Kegiatan | : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 226.061.968,00 | 20.041.824,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| Organisasi | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | |
| Unit Organisasi | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | |
| Program | : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.951.000,00 | 11.878.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.388.506.315,00 | 3.990.124.757,98 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.160.000,00 | 127.470.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.056.000,00 | 22.206.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.290.919,00 | 1.197.263,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.036.592,00 | 3.352.644,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.900.000,00 | 12.950.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.520.052,00 | 10.203.924,10 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 239.396.000,00 | 101.738.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.803.100,00 | 27.803.100,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.203.535,00 | 16.481.605,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.723.392,00 | 1.723.392,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 32.318.480,00 | |
| Kegiatan | : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.205.959,00 | 7.029.459,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.190.000,00 | 4.510.000,00 | |
| Program | : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 168.381.500,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 204.762.057,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 380.316.000,00 | 203.680.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.138.000,00 | 20.927.000,00 | |
| Program | : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.940.000,00 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | |
| Program | : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 143.571.675,00 | 109.004.675,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah yang menerima penghargaan pemuda | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 241.197.629,00 | 207.844.629,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 237.443.105,00 | 207.365.105,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 193.632.920,00 | 100.000,00 | |
| Program | : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 250.000.000,00 | 201.522.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 192.903.000,00 | 99.658.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.357.500,00 | 78.508.690,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 218.171.403,00 | 171.746.885,00 | |
| Kegiatan | : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 293.385.070,00 | 186.811.729,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 21.007.016,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.927.285.544,77 | 5.462.543.161,77 | |
| Program | : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.712.000,00 | 121.256.000,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 307.288.000,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 235.383.110,00 | 100.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | |
| Organisasi | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | |
| Unit Organisasi | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | |
| Program | : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | |
| Indikator Hasil | : PERSENTASE LAJU PEMANFAATAN DATA SEKTORAL | | | |
| Kegiatan | : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.905.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.495.000,00 | 7.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.732.000,00 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | |
| Program | : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | |
| Indikator Hasil | : PERSENTASE PELAKSANAAN KEAMANAN DIGITAL PERANGKAT DAERAH | | | |
| Kegiatan | : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 114.340.000,00 | 58.723.129,60 | |
| Kegiatan | : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.091.896,00 | 5.979.680,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| Organisasi | : 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | |
| Unit Organisasi | : 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | |
| Program | : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya<br>Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya | | | |
| Kegiatan | : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 512.450.000,00 | 55.850.000,00 | |
| Program | : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan | | | |
| Kegiatan | : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 253.266.680,00 | 0,00 | |
| Program | : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola | | | |
| Kegiatan | : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | |
| Organisasi | : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | | | |
| Program | : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Kegiatan | : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.510.094,00 | 47.644.976,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.512.102.637,00 | 2.540.867.264,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.812.000,00 | 106.416.000,00 | |
| Kegiatan | : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Administrasi Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 67.000.684,00 | 57.248.924,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.097.905,00 | 59.819.698,20 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.162.380,00 | 31.974.380,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.100.900,00 | 32.259.750,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 292.842.800,00 | 188.978.600,00 | |
| Kegiatan | : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 53.842.763,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.026.364,00 | 300.026.364,00 | |
| Kegiatan | : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.268.301,00 | 46.491.255,09 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 29.534.920,00 | |
| Program | : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Cakupan Layanan Keperpustakaan | | | |
| Kegiatan | : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan Perpustakaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 314.440.769,00 | 192.309.652,50 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 289.737.770,00 | 38.138.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.766.000,00 | 30.020.500,00 | |
| Kegiatan | : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Gemar Membaca di daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.768.300,00 | 69.939.980,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 298.847.242,00 | 147.411.702,00 | |
| Bidang Urusan | : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | |
| Program | : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Tersusunnya Arsip Yang Sesuai Standar | | | |
| Kegiatan | : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Yang Sesuai Standar | | | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 104.672.661,00 | 76.285.814,00 | |
| Sub Kegiatan | : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.954.500,00 | 30.000.522,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| Organisasi | : 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | | | |
| Unit Organisasi | : 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | | | |
| Program | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Kegiatan | : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan keuangan dinas | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 13.204.389.616,00 | 11.316.428.765,71 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 242.160.000,00 | 151.480.000,00 | |
| Kegiatan | : 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan Administrasi BMD | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.368.000,00 | 54.968.000,00 | |
| Kegiatan | : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.479.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 10.247.384,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.652.473,00 | 10.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.880.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 376.120.000,00 | 111.545.028,58 | |
| Kegiatan | : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase tersedianya BMD | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 64.974.183,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 200.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 64.706.226,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 342.876.095,00 | 342.876.095,00 | |
| Kegiatan | : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 112.704.045,00 | 41.612.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.516.445,00 | 50.516.445,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 279.931.791,00 | |
| Kegiatan | : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan BMD | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.822.515,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.383.857,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | | | |
| Kegiatan | : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.952.734.200,00 | 4.700.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.000.000,00 | 83.213.000,00 | |
| Program | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Produksi Perikanan Budidaya | | | |
| Kegiatan | : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah POKDAKAN yang dibina | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 920.000.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 20.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.266.901,50 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.733.098,50 | 20.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 600.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Produksi Pengolahan Perikanan | | | |
| Kegiatan | : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.972.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.428.000,00 | 2.150.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| Organisasi | : 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | |
| Unit Organisasi | : 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | |
| Program | : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan pemerintahan | | | |
| Kegiatan | : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Perencanaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 12.900.000,00 | |
| Kegiatan | : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.542.183.516,00 | 4.166.749.692,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 0,00 | 3.000.000,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 192.960.000,00 | 147.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.912.556,00 | 10.362.318,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.919.209,00 | 16.280.615,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.134.000,00 | 28.014.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.008.400,00 | 6.086.515,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 343.530.194,38 | 163.000.194,38 | |
| Kegiatan | : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Sarana Dan Prasarana Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.650.000,00 | 500.000,00 | |
| Kegiatan | : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.551.040,00 | 35.037.040,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.049.265,00 | 60.049.265,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.974.000,00 | 27.974.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.014.632,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 68.782.824,00 | |
| Kegiatan | : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.242.530,00 | 5.242.530,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.460.000,00 | 9.420.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 343.797.383,62 | 343.797.383,62 | |
| Program | : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.205.800,00 | 31.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 42.200.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 8.749.000,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 297.038.753,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 283.117.422,00 | 36.400.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.934.032,00 | 0,00 | |
| Program | : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan | | | |
| Kegiatan | : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 637.574.822,00 | 56.140.557,00 | |
| Bidang Urusan | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| Organisasi | : 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | | | |
| Unit Organisasi | : 3.25.3.27.2.09.01.0000 DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | | | |
| Program | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penyediaan Sarana Pertanian | | | |
| Kegiatan | : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 551.358.914,00 | 35.927.880,00 | |
| Program | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian | | | |
| Kegiatan | : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pertanian | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 405.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Kesehatan Hewan Ternak Dan Kesmavet | | | |
| Kegiatan | : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penjaminan kesehatan hewan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelayanan jasa medik veteriner | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 215.000.000,00 | 24.998.500,00 | |
| Program | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Kinerja Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | | |
| Kegiatan | : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.568.516,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.431.484,00 | 0,00 | |
| Program | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani | | | |
| Kegiatan | : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 22.800.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | |
| Program | : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan | | | |
| Kegiatan | : 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.326.860,00 | 784.215,00 | |
| Program | : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik | | | |
| Kegiatan | : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 359.731.418,00 | 98.744.935,80 | |
| Program | : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase kestabilan harga barang | | | |
| Kegiatan | : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari) | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.077.500,00 | 3.800.000,00 | |
| Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.17.2.07.3.31.01.0002 UPT METROLOGI LEGAL | | | |
| Program | : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | | | |
| Kegiatan | : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan administrasi umum kantor | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : 0 | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 2.119.504,00 | |
| Program | : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Peralatan yang terstandardisasi | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UTTP Terkaliberasi | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.363.067,00 | 14.440.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | |
| Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | |
| Unit Organisasi | : 2.17.2.07.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | |
| Program | : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri | | | |
| Kegiatan | : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 466.648.092,77 | 458.063.653,39 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 80.208.600,00 | |
| Program | : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri | | | |
| Kegiatan | : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Data Industri di dalam SINNAS | | | |
| Sub Kegiatan | : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.127.500,00 | 0,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH |
| Organisasi | : 4.01.2.23.2.24.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH |
| Unit Organisasi | : 4.01.2.23.2.24.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH |
| Program | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : - |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 25.493.654.996,00 | 21.959.123.498,85 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 802.896.000,00 | 655.379.360,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>undefined |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.957.300,00 | 77.475.528,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang/ Jasa Rutinitas Perkantoran |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 88.243.160,00 | 136.243.039,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 160.329.297,00 | 189.436.538,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.984.079,00 | 82.269.652,41 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 10.458.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.346.722.529,41 | 1.690.726.446,02 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 197.832.300,00 | 96.742.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.012.024.000,00 | 704.486.985,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.005.830.809,00 | 2.455.592.003,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.806.252,00 | 621.609.833,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 239.982.092,00 | 379.268.768,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.595.228,00 | 89.611.977,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.549.324.640,00 | 1.456.599.014,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 696.904.900,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 410.593.130,00 | 444.735.660,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.350.000,00 | 188.152.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.083.133.988,00 | 1.027.828.138,01 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 177.988.160,00 | 177.988.160,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.675.860,00 | 177.537.270,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 158.000.000,00 | 143.737.020,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.744.000,00 | 102.744.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 151.111.200,00 | 151.111.200,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Penataan Organisasi | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 216.100.820,94 | 140.200.820,94 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 289.044.579,00 | 202.806.779,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 109.839.387,72 | 61.518.988,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 652.900.000,00 | 618.046.011,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 355.190.000,00 | 357.088.869,50 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 440.348.493,00 | 328.375.093,00 | |
| Program | : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 266.465.874,00 | 104.696.571,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 235.897.750,00 | 28.848.000,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.935.864.320,00 | 1.723.308.917,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.100.000.000,00 | 550.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.954.316.902,00 | 2.772.288.846,65 | |
| Kegiatan | : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi Hukum | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 537.867.700,00 | 184.823.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 458.115.572,93 | 637.117.472,93 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 170.563.000,00 | 95.248.100,00 | |
| Program | : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.608.750,00 | 1.375.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 206.244.360,00 | 76.203.000,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.085.000,00 | 19.387.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 500.191.200,00 | 59.995.980,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 88.439.700,00 | 33.042.700,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa<br>undefined | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 221.788.000,00 | 491.493.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 326.708.000,00 | 258.126.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 708.059.105,00 | 373.305.553,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 236.176.560,00 | 146.325.071,00 | |
| Kegiatan | : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bulan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam<br>undefined | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.400.000,00 | 24.890.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.350.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.000.000,00 | 24.748.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 4.02 SEKRETARIAT DPRD | | | |
| Organisasi | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD | | | |
| Unit Organisasi | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD | | | |
| Program | : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan pemerintahan | | | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.648.100,00 | 86.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.579.100,00 | 188.700,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.612.600,00 | 34.496,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.614.800,00 | 86.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.030.000,00 | 86.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.878.000,00 | 4.700.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.373.500,00 | 188.700,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.930.652.610,00 | 5.553.008.781,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 207.000.000,00 | 206.963.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.516.300,00 | 341.000,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.584.456,00 | 87.890.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.640.000,00 | 123.823,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.396.140,00 | 30.396.140,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.844.060,00 | 6.862.859,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 397.924.471,00 | 197.591.968,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.959.172,00 | 26.763.538,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.178.930,00 | 59.390.930,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.200.000,00 | 162.460,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.654.295,00 | 176.953,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.420.000,00 | 62.560.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 204.706.000,00 | 111.566.000,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 71.400,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 147.994.742,00 | 102.859.180,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 217.867.761,00 | 200.961.091,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 147.114.428,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.330.000,00 | 28.660.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.730.000,00 | 39.470.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 197.285.872,00 | 183.062.376,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.045.924.125,00 | 10.388.997.441,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 288.949.000,00 | 530.529.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 626.840.000,00 | 266.173.558,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.300.000,00 | 155.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 510.263.976,00 | 377.092.431,00 | |
| Program | : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | |
| Indikator Hasil | : capaian penetapan perda | | | |
| Kegiatan | : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.147.687.529,00 | 1.385.980.899,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 522.429.499,00 | 41.200,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 124.010.000,00 | 124.010.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 360.878.000,00 | 201.522.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 360.878.000,00 | 135.986.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 155.442.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.011.480.000,00 | 958.547.800,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 420.000.000,00 | 451.200.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 576.012.649,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.280.257.800,00 | 900.471.950,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |
| Indikator Keluaran | : Presentase Pemenuhan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.266.100.000,00 | 228.272.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 355.478.000,00 | 37.937.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.548.603.452,00 | 1.039.295.365,00 | |
| Kegiatan | : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD | | | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.035.721.000,00 | 2.536.878.606,00 | |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.520.099.258,00 | 895.736.588,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |

| | |
|---|---|
| Bidang Urusan | : 5.01 PERENCANAAN |
| Organisasi | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Unit Organisasi | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Program | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.062.462.544,00 | 580.855.126,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.021.000,00 | 25.790.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 7.598.037.462,53 | 6.265.301.128,42 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 257.280.000,00 | 257.280.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.000.000,00 | 8.419.880,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.689.893,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 136.000.000,59 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.316.885,00 | 30.756.083,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.032.902,00 | 84.703.581,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.266.731,01 | 20.552.913,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.176.067,99 | 94.197.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.668.206,00 | 67.252.265,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 642.006.000,00 | 350.440.336,18 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.000.000,00 | 18.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 154.460.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 230.718.530,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 113.116.893,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.238.705,00 | 30.900.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 267.120.256,00 | 86.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 26.999.874,60 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.130.000,00 | 2.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.951.800,00 | 139.149.450,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 129.611.169,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.868.178,00 | 6.560.025,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.420.000,00 | 9.879.620,00 | |
| Program | : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD | | | |
| Kegiatan | : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.880.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 426.101.840,00 | 300.082.760,40 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.972.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.651.113.360,00 | 1.962.842.160,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | :<br>Meningkatnya akses ketersediaan data dan informasi pemerintah daerah<br>Persentase ketersediaan data untuk perencanaan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.284.420,00 | 22.698.600,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | :<br>Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 152.515.580,00 | 286.889.806,00 | |
| Program | : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah yang berkualitas | | | |
| Kegiatan | : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.998.174,00 | 71.865.918,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.080.404,13 | 8.748.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.875.200,00 | 4.450.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.431.000,00 | 14.915.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.630.437,00 | 25.970.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.033.300,00 | 24.145.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.792.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.261.000,00 | 12.695.020,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.410.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.792.000,00 | 15.862.270,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.918.310,00 | 3.715.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.375.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 149.721.800,00 | 18.687.960,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.899.110,00 | 17.003.810,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.675.000,00 | 4.100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.056.810,00 | 10.098.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.834.090,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.580.000,00 | 0,00 | |
| Bidang Urusan | : 5.02 KEUANGAN | | | |
| Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | | | |
| Program | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | | | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.351.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.850.000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 21.598.269.234,99 | 12.342.675.468,45 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 654.648.000,00 | 494.918.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, pelayanan tamu dan perjalanan dinas | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.333.033,00 | 16.786.696,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 8.900.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.731.122,00 | 72.303.170,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.761.300,00 | 67.770.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 374.586.000,00 | 294.164.600,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 168.430.464,00 | 79.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 225.302.445,36 | 225.302.445,36 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.612.994,64 | 72.316.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 145.977.758,00 | 67.719.392,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 174.055.440,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.367.500,00 | 43.947.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.430.000,00 | 29.530.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.094.000,00 | 100.094.000,00 | |
| Program | : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Silpa terhadap APBD | | | |
| Kegiatan | : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelaksanaan koordinasi dan ketersediaan dokumen anggaran daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.557.750,00 | 25.663.100,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.400.000,00 | 24.188.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.557.425,00 | 12.142.970,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.600.000,00 | 8.160.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 772.122.000,00 | 542.072.448,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 729.942.000,00 | 384.189.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 439.645.500,00 | 24.956.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 263.860.000,00 | 68.582.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 181.912.000,00 | 66.776.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 193.000.000,00 | 396.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.605.000,00 | 3.300.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 386.152.000,00 | 146.784.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.384.000,00 | 7.200.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.506.000,00 | 82.828.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 285.864.500,00 | 10.678.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 8.981.012.988,52 | 8.608.707.406,35 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | | | |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 3.096.467.249,00 | 4.598.797.819,00 | |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 102.116.847.410,00 | 98.985.899.576,00 | |
| Kegiatan | : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 924.591.500,00 | 226.520.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 231.457.400,00 | 0,00 | |
| Program | : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan pengelolaan asset daerah | | | |
| Kegiatan | : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Harga yang Disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 689.332.000,00 | 185.031.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 446.788.440,00 | 69.210.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 462.432.000,00 | 57.973.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 215.749.000,00 | 22.906.900,00 | |
| Program | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase tingkat pertumbuhan PAD | | | |
| Kegiatan | : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase dokumen pengelolaan pendapatan daerah yang harus tersusun | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.058.000,00 | 19.260.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 291.975.078,00 | 291.975.078,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 107.879.601,00 | 7.569.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.553.980,00 | 1.905.980,00 | |
| Bidang Urusan | : 5.03 KEPEGAWAIAN | | | |
| Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| Unit Organisasi | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| Program | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perudang-undangan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.650.000,00 | 2.250.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 750.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.728.619.135,98 | 5.617.013.437,90 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.736.000,00 | 185.714.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 639.903,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.210.770,82 | 6.901.250,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.690.776,00 | 4.694.228,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.210.816,00 | 11.995.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.196.000,00 | 10.052.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.916.172,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 331.617.000,00 | 137.696.124,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 43.629.216,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.535.280,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.622.800,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.503.169,20 | 16.503.169,20 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.956.400,00 | 1.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.400.000,00 | 2.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 54.076.700,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.398.283,00 | 11.135.075,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.840.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Jumlah Pemenuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK | | | |
| Kegiatan | : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 278.722.541,00 | 275.168.305,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.448.000,00 | 15.000.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 29.250.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi, Fungsional dan Pelaksana | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 410.155.520,00 | 561.980.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.941.000,00 | 127.101.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Menempuh Pendidikan Lanjutan | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Aparatur Berkinerja Baik | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.154.500,00 | 5.772.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 192.463.911,00 | 71.935.000,00 | |
| Bidang Urusan | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | |
| Program | : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur | | | |
| Kegiatan | : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 944.375.812,00 | 34.953.578,00 | |
| Bidang Urusan | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | |

| | |
|---|---|
| Organisasi | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Unit Organisasi | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| Program | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| Indikator Hasil | : Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan |
| Kegiatan | : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan |
| Indikator Keluaran | : Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 135.142.813,00 | 100.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan |
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.556.800.000,00 | 350.000.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 117.171.800,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Bidang Urusan | : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN |
| Organisasi | : 5.06.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| Unit Organisasi | : 5.06.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH |
| Program | : 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : - |
| Kegiatan | : 5.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 3.750.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.994.120.606,00 | 2.652.310.559,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 112.440.000,00 | 121.480.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.600.000,00 | 6.474.500,00 | |
| Kegiatan | : 5.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.308.000,00 | 9.744.000,00 | |
| Kegiatan | : 5.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.735.707,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.015.164,00 | 11.873.810,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.866.517,00 | 7.578.996,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.147.720,00 | 58.148.774,31 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.378.000,00 | 32.718.190,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 319.862.744,00 | 90.278.200,00 | |
| Kegiatan | : 5.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 32.292.080,00 | 79.614.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 35.547.330,00 | 38.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.360.782,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 57.713.596,00 | 33.049.862,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 94.534.848,00 | 94.534.848,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 5.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.427.162,00 | 61.414.362,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.489.000,00 | 28.682.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 17.319.115,00 | |
| Kegiatan | : 5.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.599.100,00 | 7.531.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.240.000,00 | 5.239.400,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program | : 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase  capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri | | | |
| Kegiatan | : 5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.954.730,00 | 12.970.300,00 | |
| Kegiatan | : 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.02.2.02.0003 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.836.045,00 | 23.122.900,00 | |
| Kegiatan | : 5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | | | |
| Sub Kegiatan | : 5.06.02.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.265.850,00 | 40.338.100,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| Bidang Urusan | : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| Organisasi | : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| Unit Organisasi | : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| Program | : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.513.160,00 | 12.150.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 9.775.438.831,77 | 10.269.703.379,39 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.860.000,00 | 73.860.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.883.100,00 | 9.950.600,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.567.200,00 | 4.150.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 550.000.000,00 | 189.585.660,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.950.437,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.187.578,00 | 54.146.847,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.598.419,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.061.776,00 | 4.979.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.376.740,00 | 9.676.420,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.240.000,00 | 20.325.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 484.299.984,00 | 300.097.295,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 172.163.024,00 | 148.416.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 202.772.518,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.723.591,00 | 53.723.591,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.480.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.828.518,00 | 9.388.204,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 92.526.983,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.160.240,00 | 6.330.135,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.730.000,00 | 1.350.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 119.601.068,10 | 49.724.348,10 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Hasil | : Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaran Pengawasan | | | |
| Kegiatan | : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 400.426.100,00 | 50.021.555,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 119.899.432,00 | 117.648.801,05 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.723.400,00 | 22.078.929,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 112.972.400,00 | 19.977.500,01 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 476.260.000,00 | 56.675.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 354.000.000,00 | 98.340.037,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 283.500.152,13 | 186.215.076,06 | |
| Kegiatan | : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.488.150,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 350.000.000,00 | 145.227.629,89 | |
| Program | : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP | | | |
| Kegiatan | : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.856.351,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 144.227.482,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksanannya Pendampingan dan Asistensi | | | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 185.300.000,00 | 17.114.472,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 126.492.000,00 | 33.006.840,94 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 657.933.042,87 | 289.568.984,32 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.176.567,13 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.882.089,00 | 4.979.300,00 | |

| | |
|---|---|
| BELANJA DAERAH | |
| Urusan Pemerintahan | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : 7.01 KECAMATAN |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Persentase terlaksananya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.239.344,00 | 5.900,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.268.600,00 | 3.268.600,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.937.467.078,00 | 3.699.751.747,11 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 189.156.000,00 | 220.836.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.046.400,00 | 25.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.067.000,00 | 25.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.570.131,00 | 1.323.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 43.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.721.000,00 | 1.347.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.678.000,00 | 43.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.938.600,00 | 34.950,30 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 2.652.480,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.551.399,00 | 2.191.480,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.217.400,00 | 18.961.100,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 1.320.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.423.000,00 | 731.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 25.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.160.000,00 | 12.215.300,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000,00 | 43.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 6.673.001,00 | 33.100.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.065.420,00 | 28.613.803,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.153.320,00 | 57.233.320,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 55.007.527,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.560.000,00 | 2.184.100,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.940.000,00 | 1.340.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.200.000,00 | 24.400,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.402.715.389,00 | 66.239.100,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.614.088,00 | 13.827.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
| Indikator Hasil | : Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| Kegiatan | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.677.900,00 | 6.800.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.749.892,00 | 25.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.096.273,00 | 27.530.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN TAREMPA |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| Indikator Hasil | : Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 34.365.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 626.045.799,00 | |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | | | |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 29.000.000,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SIANTAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.01.01 KELURAHAN TAREMPA | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.481.273,00 | 1.230.116,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.845.458,00 | 4.546.480,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.922.175,00 | 9.659.740,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 255.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.220.000,00 | 6.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.700.000,00 | 725.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.987.152,00 | 25.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.850.858,00 | 12.269.916,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.574.936,00 | 19.719.495,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.360.000,00 | 3.530.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.100.000,00 | 9.000.000,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.482.500,00 | 5.103.824,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.365.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.985.640.444,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN JEMAJA | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN JEMAJA | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 250.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.220.000,00 | 500.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 293.500,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.543.500,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.731.887.865,00 | 4.463.750.646,80 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 178.440.000,00 | 211.970.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.843.000,00 | 1.983.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.842.000,00 | 522.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.480.000,00 | 5.240.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.750.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.104.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.890,00 | 5.000.890,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10.709.895,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.023.773,00 | 8.023.773,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.502.840,00 | 25.385.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.503.124,00 | 9.532.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.500.000,00 | 8.750.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 175.504.000,00 | 87.429.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 35.990.306,00 | 61.650.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 47.892.763,00 | 32.164.583,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.742.388,00 | 9.684.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 79.967.463,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.960.000,00 | 5.970.000,00 | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 595.215.360,00 | 35.755.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 38.643.412,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.562.400,00 | 31.092.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.250.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Kegiatan | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 100.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.270.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.000.000,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN JEMAJA | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN LETUNG | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN JEMAJA | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.02.01 KELURAHAN LETUNG | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.898.000,00 | 4.898.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.020.000,00 | 9.599.680,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 5.271.180,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.200.000,00 | 6.900.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 15.007.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.998.928,00 | 6.998.928,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.820.800,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| Indikator Hasil | : Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
| Indikator Keluaran | : Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.184.700,00 | 88.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 527.450.000,00 | 474.442.000,00 | |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | | | |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PALMATAK | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PALMATAK | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.356.752.672,00 | 3.835.194.709,91 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.720.000,00 | 81.000.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.760.000,00 | 22.800.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.514.285,00 | 6.514.285,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.955.724,00 | 14.643.924,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.306.330,00 | 3.306.330,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.450.000,00 | 12.480.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.852.000,00 | 35.612.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 78.143.234,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.762.882,00 | 25.338.170,20 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.434.000,00 | 43.434.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 103.336.199,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.880.000,00 | 6.580.000,00 | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | | | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan di Kecamatan Palmatak | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 655.776.154,00 | 38.432.000,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 195.125.504,00 | 50.053.485,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Kegiatan | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan/Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang ditargetkan 100% | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.802.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.724.000,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SIANTAN TIMUR |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SIANTAN TIMUR |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : - |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : - |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.750.000,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.500.000,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : - |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.212.936.481,00 | 1.864.834.931,39 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.000.000,00 | 123.910.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.424.000,00 | 3.010.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.042.474,00 | 8.042.474,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.891.400,00 | 3.819.648,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 124.247.419,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.909.992,00 | 23.316.298,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.950.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.977.000,00 | 26.786.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.587.995,99 | 41.971.645,99 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.273.000,00 | 6.672.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 42.169.160,00 | |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | | | |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan Tiap Kecamatan (Kecamatan Siantan Timur) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 581.279.376,01 | 22.823.520,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 181.333.828,00 | 36.090.842,00 | |
| Program | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.704.120,00 | 8.189.120,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.370.000,00 | 27.150.000,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIANTAN SELATAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SIANTAN SELATAN | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ketersediaan Gaji dan tunjangan ASN | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.832.484.073,00 | 2.041.650.344,91 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 93.000.000,00 | 116.640.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.800.000,00 | 29.800.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.439.140,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.990.260,00 | 17.103.870,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.244.373,00 | 32.834.057,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.956.743,00 | 12.780.743,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.799.547,00 | 9.710.109,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.111.400,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.700.000,00 | 8.150.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.760.000,00 | 24.706.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pegadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 68.572.016,00 | 11.400.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 45.433.814,00 | 51.800.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.518.800,00 | 7.042.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 24.218.450,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.938.635,00 | 45.546.704,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.390.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.120.000,00 | 8.190.000,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Des | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 286.655.896,00 | 31.391.900,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 160.880.256,00 | 16.231.900,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.350.000,00 | 3.650.000,00 | |
| Program | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Kegiatan | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.722.280,00 | 211.140,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.816.840,00 | 8.250.000,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN JEMAJA TIMUR | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN JEMAJA TIMUR | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : TERSEDIANYA DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : TERSEDIANYA JUMLAH DOKUMEN DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.832.605,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.761.090,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.854.718,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.412.632,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.854.520,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.839.590,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : TERSEDIANYA GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.579.067.434,00 | 2.341.581.146,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.800.000,00 | 147.050.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.527.023,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.780.096,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : TERSEDIANYA JUMLAH LAPORAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.105.100,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : TERSEDIANYA PAKAIAAN DINAS BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANYA PEGAWAI KANTOR KECAAMATAN JEMAJA TIMUR | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.228.115,90 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : TERSEDIANYA JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DI SEDIAKAN | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.376.163,60 | 15.383.300,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 127.481.486,18 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.576.060,00 | 16.576.060,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.047.005,00 | 9.598.160,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.715.500,00 | 4.539.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.500.000,00 | 16.941.500,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.902.000,00 | 67.350.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KANTOR | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.072.000,00 | 12.072.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 40.144.662,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : TERSEDIANYA JUMLAH KENDARAAN DINAS DAN PEMELIHARAAN PERALATAN MESIN LAINNYA | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.890.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.533.380,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Jemaja Timur) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Jemaja Timur)<br>Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Tersedia nya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 226.877.837,32 | 21.818.208,71 | |
| Program | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : TERLAKSANA NYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : TERLAKSANA NYA KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.600.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : TERSEDIANYA JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 142.147.550,00 | 59.775.000,00 | |
| Program | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : TERLAKASANANYA FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Kegiatan | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : TERSEDIANYA DOKUMEN FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.515.400,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.600.000,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SIANTAN TENGAH | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SIANTAN TENGAH | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan pemerintahan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.690.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.530.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.280.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.624.600,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.649.600,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.720.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.704.547.573,00 | 2.470.983.528,16 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 109.656.000,00 | 125.932.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.472.190,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : PersentaseAdministrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.046.968,00 | 7.046.967,99 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.155.900,00 | 23.099.999,73 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.781.768,00 | 5.167.000,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.994.860,00 | 2.798.580,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.118.430,00 | 4.988.355,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.400.100,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.200.000,00 | 31.148.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 89.920.000,00 | 35.725.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.395.923,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 20.550.426,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.212.830,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.452.200,00 | 26.452.200,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 72.963.305,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.780.000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.370.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.480.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Siantan Tengah) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.050.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Siantan Tengah) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : undefined | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 235.225.000,00 | 20.025.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.252.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Siantan Tengah) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.913.282,00 | 23.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Siantan Tengah) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.026.950,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.362.000,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIANTAN UTARA | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SIANTAN UTARA | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.029.543.898,00 | 2.050.280.088,78 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.680.000,00 | 87.180.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.788.000,00 | 12.586.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.242.888,12 | 7.242.888,12 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.536.275,00 | 21.391.948,15 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.517.500,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.000.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 417.862.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.224.495,00 | 50.224.495,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.193.500,00 | 16.172.910,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 32.652.052,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.436.600,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Siantan Utara) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 387.473.275,88 | 26.750.000,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.878.777,00 | 30.209.470,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Kegiatan | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.350.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN JEMAJA BARAT | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN JEMAJA BARAT | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : Cakupan layanan pemerintahan | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 1.740.909,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.001.000,00 | 1.855.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.090.414,00 | 2.870.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.113.000,00 | 1.870.400,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.965.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.900.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.945.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.196.521.862,00 | 1.664.861.963,63 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.400.000,00 | 128.440.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.380.000,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.380.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.070.000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.076.700,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.461.538,00 | 2.123.376,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.468.480,00 | 16.259.076,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.274.410,00 | 5.274.410,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.000.000,00 | 10.050.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 220.436.000,00 | 110.118.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 34.229.476,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 51.991.747,00 | 4.200.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.371.088,00 | 18.561.764,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 26.393.140,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.058.864,00 | 11.440.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.556.352,00 | 16.556.352,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Hasil | : Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja Barat) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah agenda Kegiatan Pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan<br>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 237.817.751,00 | 46.206.400,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Jemaja Barat) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mengikuti<br>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.455.000,00 | 26.553.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.175.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Jemaja Barat) | | | |
| Kegiatan | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan fasilitasu Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah drsa<br>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.622.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.741.180,00 | 4.200.000,00 | |
| Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KUTE SIANTAN | | | |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KUTE SIANTAN | | | |
| Program | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.370.000,00 | 3.790.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.386.000,00 | 2.270.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.258.000,00 | 3.090.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.930.000,00 | 2.250.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.155.000,00 | 2.570.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.930.000,00 | 2.145.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.090.104.797,09 | 2.712.466.333,51 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 110.409.600,00 | 127.789.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.384.682,00 | 10.534.590,04 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.440.244,00 | 4.567.244,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.960.000,00 | 3.700.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.766.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.520.000,00 | 10.898.000,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.993.878,00 | 75.761.153,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.480.206,00 | 6.600.875,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.934.800,00 | 25.678.680,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.467.650,00 | 12.066.660,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.567.440,00 | 31.300.952,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.592.000,00 | 84.920.732,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.868.995,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 110.089.445,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 169.432.487,91 | 126.107.680,53 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.210.000,00 | 18.168.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 78.895.860,00 | |
| Kegiatan | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.015,00 | 8.286.065,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.470.000,00 | 6.630.000,00 | |
| Program | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.090.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 175.313.096,00 | 42.165.200,00 | |
| Program | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.322.000,00 | 29.786.500,00 | |
| Program | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 84.760.000,00 | 80.340.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.768.000,00 | 5.796.000,00 | |
| Program | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| Indikator Hasil | : - | | | |
| Kegiatan | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.611.600,00 | 5.240.800,00 | |
| Sub Kegiatan | : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.827.800,00 | 22.400.000,00 | |

| | |
|---|---|
| BELANJA DAERAH | |
| Urusan Pemerintahan | : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |
| Bidang Urusan | : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Organisasi | : 1.05.8.01.0.00.02.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Unit Organisasi | : 1.05.8.01.0.00.02.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| Program | : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : Persentase Urusan Pemerintahan terselesaikan |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.045.350.504,00 | 3.977.714.366,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 124.680.000,00 | 138.820.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.428.000,00 | 19.166.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Kegiatan | : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : - |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.955.995,29 | 25.900.320,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.399.730,00 | 13.626.396,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.167.460,00 | 51.311.600,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.677.400,00 | 3.170.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 308.086.000,00 | 156.623.964,00 | |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : - | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 43.338.372,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 118.963.964,16 | 109.700.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.669.599,94 | 174.669.599,94 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.420.732,61 | 19.907.624,06 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.250.000,00 | 1.350.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 38.376.014,00 | |
| Kegiatan | : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Persentase pemeliharaan sarara dan prasarana perkantoran | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.400.000,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.890.000,00 | 0,00 | |
| Program | : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | |
| Indikator Hasil | : indeks kepuasan masyrakat bidang ideologi dan wawasan kebangsaan | | | |
| Kegiatan | : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | |

| | |
|---|---|
| Indikator Keluaran | : Jumlah monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran Kebangsaan<br>Jumlah pelajar yang memperoleh pendidikan/ pemahaman Bela Negara<br>Terbentuknya pengurus Forum Pembauran Kebangsaan<br>Terbentuknya Tim GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas<br>Terlaksananya kegiatan GNRM<br>Terlaksananya kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan<br>Terlaksananya rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan<br>Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan |
| Sub Kegiatan | : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 127.384.626,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 100.000.000,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paskibraka |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.303.983.449,00 | 1.011.979.122,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |
| Indikator Hasil | : rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada |
| Kegiatan | : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat yang memperoleh penguatan pendidikan politik<br>Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan dana hibah<br>Jumlah Pemilih Muda yang memperoleh penguatan pendidikan politik<br>Jumlah pengurus parpol yang memperoleh penguatan pendidikan politik<br>Jumlah Perempuan yang memperoleh penguatan pendidikan politik<br>Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Partai Politik dan Pemerintah Daerah<br>Terlaksananya rapat koordinasi penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik |
| Sub Kegiatan | : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.564.000,00 | 8.000.000,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 419.507.589,00 | 419.507.589,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 60.551.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| Indikator Hasil | : Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kabupaten Kepulauan Anambas<br>indeks kepuasan masyrakat bidang organisasi masyarakat |
| Kegiatan | : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah<br>Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik<br>Terbentuknya tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas<br>Terlaksananya monitoring perkembangan ormas di Kecamatan<br>Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas |
| Sub Kegiatan | : 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| Program | : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |
| Indikator Hasil | : indeks kepuasan masyrakat bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya |
| Kegiatan | : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan/ Peraturan/ pedoman/ rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya<br>Jumlah monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya<br>Terbentuknya pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama<br>Terlaksananya dialog antar umat beragama<br>Terlaksananya kegiatan RAN P4GN<br>Terlaksananya rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama<br>Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama<br>Terselenggaranya kegiatan Sosial Budaya masyarakat |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.013.870,00 | 39.393.944,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.878.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 150.000.000,00 | 80.000.000,00 | |
| Program | : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | |
| Indikator Hasil | : persentase isu kewaspadaan/ konflik sosial yg berhasil ditangani | | | |
| Kegiatan | : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | |
| Indikator Keluaran | : -<br>Jumlah fasilitasi pelak sanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah | | | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | **JUMLAH** | | **DASAR HUKUM** |
| | | **SEBELUM** | **SESUDAH** | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 428.611.520,00 | 326.589.247,00 | |

| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 158.378.359.422,00 | 2.722.061.797,29 | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 157.878.359.422,00 | 2.222.061.797,29 | |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati

ANENG

Lampiran IV
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025

**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 61.271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.271.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 500 Orang/bulan | 181.376.369.459,00 | 174.133.680.779,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.376.369.459,00 | 174.133.680.779,82 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 3 | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3 Dokumen | 1.600.000.000,00 | 1.599.767.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000.000,00 | 1.599.767.280,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 5 | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 150.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Operasional Kantor | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 200.000.000,00 | 148.768.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 148.768.250,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 271.033.971,00 | 276.530.374,00 | 731.504.491,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.538.462,00 | 289.030.374,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 8 | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 111.800.000,00 | 111.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.800.000,00 | 111.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 9 | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 324.882.326,00 | 306.882.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.882.326,00 | 306.882.326,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 10 | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 11 | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 444.430.000,00 | 186.004.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.430.000,00 | 186.004.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 305.664.911,78 | 201.803.411,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.664.911,78 | 201.803.411,78 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 14 | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 188.774.937,00 | 188.774.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.774.937,00 | 188.774.937,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 15 | 1.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 90.300.000,00 | 90.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.300.000,00 | 90.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 16 | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 3.081.672.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081.672.450,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>- |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 1 Dokentasi | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 316.027.602,00 | 315.967.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.027.602,00 | 315.967.602,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 18 | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 164.061.756,00 | 164.061.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.061.756,00 | 164.061.756,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 19 | 1.01.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 20 | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 193.739.600,00 | 48.939.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.739.600,00 | 48.939.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Tersedianya pengelolaan pendidikan dasar | 1182 Ruang /Sekolah/Unit/Buah/Set/ Siswa/Orang/Tahun | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 3 Ruang | 437.670.525,20 | 0,00 | 158.107.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.778.326,20 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 22 | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 3 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 23 | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 24 | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 3 Ruang | 0,00 | 72.068.000,00 | 0,00 | 148.382.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.450.781,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 25 | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 9 Unit | 1.680.123.009,00 | 224.610.000,00 | 1.510.196.739,97 | 3.300.146.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190.319.748,97 | 3.524.756.420,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 26 | 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit | 56.300.000,00 | 0,00 | 499.856.835,40 | 324.641.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.156.835,40 | 324.641.344,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 27 | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 10 Ruang | 83.213.500,00 | 53.652.866,98 | 199.544.970,10 | 255.121.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.758.470,10 | 308.774.599,98 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 28 | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | 143.953.000,00 | 0,00 | 374.621.410,25 | 321.544.970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.574.410,25 | 321.544.970,10 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 29 | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | 10 Unit | 136.410.370,00 | 64.310.000,00 | 598.104.558,22 | 2.185.865.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.514.928,22 | 2.250.175.532,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 30 | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 5 Paket | 278.498.146,00 | 267.898.146,00 | 1.789.481.082,00 | 1.903.346.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067.979.228,00 | 2.171.244.423,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 31 | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 17 Peserta Didik | 199.774.705,00 | 233.666.033,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.774.705,00 | 233.666.033,43 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 32 | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 10 Orang | 171.085.900,00 | 112.740.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.085.900,00 | 112.740.260,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 33 | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 100 Orang | 379.218.703,00 | 390.284.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.218.703,00 | 390.284.380,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 34 | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 68 Satuan Pendidikan | 3.300.084,00 | 16.500.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.084,00 | 16.500.084,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 35 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 68 Satuan Pendidikan | 5.279.444.880,00 | 5.599.444.880,00 | 2.312.362.120,00 | 2.312.362.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.591.807.000,00 | 7.911.807.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 36 | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 30 Orang | 7.310.000,00 | 60.533.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310.000,00 | 60.533.220,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 37 | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 2 Konten Digital | 6.498.500,00 | 6.498.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.498.500,00 | 6.498.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 38 | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 20 Orang | 7.310.000,00 | 150.000.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310.000,00 | 150.000.000,02 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 39 | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | 267.876.780,00 | 157.337.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.876.780,00 | 157.337.860,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 40 | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | 243.566.145,00 | 162.733.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.566.145,00 | 162.733.145,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 41 | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 20 Komunitas | 6.429.923,00 | 100.022.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.429.923,00 | 100.022.228,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 42 | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan | 182.352.000,00 | 101.384.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.352.000,00 | 101.384.940,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 43 | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 5 Paket | 489.404.320,00 | 2.331.197.665,00 | 10.374.016,00 | 10.374.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.778.336,00 | 2.341.571.681,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 44 | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.683.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.683.943,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 45 | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 25 Orang | 247.905.000,00 | 199.332.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.905.000,00 | 199.332.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 46 | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 9 Ruang | 236.212.500,00 | 73.750.000,00 | 1.104.234.468,42 | 3.110.191.121,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.446.968,42 | 3.183.941.121,10 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 47 | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 404 Peserta Didik | 3.982.339.900,00 | 2.472.624.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.339.900,00 | 2.472.624.013,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 48 | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 11 Paket | 499.300.000,00 | 499.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.300.000,00 | 499.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Tersedianya pengelolaan pendidikan dasar | 226 Ruang/ Sekolah/Unit | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 3 Ruang | 170.000.000,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | 455.546.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 685.546.758,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 50 | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 3 Ruang | 0,00 | 54.918.000,00 | 0,00 | 160.837.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.755.421,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 51 | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 3 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 52 | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 3 Ruang | 108.400.000,00 | 0,00 | 391.600.000,00 | 1.008.543.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 1.008.543.627,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 53 | 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.614.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543.614.915,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 54 | 1.01.02.2.02.0011 | Pembangunan Kantin Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | 6 Unit | 125.250.000,00 | 14.025.000,00 | 199.677.558,12 | 296.877.558,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.927.558,12 | 310.902.558,12 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 55 | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 5 Unit | 682.106.090,01 | 838.514.642,14 | 1.210.116.050,63 | 1.934.960.742,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892.222.140,64 | 2.773.475.384,45 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 56 | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang | 72.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 774.518.715,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400.000,00 | 774.518.715,55 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 57 | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 30 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 58 | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 8 Unit | 489.584.800,00 | 22.800.000,00 | 483.011.372,10 | 1.865.196.632,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.596.172,10 | 1.887.996.632,10 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 59 | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 27 Paket | 849.800.000,00 | 638.900.000,00 | 793.170.588,00 | 793.170.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.970.588,00 | 1.432.070.588,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 60 | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 985 Peserta Didik | 1.890.800.800,00 | 2.113.577.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.800.800,00 | 2.113.577.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 61 | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 20 Peserta Didik | 199.211.935,00 | 135.624.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.211.935,00 | 135.624.692,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 62 | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 10 Orang | 197.354.910,00 | 144.437.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.354.910,00 | 144.437.910,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 63 | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 30 Orang | 374.621.081,00 | 289.583.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.621.081,00 | 289.583.651,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 64 | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 27 Satuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 65 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 27 Satuan Pendidikan | 3.221.477.500,00 | 2.927.727.500,00 | 1.378.002.500,00 | 1.378.002.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.599.480.000,00 | 4.305.730.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 66 | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 20 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 67 | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 2 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 68 | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 20 Orang | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>- |
| 69 | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | 285.583.311,00 | 194.046.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.583.311,00 | 194.046.311,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 70 | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | 226.042.290,00 | 140.862.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.042.290,00 | 140.862.290,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 71 | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 20 Komunitas | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 72 | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 35 Satuan Pendidikan | 208.698.000,00 | 129.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.698.000,00 | 129.114.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 73 | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 3 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 74 | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 27 Paket | 229.626.960,00 | 1.901.716.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.626.960,00 | 1.901.716.435,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 75 | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 20 Ruang | 133.400.000,00 | 0,00 | 199.544.970,33 | 557.944.970,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.944.970,33 | 557.944.970,33 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 76 | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 250 Paket | 398.600.000,00 | 398.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.600.000,00 | 398.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Tersedianya Pengelolaan PAUD | 23 Unit/Ruang/Lembaga | | | | | | | | | | | |
| 77 | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 8 Unit | 859.110.749,00 | 1.277.423.128,00 | 795.691.511,20 | 2.157.310.374,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654.802.260,20 | 3.434.733.502,27 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 78 | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 5 Paket | 1.178.831,00 | 1.178.831,00 | 482.922.977,00 | 387.049.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.101.808,00 | 388.228.684,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 79 | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 2 Paket | 653.845.313,20 | 612.045.313,20 | 289.589.772,00 | 396.063.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.435.085,20 | 1.008.108.655,20 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 80 | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1800 Peserta Didik | 1.958.800.000,00 | 1.958.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.800.000,00 | 1.958.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 81 | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 10 Orang | 0,00 | 374.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.966,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 82 | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 20 Orang | 27.316.000,00 | 23.661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.316.000,00 | 23.661.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 83 | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 68 Satuan Pendidikan | 98.904.560,00 | 109.434.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.904.560,00 | 109.434.560,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 84 | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 68 Satuan Pendidikan | 120.000.000,00 | 71.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 71.850.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 85 | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 86 | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 87 | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 6 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 88 | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 89 | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 1780 Paket | 1.131.359.210,00 | 1.869.598.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.359.210,00 | 1.869.598.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 90 | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 10 Paket | 369.385.720,00 | 369.385.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.385.720,00 | 369.385.720,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 91 | 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 68 Satuan Pendidikan | 569.820.469,00 | 904.394.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.820.469,00 | 904.394.985,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 92 | 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 10 Ruang | 800.000.000,00 | 1.054.075.693,40 | 0,00 | 424.866.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 | 1.478.942.285,40 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan | 26 Lembaga /Orang | | | | | | | | | | | |
| 93 | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 120 Peserta Didik | 314.480.000,00 | 514.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.480.000,00 | 514.480.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 94 | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 4 Satuan Pendidikan | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.03.2.01 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kurikulum | 123 Kurikulum/Lembaga | | | | | | | | | | | |
| 95 | 1.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | 95 Dokumen | 394.633.000,00 | 284.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.633.000,00 | 284.971.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 96 | 1.01.03.2.01.0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | 231 Buku | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 97 | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | 95 Orang | 395.674.000,00 | 285.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.674.000,00 | 285.094.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Tersedianya Kegiatan Pengelolaan pendidikan dan sarana prasarana penunjang lainnya | 1295 Ruang /Sekolah/Unit | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 98 | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Laporan | 200.000.000,00 | 133.403.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 133.403.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.05.2.01 | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Tersedianya Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat | 1 Sekolah | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.01.05.2.02 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Tersedianya Penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat | 1 Sekolah | | | | | | | | | | | |
| 100 | 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 10 Dokumen | 124.950.000,00 | 17.189.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.950.000,00 | 17.189.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 101 | 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 20 Dokumen | 45.760.500,00 | 2.720.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760.500,00 | 2.720.250,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 102 | 2.19.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota | 5 Dokumen | 143.571.675,00 | 109.004.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.571.675,00 | 109.004.675,00 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 103 | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | 20 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 104 | 2.19.02.2.01.0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 105 | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 60 Orang | 241.197.629,00 | 207.844.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.197.629,00 | 207.844.629,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 106 | 2.19.02.2.01.0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | 5 Unit | 237.443.105,00 | 207.365.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.443.105,00 | 207.365.105,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 107 | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 1 Organisasi | 193.632.920,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.632.920,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 108 | 2.19.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 109 | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 5 Kegiatan | 250.000.000,00 | 201.522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 201.522.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 110 | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | 100 Orang | 192.903.000,00 | 99.658.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.903.000,00 | 99.658.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 111 | 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | 80 Orang | 125.357.500,00 | 78.508.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.357.500,00 | 78.508.690,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 112 | 2.19.03.2.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | 80 Orang | 218.171.403,00 | 171.746.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.171.403,00 | 171.746.885,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 113 | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 293.385.070,00 | 186.811.729,00 | 0,00 | 21.007.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.385.070,00 | 207.818.745,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 114 | 2.19.03.2.05.0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 3 Unit | 6.927.285.544,77 | 5.462.543.161,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.927.285.544,77 | 5.462.543.161,77 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| | 2.19.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 115 | 2.19.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 116 | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 1 Organisasi | 350.000.000,00 | 121.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 121.356.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 117 | 2.19.04.2.01.0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 118 | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 119 | 2.19.04.2.01.0007 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 120 | 2.19.04.2.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | 1 Organisasi | 235.383.110,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.383.110,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 121 | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 53.940.213,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.940.213,93 | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 122 | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Orang/bulan | 95.045.333.035,30 | 88.264.371.619,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.045.333.035,30 | 88.264.371.619,35 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 123 | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 1.308.300.000,00 | 1.463.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308.300.000,00 | 1.463.059.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 124 | 1.02.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 14 Laporan | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 125 | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10.545.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.545.700,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 126 | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 33.375.480,00 | 7.818.000,00 | 132.031.849,15 | 112.271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.407.329,15 | 120.089.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 127 | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 13.028.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.028.636,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 128 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 153.624.300,00 | 109.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.624.300,00 | 109.860.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 129 | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 74.846.753,88 | 51.307.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.846.753,88 | 51.307.980,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 130 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 311.313.000,00 | 155.656.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.313.000,00 | 155.656.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 131 | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 119.186.380,33 | 29.996.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.186.380,33 | 29.996.050,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 132 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 104.488.940,00 | 104.488.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.488.940,00 | 104.488.940,00 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 133 | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 30.730.000,00 | 8.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.730.000,00 | 8.080.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 134 | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 8.735.742.526,00 | 5.450.909.761,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.735.742.526,00 | 5.450.909.761,04 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan opemerintahan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 135 | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 41.834.600,00 | 52.853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.834.600,00 | 52.853.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 136 | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 137 | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 298.994.333,92 | 298.994.333,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.994.333,92 | 298.994.333,92 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 138 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 49.522.800,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.522.800,00 | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan kesehatan<br>Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>100 %<br>183/100.000 KH<br>76,25 Persen<br>83,3 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 139 | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 13 Unit | 1.998.034.469,00 | 1.034.767.994,00 | 17.033.398.041,00 | 19.148.153.055,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.031.432.510,00 | 20.182.921.049,10 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok |
| 140 | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 1 Unit | 303.428.907,00 | 21.055.013,91 | 3.226.336.852,60 | 3.226.336.852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.529.765.759,60 | 3.247.391.866,51 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 141 | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | 14 Unit | 669.614.000,00 | 169.613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.614.000,00 | 169.613.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 142 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 14 Unit | 600.000.000,00 | 827.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 827.525.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 143 | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket | 13.998.178.622,00 | 14.713.592.194,44 | 34.075.930,00 | 10.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.032.254.552,00 | 14.724.185.194,44 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 144 | 1.02.02.2.01.0025 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 3 0 | 3.599.337.000,00 | 3.599.337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599.337.000,00 | 3.599.337.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 145 | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 13 Paket | 98.486.000,00 | 140.616.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.486.000,00 | 140.616.500,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | |
| 146 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 192.600.000,00 | 192.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.600.000,00 | 192.600.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 147 | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 32369 Orang | 100.000.000,00 | 146.101.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 146.101.530,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 148 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 129.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 129.160.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 149 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 48.171.200,00 | 48.171.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.171.200,00 | 48.171.200,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 150 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 310.013.500,00 | 252.249.997,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.013.500,00 | 252.249.997,78 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 151 | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 137.042.000,00 | 137.042.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.042.000,00 | 137.042.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 152 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 10 Dokumen | 79.140.000,00 | 79.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.140.000,00 | 79.140.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 153 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 10 Dokumen | 303.774.000,00 | 264.864.000,00 | 76.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.774.000,00 | 264.864.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 154 | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | 9.133.131.125,22 | 10.503.463.469,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.133.131.125,22 | 10.503.463.469,23 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 155 | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 15 Paket | 27.700.000,00 | 27.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700.000,00 | 27.700.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 156 | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen | 67.268.074,13 | 26.239.350,00 | 0,00 | 20.203.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.268.074,13 | 46.443.273,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 157 | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1 Dokumen | 162.417.750,00 | 162.417.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.417.750,00 | 162.417.750,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 158 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 5 Dokumen | 68.665.000,00 | 68.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.665.000,00 | 68.665.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 159 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 243.607.000,00 | 243.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.607.000,00 | 243.607.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | | | | | | | | | | | |
| 160 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 1 0 | 9.268.108,00 | 9.268.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.268.108,00 | 9.268.108,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | -<br>Persentase sdmk yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan | 0<br>90 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDMK yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan | 90 % | | | | | | | | | | | |
| 161 | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 1 Orang | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 162 | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 1 Laporan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| 163 | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 1 Laporan | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| 164 | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 1 Dokumen | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 165 | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Laporan | 343.000.000,00 | 343.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.000.000,00 | 343.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| 166 | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 1 Laporan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| 167 | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| 168 | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 1 Organisasi | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah IMP (Institusi masyarakat pedesaan) yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 169 | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1 Orang | 972.200.000,00 | 432.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.200.000,00 | 432.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Peserta KB aktif modern | 35,5 % | | | | | | | | | | | |
| 170 | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 1 Laporan | 11.660.000,00 | 11.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660.000,00 | 11.660.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| 171 | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1 Orang | 162.550.000,00 | 162.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.550.000,00 | 162.550.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| 172 | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 1 Laporan | 19.332.000,00 | 19.332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.332.000,00 | 19.332.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 173 | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Kampung | 145.600.000,00 | 145.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.600.000,00 | 145.600.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 174 | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 1 Unit | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 175 | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1 laporan | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| 176 | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 1 laporan | 208.800.000,00 | 208.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.800.000,00 | 208.800.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB |
| | | RSUD Tarempa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 177 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 466.621.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.621.552,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 178 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 390.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000.000,00 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 179 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 1 Unit | 0,00 | 87.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| | | RSUD Jemaja | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 180 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 257.904.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.904.224,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 181 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 235.464.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.464.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | | RSUD Palmatak | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 182 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 245.139.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.139.739,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 183 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 256.826.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.826.000,00 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | | Puskesmas Siantan Tengah | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 184 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 505.411.138,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.411.138,75 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah<br>undefined | 100 %<br>undefined<br>undefined | | | | | | | | | | | |
| 185 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 45.901.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.901.870,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | | Puskesmas Letung | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 186 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 32.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.570.000,00 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 187 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 0,00 | 28.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.420.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 188 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 0,00 | 19.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.040.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 189 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 0,00 | 21.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.280.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 190 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 0,00 | 59.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 191 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 0,00 | 25.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.870.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 192 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 0,00 | 28.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.560.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | Puskesmas Jemaja Timur | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 193 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 26.479.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.479.600,00 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | | Puskesmas Palmatak | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 194 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 90.822.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.822.298,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 195 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 62.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400.000,00 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | | Puskesmas Tarempa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 196 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 55.626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.626.000,00 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | | Puskesmas Siantan Selatan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 197 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 20.000.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.245,00 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | | Puskesmas Siantan Timur | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 198 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 44.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.785.000,00 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | | Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 199 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 99.591.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.591.208,00 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| | | Puskesmas Jemaja Barat | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 200 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 0,00 | 133.624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.624.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok |
| | | Puskesmas Siantan Utara | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 201 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 5.699.829,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.699.829,04 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 202 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 0,00 | 113.528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.528.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok |
| | | Puskesmas Kute Siantan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 203 | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 204 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 29.036.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.036.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | RSUD Tarempa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 205 | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 206 | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 26.177.596,20 | 120.000.000,00 | 4.043.896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 30.221.492,70 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 207 | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 208 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 266.621.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.621.552,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 209 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 210 | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 211 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 293.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.700.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 212 | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 33.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 33.925.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 213 | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 214 | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 222.000.000,00 | 222.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000.000,00 | 222.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 215 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2.858.235.100,00 | 4.137.052.374,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.058.235.100,00 | 4.337.052.374,00 | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan dari BLUD |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 216 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 1 Unit | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | Puskesmas Siantan Timur | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 217 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 213.164.000,00 | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.164.000,00 | 140.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 218 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 44.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.785.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 219 | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 20.240.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.240.000,00 | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 220 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 303.567.163,00 | 334.567.163,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.567.163,00 | 334.567.163,00 | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan dari BLUD |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | -<br>Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 0<br>100 %<br>76,25 %<br>76,25<br>Persen<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 221 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 97.100.000,00 | 97.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.100.000,00 | 97.100.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 222 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 223 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 1 Orang | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 224 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1 Orang | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 225 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 153.205.000,00 | 153.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.205.000,00 | 153.205.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 226 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 227 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 228 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 12.335.000,00 | 12.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.335.000,00 | 12.335.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 229 | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 230 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 85.565.000,00 | 85.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.565.000,00 | 85.565.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 231 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 85.498.000,00 | 85.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.498.000,00 | 85.498.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 232 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 233 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 34.098.000,00 | 34.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.098.000,00 | 34.098.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 234 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 1.794.000,00 | 1.794.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794.000,00 | 1.794.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 235 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 236 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 11.856.000,00 | 11.856.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.856.000,00 | 11.856.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 237 | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.408.220,00 | 1.408.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408.220,00 | 1.408.220,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 238 | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 7.928.140,00 | 7.928.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.928.140,00 | 7.928.140,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 239 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 8.228.000,00 | 8.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.228.000,00 | 8.228.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 240 | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 241 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 242 | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 10.851.200,00 | 10.851.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.851.200,00 | 10.851.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 243 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 99.591.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.591.208,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 244 | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 245 | 1.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 10.490.000,00 | 10.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.490.000,00 | 10.490.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | Puskesmas Jemaja Barat | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | | |
| 246 | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.894.000,00 | 5.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894.000,00 | 5.894.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | |
| 247 | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 5.989.500,00 | 5.989.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.989.500,00 | 5.989.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | |
| 248 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 42.883.060,00 | 21.848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.883.060,00 | 21.848.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | |
| 249 | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | |
| 250 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 19.997.053,00 | 11.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.997.053,00 | 11.595.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | | |
| 251 | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 10.054.987,00 | 10.054.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.054.987,00 | 10.054.987,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 50.010.000,00 | 23.358.463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.010.000,00 | 23.358.463,50 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 253 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 38.425.000,00 | 38.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.425.000,00 | 38.425.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 254 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 255 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 1 Orang | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 256 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1 Orang | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 257 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 101.705.000,00 | 101.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.705.000,00 | 101.705.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 258 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 259 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 260 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 261 | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 262 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 263 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 112.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.024.000,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 264 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 265 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 266 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 267 | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 268 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 12.678.800,00 | 12.678.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.678.800,00 | 12.678.800,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | Puskesmas Siantan Utara | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 269 | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.222.325,00 | 1.182.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.325,00 | 1.182.572,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 270 | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 7.423.254,00 | 11.681.085,00 | 14.832.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.681.085,00 | 22.255.921,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 271 | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 7.680.011,00 | 6.341.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680.011,00 | 6.341.831,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 272 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 30.100.000,00 | 15.097.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100.000,00 | 15.097.411,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 273 | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 2.500.000,00 | 2.499.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.499.510,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 274 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 24.074.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 24.074.748,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 275 | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 32.275.940,00 | 28.542.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.275.940,00 | 28.542.239,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 276 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 2.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 277 | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 3.962.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.962.700,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 278 | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 279 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 74.800.000,00 | 74.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.800.000,00 | 74.800.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 280 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 281 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1 Orang | 14.040.000,00 | 14.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.040.000,00 | 14.040.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 282 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 72.231.000,00 | 72.231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.231.000,00 | 72.231.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 283 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 284 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 285 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 286 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 63.340.000,00 | 63.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.340.000,00 | 63.340.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 287 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 97.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.328.000,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 288 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 289 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 290 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 11.880.000,00 | 11.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880.000,00 | 11.880.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 291 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 5.735.000,00 | 5.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.735.000,00 | 5.735.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | Puskesmas Kute Siantan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 292 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 20.000.000,00 | 16.964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 16.964.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 293 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 294 | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25<br>Persen<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM<br>Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 %<br>100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 295 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 82.720.000,00 | 82.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.720.000,00 | 82.720.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 296 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 297 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 1 Orang | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 298 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1 Orang | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 299 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 98.045.000,00 | 111.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.045.000,00 | 111.905.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 300 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 301 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 10.560.000,00 | 10.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560.000,00 | 10.560.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 302 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 303 | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 304 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 31.670.000,00 | 31.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.670.000,00 | 31.670.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 305 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 338.856.800,00 | 338.856.800,00 | 19.392.000,00 | 19.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.248.800,00 | 358.248.800,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP |
| 306 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 307 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 308 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 309 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 310 | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen | 53.840.000,00 | 39.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.840.000,00 | 39.980.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah | 98,4 % | | | | | | | | | | | |
| 311 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1 Dokumen | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 312 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | RSUD Jemaja | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 313 | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 314 | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 315 | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 18.748.984,00 | 18.748.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.748.984,00 | 18.748.984,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 316 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 225.188.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.188.224,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 317 | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 318 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 50.100.000,00 | 25.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100.000,00 | 25.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 319 | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 21.692.901,00 | 36.646.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.692.901,00 | 36.646.401,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 320 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 321 | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 322 | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 44.700.000,00 | 6.566.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700.000,00 | 6.566.100,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 323 | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 324 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 275.000.000,00 | 300.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan dari BLUD |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 325 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 1 Unit | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | RSUD Palmatak | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 326 | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.577.864,00 | 6.577.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577.864,00 | 6.577.864,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 327 | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.489.137,27 | 0,00 | 118.510.862,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 328 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 270.289.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.289.739,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 329 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 330 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 231.676.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.676.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 331 | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 33.024.000,00 | 33.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.024.000,00 | 33.024.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 332 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 2.100.000.000,00 | 2.170.000.000,00 | 300.000.000,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000.000,00 | 2.400.000.000,00 | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan dari BLUD |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi saranan dan prasarananya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 333 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 1 Unit | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | Puskesmas Siantan Tengah | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 334 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 355.787.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.787.133,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah<br>undefined | 100 %<br>undefined<br>undefined | | | | | | | | | | | |
| 335 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 45.901.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.901.870,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 336 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 271.424.960,00 | 271.424.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.424.960,00 | 271.424.960,00 | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan dari BLUD |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 337 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 95.400.000,00 | 95.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.400.000,00 | 95.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 338 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 339 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 1 Orang | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 340 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1 Orang | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 341 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 161.956.000,00 | 161.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.956.000,00 | 161.956.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 342 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 343 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 12.570.000,00 | 12.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.570.000,00 | 12.570.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 344 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 25.510.000,00 | 25.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.510.000,00 | 25.510.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 345 | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 346 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 74.199.000,00 | 74.199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.199.000,00 | 74.199.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 347 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 164.082.000,00 | 164.082.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.082.000,00 | 164.082.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 348 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 349 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 4.325.000,00 | 4.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.325.000,00 | 4.325.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 350 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 351 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 352 | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen | 22.785.000,00 | 22.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.785.000,00 | 22.785.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 353 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 9.771.694,00 | 9.771.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.771.694,00 | 9.771.694,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | Puskesmas Letung | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 354 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 57.991.116,00 | 57.991.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.991.116,00 | 57.991.116,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 355 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 37.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.570.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 356 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 459.212.358,00 | 559.003.723,00 | 80.787.642,00 | 215.676.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000.000,00 | 774.680.268,00 | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan dari BLUD |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 357 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 43.140.000,00 | 43.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.140.000,00 | 43.140.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 358 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 24.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.980.000,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 359 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 1 Orang | 15.360.000,00 | 15.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.360.000,00 | 15.360.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 360 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1 Orang | 10.320.000,00 | 10.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.320.000,00 | 10.320.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 361 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 206.270.000,00 | 193.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.270.000,00 | 193.255.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 362 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 46.800.000,00 | 23.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800.000,00 | 23.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 363 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 12.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.040.000,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 364 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 16.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 365 | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 366 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 39.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.660.000,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 367 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 63.767.000,00 | 63.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.767.000,00 | 63.767.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 368 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | 5.198.000,00 | 1.783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198.000,00 | 1.783.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 369 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 24.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.880.000,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 370 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 5.160.000,00 | 1.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160.000,00 | 1.720.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 371 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 20.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.640.000,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 372 | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen | 45.240.000,00 | 45.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.240.000,00 | 45.240.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 373 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | Puskesmas Jemaja Timur | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 374 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 69.148.000,00 | 69.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.148.000,00 | 69.148.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 375 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 26.479.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.479.600,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 376 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 178.404.410,00 | 198.404.410,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.404.410,00 | 248.404.410,00 | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan dari BLUD |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 377 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 38.880.000,00 | 38.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.880.000,00 | 38.880.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 378 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 29.040.000,00 | 29.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.040.000,00 | 29.040.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 379 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 1 Orang | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 380 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1 Orang | 16.830.000,00 | 16.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.830.000,00 | 16.830.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 381 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 98.770.000,00 | 98.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.770.000,00 | 98.770.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 382 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 383 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 384 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 385 | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | 7.040.000,00 | 7.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.040.000,00 | 7.040.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 386 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 387 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 133.756.000,00 | 133.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.756.000,00 | 133.756.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 388 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 389 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 390 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 391 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 10.890.000,00 | 10.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.890.000,00 | 10.890.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 392 | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen | 21.120.000,00 | 21.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.120.000,00 | 21.120.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | - | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 393 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 7.349.000,00 | 7.349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.349.000,00 | 7.349.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | Puskesmas Palmatak | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 394 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 90.822.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.822.298,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 395 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 62.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 396 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 785.700.000,00 | 1.149.700.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815.700.000,00 | 1.149.700.000,00 | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan dari BLUD |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 397 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 105.600.000,00 | 105.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.600.000,00 | 105.600.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 398 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 5.490.000,00 | 5.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490.000,00 | 5.490.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 399 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 1 Orang | 5.320.000,00 | 5.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.320.000,00 | 5.320.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 400 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1 Orang | 11.970.000,00 | 11.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.970.000,00 | 11.970.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 401 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 136.835.000,00 | 136.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.835.000,00 | 136.835.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 402 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 403 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 404 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 12.140.000,00 | 12.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.140.000,00 | 12.140.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 405 | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 406 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 88.910.000,00 | 88.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.910.000,00 | 88.910.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 407 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 111.520.000,00 | 111.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.520.000,00 | 111.520.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 408 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 409 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 4.245.000,00 | 4.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245.000,00 | 4.245.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 410 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 3.271.000,00 | 3.271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271.000,00 | 3.271.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 411 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 412 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 5.192.886,00 | 5.192.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.192.886,00 | 5.192.886,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | Puskesmas Tarempa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 413 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 38.888.000,00 | 38.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.888.000,00 | 38.888.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 414 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 55.626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.626.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 415 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 952.000.000,00 | 1.123.616.027,00 | 210.391.059,00 | 125.909.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162.391.059,00 | 1.249.525.447,00 | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan dari BLUD |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 416 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 66.250.000,00 | 66.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.250.000,00 | 66.250.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 417 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 75.400.000,00 | 75.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.400.000,00 | 75.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 418 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 1 Orang | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 419 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1 Orang | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 420 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 120.925.000,00 | 120.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.925.000,00 | 120.925.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 421 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 422 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 423 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 12.750.000,00 | 12.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750.000,00 | 12.750.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 424 | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 425 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 54.500.000,00 | 54.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500.000,00 | 54.500.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 426 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 145.700.000,00 | 145.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.700.000,00 | 145.700.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 427 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 428 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 22.630.000,00 | 22.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630.000,00 | 22.630.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 429 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 430 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 431 | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen | 70.450.000,00 | 70.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.450.000,00 | 70.450.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 432 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 15.604.820,00 | 15.604.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.604.820,00 | 15.604.820,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | Puskesmas Siantan Selatan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 433 | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 234.689.765,44 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.689.765,44 | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 434 | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 435 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 20.000.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.245,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan Pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 436 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 325.013.164,00 | 325.013.164,00 | 36.921.036,00 | 36.921.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.934.200,00 | 361.934.200,00 | Pendapatan dari BLUD<br>Pendapatan dari BLUD |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan<br>Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi<br>Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat | 100 %<br>76,25 %<br>83,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat<br>Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)<br>Persentase Penyelenggaraa n Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah<br>Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM | 55 %<br>98 %<br>98,4 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 437 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 70.647.000,00 | 70.647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.647.000,00 | 70.647.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 438 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1 Orang | 72.750.000,00 | 72.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.750.000,00 | 72.750.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 439 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 1 Orang | 28.290.000,00 | 28.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.290.000,00 | 28.290.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 440 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 1 Orang | 16.830.000,00 | 16.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.830.000,00 | 16.830.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 441 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 207.110.000,00 | 207.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.110.000,00 | 207.110.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 442 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 443 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 20.790.000,00 | 20.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790.000,00 | 20.790.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 444 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen | 14.985.000,00 | 14.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.985.000,00 | 14.985.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 445 | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 1 Orang | 12.780.000,00 | 12.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.780.000,00 | 12.780.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 446 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1 Dokumen | 94.245.000,00 | 94.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.245.000,00 | 94.245.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 447 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 1 Dokumen | 104.376.000,00 | 104.376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.376.000,00 | 104.376.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 448 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1 Orang | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 449 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 11.755.000,00 | 11.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.755.000,00 | 11.755.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| 450 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak | 1 Dokumen | 10.230.000,00 | 10.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.230.000,00 | 10.230.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 451 | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan | 1 Dokumen | 53.460.000,00 | 53.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.460.000,00 | 53.460.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 452 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| | | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan pemerintahan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 453 | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 63 Orang/bulan | 13.050.683.317,02 | 9.699.146.679,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.050.683.317,02 | 9.699.146.679,75 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 455 | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 1.061.760.000,00 | 606.852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061.760.000,00 | 606.852.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 456 | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | 1.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 458 | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 459 | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 120 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 Paket | 583.874.773,00 | 599.256.855,35 | 0,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.874.773,00 | 609.856.855,35 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 462 | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 1.440.476.700,00 | 535.730.755,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.476.700,00 | 535.730.755,98 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 464 | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 214.323.264,00 | 255.759.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.323.264,00 | 255.759.663,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit | 235.900.324,00 | 56.502.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.900.324,00 | 56.502.300,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 466 | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 0,00 | 197.413.837,00 | 0,00 | 29.542.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.956.487,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 467 | 1.03.02.2.01.0051 | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 468 | 1.03.02.2.01.0068 | Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0 Penampung Air Alami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 469 | 1.03.02.2.01.0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 470 | 1.03.02.2.01.0089 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 471 | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 1.2 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 472 | 1.03.02.2.01.0101 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 473 | 1.03.02.2.01.0102 | Pembangunan Breakwater | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Breakwater yang Dibangun | 0 KM | 107.750.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.750.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 474 | 1.03.02.2.01.0103 | Peningkatan Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 475 | 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | 1 KM | 142.650.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.650.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 476 | 1.03.02.2.01.0110 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 477 | 1.03.02.2.01.0114 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 478 | 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 0.2 KM | 35.000.000,00 | 0,00 | 310.444.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.444.565,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 479 | 1.03.02.2.01.0117 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 480 | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 0 Dokumen | 0,00 | 118.372.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.372.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 481 | 1.03.02.2.01.0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 482 | 1.03.02.2.01.0124 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 483 | 1.03.02.2.01.0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 484 | 1.03.02.2.01.0127 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 485 | 1.03.02.2.01.0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 0 Dokumen | 1.002.506.000,00 | 0,00 | 3.198.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.886.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 486 | 1.03.02.2.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 487 | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 488 | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 489 | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 490 | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 1 Dokumen | 0,00 | 308.712.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.712.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 491 | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 1 Liter/Detik | 237.699.000,00 | 488.050.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.699.000,00 | 488.050.234,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 492 | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 3 Liter/Detik | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 493 | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 494 | 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase peningkatan ketersediaan sarpras pengelolaan persampahan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | 1.03.04.2.01.0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun | 1 Ton/hari | 187.778.000,00 | 150.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.778.000,00 | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 496 | 1.03.04.2.01.0013 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan | 0 Ton/hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 497 | 1.03.04.2.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 498 | 1.03.04.2.01.0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 499 | 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun | 0.1 M³/Hari | 342.228.000,00 | 98.112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.228.000,00 | 98.112.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 500 | 1.03.05.2.01.0023 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun | 0 M³/Hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 501 | 1.03.05.2.01.0027 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan | 0 M³/Hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 502 | 1.03.05.2.01.0032 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan | 0 M³/Hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 503 | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 504 | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 200 M | 190.000.000,00 | 0,00 | 1.259.631.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.631.955,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 505 | 1.03.06.2.01.0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara | 0 Meter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 506 | 1.03.06.2.01.0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan | 0 Sistem Drainase Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 507 | 1.03.06.2.01.0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 508 | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | 0 Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | 243.551.298,00 | 0,00 | 137.538.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.089.728,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum<br>- |
| 509 | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | 0 Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 510 | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 1 Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 511 | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau<br>Persentase Penambahan panjang Jalan Lingkungan yang dibangun | 800 unit<br>80 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 512 | 1.03.07.2.01.0009 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan | 0 Ton/hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 513 | 1.03.07.2.01.0015 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | 0 Ton/hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 514 | 1.03.07.2.01.0019 | Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | 0 Ton/hari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 515 | 1.03.07.2.01.0021 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun | 0 Liter/Detik | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | - | - | | | | | | | | | | | |
| 516 | 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 0 Bangunan Gedung | 270.000.000,00 | 209.536.230,93 | 675.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.000.000,00 | 209.536.230,93 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 517 | 1.03.08.2.01.0019 | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 0 Dokumen | 281.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.850.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 518 | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 15 Dokumen | 5.537.656.000,00 | 3.782.865.378,00 | 8.303.000.000,00 | 194.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.840.656.000,00 | 3.977.745.378,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 519 | 1.03.08.2.01.0022 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 520 | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 5 Dokumen | 193.263.613,00 | 120.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.263.613,00 | 120.620.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| | 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 521 | 1.03.09.2.01.0007 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 522 | 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 1 Kawasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 523 | 1.03.09.2.01.0009 | Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 524 | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 449.141.298,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.141.298,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan | 90 persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan melalui sarana prasarana trasportasi darat | 35 KM | | | | | | | | | | | |
| 525 | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 0 Dokumen | 551.390.000,00 | 9.300.000,00 | 0,00 | 101.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.390.000,00 | 110.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 526 | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dibangun | 8 KM | 986.289.200,03 | 68.903.612,00 | 10.881.490.800,00 | 5.259.460.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.867.780.000,03 | 5.328.364.174,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 527 | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | 0 KM | 1.203.262.200,00 | 53.915.100,00 | 22.231.776.800,00 | 3.456.662.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.435.039.000,00 | 3.510.577.713,00 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 528 | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | 8 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 529 | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Jembatan yang Dibangun | 2 Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 530 | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 10 KM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 531 | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | 0.8 KM | 725.858.400,00 | 28.900.000,00 | 7.255.000.000,00 | 965.129.768,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.858.400,00 | 994.029.768,14 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 532 | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | 4 KM | 59.150.000,00 | 49.900.000,00 | 450.000.000,00 | 315.346.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.150.000,00 | 365.246.560,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
| | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | - | - | | | | | | | | | | | |
| 533 | 1.03.11.2.01.0009 | Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 534 | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 535 | 1.03.11.2.01.0015 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 536 | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 15 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 537 | 1.03.11.2.02.0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | 0 Perangkat Pendukung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.03.11.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | - | - | | | | | | | | | | | |
| 538 | 1.03.11.2.03.0007 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | - | - | | | | | | | | | | | |
| 539 | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | 0 Paket Pekerjaan | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 540 | 1.03.11.2.04.0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 541 | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 542 | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 543 | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 544 | 1.03.12.2.02.0004 | Penyusunan Peta Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah data SHP Peta Dasar | 0 Peta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 545 | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 546 | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | 1 Dokumen | 142.671.413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.671.413,50 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 547 | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | 0 Layanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 548 | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 549 | 1.03.12.2.04.0013 | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang | 0 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 550 | 1.04.02.2.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 551 | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.04.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 552 | 1.04.02.2.02.0006 | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 553 | 1.04.02.2.02.0010 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 554 | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 1 Unit Rumah | 25.000.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 555 | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | 0 Unit Rumah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 556 | 1.04.02.2.03.0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0 Unit Rumah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 557 | 1.04.02.2.03.0011 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0 Unit Rumah | 50.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | - | - | | | | | | | | | | | |
| 558 | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | - | | | | | | | | | | | |
| 559 | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina | 0 Kelompok Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 560 | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | - | - | | | | | | | | | | | |
| 561 | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 120 Unit Rumah | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 562 | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 563 | 1.04.03.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 564 | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 0 Unit Rumah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 565 | 1.04.04.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Meningkatnya Pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman<br>Persentase penanganan PSU pada Perumahan komersil | 280 KK<br>80 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Meningkatnya Pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan permukiman | 280 KK | | | | | | | | | | | |
| 566 | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 567 | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 0 Lokasi | 5.137.136.000,00 | 356.958.850,00 | 32.358.681.840,00 | 1.318.708.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.495.817.840,00 | 1.675.667.539,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri |
| 568 | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 569 | 1.04.05.2.01.0007 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan | 0 Lokasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 570 | 2.10.04.2.01.0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 571 | 2.10.04.2.01.0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.10.05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 572 | 2.10.05.2.01.0001 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 573 | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 574 | 2.10.05.2.01.0004 | Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 575 | 2.10.05.2.01.0005 | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan | 1 Laporan | 126.156.350,00 | 0,00 | 373.895.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.051.990,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 576 | 2.10.06.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.10.06.2.02 | Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 577 | 2.10.06.2.02.0002 | Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.10.08 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.08.2.01 | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | - | - | | | | | | | | | | | |
| 578 | 2.10.08.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.10.08.2.02 | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | - | - | | | | | | | | | | | |
| 579 | 2.10.08.2.02.0001 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 580 | 2.10.08.2.02.0003 | Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 0 Berita Acara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.10.09 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.09.2.01 | Penerbitan Izin Membuka Tanah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 581 | 2.10.09.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah | 0 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 582 | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 0 Laporan | 111.818.000,00 | 170.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.818.000,00 | 170.636.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 583 | 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | UPTD SPAM SIANTAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 161.074.448,49 | 0,00 | 30.685.551,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.760.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 585 | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 108.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.240.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan | 56,7 persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatkan cakupan distribusi air bersih; | 341 SR | | | | | | | | | | | |
| 586 | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit | 826.700.432,70 | 266.961.482,70 | 27.660.567,30 | 34.592.517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.361.000,00 | 301.554.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 587 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 Orang/bulan | 7.395.059.246,00 | 6.068.727.090,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.395.059.246,00 | 6.068.727.090,17 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 588 | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 79.800.000,00 | 101.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.800.000,00 | 101.240.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 589 | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 10.788.000,00 | 14.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.788.000,00 | 14.384.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 590 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9.475.648,00 | 62.482.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.475.648,00 | 62.482.553,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 591 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 11.050.000,00 | 5.100.000,00 | 86.384.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.434.165,00 | 5.100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 592 | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 64.981.434,08 | 82.786.434,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.981.434,08 | 82.786.434,08 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 593 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 15.238.800,00 | 29.288.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.238.800,00 | 29.288.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 594 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 268.780.000,00 | 151.767.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.780.000,00 | 151.767.540,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 595 | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 48.105.592,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.105.592,92 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 596 | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 15 Unit | 0,00 | 0,00 | 59.424.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.424.564,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 597 | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 13 Unit | 0,00 | 0,00 | 32.222.685,00 | 49.511.569,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.222.685,00 | 49.511.569,07 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 598 | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 177.085.505,00 | 211.483.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.085.505,00 | 211.483.925,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 599 | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 Laporan | 76.068.129,00 | 72.993.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.068.129,00 | 72.993.129,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 600 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 48.586.800,00 | 48.586.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.586.800,00 | 48.586.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 601 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 158.004.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.004.914,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 602 | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | 26.640.000,00 | 65.462.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.640.000,00 | 65.462.180,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 603 | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 31.997.180,00 | 10.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.997.180,00 | 10.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 604 | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 26.393.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.393.820,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 605 | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 249 Unit | 53.400.000,00 | 90.650.000,00 | 700.629.971,00 | 285.276.631,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.029.971,00 | 375.926.631,21 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan pemerintahan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan | 10 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 606 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 97.021.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.021.500,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 607 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | 10.538.764.897,00 | 7.755.133.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.538.764.897,00 | 7.755.133.950,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 608 | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 226.068.000,00 | 205.705.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.068.000,00 | 205.705.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100 persen | | | | | | | | | | | |
| 609 | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 610 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 8.465.130,00 | 8.465.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.465.130,00 | 8.465.130,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 611 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 58.904.715,00 | 266.869.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.904.715,00 | 266.869.107,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 612 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 35.310.660,00 | 70.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.310.660,00 | 70.468,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 613 | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 56.219.150,00 | 8.478.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.219.150,00 | 8.478.399,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 614 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 37.324.000,00 | 30.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.324.000,00 | 30.404.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 615 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 169.461.188,00 | 29.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.461.188,00 | 29.030.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 616 | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 617 | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 618 | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 619 | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 221.064.004,00 | 196.835.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.064.004,00 | 196.835.775,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 620 | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 0,00 | 8.094.000,00 | 15.210.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.210.510,00 | 8.094.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 621 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 7 Laporan | 68.310.000,00 | 68.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.310.000,00 | 68.310.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 622 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 359.109.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.109.432,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peersentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 623 | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 182.367.410,00 | 60.589.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.367.410,00 | 60.589.080,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 624 | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 17.100.000,00 | 11.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100.000,00 | 11.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 625 | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 150 Orang | 186.685.230,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.685.230,00 | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 626 | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 15 Unit | 100,00 | 1.000.000,00 | 4.988.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.988.600,00 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 627 | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 9 Kawasan | 4.211.600,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211.600,00 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 628 | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 155 Orang | 129.509.359,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.509.359,00 | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 629 | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 12 laporan | 87.514.500,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.514.500,00 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 630 | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 9 Kawasan | 4.400.100,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.100,00 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 631 | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 12 Dokumen | 70.000.000,00 | 33.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 33.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 632 | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 20 Orang | 9.800.000,00 | 20.952.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 20.952.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 633 | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 250 Orang | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 634 | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 12 Dokumen | 26.173.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.173.000,00 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 635 | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 10 Kegiatan | 165.725.000,00 | 100.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.725.000,00 | 100.085.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 636 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 19.877.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.877.000,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 637 | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 19.950.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950.000,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 638 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/bulan | 11.324.853.534,00 | 8.434.662.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.324.853.534,00 | 8.434.662.268,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 639 | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 70 Dokumen | 128.280.000,00 | 77.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.280.000,00 | 77.060.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 640 | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 33.564.000,00 | 16.782.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.564.000,00 | 16.782.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 641 | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 26 Orang | 156.678.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.678.000,00 | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 642 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 5.250.924,00 | 101.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250.924,00 | 101.568,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 643 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 71.645.031,00 | 43.943.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.645.031,00 | 43.943.810,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 644 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 Paket | 8.270.284,00 | 2.379.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.270.284,00 | 2.379.697,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 645 | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 47.560.500,00 | 26.475.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.560.500,00 | 26.475.680,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 646 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 13.887.900,00 | 4.574.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.887.900,00 | 4.574.700,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 647 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 Laporan | 219.715.000,00 | 34.712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.715.000,00 | 34.712.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 648 | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 649 | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 353.105.325,00 | 353.105.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.105.325,00 | 353.105.325,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 650 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 43.350.000,00 | 36.414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.350.000,00 | 36.414.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 651 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 492.386.238,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.386.238,01 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara | 95 Persen | | | | | | | | | | | |
| 652 | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 Unit | 32.906.378,00 | 29.845.311,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.906.378,00 | 29.845.311,92 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 653 | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 4.670.000,00 | 292.944,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.670.000,00 | 292.944,57 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada<br>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan | 100 Persen<br>92 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti | 92 Persen | | | | | | | | | | | |
| 654 | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen | 10.740.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.740.000,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 655 | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 12 Dokumen | 10.083.103,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.083.103,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 656 | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan | 16 Dokumen | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 657 | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 35 laporan | 105.186.096,00 | 13.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.186.096,00 | 13.865.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani | 92 % | | | | | | | | | | | |
| 658 | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 10 Laporan | 16.493.140,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.493.140,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 659 | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 40 Laporan | 16.940.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.940.000,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Persentase PPNS yang aktif | 60 Persen | | | | | | | | | | | |
| 660 | 1.05.02.2.03.0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah | 1 Laporan | 80.104.000,00 | 40.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.104.000,00 | 40.052.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 661 | 1.05.02.2.03.0005 | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS | 12 Laporan | 60.650.000,00 | 29.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.650.000,00 | 29.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Urusan Pemerintahan terselesaikan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 662 | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | 4.045.350.504,00 | 3.977.714.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045.350.504,00 | 3.977.714.366,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 663 | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 124.680.000,00 | 138.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.680.000,00 | 138.820.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 664 | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 16.428.000,00 | 19.166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.428.000,00 | 19.166.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 665 | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 53.955.995,29 | 25.900.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.955.995,29 | 25.900.320,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 666 | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 10.399.730,00 | 13.626.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.399.730,00 | 13.626.396,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 667 | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 60.167.460,00 | 51.311.600,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.167.460,00 | 53.311.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 668 | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 15.677.400,00 | 3.170.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.677.400,00 | 3.170.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 669 | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 308.086.000,00 | 156.623.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.086.000,00 | 156.623.964,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 670 | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 43.338.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.338.372,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 671 | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 118.963.964,16 | 109.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.963.964,16 | 109.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 672 | 8.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 174.669.599,94 | 174.669.599,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.669.599,94 | 174.669.599,94 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 673 | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 674 | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 22.420.732,61 | 19.907.624,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.420.732,61 | 19.907.624,06 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 675 | 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 4.250.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 676 | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 38.376.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.376.014,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan sarara dan prasarana perkantoran | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 677 | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 678 | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 4.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | indeks kepuasan masyrakat bidang ideologi dan wawasan kebangsaan | 77 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran Kebangsaan<br>Jumlah pelajar yang memperoleh pendidikan/ pemahaman Bela Negara<br>Terbentuknya pengurus Forum Pembauran Kebangsaan<br>Terbentuknya Tim GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas<br>Terlaksananya kegiatan GNRM<br>Terlaksananya kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan<br>Terlaksananya rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan<br>Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan | 4 Kali<br>50 Orang<br>1 Forum<br>1 Tim<br>2 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali | | | | | | | | | | | |
| 679 | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 50 Orang | 100.000.000,00 | 127.384.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 127.384.626,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 680 | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paskibraka | 45 Orang | 1.303.983.449,00 | 1.011.979.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.983.449,00 | 1.011.979.122,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada | 85,5 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Masyarakat yang memperoleh penguatan pendidikan politik<br>Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan dana hibah<br>Jumlah Pemilih Muda yang memperoleh penguatan pendidikan politik<br>Jumlah pengurus parpol yang memperoleh penguatan pendidikan politik<br>Jumlah Perempuan yang memperoleh penguatan pendidikan politik<br>Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Partai Politik dan Pemerintah Daerah<br>Terlaksananya rapat koordinasi penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik | 60 Orang<br>10 Partai<br>60 Orang<br>20 Orang<br>60 Orang<br>1 Rapat<br>4 Rapat | | | | | | | | | | |
| 681 | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 30 Orang | 442.071.589,00 | 427.507.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.071.589,00 | 427.507.589,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 682 | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 683 | 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | 0 Kegiatan | 0,00 | 60.551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.551.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kabupaten Kepulauan Anambas indeks kepuasan masyrakat bidang organisasi masyarakat | 1 Laporan<br>78,5 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah<br>Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik<br>Terbentuknya tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas<br>Terlaksananya monitoring perkembangan ormas di Kecamatan<br>Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas | 8 Ormas<br>40 Orang<br>1 Tim<br>10 Kecamatan<br>8 Rapat | | | | | | | | | | | |
| 684 | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | indeks kepuasan masyrakat bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | 77 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan/ Peraturan/ pedoman/ rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya<br>Jumlah monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya<br>Terbentuknya pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama<br>Terlaksananya dialog antar umat beragama<br>Terlaksananya kegiatan RAN P4GN<br>Terlaksananya rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama<br>Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama<br>Terselenggaranya kegiatan Sosial Budaya masyarakat | 2 kebijakan/ peraturan/ edaran<br>4 Kali<br>0 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali<br>1 Kali | | | | | | | | | | | |
| 685 | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | 50.013.870,00 | 39.393.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.013.870,00 | 39.393.944,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 686 | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 30 Orang | 209.878.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.878.000,00 | 80.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | persentase isu kewaspadaan/ konflik sosial yg berhasil ditangani | 80 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | -<br>Jumlah fasilitasi pelak sanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah | 1 Kegiatan<br>10 Kali | | | | | | | | | | | |
| 687 | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 688 | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 428.611.520,00 | 326.589.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.611.520,00 | 326.589.247,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan pemerintahan undefined | 100 Persen undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 689 | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | 46.619.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.619.632,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 690 | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27 Orang/bulan | 4.556.427.024,96 | 4.973.309.223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.556.427.024,96 | 4.973.309.223,46 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 691 | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 135.120.000,00 | 134.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.120.000,00 | 134.170.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 692 | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan Laporan | 20.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.550.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 693 | 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 26.760.000,00 | 16.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.760.000,00 | 16.260.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 694 | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 33.278.920,00 | 11.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.278.920,00 | 11.862.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 695 | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 0,00 | 0,00 | 243.615.506,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.615.506,00 | 70.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 696 | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 32.875.822,00 | 1.983.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.875.822,00 | 1.983.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 697 | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 62.423.424,00 | 13.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.423.424,00 | 13.215.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 698 | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 50.411.200,00 | 4.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.411.200,00 | 4.113.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 699 | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 433.400.313,03 | 129.107.828,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.400.313,03 | 129.107.828,18 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 95 % | | | | | | | | | | | |
| 700 | 1.06.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 113.226.330,00 | 113.226.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.226.330,00 | 113.226.330,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 701 | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 150.781.236,00 | 82.103.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.781.236,00 | 82.103.490,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 702 | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 703 | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 40.747.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.747.581,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 704 | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 26.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 705 | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 34.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.270.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | | | | | | | | | | | |
| 706 | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 8 Orang | 0,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | - | | | | | | | | | | | |
| 707 | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 180.245.458,00 | 138.029.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.245.458,00 | 138.029.658,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 708 | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 1000 Orang | 189.687.650,01 | 39.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.687.650,01 | 39.560.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 709 | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 1000 Keluarga | 50.000.000,00 | 28.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 28.950.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 710 | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 1000 Keluarga | 50.000.000,00 | 1.054.160.417,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 1.054.160.417,80 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 711 | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 0,00 | 51.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.450.000,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 712 | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang | 49.754.542,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.754.542,00 | 51.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase perangkat daerah memiliki focal poin aktif | 81 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Kantor Pemerintah dan Fasilitas umum di Kabupaten Kepulauan Anambas yan Responsif Gender | 50 % | | | | | | | | | | | |
| 713 | 2.08.02.2.01.0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota | 25 Orang | 0,00 | 3.998.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998.300,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia<br>Jumlah Peserta yang Mendapatkan Kemampuan dan Keterampilan dari Kegiatan | 1 Dokumen<br>50 Orang | | | | | | | | | | | |
| 714 | 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 295.969.648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 295.969.648,20 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 715 | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak<br>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 716 | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Layanan | 115.240.000,00 | 115.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.240.000,00 | 115.240.000,00 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak<br>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 717 | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 50 Orang | 88.400.000,00 | 88.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.400.000,00 | 88.400.000,00 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak<br>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 718 | 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang | 370.000.000,00 | 14.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000.000,00 | 14.868.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | - | - | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 719 | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | 50 Orang | 272.050.000,00 | 202.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.050.000,00 | 202.252.000,00 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 720 | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 721 | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 722 | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 723 | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 724 | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 725 | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 726 | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 727 | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 728 | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 729 | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Layanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 730 | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 731 | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | 30 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 732 | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 733 | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100% | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 734 | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 77 Orang/bulan | 8.473.406.230,00 | 6.842.443.022,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473.406.230,00 | 6.842.443.022,57 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 735 | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 139.560.000,00 | 138.496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.560.000,00 | 138.496.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 736 | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 737 | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 161.169.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.169.780,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 738 | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 12.964.048,00 | 12.964.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.964.048,00 | 12.964.048,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 739 | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 11.263.846,59 | 24.967.368,00 | 331.735.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.999.480,00 | 24.967.368,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 740 | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 12.998.922,00 | 12.998.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.998.922,00 | 12.998.922,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 741 | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 19.801.000,00 | 19.801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.801.000,00 | 19.801.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 742 | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 36.623.560,00 | 40.955.665,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.623.560,00 | 40.955.665,58 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 743 | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | 12.370.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.370.000,00 | 3.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 744 | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 314.227.658,00 | 127.113.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.227.658,00 | 127.113.829,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 745 | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 98.838.060,00 | 41.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.838.060,00 | 41.081.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 746 | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 196.000.000,00 | 171.046.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000.000,00 | 171.046.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 747 | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 158.956.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.956.830,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 748 | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 17.000.000,00 | 6.187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 6.187.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 749 | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 12.810.000,00 | 11.735.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.810.000,00 | 11.735.778,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 750 | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 95.830.740,00 | 47.822.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.830.740,00 | 47.822.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 751 | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | 49.906.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.906.800,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 752 | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 1000 Dokumen | 176.378.250,00 | 35.854.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.378.250,00 | 35.854.073,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 753 | 2.12.02.2.01.0007 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 10 Laporan | 181.300.000,00 | 73.342.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.300.000,00 | 73.342.291,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 754 | 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | 10 Dokumen | 50.518.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.518.900,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran 0 -18 Tahun (%) | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | Persentase terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 755 | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 1000 Dokumen | 150.000.000,00 | 24.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 24.014.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | - | | | | | | | | | | | |
| 756 | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 5 Dokumen | 175.105.000,00 | 22.411.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.105.000,00 | 22.411.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 757 | 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | 5 Dokumen | 0,00 | 2.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase publikasi Profil Kependudukan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | Persentase Penyediaan Buku profil Kependudukan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 758 | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | 100 Dokumen | 68.986.400,00 | 14.135.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.986.400,00 | 14.135.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah | 82 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas<br>Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD | 100 %<br>100 % | | | | | | | | | | | |
| 759 | 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27 Orang/bulan | 2.477.896.368,00 | 2.495.672.439,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477.896.368,00 | 2.495.672.439,70 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 760 | 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 129.948.000,00 | 149.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.948.000,00 | 149.798.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 761 | 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.946.494,00 | 935.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946.494,00 | 935.812,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 762 | 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 0,00 | 0,00 | 249.268.797,00 | 86.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.268.797,00 | 86.290.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 763 | 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 82.000.000,00 | 58.816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000.000,00 | 58.816.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 764 | 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 9.588.000,00 | 17.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.588.000,00 | 17.088.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 765 | 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 277.788.000,00 | 166.297.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.788.000,00 | 166.297.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 766 | 2.13.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 767 | 2.13.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 42.854.602,00 | 74.956.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.854.602,00 | 74.956.102,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 768 | 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 21.624.000,00 | 21.624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.624.000,00 | 21.624.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 769 | 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 28.893.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.893.140,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 770 | 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 6.881.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.881.944,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 771 | 2.13.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 7.310.000,00 | 7.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310.000,00 | 7.310.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal<br>Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri<br>Persentase Penataan Desa | 33,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik | 33,33 % | | | | | | | | | | | |
| 772 | 2.13.02.2.01.0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 18 Desa | 363.168.733,00 | 292.321.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.168.733,00 | 292.321.733,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 773 | 2.13.02.2.01.0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya | 52 Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 774 | 2.13.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 18 Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 775 | 2.13.02.2.01.0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi | 18 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| | 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase Desa yang melakukan kerjasama | 25 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | - | - | | | | | | | | | | | |
| 776 | 2.13.03.2.01.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 777 | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase pembinaan pemerintahan desa | 73 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang mendapat pembinaan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 778 | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 1.029.498.400,00 | 1.029.948.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.498.400,00 | 1.029.948.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 779 | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 1 Dokumen | 93.428.000,00 | 60.378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.428.000,00 | 60.378.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 780 | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 1 Dokumen | 25.080.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.080.000,00 | 2.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 781 | 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 782 | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 1 Dokumen | 57.428.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.428.000,00 | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 783 | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | 18 Desa | 40.100.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100.000,00 | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 784 | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 5.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 9,62 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 9,38 % | | | | | | | | | | | |
| 785 | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen | 103.960.000,00 | 5.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.960.000,00 | 5.830.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 786 | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 100 Lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 787 | 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |
| 788 | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -<br>- |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 789 | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 1 Dokumen | 438.612.785,00 | 163.175.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.612.785,00 | 163.175.300,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah aksi pemantauan kualitas lingkungan yang dilaksanakan | 3 Kali | | | | | | | | | | | |
| 790 | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | 46.412.000,00 | 14.747.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.412.000,00 | 14.747.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Perlindungan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan | 3 Kali | | | | | | | | | | | |
| 791 | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Ha | 51.276.829,08 | 15.931.418,95 | 5.874.661,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.151.490,70 | 15.931.418,95 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penaatan lingkungan hidup yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 792 | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 3 Badan Usaha | 379.967.017,80 | 18.960.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.967.017,80 | 18.960.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Peran Serta Sekolah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penghargaan sekolah Adiwiyata yang diberikan | 2 Sekolah | | | | | | | | | | | |
| 793 | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 3 Dokumen | 180.620.025,15 | 17.325.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.620.025,15 | 17.325.155,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Aksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup | 3 Aksi | | | | | | | | | | | |
| 794 | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 10 Entitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penanganan Pengaduann Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaduan Lingkungan Hidup | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 795 | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | 5 Pengaduan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Pengelolaan Persampahan Yang Berwawasan Lingkungan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Jumlah aksi pengelolaan sampah yang dilaksanakan | 6 Kali | | | | | | | | | | | |
| 796 | 2.11.11.2.01.0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali | 12,57 Ton | 82.051.178,00 | 4.484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.051.178,00 | 4.484.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 797 | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 8 Unit | 69.836.822,00 | 690.383.220,00 | 186.700.000,00 | 147.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.536.822,00 | 837.383.220,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Pajak Air Tanah |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 798 | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 17.792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.792.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 799 | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 12.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.208.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan | 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 800 | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 Orang/bulan | 12.451.711.460,00 | 8.698.408.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.451.711.460,00 | 8.698.408.279,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 801 | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 356.904.000,00 | 238.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.904.000,00 | 238.428.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 802 | 2.15.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 803 | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 5.420.985,00 | 7.164.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.985,00 | 7.164.061,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 804 | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 5.970.212,00 | 0,00 | 33.578.079,42 | 55.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.548.291,42 | 55.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 805 | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 82.853.511,00 | 99.485.929,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.853.511,00 | 99.485.929,21 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 806 | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 24.978.000,00 | 28.246.828,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.978.000,00 | 28.246.828,94 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 807 | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 Laporan | 51.750.000,00 | 27.206.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.750.000,00 | 27.206.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 808 | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 304.771.581,00 | 110.684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.771.581,00 | 110.684.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 809 | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 71.935.715,00 | 56.081.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.935.715,00 | 56.081.683,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 810 | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | 68.686.000,00 | 50.042.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.686.000,00 | 50.042.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 811 | 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 23.442.315,00 | 19.029.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.442.315,00 | 19.029.464,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 812 | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 574.137.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.137.770,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD | 16 Unit | | | | | | | | | | | |
| 813 | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 447.267.530,00 | 325.715.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.267.530,00 | 325.715.625,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 814 | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 26.920.000,00 | 66.887.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.920.000,00 | 66.887.441,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Panjang Jalan yang dilengkapi Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan | 5 Km | | | | | | | | | | | |
| 815 | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 816 | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2 Unit | 25.178.000,00 | 111.702.000,00 | 54.981.772,00 | 15.349.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.159.772,00 | 127.051.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 817 | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 818 | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 2 Unit | 154.038.228,00 | 117.691.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.038.228,00 | 117.691.524,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Manajemen Rekayasa lalu Lintas | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 819 | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 820 | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 821 | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Angkutan Sekolah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 822 | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 8.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.837.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 823 | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 Unit | 16.965.000,00 | 30.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.965.000,00 | 30.672.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase ketersedian sarana dan prasarana transportasi angkutan laut | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.03.2.12 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana angkutan laut | 6 Unit | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 824 | 2.15.03.2.12.0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun | 5 Unit | 3.553.734.669,39 | 240.114.160,00 | 9.610.098.736,01 | 1.755.121.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.163.833.405,40 | 1.995.235.164,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 825 | 2.15.03.2.12.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara | 1 Unit | 20.700.000,00 | 13.148.200,00 | 90.000.000,00 | 29.664.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.700.000,00 | 42.812.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 826 | 2.15.03.2.12.0005 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia | 1 Unit | 828.494.064,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.494.064,00 | 65.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 827 | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.243.479,00 | 2.528.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.243.479,00 | 2.528.799,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 828 | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 51.859.540,00 | 0,00 | 16.024.665,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.884.205,96 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 829 | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 3.104.820,00 | 3.104.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104.820,00 | 3.104.820,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 830 | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 309.379.940,00 | 125.388.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.379.940,00 | 125.388.172,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 831 | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 54.360.479,62 | 16.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.360.479,62 | 16.380.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 832 | 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 833 | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 52.306.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.306.000,00 | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 834 | 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 9.918.000,00 | 31.239.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.918.000,00 | 31.239.933,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 835 | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 12.834.280,00 | 12.834.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.834.280,00 | 12.834.280,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 836 | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | 47.600.000,00 | 39.516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600.000,00 | 39.516.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD | 3 Unit | | | | | | | | | | | |
| 837 | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 9.780.000,00 | 4.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780.000,00 | 4.890.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 838 | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 37.660.000,00 | 10.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.660.000,00 | 10.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | UPT PENGELOLAAN SAMPAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 839 | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 743.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.270,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 840 | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 22.432.390,00 | 0,00 | 410.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.432.390,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 841 | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 7.655.000,00 | 10.195.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.655.000,00 | 10.195.238,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 842 | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 2.281.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.281.751,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 843 | 2.11.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 2 Paket | 5.017.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.017.756,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 844 | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 845 | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 27.732.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.732.000,00 | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 846 | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.427.360,00 | 2.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427.360,00 | 2.790.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 847 | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | 7.345.750,00 | 6.940.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.345.750,00 | 6.940.750,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD | 6 Unit | | | | | | | | | | | |
| 848 | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 403.390.200,00 | 291.131.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.390.200,00 | 291.131.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 849 | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit | 42.240.000,00 | 16.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.240.000,00 | 16.120.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, DOKUMEN LAPORAN KINERJA DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU DAN HASIL PENGENDALIAN EVALUASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 850 | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 40.200.000,00 | 11.870.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200.000,00 | 11.870.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 851 | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 852 | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/bulan | 5.404.566.759,00 | 4.781.913.299,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.404.566.759,00 | 4.781.913.299,46 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 853 | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 203.040.000,00 | 285.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.040.000,00 | 285.860.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 854 | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.16.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 855 | 2.16.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 33.564.000,00 | 47.549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.564.000,00 | 47.549.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 856 | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 9.934.962,00 | 9.934.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.934.962,00 | 9.934.962,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 857 | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.684.380,00 | 4.684.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684.380,00 | 4.684.380,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 858 | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 14.752.152,00 | 14.752.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.752.152,00 | 14.752.152,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 859 | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 51.118.632,00 | 44.319.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.118.632,00 | 44.319.732,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 860 | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 37.768.854,00 | 52.979.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.768.854,00 | 52.979.722,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 861 | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 22.020.000,00 | 10.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.020.000,00 | 10.001.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 862 | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 400.278.000,00 | 316.260.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.278.000,00 | 316.260.652,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 863 | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | 0,00 | 0,00 | 54.654.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.654.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 864 | 2.16.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 25.223.712,00 | 25.223.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.223.712,00 | 25.223.712,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 865 | 2.16.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 23.490.135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.490.135,24 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 866 | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 62.948.295,00 | 62.948.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.948.295,00 | 62.948.295,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 867 | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 57.701.546,00 | 57.701.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.701.546,00 | 57.701.546,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 868 | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 60.708.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.708.817,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 869 | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit | 57.782.081,00 | 16.723.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.782.081,00 | 16.723.181,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 870 | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100% Unit | 10.110.000,00 | 10.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.110.000,00 | 10.110.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | PERSENTASE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| 871 | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 1 Layanan Laporan | 3.647.299.627,20 | 2.812.000.000,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647.299.627,20 | 2.812.000.000,13 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 872 | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 1 Dokumen Permohonan | 76.384.308,00 | 9.787.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.384.308,00 | 9.787.300,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 873 | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | 1 Rekomendasi | 53.908.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.908.081,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 874 | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 1 Dokumen Media | 170.110.857,09 | 115.991.888,00 | 31.138.142,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.249.000,00 | 115.991.888,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 875 | 2.16.02.2.01.0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan | 3 Orang | 65.995.922,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.995.922,44 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | PERSENTASE LAYANAN SPBE PEMERINTAH DAERAH YANG DITERAPKAN OLEH PERANGKAT DAERAH | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 876 | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 1 Dokumen | 129.028.367,77 | 127.511.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.028.367,77 | 127.511.028,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 877 | 2.16.03.2.02.0016 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional | 1 Unit Dokumen | 46.095.152,66 | 18.526.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.095.152,66 | 18.526.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 878 | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 1 Unit Aplikasi | 42.842.000,00 | 10.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.842.000,00 | 10.546.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 879 | 2.16.03.2.02.0022 | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah | 1 Dokumen | 78.734.800,00 | 53.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.734.800,00 | 53.196.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 880 | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 30 Perangkat Daerah | 3.551.236.292,69 | 2.591.288.590,00 | 222.434.224,23 | 5.169.649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.773.670.516,92 | 2.596.458.239,99 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | PERSENTASE LAJU PEMANFAATAN DATA SEKTORAL | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 881 | 2.20.02.2.01.0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik | 1 Orang | 54.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.905.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 882 | 2.20.02.2.01.0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu | 1 Dokumen Persentase | 57.495.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.495.000,00 | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 883 | 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | 1 Dokumen | 75.732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.732.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | PERSENTASE PELAKSANAAN KEAMANAN DIGITAL PERANGKAT DAERAH | 29,03 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 884 | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 114.340.000,00 | 58.723.129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.340.000,00 | 58.723.129,60 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 885 | 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 10 Perangkat Daerah | 82.091.896,00 | 5.979.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.091.896,00 | 5.979.680,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berdasarkan Kompetensi dibagi target per tahun | 87 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Terlakasananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi | 77 % | | | | | | | | | | | |
| 886 | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | 48 Orang | 66.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.070.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Cakupan Koordinasi dan Pengembangan Bursa Kerja | 95 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | persentase jumlah masyarakat masyarakat pencari kerja yang terlayani dengan baik | 75 % | | | | | | | | | | | |
| 887 | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 10 Orang | 6.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase besaran kasus yang diselesaikan | 81,19 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya regulasi yang tersusun | 67,16 % | | | | | | | | | | | |
| 888 | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1 Laporan | 944.618.000,00 | 714.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.618.000,00 | 714.870.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha | 47,50 % | | | | | | | | | | | |
| 889 | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 10 Lembaga | 393.682.420,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.682.420,37 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasiTersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 890 | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 29.506.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.506.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Keuangan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 891 | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 Orang/bulan | 7.954.595.436,00 | 5.951.465.526,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.954.595.436,00 | 5.951.465.526,37 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 892 | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 230.150.000,00 | 149.993.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.150.000,00 | 149.993.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 893 | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum kantor | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 894 | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 8.401.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.401.380,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 895 | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 80.441.705,00 | 54.593.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.441.705,00 | 54.593.240,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 896 | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 4 Paket | 25.084.713,00 | 11.656.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.084.713,00 | 11.656.395,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 897 | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 43.996.915,00 | 24.357.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.996.915,00 | 24.357.745,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 898 | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 33.020.540,00 | 11.744.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.020.540,00 | 11.744.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 899 | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 37 Laporan | 641.763.000,00 | 167.670.045,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.763.000,00 | 167.670.045,29 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan BMD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 900 | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 70.452.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.452.082,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 901 | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 18.170.010,00 | 9.106.355,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.170.010,00 | 9.106.355,80 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 902 | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 73.361.800,00 | 62.157.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.361.800,00 | 62.157.440,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 903 | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 95.242.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.242.712,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan BMD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 904 | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 49.697.785,00 | 10.620.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.697.785,00 | 10.620.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 905 | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 16 Unit | 11.940.000,00 | 7.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.940.000,00 | 7.270.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Presentase tingkat Kesehatan koperasi aktif | 85,71 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP | 6 koperasi | | | | | | | | | | | |
| 906 | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | 6 Unit Usaha | 39.307.500,00 | 6.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.307.500,00 | 6.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang mendapatkan pelatihan | 85,71 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM koperasi yang mengikuti fasilitasi pendidikan dan pelatihan | 18 orang | | | | | | | | | | | |
| 907 | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 18 Orang | 49.781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.781.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil | 95,16 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitasi | 59 usaha | | | | | | | | | | | |
| 908 | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 59 Unit Usaha | 527.632.975,00 | 83.642.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.632.975,00 | 83.642.574,00 | DAK Non Fisik-PK2UMK<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan | 73 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 101 perizinan | | | | | | | | | | | |
| 909 | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 101 Dokumen | 16.326.860,00 | 784.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.326.860,00 | 784.215,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang dikelola dengan baik | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 14 unit | | | | | | | | | | | |
| 910 | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 14 Unit | 359.731.418,00 | 98.744.935,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.731.418,00 | 98.744.935,80 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase kestabilan harga barang | 0,71 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Ketersediaan Bapokting (Hari) | 15 Hari | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 911 | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 24 Laporan | 87.077.500,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.077.500,00 | 3.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri | 88 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Pertumbuhan Pelaku Usaha Industri Yang tumbuh di Kawasan SIKM | 88 % | | | | | | | | | | | |
| 912 | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen | 466.648.092,77 | 458.063.653,39 | 0,00 | 80.208.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.648.092,77 | 538.272.253,39 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Industri | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Data Industri di dalam SINNAS | 1 Informasi | | | | | | | | | | | |
| 913 | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 14 Dokumen | 62.127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.127.500,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum kantor | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 914 | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 3.988.115,67 | 1.931.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988.115,67 | 1.931.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.17.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase tingkat pelayanan BLUD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 915 | 2.17.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang mendapatkan pembinaan | 83,33 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Peningkatan jumlah usaha mikro yang mendapatkan pemberdayaan | 250 usaha | | | | | | | | | | | |
| 916 | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 12 Unit Usaha | 226.061.968,00 | 20.041.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.061.968,00 | 20.041.824,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | UPT METROLOGI LEGAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum kantor | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 917 | 3.30.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 0 | 4.000.000,00 | 2.119.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.119.504,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Peralatan yang terstandardisasi | 96 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah UTTP Terkaliberasi | 120 Unit | | | | | | | | | | | |
| 918 | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 120 Unit | 95.363.067,00 | 14.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.363.067,00 | 14.440.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 919 | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 26.951.000,00 | 11.878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.951.000,00 | 11.878.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 920 | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | 4.388.506.315,00 | 3.990.124.757,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.388.506.315,00 | 3.990.124.757,98 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 921 | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 128.160.000,00 | 127.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.160.000,00 | 127.470.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 922 | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 923 | 2.18.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 19.056.000,00 | 22.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.056.000,00 | 22.206.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 924 | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 2.290.919,00 | 1.197.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.919,00 | 1.197.263,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 925 | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 926 | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 5.036.592,00 | 3.352.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.036.592,00 | 3.352.644,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 927 | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 22.900.000,00 | 12.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900.000,00 | 12.950.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 928 | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 13.520.052,00 | 10.203.924,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520.052,00 | 10.203.924,10 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 929 | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 239.396.000,00 | 101.738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.396.000,00 | 101.738.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 930 | 2.18.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 27.803.100,00 | 27.803.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.803.100,00 | 27.803.100,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 931 | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 34.203.535,00 | 16.481.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.203.535,00 | 16.481.605,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 932 | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1.723.392,00 | 1.723.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.723.392,00 | 1.723.392,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 933 | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 32.318.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.318.480,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 934 | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 9.205.959,00 | 7.029.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.205.959,00 | 7.029.459,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 935 | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 Unit | 7.190.000,00 | 4.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190.000,00 | 4.510.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 936 | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | 168.381.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.381.500,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 937 | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 204.762.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.762.057,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 938 | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 50 Pelaku Usaha | 380.316.000,00 | 203.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.316.000,00 | 203.680.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 939 | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 25 Kegiatan Usaha | 42.138.000,00 | 20.927.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.138.000,00 | 20.927.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 940 | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 150 Pelaku Usaha | 33.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.940.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 941 | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 55.510.094,00 | 47.644.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.510.094,00 | 47.644.976,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 942 | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 bulan Orang/bulan | 2.512.102.637,00 | 2.540.867.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512.102.637,00 | 2.540.867.264,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 943 | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 79.812.000,00 | 106.416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.812.000,00 | 106.416.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 944 | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 67.000.684,00 | 57.248.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000.684,00 | 57.248.924,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 945 | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | 52.097.905,00 | 59.819.698,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.097.905,00 | 59.819.698,20 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 946 | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 24.162.380,00 | 31.974.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.162.380,00 | 31.974.380,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 947 | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 37.100.900,00 | 32.259.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100.900,00 | 32.259.750,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 948 | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 292.842.800,00 | 188.978.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.842.800,00 | 188.978.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.23.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 949 | 2.23.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 0,00 | 0,00 | 53.842.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.842.763,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 950 | 2.23.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 300.026.364,00 | 300.026.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.026.364,00 | 300.026.364,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 951 | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 49.268.301,00 | 46.491.255,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.268.301,00 | 46.491.255,09 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 952 | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | 0,00 | 29.534.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.534.920,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase Cakupan Layanan Keperpustakaan | 83 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Perpustakaan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 953 | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 1 Perpustakaan | 314.440.769,00 | 192.309.652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.440.769,00 | 192.309.652,50 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 954 | 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 60 Orang | 289.737.770,00 | 38.138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.737.770,00 | 38.138.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 955 | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 200 Eksemplar | 85.766.000,00 | 30.020.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.766.000,00 | 30.020.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Gemar Membaca di daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 956 | 2.23.02.2.02.0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 200 Orang | 115.768.300,00 | 69.939.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.768.300,00 | 69.939.980,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 957 | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 5 Lokus | 298.847.242,00 | 147.411.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.847.242,00 | 147.411.702,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Tersusunnya Arsip Yang Sesuai Standar | 48 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Yang Sesuai Standar | 48 % | | | | | | | | | | | |
| 958 | 2.24.02.2.01.0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 12 Berkas | 104.672.661,00 | 76.285.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.672.661,00 | 76.285.814,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 959 | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 56.954.500,00 | 30.000.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.954.500,00 | 30.000.522,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan | 84 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 960 | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | 80.265.700,00 | 3.179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.265.700,00 | 3.179.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase penanganan kerawanan pangan | 56 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 961 | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 113.567.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.567.931,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan yang diterbitkan | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 962 | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen | 14.559.900,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.559.900,00 | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan keuangan dinas | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 963 | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 Orang/bulan | 13.204.389.616,00 | 11.316.428.765,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.204.389.616,00 | 11.316.428.765,71 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 964 | 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 242.160.000,00 | 151.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.160.000,00 | 151.480.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pelayanan Administrasi BMD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 965 | 3.25.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 40.368.000,00 | 54.968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.368.000,00 | 54.968.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 966 | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 6.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.479.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 967 | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 968 | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 20.000.000,00 | 10.247.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 10.247.384,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 969 | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 43.652.473,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.652.473,00 | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 970 | 3.25.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 3.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 971 | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 376.120.000,00 | 111.545.028,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.120.000,00 | 111.545.028,58 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya BMD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 972 | 3.25.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 64.974.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.974.183,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 973 | 3.25.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 200.000,00 | 64.706.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.706.226,00 | 200.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 974 | 3.25.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 342.876.095,00 | 342.876.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.876.095,00 | 342.876.095,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemda | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 975 | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 112.704.045,00 | 41.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.704.045,00 | 41.612.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 976 | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 50.516.445,00 | 50.516.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.516.445,00 | 50.516.445,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 977 | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 279.931.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.931.791,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan BMD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 978 | 3.25.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit | 13.822.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.822.515,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 979 | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit | 15.383.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.383.857,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 980 | 3.25.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 5 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KUB yang dibina, didampingi dan difasilitasi | 16 Kelompok | | | | | | | | | | | |
| 981 | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | 160 Orang | 4.952.734.200,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952.734.200,00 | 4.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 982 | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 16 Kelompok | 70.000.000,00 | 83.213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 83.213.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | 65 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah POKDAKAN yang dibina | 30 Kelompok | | | | | | | | | | | |
| 983 | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 30 Kelompok | 920.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 235 Ton | | | | | | | | | | | |
| 984 | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 985 | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 48.266.901,50 | 0,00 | 1.733.098,50 | 20.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 20.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 986 | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Unit | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Produksi Pengolahan Perikanan | 83.30 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Dokumen data pengolahan hasil perikanan dan pemasaran | 200 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 987 | 3.25.06.2.01.0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | 200 Dokumen | 31.972.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.972.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olahan perikanan yang dilakukan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 988 | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 10 Pelaku Usaha | 200.428.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.428.000,00 | 2.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Penyediaan Sarana Pertanian | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 989 | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 Dokumen | 551.358.914,00 | 35.927.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.358.914,00 | 35.927.880,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian | 88.20 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah kawasan yang menghasilkan produk pertanian, peternakan, perkebunan dan biogas untuk memenuhi kebutuhan lokal kecamatan | 1 Unit | | | | | | | | | | | |
| 990 | 3.27.03.2.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian | 1 Unit | | | | | | | | | | | |
| 991 | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Unit | 405.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Kesehatan Hewan Ternak Dan Kesmavet | 86 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penjaminan kesehatan hewan | 1300 Ekor | | | | | | | | | | | |
| 992 | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelayanan jasa medik veteriner | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 993 | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | 215.000.000,00 | 24.998.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000.000,00 | 24.998.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Kinerja Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 75 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan | 85 % | | | | | | | | | | | |
| 994 | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 1 Ha | 22.568.516,00 | 0,00 | 3.431.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tani | 95 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 12 Kali | | | | | | | | | | | |
| 995 | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 12 Unit | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 996 | 3.27.07.2.01.0006 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | 5 Orang | 0,00 | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800.000,00 | DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian |
| | | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya<br>Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya | 61 Persen<br>88 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 997 | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 2 Objek | 512.450.000,00 | 55.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.450.000,00 | 55.850.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan | 90 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan | 1 Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 998 | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga | 253.266.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.266.680,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola | 75 % | | | | | | | | | | | |
| | 2.22.05.2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan | 2 Cagar Budaya | | | | | | | | | | | |
| 999 | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | 2 Objek | 100.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan pemerintahan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 30.000.000,00 | 12.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 12.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.26.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1001 | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang/bulan | 4.542.183.516,00 | 4.166.749.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.542.183.516,00 | 4.166.749.692,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1002 | 3.26.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 192.960.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.960.000,00 | 150.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.26.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1003 | 3.26.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 16.912.556,00 | 10.362.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.912.556,00 | 10.362.318,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1004 | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 20.919.209,00 | 16.280.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.919.209,00 | 16.280.615,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1005 | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 36.134.000,00 | 28.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.134.000,00 | 28.014.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1006 | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1007 | 3.26.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 300.008.400,00 | 6.086.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.008.400,00 | 6.086.515,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1008 | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 343.530.194,38 | 163.000.194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.530.194,38 | 163.000.194,38 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.26.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Sarana Dan Prasarana Di dinas Pariwsata Dan Kebudayaan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1009 | 3.26.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 0,00 | 0,00 | 14.650.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650.000,00 | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.26.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1010 | 3.26.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 37.551.040,00 | 35.037.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.551.040,00 | 35.037.040,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1011 | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 70.049.265,00 | 60.049.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.049.265,00 | 60.049.265,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1012 | 3.26.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 2.974.000,00 | 27.974.000,00 | 6.014.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.988.632,00 | 27.974.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1013 | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 68.782.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.782.824,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.26.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1014 | 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | 5.242.530,00 | 5.242.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.242.530,00 | 5.242.530,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1015 | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 19.460.000,00 | 9.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.460.000,00 | 9.420.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1016 | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 343.797.383,62 | 343.797.383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.797.383,62 | 343.797.383,62 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1017 | 3.26.02.2.01.0009 | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 99.205.800,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.205.800,00 | 31.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah | 80 % | | | | | | | | | | | |
| 1018 | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 1 Lokasi | 0,00 | 42.200.000,00 | 0,00 | 305.787.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.987.753,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1019 | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | 5 Unit | 283.117.422,00 | 36.400.000,00 | 13.934.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.051.454,00 | 36.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan | 83 % | | | | | | | | | | | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah | 83 % | | | | | | | | | | | |
| 1020 | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 1 Kegiatan | 637.574.822,00 | 56.140.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.574.822,00 | 56.140.557,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1021 | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 71 Orang/bulan | 25.493.654.996,00 | 21.959.123.498,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.493.654.996,00 | 21.959.123.498,85 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1022 | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 Dokumen | 802.896.000,00 | 655.379.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.896.000,00 | 655.379.360,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah undefined | 48 Bulan undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| 1023 | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 10 Paket | 61.957.300,00 | 77.475.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.957.300,00 | 77.475.528,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Barang/ Jasa Rutinitas Perkantoran | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1024 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 88.243.160,00 | 136.243.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.243.160,00 | 136.243.039,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1025 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 160.329.297,00 | 189.436.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.329.297,00 | 189.436.538,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1026 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | 44.984.079,00 | 82.269.652,41 | 0,00 | 10.458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.984.079,00 | 92.727.652,41 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1027 | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 1.346.722.529,41 | 1.690.726.446,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.722.529,41 | 1.690.726.446,02 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1028 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket | 197.832.300,00 | 96.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.832.300,00 | 96.742.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1029 | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10 Laporan | 1.012.024.000,00 | 704.486.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.024.000,00 | 704.486.985,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1030 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 2.005.830.809,00 | 2.455.592.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005.830.809,00 | 2.455.592.003,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1031 | 4.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 34.806.252,00 | 621.609.833,00 | 239.982.092,00 | 379.268.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.788.344,00 | 1.000.878.601,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1032 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15 Laporan | 139.595.228,00 | 89.611.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.595.228,00 | 89.611.977,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1033 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 10 Laporan | 1.549.324.640,00 | 1.456.599.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549.324.640,00 | 1.456.599.014,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1034 | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100 Laporan | 0,00 | 696.904.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.904.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1035 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 15 Unit | 410.593.130,00 | 444.735.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.593.130,00 | 444.735.660,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1036 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 120.350.000,00 | 188.152.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.350.000,00 | 188.152.700,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1037 | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 1.083.133.988,00 | 1.027.828.138,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083.133.988,00 | 1.027.828.138,01 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1038 | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 0 Orang/Bulan | 177.988.160,00 | 177.988.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.988.160,00 | 177.988.160,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1039 | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 0 Paket | 113.675.860,00 | 177.537.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.675.860,00 | 177.537.270,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1040 | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1041 | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang/Bulan | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah Bulan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1042 | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 0 Paket | 158.000.000,00 | 143.737.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000.000,00 | 143.737.020,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1043 | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 0 Paket | 102.744.000,00 | 102.744.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.744.000,00 | 102.744.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1044 | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 5 Paket | 151.111.200,00 | 151.111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.111.200,00 | 151.111.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | Jumlah Bulan Penataan Organisasi | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1045 | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 20 Dokumen | 216.100.820,94 | 140.200.820,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.100.820,94 | 140.200.820,94 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1046 | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 10 Laporan | 289.044.579,00 | 202.806.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.044.579,00 | 202.806.779,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1047 | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 10 Dokumen | 109.839.387,72 | 61.518.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.839.387,72 | 61.518.988,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Bulan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1048 | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 10 Laporan | 652.900.000,00 | 618.046.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.900.000,00 | 618.046.011,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1049 | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 10 Laporan | 355.190.000,00 | 357.088.869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.190.000,00 | 357.088.869,50 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1050 | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 20 Laporan | 440.348.493,00 | 328.375.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.348.493,00 | 328.375.093,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1051 | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 15 Dokumen | 266.465.874,00 | 104.696.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.465.874,00 | 104.696.571,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1052 | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 5 Dokumen | 235.897.750,00 | 28.848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.897.750,00 | 28.848.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1053 | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 10 Dokumen | 4.035.864.320,00 | 2.273.308.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.035.864.320,00 | 2.273.308.917,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1054 | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 20 Dokumen | 3.954.316.902,00 | 2.772.288.846,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954.316.902,00 | 2.772.288.846,65 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi Hukum | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1055 | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 20 Dokumen | 537.867.700,00 | 184.823.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.867.700,00 | 184.823.700,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1056 | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | 15 Kasus | 458.115.572,93 | 637.117.472,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.115.572,93 | 637.117.472,93 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1057 | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br><br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 20 Dokumen | 170.563.000,00 | 95.248.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.563.000,00 | 95.248.100,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1058 | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 5 Dokumen | 134.608.750,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.608.750,00 | 1.375.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1059 | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 10 Laporan | 206.244.360,00 | 76.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.244.360,00 | 76.203.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 48 Bulan | | | | | | | | | | | |
| 1060 | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | 20 Dokumen | 32.085.000,00 | 19.387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.085.000,00 | 19.387.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1061 | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 0 Laporan | 500.191.200,00 | 59.995.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.191.200,00 | 59.995.980,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1062 | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 20 Laporan | 88.439.700,00 | 33.042.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.439.700,00 | 33.042.700,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Bulan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa undefined | 48 Bulan undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| 1063 | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 20 Dokumen | 221.788.000,00 | 491.493.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.788.000,00 | 491.493.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1064 | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 20 Dokumen | 326.708.000,00 | 258.126.000,00 | 708.059.105,00 | 373.305.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034.767.105,00 | 631.431.553,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1065 | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 15 Orang | 236.176.560,00 | 146.325.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.176.560,00 | 146.325.071,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah Bulan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam<br>undefined | 48 Bulan<br>undefined<br>undefined | | | | | | | | | | | |
| 1066 | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 10 Dokumen | 45.400.000,00 | 24.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400.000,00 | 24.890.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1067 | 4.01.03.2.04.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 10 Dokumen | 48.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.350.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1068 | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 10 Dokumen | 52.000.000,00 | 24.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | 24.748.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan pemerintahan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun | 8 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1069 | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 44.648.100,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.648.100,00 | 86.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1070 | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.579.100,00 | 188.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.100,00 | 188.700,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1071 | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1.612.600,00 | 34.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.600,00 | 34.496,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1072 | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.614.800,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614.800,00 | 86.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1073 | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.030.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 86.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1074 | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 44.878.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.878.000,00 | 4.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1075 | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1.373.500,00 | 188.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373.500,00 | 188.700,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1076 | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | 5.930.652.610,00 | 5.553.008.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930.652.610,00 | 5.553.008.781,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1077 | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 207.000.000,00 | 206.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000.000,00 | 206.963.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1078 | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.516.300,00 | 341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516.300,00 | 341.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1079 | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 4 Paket | 55.584.456,00 | 87.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.584.456,00 | 87.890.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1080 | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Orang | 92.640.000,00 | 123.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.640.000,00 | 123.823,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1081 | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 30.396.140,00 | 30.396.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.396.140,00 | 30.396.140,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1082 | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 45.844.060,00 | 6.862.859,00 | 397.924.471,00 | 197.591.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.768.531,00 | 204.454.827,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1083 | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 41.959.172,00 | 26.763.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.959.172,00 | 26.763.538,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1084 | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 75.178.930,00 | 59.390.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.178.930,00 | 59.390.930,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1085 | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 10.200.000,00 | 162.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 162.460,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1086 | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 2.654.295,00 | 176.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654.295,00 | 176.953,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1087 | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 41.420.000,00 | 62.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.420.000,00 | 62.560.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1088 | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 204.706.000,00 | 111.566.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.706.000,00 | 111.566.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1089 | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1090 | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 147.994.742,00 | 102.859.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.994.742,00 | 102.859.180,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1091 | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 217.867.761,00 | 200.961.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.867.761,00 | 200.961.091,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1092 | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 147.114.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.114.428,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1093 | 4.02.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 12 Unit | 43.330.000,00 | 28.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.330.000,00 | 28.660.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1094 | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 Unit | 54.730.000,00 | 39.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.730.000,00 | 39.470.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1095 | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 197.285.872,00 | 183.062.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.285.872,00 | 183.062.376,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1096 | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 20 Orang/Bulan | 11.045.924.125,00 | 10.388.997.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.045.924.125,00 | 10.388.997.441,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1097 | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 4 Paket | 288.949.000,00 | 530.529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.949.000,00 | 530.529.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1098 | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 20 Orang | 626.840.000,00 | 266.173.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.840.000,00 | 266.173.558,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1099 | 4.02.01.2.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 1 Dokumen | 8.300.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300.000,00 | 155.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1100 | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 Laporan | 510.263.976,00 | 377.092.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.263.976,00 | 377.092.431,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | capaian penetapan perda | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1101 | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 4 Perda Dokumen | 2.147.687.529,00 | 1.385.980.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.147.687.529,00 | 1.385.980.899,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1102 | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br><br>Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 1 Dokumen | 522.429.499,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.429.499,00 | 41.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1103 | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 Dokumen | 124.010.000,00 | 124.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.010.000,00 | 124.010.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1104 | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1105 | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen | 360.878.000,00 | 201.522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.878.000,00 | 201.522.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1106 | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen | 360.878.000,00 | 135.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.878.000,00 | 135.986.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1107 | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | 1 Dokumen Dokumen | 0,00 | 155.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.442.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1108 | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 1 Dokumen | 1.011.480.000,00 | 958.547.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.480.000,00 | 958.547.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1109 | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 10 Orang | 420.000.000,00 | 451.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000.000,00 | 451.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1110 | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | 576.012.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.012.649,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1111 | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 1 Dokumen | 1.280.257.800,00 | 900.471.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.257.800,00 | 900.471.950,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Presentase Pemenuhan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1112 | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 1 Laporan | 1.266.100.000,00 | 228.272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266.100.000,00 | 228.272.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1113 | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | 355.478.000,00 | 37.937.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.478.000,00 | 37.937.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1114 | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 1 Dokumen | 1.548.603.452,00 | 1.039.295.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548.603.452,00 | 1.039.295.365,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1115 | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1 Dokumen | 3.035.721.000,00 | 2.536.878.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.721.000,00 | 2.536.878.606,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1116 | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1 Dokumen | 2.520.099.258,00 | 895.736.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520.099.258,00 | 895.736.588,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | 90 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1117 | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1.062.462.544,00 | 580.855.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.462.544,00 | 580.855.126,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1118 | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 125.021.000,00 | 25.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.021.000,00 | 25.790.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1119 | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100 Orang/bulan | 7.598.037.462,53 | 6.265.301.128,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.598.037.462,53 | 6.265.301.128,42 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1120 | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 257.280.000,00 | 257.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.280.000,00 | 257.280.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1121 | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 80.000.000,00 | 8.419.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 8.419.880,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1122 | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100 Paket | 79.689.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.689.893,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1123 | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 38 Orang | 136.000.000,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000.000,59 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1124 | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 40 Paket | 35.316.885,00 | 30.756.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.316.885,00 | 30.756.083,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1125 | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 106.032.902,00 | 84.703.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.032.902,00 | 84.703.581,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1126 | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 24 Paket | 33.266.731,01 | 20.552.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.266.731,01 | 20.552.913,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1127 | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 935 Paket | 123.176.067,99 | 94.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.176.067,99 | 94.197.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1128 | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 99.668.206,00 | 67.252.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.668.206,00 | 67.252.265,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1129 | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1130 | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 642.006.000,00 | 350.440.336,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.006.000,00 | 350.440.336,18 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1131 | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen | 72.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 18.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1132 | 5.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 154.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.460.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1133 | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Unit | 230.718.530,00 | 0,00 | 113.116.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.835.423,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1134 | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 35.238.705,00 | 30.900.000,00 | 267.120.256,00 | 86.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.358.961,00 | 116.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1135 | 5.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 26.999.874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.999.874,60 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1136 | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 14.130.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.130.000,00 | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1137 | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 174.951.800,00 | 139.149.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.951.800,00 | 139.149.450,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1138 | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 129.611.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.611.169,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1139 | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 22 Unit | 60.868.178,00 | 6.560.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.868.178,00 | 6.560.025,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1140 | 5.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 12 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1141 | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 35.420.000,00 | 9.879.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.420.000,00 | 9.879.620,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1142 | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 3.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1143 | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 2 Berita Acara | 426.101.840,00 | 300.082.760,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.101.840,00 | 300.082.760,40 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1144 | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 10 Usulan | 44.972.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.972.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1145 | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br><br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | 1.651.113.360,00 | 1.962.842.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651.113.360,00 | 1.962.842.160,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya akses ketersediaan data dan informasi pemerintah daerah<br>Persentase ketersediaan data untuk perencanaan | 80 %<br>80 % | | | | | | | | | | | |
| 1146 | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 38 Orang | 93.284.420,00 | 22.698.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.284.420,00 | 22.698.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya | 85 % | | | | | | | | | | | |
| 1147 | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 6 Laporan | 152.515.580,00 | 286.889.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.515.580,00 | 286.889.806,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah yang berkualitas | 94 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1148 | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 123.998.174,00 | 71.865.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.998.174,00 | 71.865.918,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1149 | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 38.080.404,13 | 8.748.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.080.404,13 | 8.748.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1150 | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 16.875.200,00 | 4.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.875.200,00 | 4.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1151 | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 125.431.000,00 | 14.915.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.431.000,00 | 14.915.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1152 | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 45.630.437,00 | 25.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.630.437,00 | 25.970.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1153 | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 32.033.300,00 | 24.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.033.300,00 | 24.145.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1154 | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 43.792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.792.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1155 | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 10.261.000,00 | 12.695.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.261.000,00 | 12.695.020,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1156 | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 14.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.410.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1157 | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 43.792.000,00 | 15.862.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.792.000,00 | 15.862.270,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1158 | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 54.918.310,00 | 3.715.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.918.310,00 | 3.715.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1159 | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 12.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.375.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase pelaksanaan koordinasi, asistensi dan monitoring, sinergitas dan harmonisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1160 | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 149.721.800,00 | 18.687.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.721.800,00 | 18.687.960,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1161 | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 32.899.110,00 | 17.003.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.899.110,00 | 17.003.810,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1162 | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 18.675.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.675.000,00 | 4.100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1163 | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 12.056.810,00 | 10.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.056.810,00 | 10.098.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1164 | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 10.834.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.834.090,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1165 | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 30.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.580.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan pembangunan | 82 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan | 80 % | | | | | | | | | | | |
| 1166 | 5.05.02.2.01.0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | 1 Laporan | 135.142.813,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.142.813,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan | 70 % | | | | | | | | | | | |
| 1167 | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 1 Dokumen | 1.556.800.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556.800.000,00 | 350.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1168 | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan | 117.171.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.171.800,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02 | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perudang-undangan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1169 | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 27.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.351.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1170 | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1171 | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 42 Orang/bulan | 21.598.269.234,99 | 12.342.675.468,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.598.269.234,99 | 12.342.675.468,45 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1172 | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 654.648.000,00 | 494.918.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.648.000,00 | 494.918.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1173 | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1174 | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 184 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1175 | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 9 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, pelayanan tamu dan perjalanan dinas | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1176 | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 63.333.033,00 | 16.786.696,00 | 0,00 | 8.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.333.033,00 | 25.686.696,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1177 | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 106.731.122,00 | 72.303.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.731.122,00 | 72.303.170,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1178 | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 91.761.300,00 | 67.770.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.761.300,00 | 67.770.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1179 | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1180 | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1181 | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 374.586.000,00 | 294.164.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.586.000,00 | 294.164.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1182 | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1183 | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 0,00 | 0,00 | 168.430.464,00 | 79.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.430.464,00 | 79.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1184 | 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 225.302.445,36 | 225.302.445,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.302.445,36 | 225.302.445,36 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1185 | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 108.612.994,64 | 72.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.612.994,64 | 72.316.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1186 | 5.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 145.977.758,00 | 67.719.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.977.758,00 | 67.719.392,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1187 | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 174.055.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.055.440,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1188 | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 76.367.500,00 | 43.947.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.367.500,00 | 43.947.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1189 | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 51 Unit | 54.430.000,00 | 29.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.430.000,00 | 29.530.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1190 | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100.094.000,00 | 100.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.094.000,00 | 100.094.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Silpa terhadap APBD | 5,50 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase pelaksanaan koordinasi dan ketersediaan dokumen anggaran daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1191 | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 47.557.750,00 | 25.663.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.557.750,00 | 25.663.100,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1192 | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen | 38.400.000,00 | 24.188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400.000,00 | 24.188.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1193 | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1194 | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1195 | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | 40.557.425,00 | 12.142.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.557.425,00 | 12.142.970,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1196 | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 34 Dokumen | 30.600.000,00 | 8.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600.000,00 | 8.160.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1197 | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen | 772.122.000,00 | 542.072.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.122.000,00 | 542.072.448,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1198 | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen | 729.942.000,00 | 384.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.942.000,00 | 384.189.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1199 | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 2 Dokumen | 439.645.500,00 | 24.956.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.645.500,00 | 24.956.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1200 | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 1 Dokumen | 263.860.000,00 | 68.582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.860.000,00 | 68.582.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1201 | 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1202 | 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1203 | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 40 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1204 | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 2 Dokumen | 181.912.000,00 | 66.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.912.000,00 | 66.776.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1205 | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 40 Orang | 193.000.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000.000,00 | 396.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1206 | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 4 Dokumen | 84.605.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.605.000,00 | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1207 | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 2 Laporan | 386.152.000,00 | 146.784.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.152.000,00 | 146.784.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1208 | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 161.384.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.384.000,00 | 7.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1209 | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 2 Dokumen | 93.506.000,00 | 82.828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.506.000,00 | 82.828.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1210 | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br><br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 102 Orang | 285.864.500,00 | 10.678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.864.500,00 | 10.678.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang tersusun | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1211 | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.981.012.988,52 | 8.608.707.406,35 | 0,00 | 0,00 | 8.981.012.988,52 | 8.608.707.406,35 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1212 | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 52 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.213.314.659,00 | 103.584.697.395,00 | 105.213.314.659,00 | 103.584.697.395,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Desa<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Desa |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1213 | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 2 Dokumen | 924.591.500,00 | 226.520.000,00 | 231.457.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.048.900,00 | 226.520.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Cakupan pengelolaan asset daerah | 93,30 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persentase dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1214 | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1215 | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1216 | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1217 | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 689.332.000,00 | 185.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.332.000,00 | 185.031.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1218 | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 446.788.440,00 | 69.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.788.440,00 | 69.210.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1219 | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1220 | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 462.432.000,00 | 57.973.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.432.000,00 | 57.973.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1221 | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 215.749.000,00 | 22.906.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.749.000,00 | 22.906.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase tingkat pertumbuhan PAD | 4,47 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase dokumen pengelolaan pendapatan daerah yang harus tersusun | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1222 | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1223 | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 2 Laporan | 102.058.000,00 | 19.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.058.000,00 | 19.260.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1224 | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 9 Unit | 291.975.078,00 | 291.975.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.975.078,00 | 291.975.078,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1225 | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 2 Dokumen | 107.879.601,00 | 7.569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.879.601,00 | 7.569.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1226 | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dokumen | 82.553.980,00 | 1.905.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.553.980,00 | 1.905.980,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.03 | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perudang-undangan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1227 | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 4.650.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1228 | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1229 | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang/bulan | 6.728.619.135,98 | 5.617.013.437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.728.619.135,98 | 5.617.013.437,90 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1230 | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 161.736.000,00 | 185.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.736.000,00 | 185.714.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1231 | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1232 | 5.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1233 | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 639.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.903,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1234 | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 34.210.770,82 | 6.901.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.210.770,82 | 6.901.250,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1235 | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 3.690.776,00 | 4.694.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690.776,00 | 4.694.228,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1236 | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 16.210.816,00 | 11.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.210.816,00 | 11.995.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1237 | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 6.196.000,00 | 10.052.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196.000,00 | 10.052.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1238 | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 4.916.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916.172,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1239 | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 331.617.000,00 | 137.696.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.617.000,00 | 137.696.124,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1240 | 5.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 43.629.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.629.216,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1241 | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit | 0,00 | 0,00 | 7.535.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.535.280,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1242 | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 Unit | 0,00 | 0,00 | 10.622.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.622.800,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1243 | 5.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 16.503.169,20 | 16.503.169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.503.169,20 | 16.503.169,20 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1244 | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.956.400,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956.400,00 | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1245 | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 4.400.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1246 | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 54.076.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.076.700,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1247 | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 10.398.283,00 | 11.135.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.398.283,00 | 11.135.075,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1248 | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | 2.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Jumlah Pemenuhan ASN berdasarkan Anjab dan ABK | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1249 | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 250 Dokumen | 278.722.541,00 | 275.168.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.722.541,00 | 275.168.305,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1250 | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 0 Lembaga | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1251 | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 58.448.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.448.000,00 | 44.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | Persentase Pemenuhan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi, Fungsional dan Pelaksana | 80 % | | | | | | | | | | | |
| 1252 | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 4 Dokumen | 410.155.520,00 | 561.980.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.155.520,00 | 561.980.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1253 | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 250 Dokumen | 200.941.000,00 | 127.101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.941.000,00 | 127.101.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN yang Menempuh Pendidikan Lanjutan | 289 Orang | | | | | | | | | | | |
| 1254 | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 1 Orang | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Persentase Aparatur Berkinerja Baik | 96 % | | | | | | | | | | | |
| 1255 | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen | 76.154.500,00 | 5.772.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.154.500,00 | 5.772.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1256 | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 30 Orang | 192.463.911,00 | 71.935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.463.911,00 | 71.935.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Cakupan Pengembangan Aparatur | 65 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 65 % | | | | | | | | | | | |
| 1257 | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1 Laporan | 944.375.812,00 | 34.953.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.375.812,00 | 34.953.578,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.06 | PENGELOLAAN PERBATASAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 5.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun | 6 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1258 | 5.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 30.000.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 3.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1259 | 5.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 2.994.120.606,00 | 2.652.310.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994.120.606,00 | 2.652.310.559,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1260 | 5.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen | 112.440.000,00 | 121.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.440.000,00 | 121.480.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1261 | 5.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 19.600.000,00 | 6.474.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600.000,00 | 6.474.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.06.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1262 | 5.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 7.308.000,00 | 9.744.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308.000,00 | 9.744.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1263 | 5.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 65.735.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.735.707,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1264 | 5.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5.015.164,00 | 11.873.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.015.164,00 | 11.873.810,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1265 | 5.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 10.866.517,00 | 7.578.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.866.517,00 | 7.578.996,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1266 | 5.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 50.147.720,00 | 58.148.774,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.147.720,00 | 58.148.774,31 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1267 | 5.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 18.378.000,00 | 32.718.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.378.000,00 | 32.718.190,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1268 | 5.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 319.862.744,00 | 90.278.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.862.744,00 | 90.278.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1269 | 5.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 32.292.080,00 | 79.614.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.292.080,00 | 79.614.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1270 | 5.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 11 Unit | 0,00 | 0,00 | 35.547.330,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.547.330,00 | 38.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1271 | 5.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 Unit | 27.360.782,00 | 0,00 | 57.713.596,00 | 33.049.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.074.378,00 | 33.049.862,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1272 | 5.06.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 94.534.848,00 | 94.534.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.534.848,00 | 94.534.848,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1273 | 5.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 35.427.162,00 | 61.414.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.427.162,00 | 61.414.362,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1274 | 5.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 33.489.000,00 | 28.682.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.489.000,00 | 28.682.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1275 | 5.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 17.319.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.319.115,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1276 | 5.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 9.599.100,00 | 7.531.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.599.100,00 | 7.531.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1277 | 5.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | 5.240.000,00 | 5.239.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 5.239.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.06.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri | 39,02 % | | | | | | | | | | | |
| | 5.06.02.2.01 | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1278 | 5.06.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun | 1 Dokumen | 101.954.730,00 | 12.970.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.954.730,00 | 12.970.300,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.06.02.2.02 | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1279 | 5.06.02.2.02.0003 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara | 1 Dokumen | 89.836.045,00 | 23.122.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.836.045,00 | 23.122.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 5.06.02.2.03 | Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan | Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1280 | 5.06.02.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | 1 Dokumen | 106.265.850,00 | 40.338.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.265.850,00 | 40.338.100,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 83,33 (30 Dok) % (Dok) | | | | | | | | | | | |
| 1281 | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 53.513.160,00 | 12.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.513.160,00 | 12.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1282 | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1283 | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1284 | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1285 | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1286 | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1287 | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1288 | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | 9.775.438.831,77 | 10.269.703.379,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.775.438.831,77 | 10.269.703.379,39 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1289 | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 25 Dokumen | 73.860.000,00 | 73.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.860.000,00 | 73.860.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1290 | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | 42.883.100,00 | 9.950.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.883.100,00 | 9.950.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Terlaksannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1291 | 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1292 | 6.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1293 | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1294 | 6.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5 Dokumen | 56.567.200,00 | 4.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.567.200,00 | 4.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1295 | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 130 Orang | 550.000.000,00 | 189.585.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000.000,00 | 189.585.660,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1296 | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 2.950.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.437,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1297 | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 89.187.578,00 | 54.146.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.187.578,00 | 54.146.847,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1298 | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 6 Paket | 4.598.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.598.419,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1299 | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 5.061.776,00 | 4.979.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.061.776,00 | 4.979.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1300 | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 37.376.740,00 | 9.676.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.376.740,00 | 9.676.420,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1301 | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | 35.240.000,00 | 20.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.240.000,00 | 20.325.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1302 | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 Laporan | 484.299.984,00 | 300.097.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.299.984,00 | 300.097.295,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Terlaksanannya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1303 | 6.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 21 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1304 | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 13 Unit | 0,00 | 0,00 | 172.163.024,00 | 148.416.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.163.024,00 | 148.416.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1305 | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 19 Unit | 0,00 | 0,00 | 202.772.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.772.518,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1306 | 6.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 53.723.591,00 | 53.723.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.723.591,00 | 53.723.591,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1307 | 6.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1308 | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 Laporan | 2.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1309 | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 Laporan | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1310 | 6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 Laporan | 4.828.518,00 | 9.388.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.828.518,00 | 9.388.204,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1311 | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 Laporan | 0,00 | 92.526.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.526.983,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terlaksananya Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1312 | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 22 Unit | 8.160.240,00 | 6.330.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.160.240,00 | 6.330.135,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1313 | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 19 Unit | 34.730.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.730.000,00 | 1.350.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1314 | 6.01.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 19 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1315 | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 119.601.068,10 | 49.724.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.601.068,10 | 49.724.348,10 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1316 | 6.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaran Pengawasan | 83,87% (26 OPD) %/OPD | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1317 | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 84 Laporan | 400.426.100,00 | 50.021.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.426.100,00 | 50.021.555,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1318 | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 25 Laporan | 119.899.432,00 | 117.648.801,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.899.432,00 | 117.648.801,05 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1319 | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 30 Laporan | 102.723.400,00 | 22.078.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.723.400,00 | 22.078.929,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1320 | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 5 Laporan | 112.972.400,00 | 19.977.500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.972.400,00 | 19.977.500,01 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1321 | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 22 Laporan | 476.260.000,00 | 56.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.260.000,00 | 56.675.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1322 | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 4 Kesepakatan | 354.000.000,00 | 98.340.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.000.000,00 | 98.340.037,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1323 | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 20 Dokumen | 283.500.152,13 | 186.215.076,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.500.152,13 | 186.215.076,06 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Persentase Terlaksanannya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1324 | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br><br>Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 10 Laporan | 22.488.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.488.150,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1325 | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 3 Laporan | 350.000.000,00 | 145.227.629,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 145.227.629,89 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP | 80,65% (25 OPD) %/OPD | | | | | | | | | | | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1326 | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 83 Rekomendasi | 20.856.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.856.351,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1327 | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 60 Rekomendasi | 144.227.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.227.482,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Terlaksanannya Pendampingan dan Asistensi | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1328 | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 98 perangkat daerah | 185.300.000,00 | 17.114.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.300.000,00 | 17.114.472,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1329 | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 99 perangkat daerah | 126.492.000,00 | 33.006.840,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.492.000,00 | 33.006.840,94 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1330 | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 80 Kegiatan | 657.933.042,87 | 289.568.984,32 | 15.176.567,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.109.610,00 | 289.568.984,32 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1331 | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 35 perangkat daerah | 111.882.089,00 | 4.979.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.882.089,00 | 4.979.300,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KECAMATAN SIANTAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1332 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 16.239.344,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.239.344,00 | 5.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1333 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 3.268.600,00 | 3.268.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268.600,00 | 3.268.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1334 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 3.937.467.078,00 | 3.699.751.747,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937.467.078,00 | 3.699.751.747,11 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1335 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 189.156.000,00 | 220.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.156.000,00 | 220.836.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1336 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 3.046.400,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046.400,00 | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1337 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 3.067.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067.000,00 | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1338 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 1.570.131,00 | 1.323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.131,00 | 1.323.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1339 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 30.000.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 43.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1340 | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 3.721.000,00 | 1.347.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721.000,00 | 1.347.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1341 | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 10.678.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.678.000,00 | 43.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1342 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4.938.600,00 | 34.950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.938.600,00 | 34.950,30 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1343 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10.000.000,00 | 2.652.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2.652.480,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1344 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 10.551.399,00 | 2.191.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.551.399,00 | 2.191.480,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1345 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 18.217.400,00 | 18.961.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.217.400,00 | 18.961.100,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1346 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 13.000.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 1.320.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1347 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 2.423.000,00 | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423.000,00 | 731.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1348 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 9.000.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1349 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 Laporan | 85.160.000,00 | 12.215.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.160.000,00 | 12.215.300,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1350 | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 100.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 43.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1351 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 6.673.001,00 | 33.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673.001,00 | 33.100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 undefined | | | | | | | | | | | |
| 1352 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 33.065.420,00 | 28.613.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.065.420,00 | 28.613.803,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1353 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 46.153.320,00 | 57.233.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.153.320,00 | 57.233.320,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1354 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 55.007.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.007.527,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1355 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 13.560.000,00 | 2.184.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.560.000,00 | 2.184.100,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1356 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 11.940.000,00 | 1.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.940.000,00 | 1.340.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1357 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 12.200.000,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200.000,00 | 24.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1358 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 1.402.715.389,00 | 66.239.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.715.389,00 | 66.239.100,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1359 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 55.614.088,00 | 13.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.614.088,00 | 13.827.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1360 | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | 33.677.900,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.677.900,00 | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1361 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 10.749.892,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.749.892,00 | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1362 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 5 Laporan | 46.096.273,00 | 27.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.096.273,00 | 27.530.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KELURAHAN TAREMPA | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1363 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 0,00 | 34.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.365.000,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan |
| 1364 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | 0,00 | 626.045.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 0,00 | 655.045.799,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan |
| | | KELURAHAN TAREMPA | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1365 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 3.481.273,00 | 1.230.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.481.273,00 | 1.230.116,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1366 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 19.845.458,00 | 4.546.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.845.458,00 | 4.546.480,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1367 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 16.922.175,00 | 9.659.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.922.175,00 | 9.659.740,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1368 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 5.000.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 255.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1369 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 33.220.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.220.000,00 | 6.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1370 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 Laporan | 24.700.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700.000,00 | 725.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1371 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 19.987.152,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.987.152,00 | 25.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1372 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 47.850.858,00 | 12.269.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.850.858,00 | 12.269.916,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1373 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 17.574.936,00 | 19.719.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.574.936,00 | 19.719.495,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1374 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 5.360.000,00 | 3.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360.000,00 | 3.530.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1375 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 9.100.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100.000,00 | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1376 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 10.482.500,00 | 5.103.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.482.500,00 | 5.103.824,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1377 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 34.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.365.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1378 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | 1.985.640.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985.640.444,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KECAMATAN JEMAJA | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1379 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1380 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1381 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1382 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1383 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1.220.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1384 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 293.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.500,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1385 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 1.543.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543.500,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1386 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 72 Orang/bulan | 4.731.887.865,00 | 4.463.750.646,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.731.887.865,00 | 4.463.750.646,80 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1387 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 178.440.000,00 | 211.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.440.000,00 | 211.970.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1388 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 5.843.000,00 | 1.983.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.843.000,00 | 1.983.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1389 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 2.842.000,00 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.842.000,00 | 522.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1390 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 10.480.000,00 | 5.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.480.000,00 | 5.240.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1391 | 7.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4 Dokumen | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1392 | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 2 Orang | 37.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.104.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1393 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 5.000.890,00 | 5.000.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.890,00 | 5.000.890,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1394 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 0,00 | 0,00 | 10.709.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.709.895,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1395 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 8.023.773,00 | 8.023.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.023.773,00 | 8.023.773,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1396 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 35.502.840,00 | 25.385.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.502.840,00 | 25.385.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1397 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 12.503.124,00 | 9.532.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.503.124,00 | 9.532.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1398 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 25.500.000,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500.000,00 | 8.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1399 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 175.504.000,00 | 87.429.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.504.000,00 | 87.429.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1400 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 35.990.306,00 | 61.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.990.306,00 | 61.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1401 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 47.892.763,00 | 32.164.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.892.763,00 | 32.164.583,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1402 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 11.742.388,00 | 9.684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.742.388,00 | 9.684.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1403 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 79.967.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.967.463,00 | - Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1405 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | 10.960.000,00 | 5.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.960.000,00 | 5.970.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 2 Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 1406 | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 52.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja) | 80 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1407 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 595.215.360,00 | 35.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.215.360,00 | 35.755.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1408 | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 38.643.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.643.412,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1409 | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1410 | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 10 Orang | 60.562.400,00 | 31.092.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.562.400,00 | 31.092.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1411 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3 Dokumen | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1412 | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1413 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 12.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.270.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1414 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 4 Laporan | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KELURAHAN LETUNG | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1415 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | KELURAHAN LETUNG | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1416 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 4.898.000,00 | 4.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898.000,00 | 4.898.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1417 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1418 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 14.020.000,00 | 9.599.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.020.000,00 | 9.599.680,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1419 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 7.000.000,00 | 5.271.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 5.271.180,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1420 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12.200.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200.000,00 | 6.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1421 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1422 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 15.007.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 15.007.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1423 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 6.998.928,00 | 6.998.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998.928,00 | 6.998.928,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1424 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1425 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1426 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 9.820.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.820.800,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 1427 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 5.184.700,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.184.700,00 | 88.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1428 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1429 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas | 527.450.000,00 | 474.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.450.000,00 | 474.442.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KECAMATAN PALMATAK | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1430 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 68 Orang/bulan | 4.356.752.672,00 | 3.835.194.709,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356.752.672,00 | 3.835.194.709,91 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1431 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 102.720.000,00 | 81.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.720.000,00 | 81.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1432 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 26.760.000,00 | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.760.000,00 | 22.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1433 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1434 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1435 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 6.514.285,00 | 6.514.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.514.285,00 | 6.514.285,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1436 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 18.955.724,00 | 14.643.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.955.724,00 | 14.643.924,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1437 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 3.306.330,00 | 3.306.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.306.330,00 | 3.306.330,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1438 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 66.450.000,00 | 12.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.450.000,00 | 12.480.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1439 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 101.852.000,00 | 35.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.852.000,00 | 35.612.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1440 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | 0,00 | 0,00 | 78.143.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.143.234,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1441 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 84.762.882,00 | 25.338.170,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.762.882,00 | 25.338.170,20 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1442 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 43.434.000,00 | 43.434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.434.000,00 | 43.434.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1443 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 103.336.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.336.199,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1444 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 14 Unit | 4.880.000,00 | 6.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880.000,00 | 6.580.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1445 | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan di Kecamatan Palmatak | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 7 Desa | | | | | | | | | | | |
| 1446 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7 Laporan | 655.776.154,00 | 38.432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.776.154,00 | 38.432.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1447 | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 300 Orang | 195.125.504,00 | 50.053.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.125.504,00 | 50.053.485,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1448 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 7 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan/Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang ditargetkan 100% | 7 Desa | | | | | | | | | | | |
| 1449 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 7 Dokumen | 26.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.802.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1450 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 7 Laporan | 28.724.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.724.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KECAMATAN SIANTAN TIMUR | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1451 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1452 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10 Dokumen | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1453 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 9 Orang/bulan | 2.212.936.481,00 | 1.864.834.931,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212.936.481,00 | 1.864.834.931,39 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1454 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br><br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6 Dokumen | 93.000.000,00 | 123.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000.000,00 | 123.910.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1455 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1456 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 17.424.000,00 | 3.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.424.000,00 | 3.010.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1457 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 8.042.474,00 | 8.042.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.042.474,00 | 8.042.474,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1458 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 6.891.400,00 | 3.819.648,00 | 124.247.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.138.819,00 | 3.819.648,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1459 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 54.909.992,00 | 23.316.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.909.992,00 | 23.316.298,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1460 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 33.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.950.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1461 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 100.977.000,00 | 26.786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.977.000,00 | 26.786.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1462 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 50.587.995,99 | 41.971.645,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.587.995,99 | 41.971.645,99 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1463 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 12.273.000,00 | 6.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.273.000,00 | 6.672.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1464 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 42.169.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.169.160,00 | -<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan Tiap Kecamatan (Kecamatan Siantan Timur) | 20 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 90,00 % | | | | | | | | | | | |
| 1465 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 581.279.376,01 | 22.823.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.279.376,01 | 22.823.520,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1466 | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 250 Orang | 181.333.828,00 | 36.090.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.333.828,00 | 36.090.842,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1467 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 12 Dokumen | 24.704.120,00 | 8.189.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.704.120,00 | 8.189.120,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1468 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 12 Laporan | 87.370.000,00 | 27.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.370.000,00 | 27.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KECAMATAN SIANTAN SELATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1469 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1470 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1471 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Ketersediaan Gaji dan tunjangan ASN | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1472 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | 1.832.484.073,00 | 2.041.650.344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832.484.073,00 | 2.041.650.344,91 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1473 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 93.000.000,00 | 116.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000.000,00 | 116.640.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1474 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1475 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1476 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 22.800.000,00 | 29.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800.000,00 | 29.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1477 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 28 Paket | 25.439.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.439.140,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1478 | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1479 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 18 Paket | 11.990.260,00 | 17.103.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.990.260,00 | 17.103.870,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1480 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 57.244.373,00 | 32.834.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.244.373,00 | 32.834.057,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1481 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 18 Paket | 11.956.743,00 | 12.780.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.956.743,00 | 12.780.743,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1482 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 11.799.547,00 | 9.710.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.799.547,00 | 9.710.109,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1483 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2.111.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111.400,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1484 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 20.700.000,00 | 8.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700.000,00 | 8.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1485 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan | 128.760.000,00 | 24.706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.760.000,00 | 24.706.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pegadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1486 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 0,00 | 0,00 | 68.572.016,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.572.016,00 | 11.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1487 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 0,00 | 0,00 | 45.433.814,00 | 51.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.433.814,00 | 51.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1488 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 17.518.800,00 | 7.042.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.518.800,00 | 7.042.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1489 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 24.218.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.218.450,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1490 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 84.938.635,00 | 45.546.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.938.635,00 | 45.546.704,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1491 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit | 10.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.390.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1492 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 29.120.000,00 | 8.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.120.000,00 | 8.190.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Des | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1493 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1494 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 286.655.896,00 | 31.391.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.655.896,00 | 31.391.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1495 | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 150 Orang | 160.880.256,00 | 16.231.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.880.256,00 | 16.231.900,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1496 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 19.350.000,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.350.000,00 | 3.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1497 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 15.722.280,00 | 211.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.722.280,00 | 211.140,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1498 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 7 Laporan | 90.816.840,00 | 8.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.816.840,00 | 8.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KECAMATAN JEMAJA TIMUR | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | TERSEDIANYA DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 90 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | TERSEDIANYA JUMLAH DOKUMEN DOKUMEN/LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 90 % | | | | | | | | | | | |
| 1499 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 4.832.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832.605,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1500 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 Dokumen | 3.761.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761.090,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1501 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3.854.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.718,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1502 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.412.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412.632,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1503 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3.854.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.520,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1504 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 3.839.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.839.590,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | TERSEDIANYA GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI KANTOR KECAMATAN JEMAJA TIMUR | 90 % | | | | | | | | | | | |
| 1505 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/bulan | 2.579.067.434,00 | 2.341.581.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.579.067.434,00 | 2.341.581.146,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1506 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 103.800.000,00 | 147.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.800.000,00 | 147.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1507 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.527.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527.023,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1508 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 2.780.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780.096,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | TERSEDIANYA JUMLAH LAPORAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD | 90 % | | | | | | | | | | | |
| 1509 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 10.105.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.105.100,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | TERSEDIANYA PAKAIAAN DINAS BESERTA ATRIBUT DAN KELENGKAPANYA PEGAWAI KANTOR KECAAMATAN JEMAJA TIMUR | 90 % | | | | | | | | | | | |
| 1510 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 34 Paket | 89.228.115,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.228.115,90 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | TERSEDIANYA JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DI SEDIAKAN | 90 % | | | | | | | | | | | |
| 1511 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 35.376.163,60 | 15.383.300,00 | 127.481.486,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.857.649,78 | 15.383.300,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1512 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Paket | 16.576.060,00 | 16.576.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.576.060,00 | 16.576.060,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1513 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 26.047.005,00 | 9.598.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.047.005,00 | 9.598.160,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1514 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 9.715.500,00 | 4.539.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.715.500,00 | 4.539.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1515 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 34.500.000,00 | 16.941.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500.000,00 | 16.941.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1516 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 134.902.000,00 | 67.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.902.000,00 | 67.350.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KANTOR | 90 % | | | | | | | | | | | |
| 1517 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12.072.000,00 | 12.072.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.072.000,00 | 12.072.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1518 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 40.144.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.144.662,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | TERSEDIANYA JUMLAH KENDARAAN DINAS DAN PEMELIHARAAN PERALATAN MESIN LAINNYA | 90 % | | | | | | | | | | | |
| 1519 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 4.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1520 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 1.533.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533.380,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Jemaja Timur) | 33,3 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 5 Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| 1521 | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Jemaja Timur)<br>Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 20 Persen<br>80 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Tersedia nya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan | 80 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1522 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 226.877.837,32 | 21.818.208,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.877.837,32 | 21.818.208,71 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | TERLAKSANA NYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | TERLAKSANA NYA KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 80 % | | | | | | | | | | | |
| 1523 | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 3 Laporan | 37.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 90 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | TERSEDIANYA JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA | 90 % | | | | | | | | | | | |
| 1524 | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 250 Orang | 142.147.550,00 | 59.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.147.550,00 | 59.775.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | TERLAKASANANYA FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 90 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | TERSEDIANYA DOKUMEN FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 90 % | | | | | | | | | | | |
| 1525 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 9.515.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.515.400,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1526 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 Laporan | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KECAMATAN SIANTAN TENGAH | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan pemerintahan | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13 Dokumen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1527 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 6.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1528 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.530.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1529 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 Dokumen | 4.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1530 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 8.624.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.624.600,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1531 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 Dokumen | 3.649.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.649.600,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1532 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 5.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1533 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 2.704.547.573,00 | 2.470.983.528,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704.547.573,00 | 2.470.983.528,16 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1534 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 109.656.000,00 | 125.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.656.000,00 | 125.932.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1535 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1536 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1537 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 61.472.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.472.190,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1538 | 7.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1539 | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | PersentaseAdministrasi Umum Perangkat Daerah | 80 % | | | | | | | | | | | |
| 1540 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 7.046.968,00 | 7.046.967,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.046.968,00 | 7.046.967,99 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1541 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 54.155.900,00 | 23.099.999,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.155.900,00 | 23.099.999,73 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1542 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 5.781.768,00 | 5.167.000,00 | 2.994.860,00 | 2.798.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.776.628,00 | 7.965.580,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1543 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 10.118.430,00 | 4.988.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.118.430,00 | 4.988.355,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1544 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 7.400.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400.100,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1545 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 46.200.000,00 | 31.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200.000,00 | 31.148.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1546 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 89.920.000,00 | 35.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.920.000,00 | 35.725.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 80 % | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1547 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 Unit | 39.395.923,00 | 0,00 | 20.550.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.946.349,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1548 | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 19.212.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.212.830,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1549 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 26.452.200,00 | 26.452.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.452.200,00 | 26.452.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1550 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 72.963.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.963.305,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1551 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 9.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1552 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 32 Unit | 11.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.370.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1553 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 25.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.480.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Siantan Tengah) | 80 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan | 75 % | | | | | | | | | | | |
| 1554 | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 6 Laporan | 21.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.050.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Siantan Tengah) | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | undefined | undefined undefined | | | | | | | | | | | |
| 1555 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 235.225.000,00 | 20.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.225.000,00 | 20.025.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1556 | 7.01.03.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | 5 Unit | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 80 % | | | | | | | | | | | |
| 1557 | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 3 Laporan | 12.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.252.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Siantan Tengah) | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1558 | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 24 Orang | 113.913.282,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.913.282,00 | 23.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1559 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Siantan Tengah) | 80 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | | | | | | | | | | | |
| 1560 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 14.026.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.026.950,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1561 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 6 Laporan | 50.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.362.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KECAMATAN SIANTAN UTARA | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1562 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1563 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 10 Orang/bulan | 2.029.543.898,00 | 2.050.280.088,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.543.898,00 | 2.050.280.088,78 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1564 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 73.680.000,00 | 87.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.680.000,00 | 87.180.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1565 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 10.788.000,00 | 12.586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.788.000,00 | 12.586.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1566 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 7.242.888,12 | 7.242.888,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.242.888,12 | 7.242.888,12 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1567 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 57.536.275,00 | 21.391.948,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.536.275,00 | 21.391.948,15 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1568 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 13.517.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.517.500,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1569 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3 Laporan | 99.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1570 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 417.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.862.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1571 | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 50.224.495,00 | 50.224.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.224.495,00 | 50.224.495,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1572 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 Laporan | 18.193.500,00 | 16.172.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.193.500,00 | 16.172.910,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1573 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1574 | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1575 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,00 | 32.652.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.652.052,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1576 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 5.436.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.436.600,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Kecamatan Siantan Utara) | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1577 | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1578 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 387.473.275,88 | 26.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.473.275,88 | 26.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1579 | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 250 Orang | 92.878.777,00 | 30.209.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.878.777,00 | 30.209.470,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1580 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1581 | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1582 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 12.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1583 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KECAMATAN JEMAJA BARAT | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan layanan pemerintahan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1584 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 5.000.000,00 | 1.740.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 1.740.909,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1585 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.001.000,00 | 1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001.000,00 | 1.855.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1586 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.090.414,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090.414,00 | 2.870.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1587 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 5.113.000,00 | 1.870.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.113.000,00 | 1.870.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1588 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 4.965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.965.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1589 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1590 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 6.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 80 % | | | | | | | | | | | |
| 1591 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 2.196.521.862,00 | 1.664.861.963,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196.521.862,00 | 1.664.861.963,63 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1592 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 95.400.000,00 | 128.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.400.000,00 | 128.440.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1593 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1594 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1595 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1596 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 2.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1597 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 49.076.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.076.700,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1598 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1599 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 15 Paket | 28.461.538,00 | 2.123.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.461.538,00 | 2.123.376,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1600 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 40.468.480,00 | 16.259.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.468.480,00 | 16.259.076,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1601 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 5.274.410,00 | 5.274.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.274.410,00 | 5.274.410,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1602 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 28.000.000,00 | 10.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 10.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1603 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 220.436.000,00 | 110.118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.436.000,00 | 110.118.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1604 | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 34.229.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.229.476,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1605 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | 0,00 | 0,00 | 51.991.747,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.991.747,00 | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1606 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15 Laporan | 24.371.088,00 | 18.561.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.371.088,00 | 18.561.764,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1607 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1608 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 13 Laporan | 0,00 | 26.393.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.393.140,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1609 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1610 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit | 10.058.864,00 | 11.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.058.864,00 | 11.440.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1611 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 16.556.352,00 | 16.556.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.556.352,00 | 16.556.352,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilaksanakan tiap kecamatan (Kecamatan Jemaja Barat) | 91 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah agenda Kegiatan Pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan<br>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 3 Dokumen<br>3 Desa | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1612 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 237.817.751,00 | 46.206.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.817.751,00 | 46.206.400,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kecamatan Jemaja Barat) | 80 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah orang yang mengikuti Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 10 orang<br>12 Rakor | | | | | | | | | | | |
| 1613 | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 10 Orang | 103.455.000,00 | 26.553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.455.000,00 | 26.553.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1614 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 Dokumen | 11.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.175.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Jemaja Barat) | 80 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan fasilitasu Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah drsa<br>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 3 Laporan<br>3 Desa | | | | | | | | | | | |
| 1615 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 6.622.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.622.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1616 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 4 Laporan | 28.741.180,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.741.180,00 | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | | KECAMATAN KUTE SIANTAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1617 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 15.370.000,00 | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.370.000,00 | 3.790.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1618 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 12.386.000,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.386.000,00 | 2.270.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1619 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 Dokumen | 11.258.000,00 | 3.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.258.000,00 | 3.090.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1620 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 10.930.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.930.000,00 | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1621 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 4 Dokumen | 8.155.000,00 | 2.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.155.000,00 | 2.570.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1622 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 8.930.000,00 | 2.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.930.000,00 | 2.145.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1623 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang/bulan | 3.090.104.797,09 | 2.712.466.333,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090.104.797,09 | 2.712.466.333,51 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| 1624 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 110.409.600,00 | 127.789.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.409.600,00 | 127.789.600,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1625 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 15.384.682,00 | 10.534.590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.384.682,00 | 10.534.590,04 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1626 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 3.440.244,00 | 4.567.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440.244,00 | 4.567.244,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1627 | 7.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 3.960.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960.000,00 | 3.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1628 | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang | 25.766.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.766.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1629 | 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 Orang | 13.520.000,00 | 10.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.520.000,00 | 10.898.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1630 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 Paket | 49.993.878,00 | 75.761.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.993.878,00 | 75.761.153,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1631 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 9.480.206,00 | 6.600.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480.206,00 | 6.600.875,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1632 | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 20.934.800,00 | 25.678.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.934.800,00 | 25.678.680,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1633 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 13.467.650,00 | 12.066.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.467.650,00 | 12.066.660,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1634 | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 21.567.440,00 | 31.300.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.567.440,00 | 31.300.952,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1635 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 128.592.000,00 | 84.920.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.592.000,00 | 84.920.732,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1636 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 11.868.995,00 | 0,00 | 110.089.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.958.440,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1637 | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 169.432.487,91 | 126.107.680,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.432.487,91 | 126.107.680,53 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1638 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 20.210.000,00 | 18.168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.210.000,00 | 18.168.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1639 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 0,00 | 78.895.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.895.860,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1640 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 5.400.015,00 | 8.286.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.015,00 | 8.286.065,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1641 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 24 Unit | 7.470.000,00 | 6.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.000,00 | 6.630.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1642 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 3 Lembaga Kemasyarakatan | 17.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.090.000,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1643 | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 2 Lembaga Kemasyarakatan | 175.313.096,00 | 42.165.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.313.096,00 | 42.165.200,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1644 | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 3 Laporan | 65.322.000,00 | 29.786.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.322.000,00 | 29.786.500,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1645 | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 21 Orang | 84.760.000,00 | 80.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.760.000,00 | 80.340.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1646 | 7.01.06.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 31.768.000,00 | 5.796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.768.000,00 | 5.796.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | - | | | | | | | | | | | |
| 1647 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 12.611.600,00 | 5.240.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.611.600,00 | 5.240.800,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |
| 1648 | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 5 Laporan | 53.827.800,00 | 22.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.827.800,00 | 22.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>Dana Alokasi Umum (DAU) |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati

ANENG

Lampiran V
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025

# KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
## REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
## URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
## TAHUN ANGGARAN 2025

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | | PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 1 | 01 | Pendidikan | 185.963.655.562,78 | 181.045.252.766,60 | 831.504.491,00 | 112.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.795.160.053,78 | 181.157.752.766,60 |
| 1 | 01 | 1 | 02 | Kesehatan | 118.956.803.627,07 | 110.712.270.245,80 | 1.421.323.533,88 | 998.654.564,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.378.127.160,95 | 111.710.924.810,30 |
| 1 | 01 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 17.021.332.826,51 | 11.950.662.091,08 | 30.685.551,51 | 40.142.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.052.018.378,02 | 11.990.804.741,08 |
| 1 | 01 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 32.415.495.272,08 | 25.659.287.748,75 | 241.347.516,92 | 49.511.569,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.656.842.789,00 | 25.708.799.317,82 |
| 1 | 01 | 1 | 06 | Sosial | 5.722.663.901,99 | 5.520.097.852,64 | 243.615.506,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.966.279.407,99 | 5.590.097.852,64 |
| 1 | 01 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 01 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup | 522.265.477,00 | 328.977.188,00 | 410.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.265.477,00 | 328.977.188,00 |
| 1 | 01 | 2 | 12 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 10.479.359.194,59 | 7.832.567.727,15 | 331.735.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.811.094.828,00 | 7.832.567.727,15 |
| 1 | 01 | 2 | 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5.421.113.326,00 | 4.782.794.326,70 | 249.268.797,00 | 86.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670.382.123,00 | 4.869.084.326,70 |
| 1 | 01 | 2 | 15 | Perhubungan | 14.544.657.847,62 | 10.558.299.585,15 | 49.602.745,38 | 55.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.594.260.593,00 | 10.614.099.585,15 |
| 1 | 01 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika | 6.440.018.373,00 | 5.813.540.950,46 | 78.144.135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.518.162.508,24 | 5.813.540.950,46 |
| 1 | 01 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 9.216.769.399,67 | 6.557.809.259,46 | 70.452.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.287.221.481,67 | 6.557.809.259,46 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 01 | 2 | 18 | Penanaman Modal | 4.930.542.864,00 | 4.374.386.625,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930.542.864,00 | 4.374.386.625,08 |
| 1 | 01 | 2 | 20 | Statistik | 188.132.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.132.000,00 | 7.200.000,00 |
| 1 | 01 | 2 | 23 | Perpustakaan | 3.469.924.065,00 | 3.441.262.131,29 | 53.842.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523.766.828,00 | 3.441.262.131,29 |
| 1 | 01 | 2 | 24 | Kearsipan | 161.627.161,00 | 106.286.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.627.161,00 | 106.286.336,00 |
| 1 | 01 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan | 14.502.352.046,00 | 12.379.805.509,29 | 129.680.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.632.032.455,00 | 12.379.805.509,29 |
| 1 | 01 | 3 | 26 | Pariwisata | 5.964.122.094,00 | 5.106.096.377,00 | 20.664.632,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.984.786.726,00 | 5.106.596.377,00 |
| 1 | 01 | 3 | 30 | Perdagangan | 4.000.000,00 | 2.119.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.119.504,00 |
| 1 | 01 | 4 | 01 | Sekretariat Daerah | 49.190.302.898,00 | 42.585.989.742,31 | 948.041.197,00 | 763.032.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.138.344.095,00 | 43.349.022.063,31 |
| 1 | 01 | 4 | 02 | Sekretariat DPRD | 35.576.608.726,00 | 27.537.043.793,00 | 397.924.471,00 | 197.591.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.974.533.197,00 | 27.734.635.761,00 |
| 1 | 01 | 5 | 01 | Perencanaan | 14.194.515.740,25 | 10.954.018.955,60 | 534.697.149,00 | 86.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.729.212.889,25 | 11.040.018.955,60 |
| 1 | 01 | 5 | 02 | Keuangan | 30.749.182.161,99 | 16.338.051.387,81 | 399.887.864,00 | 88.700.000,00 | 8.981.012.988,52 | 8.608.707.406,35 | 105.213.314.659,00 | 103.584.697.395,00 | 145.343.397.673,51 | 128.620.156.189,16 |
| 1 | 01 | 5 | 03 | Kepegawaian | 8.658.219.898,00 | 7.177.988.989,10 | 61.787.296,00 | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720.007.194,00 | 7.207.238.989,10 |
| 1 | 01 | 5 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan | 944.375.812,00 | 34.953.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.375.812,00 | 34.953.578,00 |
| 1 | 01 | 5 | 05 | Penelitian dan Pengembangan | 1.809.114.613,00 | 350.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809.114.613,00 | 350.100.000,00 |
| 1 | 01 | 5 | 06 | Pengelolaan Perbatasan Daerah | 4.137.181.975,00 | 3.285.509.554,31 | 125.553.006,00 | 150.663.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.262.734.981,00 | 3.436.173.416,31 |
| 1 | 01 | 6 | 01 | Inspektorat | 14.946.889.241,87 | 12.239.949.987,76 | 390.112.109,13 | 148.416.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.337.001.351,00 | 12.388.366.387,76 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 01 | 7 | 01 | Kecamatan | 45.519.037.854,82 | 33.288.495.741,96 | 737.094.277,18 | 164.973.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000.000,00 | 46.256.132.132,00 | 33.482.469.321,96 |
| 1 | 01 | 8 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 7.379.933.849,84 | 6.694.042.012,00 | 162.302.336,16 | 111.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.542.236.186,00 | 6.805.742.012,00 |
| 2 | | | | KETERTIBAN DAN KEAMANAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 03 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 1.044.215.228,00 | 374.104.000,00 | 732.012.291,00 | 285.276.631,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776.227.519,00 | 659.380.631,21 |
| 2 | 03 | 1 | 06 | Sosial | 49.754.542,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.754.542,00 | 51.000,00 |
| 3 | | | | EKONOMI | | | | | | | | | | |
| 3 | 04 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11.895.766.711,03 | 4.685.863.618,93 | 55.364.724.120,00 | 10.580.417.933,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.260.490.831,03 | 15.266.281.552,07 |
| 3 | 04 | 2 | 07 | Tenaga Kerja | 1.411.100.420,37 | 714.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411.100.420,37 | 714.870.000,00 |
| 3 | 04 | 2 | 09 | Pangan | 208.393.531,00 | 3.579.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.393.531,00 | 3.579.500,00 |
| 3 | 04 | 2 | 15 | Perhubungan | 4.607.946.961,39 | 513.392.884,00 | 9.755.080.508,01 | 1.800.134.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.363.027.469,40 | 2.313.527.688,00 |
| 3 | 04 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika | 7.861.635.408,85 | 5.738.847.706,13 | 253.572.367,14 | 5.169.649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.115.207.775,99 | 5.744.017.356,12 |
| 3 | 04 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 842.783.443,00 | 110.134.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.783.443,00 | 110.134.398,00 |
| 3 | 04 | 2 | 18 | Penanaman Modal | 829.537.557,00 | 224.607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.537.557,00 | 224.607.000,00 |
| 3 | 04 | 2 | 21 | Persandian | 196.431.896,00 | 64.702.809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.431.896,00 | 64.702.809,60 |
| 3 | 04 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan | 6.823.401.101,50 | 90.063.000,00 | 1.733.098,50 | 40.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825.134.200,00 | 130.863.000,00 |
| 3 | 04 | 3 | 27 | Pertanian | 1.253.927.430,00 | 86.726.380,00 | 3.431.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257.358.914,00 | 86.726.380,00 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 3 | 04 | 3 | 30 | Perdagangan | 558.498.845,00 | 117.769.150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.498.845,00 | 117.769.150,80 |
| 3 | 04 | 3 | 31 | Perindustrian | 528.775.592,77 | 458.063.653,39 | 0,00 | 80.208.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.775.592,77 | 538.272.253,39 |
| 4 | | | | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 672.677.413,50 | 98.262.200,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.677.413,50 | 98.262.200,00 |
| 4 | 05 | 2 | 10 | Pertanahan | 237.974.350,00 | 170.636.000,00 | 373.895.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.869.990,00 | 170.636.000,00 |
| 4 | 05 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup | 810.163.872,03 | 761.832.093,95 | 192.574.661,62 | 147.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.738.533,65 | 908.832.093,95 |
| 5 | | | | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM | | | | | | | | | | |
| 5 | 06 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.564.399.432,70 | 1.063.724.616,70 | 27.660.567,30 | 34.592.517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.060.000,00 | 1.098.317.134,00 |
| 5 | 06 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 5.362.136.000,00 | 559.108.850,00 | 32.358.681.840,00 | 1.318.708.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.720.817.840,00 | 1.877.817.539,00 |
| 6 | | | | KESEHATAN | | | | | | | | | | |
| 6 | 07 | 1 | 02 | Kesehatan | 38.617.342.755,35 | 39.189.162.107,36 | 20.389.202.823,60 | 22.424.678.830,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.006.545.578,95 | 61.613.840.938,06 |
| 6 | 07 | 2 | 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.884.142.000,00 | 2.343.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884.142.000,00 | 2.343.942.000,00 |
| 7 | | | | PARIWISATA | | | | | | | | | | |
| 7 | 08 | 3 | 26 | Pariwisata | 1.019.898.044,00 | 165.740.557,00 | 13.934.032,00 | 305.787.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.832.076,00 | 471.528.310,00 |
| 8 | | | | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| 8 | 10 | 1 | 01 | Pendidikan | 33.263.673.919,41 | 33.294.118.599,17 | 14.780.211.300,74 | 27.656.164.845,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.043.885.220,15 | 60.950.283.445,05 |
| 8 | 10 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga | 9.408.330.956,77 | 6.846.560.874,77 | 0,00 | 21.007.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.408.330.956,77 | 6.867.567.890,77 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 8 | 10 | 2 | 22 | Kebudayaan | 865.716.680,00 | 56.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.716.680,00 | 56.850.000,00 |
| 8 | 10 | 2 | 23 | Perpustakaan | 1.104.560.081,00 | 477.819.834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.560.081,00 | 477.819.834,50 |
| 9 | | | | PERLINDUNGAN SOSIAL | | | | | | | | | | |
| 9 | 11 | 1 | 06 | Sosial | 469.933.108,01 | 1.316.000.075,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.933.108,01 | 1.316.000.075,80 |
| 9 | 11 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.025.690.000,00 | 850.727.948,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.690.000,00 | 850.727.948,20 |
| | | | | **TOTAL** | **784.449.005.089,76** | **657.029.570.980,34** | **142.215.982.235,72** | **67.866.224.029,05** | **8.981.012.988,52** | **8.608.707.406,35** | **105.213.314.659,00** | **103.613.697.395,00** | **1.040.859.314.973,00** | **837.118.199.810,74** |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati

ANENG

Lampiran VI
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025

# KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
## REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
## TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A SPM Bidang Pendidikan | | | | |
| 1. | Angka Partisipasi Sekolah | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.131.359.210,00 | 1.869.598.900,00 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 1.958.800.000,00 | 1.958.300.000,00 |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 0,00 | 374.966,00 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | 314.480.000,00 | 514.480.000,00 |
| | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 267.876.780,00 | 157.337.860,00 |
| | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 0,00 | 449.683.943,00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 499.778.336,00 | 2.341.571.681,00 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 3.982.339.900,00 | 2.472.624.013,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1.340.446.968,42 | 3.183.941.121,10 |
| | | Total | 9.495.081.194,42 | 12.947.912.484,10 |
| 2. | Literasi dan Numerasi | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 200.000.000,00 | 133.403.200,00 |
| | | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 247.905.000,00 | 199.332.800,00 |
| | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.429.923,00 | 100.022.228,00 |
| | | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 7.310.000,00 | 150.000.000,02 |
| | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 7.310.000,00 | 60.533.220,00 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 499.300.000,00 | 499.300.000,00 |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 379.218.703,00 | 390.284.380,00 |
| | | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 6.498.500,00 | 6.498.500,00 |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 171.085.900,00 | 112.740.260,00 |
| | | Total | 1.525.058.026,00 | 1.652.114.588,02 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 182.352.000,00 | 101.384.940,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 3.300.084,00 | 16.500.084,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 0,00 | 0,00 |
| | | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | 185.652.084,00 | 117.885.024,00 |
| 4. | Kekhususan PAUD | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 98.904.560,00 | 109.434.560,00 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 369.385.720,00 | 369.385.720,00 |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 27.316.000,00 | 23.661.000,00 |
| | | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | 495.606.280,00 | 502.481.280,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan | 11.701.397.584,42 | 15.220.393.376,12 |
| B SPM Bidang Kesehatan | | | | |
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 712.962.000,00 | 712.962.000,00 |
| | | Total | 712.962.000,00 | 712.962.000,00 |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 192.600.000,00 | 192.600.000,00 |
| | | Total | 192.600.000,00 | 192.600.000,00 |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 260.010.000,00 | 263.450.000,00 |
| | | Total | 260.010.000,00 | 263.450.000,00 |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 100.000.000,00 | 146.101.530,00 |
| | | Total | 100.000.000,00 | 146.101.530,00 |
| 5. | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 85.170.000,00 | 85.170.000,00 |
| | | Total | 85.170.000,00 | 85.170.000,00 |
| 6. | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 116.430.000,00 | 116.430.000,00 |
| | | Total | 116.430.000,00 | 116.430.000,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan | 1.467.172.000,00 | 1.516.713.530,00 |
| C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | | | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 854.361.000,00 | 301.554.000,00 |
| | | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 400.000.000,00 | 0,00 |
| | | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 237.699.000,00 | 488.050.234,00 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0,00 | 308.712.900,00 |
| | | Total | 1.492.060.000,00 | 1.098.317.134,00 |
| 2. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 342.228.000,00 | 98.112.200,00 |
| | | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| | | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 0,00 | 0,00 |
| | | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | 342.228.000,00 | 98.112.200,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 1.834.288.000,00 | 1.196.429.334,00 |
| D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 0,00 | 0,00 |
| | | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 25.000.000,00 | 1.400.000,00 |
| | | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 |
| | | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | 25.000.000,00 | 1.400.000,00 |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 50.000.000,00 | 600.000,00 |
| | | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 0,00 | 0,00 |
| | | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | 50.000.000,00 | 600.000,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 75.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 105.186.096,00 | 13.865.000,00 |
| | | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | Total | 105.186.096,00 | 15.865.000,00 |
| 2. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 186.685.230,00 | 25.000.000,00 |
| | | Total | 186.685.230,00 | 25.000.000,00 |
| 3. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 4.400.100,00 | 1.000.000,00 |
| | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 87.514.500,00 | 1.000.000,00 |
| | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 4.988.600,00 | 1.000.000,00 |
| | | Total | 96.903.200,00 | 3.000.000,00 |
| 4. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 9.800.000,00 | 20.952.000,00 |
| | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 |
| | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 70.000.000,00 | 33.800.000,00 |
| | | Total | 86.400.000,00 | 61.352.000,00 |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 26.393.820,00 | 0,00 |
| | | Total | 26.393.820,00 | 0,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 501.568.346,00 | 105.217.000,00 |
| F SPM Bidang Sosial | | | | |
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Layanan Rujukan | 180.245.458,00 | 138.029.658,00 |
| | | Total | 180.245.458,00 | 138.029.658,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial | 180.245.458,00 | 138.029.658,00 |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati

ANENG

# KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
## SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
## TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| 6 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1.400.000.000,00 | 2.222.269.634,13 | 696.184.528,01 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | |
| 2 | 10 | 08 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 5.966.279.407,99 | 5.590.097.852,64 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 566.921.000,00 | 60.975.080,00 | 18.960.900,00 |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 806.536.000,00 | 175.105.000,00 | 25.201.800,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 6.128.194.489,00 | 7.808.205.191,21 | 1.720.650.951,71 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 976.636.942,00 | 49.754.542,00 | 51.000,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 525.342.400,00 | 116.424.000,00 | 29.786.500,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 71.538.000,00 | 68.986.400,00 | 14.135.200,00 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| 6 | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1.280.000.000,00 | 1.261.867.532,00 | 344.669.597,26 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 382.994.879,00 | 226.061.968,00 | 20.041.824,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| 1 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 186.795.160.053,78 | 181.157.752.766,60 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 838.816.869,00 | 458.103.950,00 | 109.196.364,00 |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 298.921.928,00 | 512.800.000,00 | 512.800.000,00 |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | |
| 2 | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 965.438.172,00 | 6.730.000,00 | 0,00 |
| 2 | 07 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 382.994.879,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 6.518.162.508,24 | 5.813.540.950,46 |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 2 | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 13.800.000.000,00 | 8.007.102.517,77 | 6.221.797.481,77 |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 932.265.477,00 | 328.977.188,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 03 | | KEPEGAWAIAN | | | |
| 5 | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 4.982.220.336,00 | 1.326.885.472,00 | 1.146.207.205,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |
| 1 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 4.669.052.275,00 | 695.607.389,00 | 197.437.000,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 05 | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | |
| 5 | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 900.000.000,00 | 1.809.114.613,00 | 350.100.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 680.000.000,00 | 168.381.500,00 | 0,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 4.787.435.992,00 | 342.228.000,00 | 98.112.200,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 460.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 9.574.871.985,00 | 237.778.000,00 | 150.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 229.796.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4 | 02 | | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| 4 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 20.375.898.010,00 | 18.614.313.253,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 50.810.461.864,00 | 5.396.730.565,00 | 268.372.000,00 |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 1 | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 19.149.743.970,00 | 150.000.000,00 | 200.150.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | |
| 2 | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 3.045.448.893,00 | 66.070.000,00 | 0,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 120.378.127.160,95 | 111.710.924.810,30 |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 13.404.820.779,00 | 649.141.298,00 | 0,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 3 | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 3.619.301.610,00 | 1.570.000.000,00 | 40.800.000,00 |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 195.000.000,00 | 95.363.067,00 | 14.440.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 725.000.001,00 | 338.588.000,00 | 841.867.220,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 8 | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 980.000.000,00 | 259.891.870,00 | 119.393.944,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 3 | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 1.914.974.397,00 | 435.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 20 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | |
| 2 | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 2.200.000.000,00 | 188.132.000,00 | 7.200.000,00 |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 4.930.542.864,00 | 4.374.386.625,08 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | |
| 5 | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 2.645.000.000,00 | 1.814.301.440,00 | 335.121.700,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 9.574.871.985,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 486.000.000,00 | 370.000.000,00 | 14.868.000,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 8 | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 1.730.000.000,00 | 1.403.983.449,00 | 1.139.363.748,00 |
| 8 | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 857.127.718,00 | 442.071.589,00 | 488.058.589,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 04 | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | |
| 5 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3.685.740.110,00 | 944.375.812,00 | 34.953.578,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 3 | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 12.351.584.861,00 | 5.022.734.200,00 | 87.913.000,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 8 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 5.007.677.758,00 | 4.732.336.484,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 03 | | KEPEGAWAIAN | | | |
| 5 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 7.393.121.722,00 | 6.061.031.784,10 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 3 | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 861.738.479,00 | 26.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 415.250.500,00 | 272.050.000,00 | 202.252.000,00 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 23 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | |
| 2 | 23 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 3.523.766.828,00 | 3.441.262.131,29 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 3 | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 708.540.527,00 | 232.400.000,00 | 2.150.000,00 |
| 3 | 32 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | |
| 3 | 32 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 1.330.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| 4 | 01 | 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 35.917.355.187,00 | 9.659.091.118,93 | 6.096.331.607,58 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 19.149.743.970,00 | 15.260.769.613,00 | 4.307.901.608,93 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| 3 | 26 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 5.984.786.726,00 | 5.106.596.377,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 450.000.000,00 | 50.000.000,00 | 299.967.948,20 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1.264.223.500,00 | 1.254.213.685,00 | 376.619.097,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| 4 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 37.879.202.301,07 | 35.743.798.251,73 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 175.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | | | |
| 5 | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.595.268.719,00 | 816.363.635,13 | 232.257.178,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| 2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 405.168.750,00 | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| 2 | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 270.000.000,00 | 80.265.700,00 | 3.179.500,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| 1 | 01 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 0,00 | 1.040.307.000,00 | 820.065.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| 2 | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.810.000.000,00 | 1.255.534.400,00 | 1.100.076.400,00 |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 10 | 04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| 4 | 01 | 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 3.916.375.116,00 | 2.600.050.675,00 | 1.508.892.204,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 1.120.149.802,00 | 527.632.975,00 | 83.642.574,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 1 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 574.492.319,00 | 75.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| 2 | 13 | 02 | PROGRAM PENATAAN DESA | 880.000.000,00 | 363.168.733,00 | 292.321.733,00 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 1.515.000.000,00 | 428.611.520,00 | 326.589.247,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | |
| 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 4.783.671.727,00 | 1.338.300.420,37 | 714.870.000,00 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 4 | 02 | | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| 4 | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 16.207.622.850,00 | 15.598.635.187,00 | 9.120.322.508,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | | | |
| 5 | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 1.002.718.855,70 | 2.371.867.200,00 | 2.572.513.326,40 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 4.000.000.000,00 | 253.266.680,00 | 0,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 4.000.000,00 | 2.119.504,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 36.324.649.020,79 | 31.243.316.713,25 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 5.936.420.631,00 | 780.423.791,00 | 375.926.631,21 |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 900.037.967,00 | 0,00 | 3.850.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 462.864.780,00 | 2.179.342.000,00 | 1.639.142.000,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| 1 | 01 | 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 17.234.769.573,00 | 200.000.000,00 | 133.403.200,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 3.572.296.009,00 | 359.731.418,00 | 98.744.935,80 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 4.100.000.000,00 | 512.450.000,00 | 55.850.000,00 |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | |
| 2 | 15 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 28.483.537.603,00 | 14.422.019.407,20 | 2.038.112.364,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 184.427.596,00 | 39.307.500,00 | 6.450.000,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |
| 1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 32.656.842.789,00 | 25.708.799.317,82 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | |
| 3 | 31 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 56.275.441,00 | 62.127.500,00 | 0,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | |
| 2 | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2.812.072.343,00 | 260.000.000,00 | 275.415.324,00 |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 293.757.000,00 | 57.151.490,70 | 15.931.418,95 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 95.748.720,00 | 49.781.000,00 | 0,00 |
| 2 | 10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | |
| 2 | 10 | 09 | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 143.076.766,00 | 16.326.860,00 | 784.215,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 1.311.757.462,00 | 180.245.458,00 | 138.029.658,00 |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 1 | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.602.740.309,00 | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 431.283.000,00 | 46.412.000,00 | 14.747.400,00 |
| 2 | 10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | |
| 2 | 10 | 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 0,00 | 111.818.000,00 | 170.636.000,00 |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| 2 | 16 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 0,00 | 4.044.836.938,64 | 2.937.779.188,13 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | | | |
| 5 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 11.540.982.054,12 | 8.235.248.451,20 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| 3 | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 18.766.749.090,00 | 637.574.822,00 | 56.140.557,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 23 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | |
| 2 | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 2.577.287.694,00 | 1.104.560.081,00 | 477.819.834,50 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 957.487.198,00 | 142.671.413,50 | 0,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 2 | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 2.200.000.000,00 | 585.383.110,00 | 121.456.000,00 |
| 2 | 21 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | |
| 2 | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 375.000.000,00 | 196.431.896,00 | 64.702.809,60 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 2.747.203.886,00 | 1.449.631.955,00 | 381.089.728,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 561.811.961,00 | 629.590.235,00 | 110.096.060,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 24 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | |
| 2 | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 151.311.080,00 | 161.627.161,00 | 106.286.336,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 3 | 25 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 14.632.032.455,00 | 12.379.805.509,29 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | |
| 8 | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 260.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |
| 3 | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 765.989.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 1 | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 79.780.650.606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.641.867.642,00 | 289.687.650,01 | 1.174.120.417,80 |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| 1 | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 107.871.251.078,00 | 46.632.867.720,15 | 59.976.905.195,05 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 227.096.000,00 | 180.620.025,15 | 17.325.155,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | |
| 1 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 7.504.784.662,00 | 300.196.339,00 | 86.017.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 623.806.000,00 | 150.000.000,00 | 24.014.000,00 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | 38.299.488,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | |
| 5 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 23.845.144.851,99 | 14.136.483.611,81 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | |
| 2 | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 14.594.260.593,00 | 10.614.099.585,15 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 560.856.026,00 | 84.203.200,00 | 84.203.200,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 17 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 9.287.221.481,67 | 6.557.809.259,46 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 1 | 04 | 04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 574.492.319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 17.052.018.378,02 | 11.990.804.741,08 |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| 6 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 11.852.864.184,87 | 11.347.512.262,49 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | |
| 3 | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 2.000.000.000,00 | 466.648.092,77 | 538.272.253,39 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 06 | | PENGELOLAAN PERBATASAN | | | |
| 5 | 06 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | 775.608.750,00 | 298.056.625,00 | 76.431.300,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 3 | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 1.953.273.885,00 | 551.358.914,00 | 35.927.880,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | |
| 1 | 01 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 919.187.711,00 | 170.710.500,00 | 19.910.050,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 385.838.000,00 | 33.940.000,00 | 0,00 |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | |
| 2 | 16 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 0,00 | 4.070.370.837,35 | 2.806.238.167,99 |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| 2 | 09 | 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 60.000.000,00 | 113.567.931,00 | 0,00 |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| 2 | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 399.259.500,00 | 333.640.000,00 | 333.640.000,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 1.340.482.078,00 | 230.000.000,00 | 24.998.500,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 398.000.000,00 | 204.762.057,00 | 0,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | |
| 5 | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 1.685.928.250,00 | 584.466.659,00 | 320.710.058,00 |
| 5 | 06 | | PENGELOLAAN PERBATASAN | | | |
| 5 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 3.964.678.356,00 | 3.359.742.116,31 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 145.993.582.460,00 | 58.372.441.378,95 | 60.979.736.738,06 |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 9.574.871.985,00 | 1.492.060.000,00 | 1.098.317.134,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | |
| 2 | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 2.135.594.500,00 | 815.845.329,00 | 524.314.409,00 |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| 2 | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | |
| 2 | 22 | 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 1.170.000.000,00 | 100.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 7.085.405.269,00 | 396.257.254,00 | 415.387.753,00 |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | |
| 3 | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 1.321.332.334,00 | 15.000.000,00 | 25.800.000,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 60.276.340.850,00 | 44.344.217.400,03 | 10.308.918.215,14 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | |
| 2 | 10 | 05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 100.000.000,00 | 500.051.990,00 | 0,00 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 494.963.000,00 | 87.077.500,00 | 3.800.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 9.958.899.478,00 | 7.660.020.363,15 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | |
| 1 | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 325.545.647,00 | 160.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 994.435.800,00 | 123.050.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 130.000.000,00 | 14.559.900,00 | 400.000,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | |
| 5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 105.035.576.741,00 | 119.099.484.722,52 | 113.827.840.819,35 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 1 | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 1.914.974.397,00 | 37.495.817.840,00 | 1.675.667.539,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 1.040.823.000,00 | 422.454.000,00 | 224.607.000,00 |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| 2 | 13 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 560.342.303.452,00 | 3.509.106.205,00 | 3.307.680.893,70 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | |
| 3 | 30 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 2.118.944.000,00 | 542.572.785,00 | 169.005.300,00 |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati

ANENG

Lampiran VIII
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025

# KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
# SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
# DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
# TAHUN ANGGARAN 2025

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 249.670.730.771,79 | 249.670.730.771,79 | 248.975.604.102,42 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 242.802.070.593,02 | 242.802.070.593,02 | 242.108.036.211,65 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 242.802.070.593,02 | 242.802.070.593,02 | 242.108.036.211,65 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 59.929.470.928,03 | 59.929.470.928,03 | 59.976.905.195,05 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 27.079.967.454,30 | 27.079.967.454,30 | 27.871.549.278,63 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 220.450.781,00 | 220.450.781,00 | 220.450.781,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 3.518.756.420,00 | 3.518.756.420,00 | 3.524.756.420,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 324.641.344,00 | 324.641.344,00 | 324.641.344,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 308.774.599,98 | 308.774.599,98 | 308.774.599,98 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 545.794.970,10 | 545.794.970,10 | 321.544.970,10 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 2.250.375.532,00 | 2.250.375.532,00 | 2.250.175.532,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 2.057.379.228,00 | 2.057.379.228,00 | 2.171.244.423,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 127.024.705,00 | 127.024.705,00 | 233.666.033,43 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 112.740.260,00 | 112.740.260,00 | 112.740.260,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 296.528.890,00 | 296.528.890,00 | 390.284.380,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 16.500.084,00 | 16.500.084,00 | 16.500.084,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 7.591.807.000,00 | 7.591.807.000,00 | 7.911.807.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 150.000.220,00 | 150.000.220,00 | 60.533.220,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 6.498.500,00 | 6.498.500,00 | 6.498.500,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 150.000.000,02 | 150.000.000,02 | 150.000.000,02 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 167.935.780,00 | 167.935.780,00 | 157.337.860,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 162.733.145,00 | 162.733.145,00 | 162.733.145,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 100.022.228,00 | 100.022.228,00 | 100.022.228,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 150.318.000,00 | 150.318.000,00 | 101.384.940,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.581.424.933,00 | 1.581.424.933,00 | 2.341.571.681,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 449.683.943,00 | 449.683.943,00 | 449.683.943,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 199.332.800,00 | 199.332.800,00 | 199.332.800,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 3.276.764.091,20 | 3.276.764.091,20 | 3.183.941.121,10 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 2.615.180.000,00 | 2.615.180.000,00 | 2.472.624.013,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 499.300.000,00 | 499.300.000,00 | 499.300.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 20.687.351.325,86 | 20.687.351.325,86 | 19.943.862.658,55 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 685.546.758,00 | 685.546.758,00 | 685.546.758,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 215.755.421,00 | 215.755.421,00 | 215.755.421,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium | 1.508.543.627,00 | 1.508.543.627,00 | 1.008.543.627,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 543.614.915,00 | 543.614.915,00 | 543.614.915,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0011 | Pembangunan Kantin Sekolah | 310.902.558,12 | 310.902.558,12 | 310.902.558,12 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2.811.368.127,31 | 2.811.368.127,31 | 2.773.475.384,45 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 787.561.369,00 | 787.561.369,00 | 774.518.715,55 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2.014.626.033,10 | 2.014.626.033,10 | 1.887.996.632,10 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 1.432.070.588,00 | 1.432.070.588,00 | 1.432.070.588,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 2.113.577.800,00 | 2.113.577.800,00 | 2.113.577.800,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 121.359.935,00 | 121.359.935,00 | 135.624.692,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 144.437.910,00 | 144.437.910,00 | 144.437.910,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 289.583.651,00 | 289.583.651,00 | 289.583.651,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 4.599.480.000,00 | 4.599.480.000,00 | 4.305.730.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 194.046.311,00 | 194.046.311,00 | 194.046.311,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 140.862.290,00 | 140.862.290,00 | 140.862.290,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 129.114.000,00 | 129.114.000,00 | 129.114.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.687.955.062,00 | 1.687.955.062,00 | 1.901.716.435,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 557.944.970,33 | 557.944.970,33 | 557.944.970,33 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 398.600.000,00 | 398.600.000,00 | 398.600.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 11.617.672.147,87 | 11.617.672.147,87 | 11.617.013.257,87 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 3.434.733.502,27 | 3.434.733.502,27 | 3.434.733.502,27 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengadaan Mebel PAUD | 388.228.684,00 | 388.228.684,00 | 388.228.684,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | 1.008.108.655,20 | 1.008.108.655,20 | 1.008.108.655,20 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 1.958.800.000,00 | 1.958.800.000,00 | 1.958.300.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 374.966,00 | 374.966,00 | 374.966,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 23.661.000,00 | 23.661.000,00 | 23.661.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 109.434.560,00 | 109.434.560,00 | 109.434.560,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 71.850.000,00 | 71.850.000,00 | 71.850.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 1.869.657.790,00 | 1.869.657.790,00 | 1.869.598.900,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga  Peserta Didik PAUD | 369.385.720,00 | 369.385.720,00 | 369.385.720,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 904.394.985,00 | 904.394.985,00 | 904.394.985,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1.478.942.285,40 | 1.478.942.285,40 | 1.478.942.285,40 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 544.480.000,00 | 544.480.000,00 | 544.480.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | 514.480.000,00 | 514.480.000,00 | 514.480.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 820.065.000,00 | 820.065.000,00 | 820.065.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 820.065.000,00 | 820.065.000,00 | 820.065.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 284.971.000,00 | 284.971.000,00 | 284.971.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 285.094.000,00 | 285.094.000,00 | 285.094.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 133.403.200,00 | 133.403.200,00 | 133.403.200,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 133.403.200,00 | 133.403.200,00 | 133.403.200,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 133.403.200,00 | 133.403.200,00 | 133.403.200,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 19.910.050,00 | 19.910.050,00 | 19.910.050,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 2.02 | | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 19.910.050,00 | 19.910.050,00 | 19.910.050,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 2.02 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 17.189.800,00 | 17.189.800,00 | 17.189.800,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 2.720.250,00 | 2.720.250,00 | 2.720.250,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 181.899.221.414,99 | 181.899.221.414,99 | 181.157.752.766,60 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 176.428.574.729,19 | 176.428.574.729,19 | 175.733.448.059,82 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 174.828.807.449,19 | 174.828.807.449,19 | 174.133.680.779,82 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.599.767.280,00 | 1.599.767.280,00 | 1.599.767.280,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.103.916.929,02 | 1.103.916.929,02 | 1.057.784.950,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 148.768.250,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 283.825.874,00 | 283.825.874,00 | 289.030.374,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 111.800.000,00 | 111.800.000,00 | 111.800.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 306.882.326,00 | 306.882.326,00 | 306.882.326,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 186.108.729,02 | 186.108.729,02 | 186.004.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.562.550.798,78 | 3.562.550.798,78 | 3.562.550.798,78 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 201.803.411,78 | 201.803.411,78 | 201.803.411,78 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 188.774.937,00 | 188.774.937,00 | 188.774.937,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 90.300.000,00 | 90.300.000,00 | 90.300.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.081.672.450,00 | 3.081.672.450,00 | 3.081.672.450,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 679.028.958,00 | 679.028.958,00 | 678.968.958,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 316.027.602,00 | 316.027.602,00 | 315.967.602,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 164.061.756,00 | 164.061.756,00 | 164.061.756,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 48.939.600,00 | 48.939.600,00 | 48.939.600,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 6.868.660.178,77 | 6.868.660.178,77 | 6.867.567.890,77 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 6.868.660.178,77 | 6.868.660.178,77 | 6.867.567.890,77 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 525.439.409,00 | 525.439.409,00 | 524.314.409,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 525.339.409,00 | 525.339.409,00 | 524.214.409,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | 109.004.675,00 | 109.004.675,00 | 109.004.675,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | 208.969.629,00 | 208.969.629,00 | 207.844.629,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 207.365.105,00 | 207.365.105,00 | 207.365.105,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 6.221.764.769,77 | 6.221.764.769,77 | 6.221.797.481,77 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 301.180.000,00 | 301.180.000,00 | 301.180.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event  Tingkat Kabupaten/Kota | 201.522.000,00 | 201.522.000,00 | 201.522.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | 99.658.000,00 | 99.658.000,00 | 99.658.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 250.277.903,00 | 250.277.903,00 | 250.255.575,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0006 | Seleksi Atlet Daerah | 78.512.500,00 | 78.512.500,00 | 78.508.690,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | 171.765.403,00 | 171.765.403,00 | 171.746.885,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 207.841.070,00 | 207.841.070,00 | 207.818.745,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | 207.841.070,00 | 207.841.070,00 | 207.818.745,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 5.462.465.796,77 | 5.462.465.796,77 | 5.462.543.161,77 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan | 5.462.465.796,77 | 5.462.465.796,77 | 5.462.543.161,77 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 121.456.000,00 | 121.456.000,00 | 121.456.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 121.456.000,00 | 121.456.000,00 | 121.456.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 121.356.000,00 | 121.356.000,00 | 121.356.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0007 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 157.227.243.728,79 | 157.227.243.728,79 | 154.223.692.122,37 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 154.883.301.728,79 | 154.883.301.728,79 | 151.879.750.122,37 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 154.883.301.728,79 | 154.883.301.728,79 | 151.879.750.122,37 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 55.754.172.668,17 | 55.754.172.668,17 | 55.202.482.938,06 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 42.917.504.610,95 | 42.917.504.610,95 | 42.891.589.610,05 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 20.248.921.049,10 | 20.248.921.049,10 | 20.182.921.049,10 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 3.247.391.866,51 | 3.247.391.866,51 | 3.247.391.866,51 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 169.613.000,00 | 169.613.000,00 | 169.613.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 741.525.000,00 | 741.525.000,00 | 827.525.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 14.770.100.195,34 | 14.770.100.195,34 | 14.724.185.194,44 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0025 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | 3.599.337.000,00 | 3.599.337.000,00 | 3.599.337.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi  Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 140.616.500,00 | 140.616.500,00 | 140.616.500,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12.827.399.949,22 | 12.827.399.949,22 | 12.301.625.220,01 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 192.600.000,00 | 192.600.000,00 | 192.600.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 146.101.530,00 | 146.101.530,00 | 146.101.530,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 129.160.000,00 | 129.160.000,00 | 129.160.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 48.171.200,00 | 48.171.200,00 | 48.171.200,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 480.361.000,00 | 480.361.000,00 | 252.249.997,78 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 137.042.000,00 | 137.042.000,00 | 137.042.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 79.140.000,00 | 79.140.000,00 | 79.140.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 264.864.000,00 | 264.864.000,00 | 264.864.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 10.828.463.469,22 | 10.828.463.469,22 | 10.503.463.469,23 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 27.700.000,00 | 27.700.000,00 | 27.700.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 19.107.000,00 | 19.107.000,00 | 46.443.273,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 162.417.750,00 | 162.417.750,00 | 162.417.750,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 68.665.000,00 | 68.665.000,00 | 68.665.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 243.607.000,00 | 243.607.000,00 | 243.607.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 9.268.108,00 | 9.268.108,00 | 9.268.108,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 9.268.108,00 | 9.268.108,00 | 9.268.108,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 98.579.228.060,62 | 98.579.228.060,62 | 96.127.366.184,31 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 92.062.270.975,66 | 92.062.270.975,66 | 89.727.430.619,35 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 90.599.211.975,66 | 90.599.211.975,66 | 88.264.371.619,35 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.463.059.000,00 | 1.463.059.000,00 | 1.463.059.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 426.810.500,00 | 426.810.500,00 | 436.913.480,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 120.089.000,00 | 120.089.000,00 | 120.089.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 109.860.000,00 | 109.860.000,00 | 109.860.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 41.205.000,00 | 41.205.000,00 | 51.307.980,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 155.656.500,00 | 155.656.500,00 | 155.656.500,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5.736.404.251,04 | 5.736.404.251,04 | 5.593.474.751,04 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24.145.550,00 | 24.145.550,00 | 29.996.050,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 104.488.940,00 | 104.488.940,00 | 104.488.940,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 | 8.080.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5.600.909.761,04 | 5.600.909.761,04 | 5.450.909.761,04 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 336.042.333,92 | 336.042.333,92 | 351.847.333,92 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.048.000,00 | 37.048.000,00 | 52.853.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 298.994.333,92 | 298.994.333,92 | 298.994.333,92 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2.343.942.000,00 | 2.343.942.000,00 | 2.343.942.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.343.942.000,00 | 2.343.942.000,00 | 2.343.942.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 1.639.142.000,00 | 1.639.142.000,00 | 1.639.142.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 868.000.000,00 | 868.000.000,00 | 868.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 343.000.000,00 | 343.000.000,00 | 343.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 432.000.000,00 | 432.000.000,00 | 432.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 432.000.000,00 | 432.000.000,00 | 432.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 193.542.000,00 | 193.542.000,00 | 193.542.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 11.660.000,00 | 11.660.000,00 | 11.660.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 162.550.000,00 | 162.550.000,00 | 162.550.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 19.332.000,00 | 19.332.000,00 | 19.332.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 145.600.000,00 | 145.600.000,00 | 145.600.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 145.600.000,00 | 145.600.000,00 | 145.600.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 512.800.000,00 | 512.800.000,00 | 512.800.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.02 | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 382.800.000,00 | 382.800.000,00 | 382.800.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0005 | Pemantauan  Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 208.800.000,00 | 208.800.000,00 | 208.800.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | | | | | | RSUD Tarempa | 744.321.552,00 | 744.321.552,00 | 944.321.552,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 744.321.552,00 | 744.321.552,00 | 944.321.552,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 744.321.552,00 | 744.321.552,00 | 944.321.552,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 87.700.000,00 | 87.700.000,00 | 87.700.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 87.700.000,00 | 87.700.000,00 | 87.700.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 87.700.000,00 | 87.700.000,00 | 87.700.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 656.621.552,00 | 656.621.552,00 | 856.621.552,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 266.621.552,00 | 266.621.552,00 | 466.621.552,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 266.621.552,00 | 266.621.552,00 | 466.621.552,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0002 | | | | | | RSUD Jemaja | 493.368.624,00 | 493.368.624,00 | 493.368.624,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 257.904.224,00 | 257.904.224,00 | 257.904.224,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 257.904.224,00 | 257.904.224,00 | 257.904.224,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 235.464.400,00 | 235.464.400,00 | 235.464.400,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 235.464.400,00 | 235.464.400,00 | 235.464.400,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0003 | | | | | | RSUD Palmatak | 501.965.739,00 | 501.965.739,00 | 501.965.739,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 270.289.739,00 | 270.289.739,00 | 245.139.739,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 270.289.739,00 | 270.289.739,00 | 245.139.739,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 231.676.000,00 | 231.676.000,00 | 256.826.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 231.676.000,00 | 231.676.000,00 | 256.826.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0004 | | | | | | Puskesmas Siantan Tengah | 501.648.248,07 | 501.648.248,07 | 551.313.008,75 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 455.746.378,07 | 455.746.378,07 | 505.411.138,75 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 455.746.378,07 | 455.746.378,07 | 505.411.138,75 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 45.901.870,00 | 45.901.870,00 | 45.901.870,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 45.901.870,00 | 45.901.870,00 | 45.901.870,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | | | | | | Puskesmas Letung | 214.840.000,00 | 214.840.000,00 | 214.840.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 182.270.000,00 | 182.270.000,00 | 182.270.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 182.270.000,00 | 182.270.000,00 | 182.270.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 28.420.000,00 | 28.420.000,00 | 28.420.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 19.040.000,00 | 19.040.000,00 | 19.040.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 21.280.000,00 | 21.280.000,00 | 21.280.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 59.100.000,00 | 59.100.000,00 | 59.100.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 25.870.000,00 | 25.870.000,00 | 25.870.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 28.560.000,00 | 28.560.000,00 | 28.560.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0006 | | | | | | Puskesmas Jemaja Timur | 26.479.600,00 | 26.479.600,00 | 26.479.600,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.479.600,00 | 26.479.600,00 | 26.479.600,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0007 | | | | | | Puskesmas Palmatak | 153.222.298,00 | 153.222.298,00 | 153.222.298,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90.822.298,00 | 90.822.298,00 | 90.822.298,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 90.822.298,00 | 90.822.298,00 | 90.822.298,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 62.400.000,00 | 62.400.000,00 | 62.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62.400.000,00 | 62.400.000,00 | 62.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0008 | | | | | | Puskesmas Tarempa | 55.626.000,00 | 55.626.000,00 | 55.626.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 55.626.000,00 | 55.626.000,00 | 55.626.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0009 | | | | | | Puskesmas Siantan Selatan | 20.000.245,00 | 20.000.245,00 | 20.000.245,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20.000.245,00 | 20.000.245,00 | 20.000.245,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0010 | | | | | | Puskesmas Siantan Timur | 44.785.000,00 | 44.785.000,00 | 44.785.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 44.785.000,00 | 44.785.000,00 | 44.785.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0011 | | | | | | Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | 99.591.208,00 | 99.591.208,00 | 99.591.208,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 99.591.208,00 | 99.591.208,00 | 99.591.208,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0012 | | | | | | Puskesmas Jemaja Barat | 133.624.000,00 | 133.624.000,00 | 133.624.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 133.624.000,00 | 133.624.000,00 | 133.624.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 133.624.000,00 | 133.624.000,00 | 133.624.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 133.624.000,00 | 133.624.000,00 | 133.624.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0013 | | | | | | Puskesmas Siantan Utara | 118.465.750,00 | 118.465.750,00 | 119.227.829,04 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 113.528.000,00 | 113.528.000,00 | 113.528.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.937.750,00 | 4.937.750,00 | 5.699.829,04 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.937.750,00 | 4.937.750,00 | 5.699.829,04 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4.937.750,00 | 4.937.750,00 | 5.699.829,04 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0014 | | | | | | Puskesmas Kute Siantan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 38.036.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 29.036.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 29.036.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | | | | | | RSUD Tarempa | 4.609.052.374,00 | 4.609.052.374,00 | 4.673.198.866,70 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 80.221.492,70 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 30.221.492,70 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | 0,00 | 33.925.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 33.925.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 222.000.000,00 | 222.000.000,00 | 222.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 222.000.000,00 | 222.000.000,00 | 222.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 4.337.052.374,00 | 4.337.052.374,00 | 4.337.052.374,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.1 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4.337.052.374,00 | 4.337.052.374,00 | 4.337.052.374,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | | | | | | Puskesmas Siantan Timur | 1.045.118.163,00 | 1.045.118.163,00 | 1.045.118.163,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 548.695.000,00 | 548.695.000,00 | 548.695.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 548.695.000,00 | 548.695.000,00 | 548.695.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 97.100.000,00 | 97.100.000,00 | 97.100.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 153.205.000,00 | 153.205.000,00 | 153.205.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12.335.000,00 | 12.335.000,00 | 12.335.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 85.565.000,00 | 85.565.000,00 | 85.565.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 85.498.000,00 | 85.498.000,00 | 85.498.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 34.098.000,00 | 34.098.000,00 | 34.098.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 1.794.000,00 | 1.794.000,00 | 1.794.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 11.856.000,00 | 11.856.000,00 | 11.856.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 11.856.000,00 | 11.856.000,00 | 11.856.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 11.856.000,00 | 11.856.000,00 | 11.856.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 484.567.163,00 | 484.567.163,00 | 484.567.163,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 334.567.163,00 | 334.567.163,00 | 334.567.163,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.10 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 334.567.163,00 | 334.567.163,00 | 334.567.163,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | | | | | | Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | 56.945.560,00 | 56.945.560,00 | 56.945.560,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 28.464.360,00 | 28.464.360,00 | 28.464.360,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.408.220,00 | 1.408.220,00 | 1.408.220,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.928.140,00 | 7.928.140,00 | 7.928.140,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 8.228.000,00 | 8.228.000,00 | 8.228.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10.851.200,00 | 10.851.200,00 | 10.851.200,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.851.200,00 | 10.851.200,00 | 10.851.200,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 17.630.000,00 | 17.630.000,00 | 17.630.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.11 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 10.490.000,00 | 10.490.000,00 | 10.490.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | | | | | | Puskesmas Jemaja Barat | 408.458.750,50 | 408.458.750,50 | 408.458.750,50 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 307.030.000,00 | 307.030.000,00 | 307.030.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 307.030.000,00 | 307.030.000,00 | 307.030.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 38.425.000,00 | 38.425.000,00 | 38.425.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 101.705.000,00 | 101.705.000,00 | 101.705.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 | 48.200.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 12.678.800,00 | 12.678.800,00 | 12.678.800,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12.678.800,00 | 12.678.800,00 | 12.678.800,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12.678.800,00 | 12.678.800,00 | 12.678.800,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 88.749.950,50 | 88.749.950,50 | 88.749.950,50 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 50.284.963,50 | 50.284.963,50 | 55.336.500,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.894.000,00 | 5.894.000,00 | 5.894.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.989.500,00 | 5.989.500,00 | 5.989.500,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.848.000,00 | 21.848.000,00 | 21.848.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6.543.463,50 | 6.543.463,50 | 11.595.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10.054.987,00 | 10.054.987,00 | 10.054.987,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.054.987,00 | 10.054.987,00 | 10.054.987,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 28.410.000,00 | 28.410.000,00 | 23.358.463,50 |
| 1.02.2.14.0.00.01.12 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 28.410.000,00 | 28.410.000,00 | 23.358.463,50 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | | | | | | Puskesmas Siantan Utara | 375.342.311,00 | 375.342.311,00 | 394.480.232,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 288.751.000,00 | 288.751.000,00 | 288.751.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 288.751.000,00 | 288.751.000,00 | 288.751.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 74.800.000,00 | 74.800.000,00 | 74.800.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 14.040.000,00 | 14.040.000,00 | 14.040.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 72.231.000,00 | 72.231.000,00 | 72.231.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 | 10.680.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 63.340.000,00 | 63.340.000,00 | 63.340.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 11.880.000,00 | 11.880.000,00 | 11.880.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.735.000,00 | 5.735.000,00 | 5.735.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5.735.000,00 | 5.735.000,00 | 5.735.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 5.735.000,00 | 5.735.000,00 | 5.735.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 80.856.311,00 | 80.856.311,00 | 99.994.232,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 52.214.072,00 | 52.214.072,00 | 71.451.993,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.182.572,00 | 1.182.572,00 | 1.182.572,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.018.000,00 | 3.018.000,00 | 22.255.921,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.341.831,00 | 6.341.831,00 | 6.341.831,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.097.411,00 | 15.097.411,00 | 15.097.411,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.499.510,00 | 2.499.510,00 | 2.499.510,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24.074.748,00 | 24.074.748,00 | 24.074.748,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 28.542.239,00 | 28.542.239,00 | 28.542.239,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 28.542.239,00 | 28.542.239,00 | 28.542.239,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.13 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | | | | | | Puskesmas Kute Siantan | 748.043.800,00 | 748.043.800,00 | 745.007.800,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 693.863.800,00 | 693.863.800,00 | 693.863.800,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 684.863.800,00 | 684.863.800,00 | 684.863.800,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 82.720.000,00 | 82.720.000,00 | 82.720.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 98.045.000,00 | 98.045.000,00 | 111.905.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10.560.000,00 | 10.560.000,00 | 10.560.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 31.670.000,00 | 31.670.000,00 | 31.670.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 358.248.800,00 | 358.248.800,00 | 358.248.800,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 53.840.000,00 | 53.840.000,00 | 39.980.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 46.964.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 16.964.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 16.964.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.14 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | | | | | | RSUD Jemaja | 402.661.485,00 | 402.661.485,00 | 402.661.485,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 402.561.485,00 | 402.561.485,00 | 402.561.485,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 43.998.984,00 | 43.998.984,00 | 43.998.984,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.748.984,00 | 18.748.984,00 | 18.748.984,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25.050.000,00 | 25.050.000,00 | 25.050.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 51.896.401,00 | 51.896.401,00 | 51.896.401,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 36.646.401,00 | 36.646.401,00 | 36.646.401,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 6.666.100,00 | 6.666.100,00 | 6.666.100,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6.566.100,00 | 6.566.100,00 | 6.566.100,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.2 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | | | | | | RSUD Palmatak | 2.489.651.864,00 | 2.489.651.864,00 | 2.489.651.864,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.489.601.864,00 | 2.489.601.864,00 | 2.489.601.864,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 56.577.864,00 | 56.577.864,00 | 56.577.864,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.577.864,00 | 6.577.864,00 | 6.577.864,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 33.024.000,00 | 33.024.000,00 | 33.024.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 33.024.000,00 | 33.024.000,00 | 33.024.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 2.400.000.000,00 | 2.400.000.000,00 | 2.400.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.3 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.400.000.000,00 | 2.400.000.000,00 | 2.400.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | | | | | | Puskesmas Siantan Tengah | 894.663.654,00 | 894.663.654,00 | 894.663.654,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 613.467.000,00 | 613.467.000,00 | 613.467.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 613.467.000,00 | 613.467.000,00 | 613.467.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 95.400.000,00 | 95.400.000,00 | 95.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 161.956.000,00 | 161.956.000,00 | 161.956.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12.570.000,00 | 12.570.000,00 | 12.570.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 25.510.000,00 | 25.510.000,00 | 25.510.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 74.199.000,00 | 74.199.000,00 | 74.199.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 164.082.000,00 | 164.082.000,00 | 164.082.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 4.325.000,00 | 4.325.000,00 | 4.325.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 22.785.000,00 | 22.785.000,00 | 22.785.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 9.771.694,00 | 9.771.694,00 | 9.771.694,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 9.771.694,00 | 9.771.694,00 | 9.771.694,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 9.771.694,00 | 9.771.694,00 | 9.771.694,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 271.424.960,00 | 271.424.960,00 | 271.424.960,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 271.424.960,00 | 271.424.960,00 | 271.424.960,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.4 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 271.424.960,00 | 271.424.960,00 | 271.424.960,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | | | | | | Puskesmas Letung | 1.252.216.384,00 | 1.252.216.384,00 | 1.252.216.384,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 414.385.000,00 | 414.385.000,00 | 414.385.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 414.385.000,00 | 414.385.000,00 | 414.385.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 43.140.000,00 | 43.140.000,00 | 43.140.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 15.360.000,00 | 15.360.000,00 | 15.360.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 10.320.000,00 | 10.320.000,00 | 10.320.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 193.255.000,00 | 193.255.000,00 | 193.255.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 | 23.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 63.767.000,00 | 63.767.000,00 | 63.767.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 1.783.000,00 | 1.783.000,00 | 1.783.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 45.240.000,00 | 45.240.000,00 | 45.240.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 832.671.384,00 | 832.671.384,00 | 832.671.384,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 57.991.116,00 | 57.991.116,00 | 57.991.116,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 57.991.116,00 | 57.991.116,00 | 57.991.116,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 774.680.268,00 | 774.680.268,00 | 774.680.268,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.5 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 774.680.268,00 | 774.680.268,00 | 774.680.268,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | | | | | | Puskesmas Jemaja Timur | 801.127.410,00 | 801.127.410,00 | 801.127.410,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 476.226.000,00 | 476.226.000,00 | 476.226.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 476.226.000,00 | 476.226.000,00 | 476.226.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 38.880.000,00 | 38.880.000,00 | 38.880.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 29.040.000,00 | 29.040.000,00 | 29.040.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 16.830.000,00 | 16.830.000,00 | 16.830.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 98.770.000,00 | 98.770.000,00 | 98.770.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 | 18.720.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 7.040.000,00 | 7.040.000,00 | 7.040.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 133.756.000,00 | 133.756.000,00 | 133.756.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 10.890.000,00 | 10.890.000,00 | 10.890.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 21.120.000,00 | 21.120.000,00 | 21.120.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 7.349.000,00 | 7.349.000,00 | 7.349.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 7.349.000,00 | 7.349.000,00 | 7.349.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 7.349.000,00 | 7.349.000,00 | 7.349.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 317.552.410,00 | 317.552.410,00 | 317.552.410,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 69.148.000,00 | 69.148.000,00 | 69.148.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 69.148.000,00 | 69.148.000,00 | 69.148.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 248.404.410,00 | 248.404.410,00 | 248.404.410,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.6 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 248.404.410,00 | 248.404.410,00 | 248.404.410,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | | | | | | Puskesmas Palmatak | 1.659.153.886,00 | 1.659.153.886,00 | 1.659.153.886,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 504.261.000,00 | 504.261.000,00 | 504.261.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 504.261.000,00 | 504.261.000,00 | 504.261.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 105.600.000,00 | 105.600.000,00 | 105.600.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 5.490.000,00 | 5.490.000,00 | 5.490.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 5.320.000,00 | 5.320.000,00 | 5.320.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 11.970.000,00 | 11.970.000,00 | 11.970.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 136.835.000,00 | 136.835.000,00 | 136.835.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 | 6.320.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12.140.000,00 | 12.140.000,00 | 12.140.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 88.910.000,00 | 88.910.000,00 | 88.910.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 111.520.000,00 | 111.520.000,00 | 111.520.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 4.245.000,00 | 4.245.000,00 | 4.245.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 3.271.000,00 | 3.271.000,00 | 3.271.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 5.192.886,00 | 5.192.886,00 | 5.192.886,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5.192.886,00 | 5.192.886,00 | 5.192.886,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 5.192.886,00 | 5.192.886,00 | 5.192.886,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.149.700.000,00 | 1.149.700.000,00 | 1.149.700.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.149.700.000,00 | 1.149.700.000,00 | 1.149.700.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.7 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.149.700.000,00 | 1.149.700.000,00 | 1.149.700.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | | | | | | Puskesmas Tarempa | 1.967.123.267,00 | 1.967.123.267,00 | 1.967.123.267,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 663.105.000,00 | 663.105.000,00 | 663.105.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 663.105.000,00 | 663.105.000,00 | 663.105.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 66.250.000,00 | 66.250.000,00 | 66.250.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 75.400.000,00 | 75.400.000,00 | 75.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 120.925.000,00 | 120.925.000,00 | 120.925.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12.750.000,00 | 12.750.000,00 | 12.750.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 54.500.000,00 | 54.500.000,00 | 54.500.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 145.700.000,00 | 145.700.000,00 | 145.700.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 22.630.000,00 | 22.630.000,00 | 22.630.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 70.450.000,00 | 70.450.000,00 | 70.450.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 15.604.820,00 | 15.604.820,00 | 15.604.820,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15.604.820,00 | 15.604.820,00 | 15.604.820,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 15.604.820,00 | 15.604.820,00 | 15.604.820,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.288.413.447,00 | 1.288.413.447,00 | 1.288.413.447,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 38.888.000,00 | 38.888.000,00 | 38.888.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38.888.000,00 | 38.888.000,00 | 38.888.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 1.249.525.447,00 | 1.249.525.447,00 | 1.249.525.447,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.8 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.249.525.447,00 | 1.249.525.447,00 | 1.249.525.447,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | | | | | | Puskesmas Siantan Selatan | 1.258.807.200,00 | 1.258.807.200,00 | 1.258.807.200,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 750.198.000,00 | 750.198.000,00 | 750.198.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 750.198.000,00 | 750.198.000,00 | 750.198.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 70.647.000,00 | 70.647.000,00 | 70.647.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 72.750.000,00 | 72.750.000,00 | 72.750.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 28.290.000,00 | 28.290.000,00 | 28.290.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 16.830.000,00 | 16.830.000,00 | 16.830.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 207.110.000,00 | 207.110.000,00 | 207.110.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 20.790.000,00 | 20.790.000,00 | 20.790.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 14.985.000,00 | 14.985.000,00 | 14.985.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 12.780.000,00 | 12.780.000,00 | 12.780.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 94.245.000,00 | 94.245.000,00 | 94.245.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 104.376.000,00 | 104.376.000,00 | 104.376.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 11.755.000,00 | 11.755.000,00 | 11.755.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | 10.230.000,00 | 10.230.000,00 | 10.230.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | 53.460.000,00 | 53.460.000,00 | 53.460.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 | 6.675.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 501.934.200,00 | 501.934.200,00 | 501.934.200,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 361.934.200,00 | 361.934.200,00 | 361.934.200,00 |
| 1.02.2.14.0.00.01.9 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 361.934.200,00 | 361.934.200,00 | 361.934.200,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 37.867.261.909,40 | 27.867.261.909,40 | 30.200.565.166,15 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 36.852.964.270,40 | 26.852.964.270,40 | 28.152.111.627,15 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 0,00 | 0,00 | 268.372.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 268.372.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0051 | Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0068 | Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0089 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0101 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0102 | Pembangunan Breakwater | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0103 | Peningkatan Tanggul Sungai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0110 | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0114 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0115 | Pembangunan Tanggul Sungai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0117 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | 0,00 | 0,00 | 268.372.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0121 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0124 | Pembangunan Polder/Kolam Retensi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0127 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 263.297.234,00 | 263.297.234,00 | 796.763.134,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 263.297.234,00 | 263.297.234,00 | 796.763.134,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0,00 | 0,00 | 308.712.900,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 263.297.234,00 | 263.297.234,00 | 488.050.234,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 0013 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 87.712.200,00 | 87.712.200,00 | 98.112.200,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 87.712.200,00 | 87.712.200,00 | 98.112.200,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 87.712.200,00 | 87.712.200,00 | 98.112.200,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0023 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0027 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0032 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 381.089.728,00 | 381.089.728,00 | 381.089.728,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 381.089.728,00 | 381.089.728,00 | 381.089.728,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0023 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | 381.089.728,00 | 381.089.728,00 | 381.089.728,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 2.01 | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 0009 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 0015 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 0019 | Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 0021 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 3.947.187.573,93 | 3.947.187.573,93 | 4.307.901.608,93 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 3.947.187.573,93 | 3.947.187.573,93 | 4.307.901.608,93 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 209.536.230,93 | 209.536.230,93 | 209.536.230,93 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0019 | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 3.663.531.343,00 | 3.663.531.343,00 | 3.977.745.378,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0022 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 74.120.000,00 | 74.120.000,00 | 120.620.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0007 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0009 | Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 19.977.203.447,00 | 9.977.203.447,00 | 10.308.918.215,14 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 19.977.203.447,00 | 9.977.203.447,00 | 10.308.918.215,14 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 0,00 | 0,00 | 110.700.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0032 | Pembangunan Jalan | 15.325.229.174,00 | 5.325.229.174,00 | 5.328.364.174,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0033 | Rekonstruksi Jalan | 3.510.577.713,00 | 3.510.577.713,00 | 3.510.577.713,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan | 776.150.000,00 | 776.150.000,00 | 994.029.768,14 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 365.246.560,00 | 365.246.560,00 | 365.246.560,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0009 | Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0015 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.02 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.02 | 0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.03 | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.03 | 0007 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | 0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | 0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Dasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0013 | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.196.324.087,47 | 12.196.324.087,47 | 11.990.804.741,08 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.355.489.840,75 | 10.355.489.840,75 | 10.305.998.679,75 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.748.637.840,75 | 9.748.637.840,75 | 9.699.146.679,75 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 606.852.000,00 | 606.852.000,00 | 606.852.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.193.881.156,72 | 1.193.881.156,72 | 1.145.587.611,33 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 642.951.299,99 | 642.951.299,99 | 609.856.855,35 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 550.929.856,73 | 550.929.856,73 | 535.730.755,98 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 309.558.603,00 | 309.558.603,00 | 255.759.663,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 244.558.603,00 | 244.558.603,00 | 255.759.663,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 337.394.487,00 | 337.394.487,00 | 283.458.787,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 110.438.000,00 | 110.438.000,00 | 56.502.300,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 226.956.487,00 | 226.956.487,00 | 226.956.487,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.014.297.639,00 | 1.014.297.639,00 | 1.877.817.539,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.02 | | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.02 | 0006 | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 200.150.000,00 | 200.150.000,00 | 200.150.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.02 | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 04 | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 04 | 2.01 | | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 05 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 812.147.639,00 | 812.147.639,00 | 1.675.667.539,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 812.147.639,00 | 812.147.639,00 | 1.675.667.539,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 812.147.639,00 | 812.147.639,00 | 1.675.667.539,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0007 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 0,00 | 0,00 | 170.636.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 0,00 | 0,00 | 170.636.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 04 | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 04 | 2.01 | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 04 | 2.01 | 0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 04 | 2.01 | 0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 05 | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 2.01 | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 2.01 | 0001 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 2.01 | 0004 | Penyelesaian  Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 2.01 | 0005 | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 06 | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 06 | 2.01 | | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 06 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 06 | 2.02 | | Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 08 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 08 | 2.01 | | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 08 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 08 | 2.02 | | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 08 | 2.02 | 0001 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 08 | 2.02 | 0003 | Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 09 | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 09 | 2.01 | | Penerbitan Izin Membuka Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 09 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 10 | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 0,00 | 0,00 | 170.636.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 2.01 | | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 170.636.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 170.636.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | | | | | | UPTD SPAM SIANTAN | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 | 301.554.000,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 7.541.370.790,73 | 7.541.370.790,73 | 7.507.895.565,53 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 7.541.370.790,73 | 7.541.370.790,73 | 7.507.895.565,53 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 375.927.511,00 | 375.927.511,00 | 375.926.631,21 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 375.927.511,00 | 375.927.511,00 | 375.926.631,21 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 879,79 | 879,79 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 375.926.631,21 | 375.926.631,21 | 375.926.631,21 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.165.443.279,73 | 7.165.443.279,73 | 7.131.968.934,32 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.295.184.228,17 | 6.295.184.228,17 | 6.169.967.090,17 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.197.664.228,17 | 6.197.664.228,17 | 6.068.727.090,17 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 97.520.000,00 | 97.520.000,00 | 101.240.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 14.384.000,00 | 14.384.000,00 | 14.384.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 14.384.000,00 | 14.384.000,00 | 14.384.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 273.850.201,47 | 273.850.201,47 | 331.425.327,08 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.605.648,00 | 11.605.648,00 | 62.482.553,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.101.779,39 | 5.101.779,39 | 5.100.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 82.786.434,08 | 82.786.434,08 | 82.786.434,08 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 29.288.800,00 | 29.288.800,00 | 29.288.800,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145.067.540,00 | 145.067.540,00 | 151.767.540,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 226.607.827,09 | 226.607.827,09 | 260.995.494,07 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4.810,56 | 4.810,56 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.942,46 | 5.942,46 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 49.511.569,07 | 49.511.569,07 | 49.511.569,07 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 177.085.505,00 | 177.085.505,00 | 211.483.925,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 299.009.843,00 | 299.009.843,00 | 279.584.843,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 92.418.129,00 | 92.418.129,00 | 72.993.129,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 48.586.800,00 | 48.586.800,00 | 48.586.800,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 158.004.914,00 | 158.004.914,00 | 158.004.914,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 56.407.180,00 | 56.407.180,00 | 75.612.180,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.560.000,00 | 34.560.000,00 | 65.462.180,00 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.847.180,00 | 21.847.180,00 | 10.150.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9.571.333.728,00 | 9.571.333.728,00 | 9.206.331.841,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 197.437.000,00 | 197.437.000,00 | 197.437.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 61.352.000,00 | 61.352.000,00 | 61.352.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 33.800.000,00 | 33.800.000,00 | 33.800.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 20.952.000,00 | 20.952.000,00 | 20.952.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 101.085.000,00 | 101.085.000,00 | 101.085.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 100.085.000,00 | 100.085.000,00 | 100.085.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.373.896.728,00 | 9.373.896.728,00 | 9.008.894.841,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.887,00 | 1.887,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.887,00 | 1.887,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.391.594.357,00 | 8.391.594.357,00 | 7.960.839.450,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.185.888.857,00 | 8.185.888.857,00 | 7.755.133.950,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 205.705.500,00 | 205.705.500,00 | 205.705.500,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 312.802.197,00 | 312.802.197,00 | 343.317.104,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.465.130,00 | 8.465.130,00 | 8.465.130,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 207.586.200,00 | 207.586.200,00 | 266.869.107,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 70.468,00 | 70.468,00 | 70.468,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 8.478.399,00 | 8.478.399,00 | 8.478.399,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.404.000,00 | 30.404.000,00 | 30.404.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 57.798.000,00 | 57.798.000,00 | 29.030.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 204.929.775,00 | 204.929.775,00 | 204.929.775,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 196.835.775,00 | 196.835.775,00 | 196.835.775,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8.094.000,00 | 8.094.000,00 | 8.094.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 427.419.432,00 | 427.419.432,00 | 427.419.432,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 68.310.000,00 | 68.310.000,00 | 68.310.000,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 359.109.432,00 | 359.109.432,00 | 359.109.432,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 37.149.080,00 | 37.149.080,00 | 72.389.080,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 25.349.080,00 | 25.349.080,00 | 60.589.080,00 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 9.980.408.613,23 | 9.980.408.613,23 | 9.653.952.542,50 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 44.065.050,00 | 44.065.050,00 | 86.017.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14.065.000,00 | 14.065.000,00 | 16.065.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 13.865.000,00 | 13.865.000,00 | 13.865.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | 29.800.050,00 | 29.800.050,00 | 69.752.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.03 | 0004 | Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah | 100.050,00 | 100.050,00 | 40.052.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.03 | 0005 | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS | 29.700.000,00 | 29.700.000,00 | 29.700.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.936.343.563,23 | 9.936.343.563,23 | 9.567.935.542,50 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.920.029.788,66 | 8.920.029.788,66 | 8.511.722.268,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.842.969.788,66 | 8.842.969.788,66 | 8.434.662.268,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 77.060.000,00 | 77.060.000,00 | 77.060.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 16.782.000,00 | 16.782.000,00 | 16.782.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16.782.000,00 | 16.782.000,00 | 16.782.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100.500,00 | 100.500,00 | 15.000.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100.500,00 | 100.500,00 | 15.000.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 112.187.455,00 | 112.187.455,00 | 112.187.455,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 101.568,00 | 101.568,00 | 101.568,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 43.943.810,00 | 43.943.810,00 | 43.943.810,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.379.697,00 | 2.379.697,00 | 2.379.697,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 26.475.680,00 | 26.475.680,00 | 26.475.680,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.574.700,00 | 4.574.700,00 | 4.574.700,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 34.712.000,00 | 34.712.000,00 | 34.712.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 353.105.325,00 | 353.105.325,00 | 353.105.325,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 353.105.325,00 | 353.105.325,00 | 353.105.325,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 522.816.702,00 | 522.816.702,00 | 528.800.238,01 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.414.000,00 | 36.414.000,00 | 36.414.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 486.402.702,00 | 486.402.702,00 | 492.386.238,01 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11.121.792,57 | 11.121.792,57 | 30.138.256,49 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10.828.848,00 | 10.828.848,00 | 29.845.311,92 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 292.944,57 | 292.944,57 | 292.944,57 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.612.601.662,00 | 6.612.601.662,00 | 6.805.742.012,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 6.612.601.662,00 | 6.612.601.662,00 | 6.805.742.012,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.612.601.662,00 | 6.612.601.662,00 | 6.805.742.012,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 1.060.190.012,00 | 1.060.190.012,00 | 1.139.363.748,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1.060.190.012,00 | 1.060.190.012,00 | 1.139.363.748,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 48.184.626,00 | 48.184.626,00 | 127.384.626,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0008 | Pembentukan Paskibraka | 1.012.005.386,00 | 1.012.005.386,00 | 1.011.979.122,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 488.058.589,00 | 488.058.589,00 | 488.058.589,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 488.058.589,00 | 488.058.589,00 | 488.058.589,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 427.507.589,00 | 427.507.589,00 | 427.507.589,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | 60.551.000,00 | 60.551.000,00 | 60.551.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 39.467.870,00 | 39.467.870,00 | 119.393.944,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 39.467.870,00 | 39.467.870,00 | 119.393.944,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 39.467.870,00 | 39.467.870,00 | 39.393.944,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 326.589.247,00 | 326.589.247,00 | 326.589.247,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 326.589.247,00 | 326.589.247,00 | 326.589.247,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 326.589.247,00 | 326.589.247,00 | 326.589.247,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.698.295.944,00 | 4.698.295.944,00 | 4.732.336.484,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.041.294.016,00 | 4.041.294.016,00 | 4.116.534.366,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.883.774.016,00 | 3.883.774.016,00 | 3.977.714.366,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 157.520.000,00 | 157.520.000,00 | 138.820.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 19.166.000,00 | 19.166.000,00 | 19.166.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.166.000,00 | 19.166.000,00 | 19.166.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 293.832.690,00 | 293.832.690,00 | 252.632.880,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 55.730.320,00 | 55.730.320,00 | 25.900.320,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.626.396,00 | 13.626.396,00 | 13.626.396,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 84.781.600,00 | 84.781.600,00 | 53.311.600,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.170.600,00 | 3.170.600,00 | 3.170.600,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 136.523.774,00 | 136.523.774,00 | 156.623.964,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 284.369.599,94 | 284.369.599,94 | 284.369.599,94 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 109.700.000,00 | 109.700.000,00 | 109.700.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 174.669.599,94 | 174.669.599,94 | 174.669.599,94 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 59.633.638,06 | 59.633.638,06 | 59.633.638,06 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 19.907.624,06 | 19.907.624,06 | 19.907.624,06 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 38.376.014,00 | 38.376.014,00 | 38.376.014,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | | | | | | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6.594.451.680,18 | 6.594.451.680,18 | 7.756.876.876,64 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 5.754.238.124,18 | 5.754.238.124,18 | 6.906.148.928,44 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 5.754.238.124,18 | 5.754.238.124,18 | 6.906.148.928,44 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 138.029.658,00 | 138.029.658,00 | 138.029.658,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 138.029.658,00 | 138.029.658,00 | 138.029.658,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan | 138.029.658,00 | 138.029.658,00 | 138.029.658,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 191.860.000,00 | 191.860.000,00 | 1.174.120.417,80 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 191.860.000,00 | 191.860.000,00 | 1.174.120.417,80 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 39.560.000,00 | 39.560.000,00 | 39.560.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 28.950.000,00 | 28.950.000,00 | 28.950.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 71.900.000,00 | 71.900.000,00 | 1.054.160.417,80 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 51.450.000,00 | 51.450.000,00 | 51.450.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.420.447.466,18 | 5.420.447.466,18 | 5.590.097.852,64 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.947.828.837,00 | 4.947.828.837,00 | 5.107.479.223,46 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.813.658.837,00 | 4.813.658.837,00 | 4.973.309.223,46 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 134.170.000,00 | 134.170.000,00 | 134.170.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 16.260.000,00 | 16.260.000,00 | 16.260.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16.260.000,00 | 16.260.000,00 | 16.260.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 230.281.228,18 | 230.281.228,18 | 230.281.228,18 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.862.000,00 | 11.862.000,00 | 11.862.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.983.400,00 | 1.983.400,00 | 1.983.400,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 13.215.000,00 | 13.215.000,00 | 13.215.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 4.113.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 130.020.828,18 | 130.020.828,18 | 129.107.828,18 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 113.226.330,00 | 113.226.330,00 | 113.226.330,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 113.226.330,00 | 113.226.330,00 | 113.226.330,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 112.851.071,00 | 112.851.071,00 | 122.851.071,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 72.103.490,00 | 72.103.490,00 | 82.103.490,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40.747.581,00 | 40.747.581,00 | 40.747.581,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 840.213.556,00 | 840.213.556,00 | 850.727.948,20 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 840.213.556,00 | 840.213.556,00 | 850.727.948,20 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 299.999.556,00 | 299.999.556,00 | 299.967.948,20 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.998.300,00 | 3.998.300,00 | 3.998.300,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | 3.998.300,00 | 3.998.300,00 | 3.998.300,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 296.001.256,00 | 296.001.256,00 | 295.969.648,20 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 296.001.256,00 | 296.001.256,00 | 295.969.648,20 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 333.640.000,00 | 333.640.000,00 | 333.640.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 115.240.000,00 | 115.240.000,00 | 115.240.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 115.240.000,00 | 115.240.000,00 | 115.240.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 88.400.000,00 | 88.400.000,00 | 88.400.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 88.400.000,00 | 88.400.000,00 | 88.400.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 4.322.000,00 | 4.322.000,00 | 14.868.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 4.322.000,00 | 4.322.000,00 | 14.868.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 4.322.000,00 | 4.322.000,00 | 14.868.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 202.252.000,00 | 202.252.000,00 | 202.252.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 202.252.000,00 | 202.252.000,00 | 202.252.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 202.252.000,00 | 202.252.000,00 | 202.252.000,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | | | | | | UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 03 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 07 | 2.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.2.08.0.00.03.0001 | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 8.442.567.727,15 | 8.442.567.727,15 | 7.832.567.727,15 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 8.442.567.727,15 | 8.442.567.727,15 | 7.832.567.727,15 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 109.298.064,00 | 109.298.064,00 | 109.196.364,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 109.296.364,00 | 109.296.364,00 | 109.196.364,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 35.854.073,00 | 35.854.073,00 | 35.854.073,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0007 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 73.342.291,00 | 73.342.291,00 | 73.342.291,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.02 | | Penataan Pendaftaran Penduduk | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 24.014.000,00 | 24.014.000,00 | 24.014.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | 24.014.000,00 | 24.014.000,00 | 24.014.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 24.014.000,00 | 24.014.000,00 | 24.014.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 25.201.800,00 | 25.201.800,00 | 25.201.800,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 25.201.800,00 | 25.201.800,00 | 25.201.800,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 22.411.800,00 | 22.411.800,00 | 22.411.800,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 14.135.200,00 | 14.135.200,00 | 14.135.200,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 05 | 2.01 | | Penyusunan Profil Kependudukan | 14.135.200,00 | 14.135.200,00 | 14.135.200,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 14.135.200,00 | 14.135.200,00 | 14.135.200,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.269.918.663,15 | 8.269.918.663,15 | 7.660.020.363,15 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.591.039.022,57 | 7.591.039.022,57 | 6.980.939.022,57 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.452.443.022,57 | 7.452.443.022,57 | 6.842.443.022,57 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 138.496.000,00 | 138.496.000,00 | 138.496.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 241.749.132,58 | 241.749.132,58 | 242.250.832,58 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.964.048,00 | 12.964.048,00 | 12.964.048,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.967.368,00 | 24.967.368,00 | 24.967.368,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.998.922,00 | 12.998.922,00 | 12.998.922,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19.801.000,00 | 19.801.000,00 | 19.801.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.453.965,58 | 40.453.965,58 | 40.955.665,58 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 127.113.829,00 | 127.113.829,00 | 127.113.829,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 371.084.630,00 | 371.084.630,00 | 371.084.630,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 41.081.000,00 | 41.081.000,00 | 41.081.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 171.046.800,00 | 171.046.800,00 | 171.046.800,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 158.956.830,00 | 158.956.830,00 | 158.956.830,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 65.745.878,00 | 65.745.878,00 | 65.745.878,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6.187.500,00 | 6.187.500,00 | 6.187.500,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.735.778,00 | 11.735.778,00 | 11.735.778,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 47.822.600,00 | 47.822.600,00 | 47.822.600,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 5.144.521.811,70 | 5.144.521.811,70 | 4.869.084.326,70 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 5.144.521.811,70 | 5.144.521.811,70 | 4.869.084.326,70 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | 292.321.733,00 | 292.321.733,00 | 292.321.733,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Desa | 292.321.733,00 | 292.321.733,00 | 292.321.733,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | 292.321.733,00 | 292.321.733,00 | 292.321.733,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 03 | 2.01 | | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 03 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 03 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.100.076.400,00 | 1.100.076.400,00 | 1.100.076.400,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1.100.076.400,00 | 1.100.076.400,00 | 1.100.076.400,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1.029.948.400,00 | 1.029.948.400,00 | 1.029.948.400,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 60.378.000,00 | 60.378.000,00 | 60.378.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 444.442.785,00 | 444.442.785,00 | 169.005.300,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 444.442.785,00 | 444.442.785,00 | 169.005.300,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 5.830.000,00 | 5.830.000,00 | 5.830.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 438.612.785,00 | 438.612.785,00 | 163.175.300,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.307.680.893,70 | 3.307.680.893,70 | 3.307.680.893,70 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.645.470.439,70 | 2.645.470.439,70 | 2.645.470.439,70 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.495.672.439,70 | 2.495.672.439,70 | 2.495.672.439,70 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 149.798.000,00 | 149.798.000,00 | 149.798.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 329.427.212,00 | 329.427.212,00 | 329.427.212,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 935.812,00 | 935.812,00 | 935.812,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 86.290.000,00 | 86.290.000,00 | 86.290.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 58.816.000,00 | 58.816.000,00 | 58.816.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.088.000,00 | 17.088.000,00 | 17.088.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 166.297.400,00 | 166.297.400,00 | 166.297.400,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 125.473.242,00 | 125.473.242,00 | 125.473.242,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 74.956.102,00 | 74.956.102,00 | 74.956.102,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21.624.000,00 | 21.624.000,00 | 21.624.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 28.893.140,00 | 28.893.140,00 | 28.893.140,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.310.000,00 | 7.310.000,00 | 7.310.000,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 7.310.000,00 | 7.310.000,00 | 7.310.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 13.364.137.363,13 | 13.364.137.363,13 | 13.579.677.363,10 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 72.731.210,95 | 72.731.210,95 | 908.832.093,95 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 14.747.400,00 | 14.747.400,00 | 14.747.400,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 14.747.400,00 | 14.747.400,00 | 14.747.400,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 14.747.400,00 | 14.747.400,00 | 14.747.400,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 15.931.418,95 | 15.931.418,95 | 15.931.418,95 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 15.931.418,95 | 15.931.418,95 | 15.931.418,95 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 15.931.418,95 | 15.931.418,95 | 15.931.418,95 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 18.960.900,00 | 18.960.900,00 | 18.960.900,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 18.960.900,00 | 18.960.900,00 | 18.960.900,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 18.960.900,00 | 18.960.900,00 | 18.960.900,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 18.457.492,00 | 18.457.492,00 | 17.325.155,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 18.457.492,00 | 18.457.492,00 | 17.325.155,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 18.457.492,00 | 18.457.492,00 | 17.325.155,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | 2.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | 2.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | 2.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 4.634.000,00 | 4.634.000,00 | 841.867.220,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | 4.634.000,00 | 4.634.000,00 | 841.867.220,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0013 | Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah | 4.484.000,00 | 4.484.000,00 | 4.484.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | 150.000,00 | 150.000,00 | 837.383.220,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 13.291.406.152,18 | 13.291.406.152,18 | 12.670.845.269,15 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 275.415.324,01 | 275.415.324,01 | 275.415.324,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 244.743.324,00 | 244.743.324,00 | 244.743.324,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 127.051.800,00 | 127.051.800,00 | 127.051.800,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 117.691.524,00 | 117.691.524,00 | 117.691.524,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.672.000,01 | 30.672.000,01 | 30.672.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.672.000,00 | 30.672.000,00 | 30.672.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 2.038.112.364,00 | 2.038.112.364,00 | 2.038.112.364,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.12 | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 2.038.112.364,00 | 2.038.112.364,00 | 2.038.112.364,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.12 | 0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | 1.995.235.164,00 | 1.995.235.164,00 | 1.995.235.164,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.12 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | 42.812.200,00 | 42.812.200,00 | 42.812.200,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.12 | 0005 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.977.878.464,17 | 10.977.878.464,17 | 10.357.317.581,15 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.886.088.947,21 | 8.886.088.947,21 | 8.936.836.279,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.647.660.947,21 | 8.647.660.947,21 | 8.698.408.279,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 238.428.000,00 | 238.428.000,00 | 238.428.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 315.387.318,94 | 315.387.318,94 | 328.587.319,15 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.164.061,00 | 7.164.061,00 | 7.164.061,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 55.800.000,00 | 55.800.000,00 | 55.800.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 86.285.929,00 | 86.285.929,00 | 99.485.929,21 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.246.828,94 | 28.246.828,94 | 28.246.828,94 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 27.206.500,00 | 27.206.500,00 | 27.206.500,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 110.684.000,00 | 110.684.000,00 | 110.684.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.423.664.143,00 | 1.423.664.143,00 | 699.290.917,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 56.081.683,00 | 56.081.683,00 | 56.081.683,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.042.000,00 | 50.042.000,00 | 50.042.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 19.029.464,00 | 19.029.464,00 | 19.029.464,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.298.510.996,00 | 1.298.510.996,00 | 574.137.770,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 352.738.055,00 | 352.738.055,00 | 392.603.066,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 308.375.625,00 | 308.375.625,00 | 325.715.625,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 44.362.430,00 | 44.362.430,00 | 66.887.441,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | | | | | | UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI | 214.642.071,00 | 214.642.071,00 | 256.782.004,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 157.401.791,00 | 157.401.791,00 | 157.401.791,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.528.799,00 | 2.528.799,00 | 2.528.799,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.104.820,00 | 3.104.820,00 | 3.104.820,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 125.388.172,00 | 125.388.172,00 | 125.388.172,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16.380.000,00 | 16.380.000,00 | 16.380.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 31.239.933,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 31.239.933,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 52.350.280,00 | 52.350.280,00 | 52.350.280,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.834.280,00 | 12.834.280,00 | 12.834.280,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 39.516.000,00 | 39.516.000,00 | 39.516.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | 15.790.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.1 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 10.900.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | | | | | | UPT PENGELOLAAN SAMPAH | 253.877.188,00 | 253.877.188,00 | 328.977.188,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 253.877.188,00 | 253.877.188,00 | 328.977.188,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 253.877.188,00 | 253.877.188,00 | 328.977.188,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 11.995.238,00 | 11.995.238,00 | 11.995.238,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.195.238,00 | 10.195.238,00 | 10.195.238,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9.730.750,00 | 9.730.750,00 | 9.730.750,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.940.750,00 | 6.940.750,00 | 6.940.750,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 232.151.200,00 | 232.151.200,00 | 307.251.200,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 232.151.200,00 | 232.151.200,00 | 291.131.200,00 |
| 2.15.2.11.0.00.01.2 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 16.120.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 11.588.145.291,12 | 11.588.145.291,12 | 11.629.461.116,18 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 11.517.740.487,02 | 11.517.740.487,02 | 11.557.558.306,58 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.893.957.300,13 | 2.893.957.300,13 | 2.937.779.188,13 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.893.957.300,13 | 2.893.957.300,13 | 2.937.779.188,13 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0014 | Relasi Media | 2.812.000.000,13 | 2.812.000.000,13 | 2.812.000.000,13 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0017 | Pelayanan Informasi Publik | 7.287.300,00 | 7.287.300,00 | 9.787.300,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 74.668.000,00 | 74.668.000,00 | 115.991.888,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0024 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.893.358.449,49 | 2.893.358.449,49 | 2.806.238.167,99 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 127.511.028,00 | 127.511.028,00 | 127.511.028,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | 127.511.028,00 | 127.511.028,00 | 127.511.028,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.765.847.421,49 | 2.765.847.421,49 | 2.678.727.139,99 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0016 | Penyelenggaraan  pusat kendali Pemerintah Daerah | 10.546.000,00 | 10.546.000,00 | 18.526.900,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 10.546.000,00 | 10.546.000,00 | 10.546.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0022 | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | 53.196.000,00 | 53.196.000,00 | 53.196.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 2.691.559.421,49 | 2.691.559.421,49 | 2.596.458.239,99 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.730.424.737,40 | 5.730.424.737,40 | 5.813.540.950,46 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.701.000,00 | 6.701.000,00 | 11.870.500,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 11.870.500,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.112.598.929,00 | 5.112.598.929,00 | 5.067.773.299,46 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.909.557.929,00 | 4.909.557.929,00 | 4.781.913.299,46 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 203.040.000,00 | 203.040.000,00 | 285.860.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 33.564.000,00 | 33.564.000,00 | 47.549.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 33.564.000,00 | 33.564.000,00 | 47.549.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 344.143.257,40 | 344.143.257,40 | 452.932.600,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.934.962,00 | 9.934.962,00 | 9.934.962,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.684.380,00 | 4.684.380,00 | 4.684.380,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.752.152,00 | 14.752.152,00 | 14.752.152,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 44.319.732,00 | 44.319.732,00 | 44.319.732,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 37.768.854,00 | 37.768.854,00 | 52.979.722,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.001.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 232.682.177,40 | 232.682.177,40 | 316.260.652,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 25.225.712,00 | 25.225.712,00 | 25.223.712,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.223.712,00 | 25.223.712,00 | 25.223.712,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 181.358.658,00 | 181.358.658,00 | 181.358.658,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 62.948.295,00 | 62.948.295,00 | 62.948.295,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 57.701.546,00 | 57.701.546,00 | 57.701.546,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 60.708.817,00 | 60.708.817,00 | 60.708.817,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26.833.181,00 | 26.833.181,00 | 26.833.181,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 16.723.181,00 | 16.723.181,00 | 16.723.181,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.110.000,00 | 10.110.000,00 | 10.110.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 5.701.994,50 | 5.701.994,50 | 7.200.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 5.701.994,50 | 5.701.994,50 | 7.200.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 5.701.994,50 | 5.701.994,50 | 7.200.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0009 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 7.200.000,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 994,50 | 994,50 | 0,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 64.702.809,60 | 64.702.809,60 | 64.702.809,60 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 64.702.809,60 | 64.702.809,60 | 64.702.809,60 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 58.723.129,60 | 58.723.129,60 | 58.723.129,60 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 58.723.129,60 | 58.723.129,60 | 58.723.129,60 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.02 | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 5.979.680,00 | 5.979.680,00 | 5.979.680,00 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5.979.680,00 | 5.979.680,00 | 5.979.680,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 8.098.503.078,66 | 8.098.503.078,66 | 8.002.441.837,65 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 714.870.000,00 | 714.870.000,00 | 714.870.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 04 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelayanan antar Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 714.870.000,00 | 714.870.000,00 | 714.870.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 714.870.000,00 | 714.870.000,00 | 714.870.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 714.870.000,00 | 714.870.000,00 | 714.870.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 6.613.586.083,49 | 6.613.586.083,49 | 6.645.970.433,46 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 04 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 2.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 05 | 2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 83.642.574,00 | 83.642.574,00 | 83.642.574,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 2.01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 83.642.574,00 | 83.642.574,00 | 83.642.574,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 83.642.574,00 | 83.642.574,00 | 83.642.574,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.523.493.509,49 | 6.523.493.509,49 | 6.555.877.859,46 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.034.074.776,40 | 6.034.074.776,40 | 6.101.459.126,37 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.884.081.176,40 | 5.884.081.176,40 | 5.951.465.526,37 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 149.993.600,00 | 149.993.600,00 | 149.993.600,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 305.022.025,29 | 305.022.025,29 | 270.022.025,29 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 54.593.240,00 | 54.593.240,00 | 54.593.240,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.656.395,00 | 11.656.395,00 | 11.656.395,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24.357.745,00 | 24.357.745,00 | 24.357.745,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.744.600,00 | 17.744.600,00 | 11.744.600,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 196.670.045,29 | 196.670.045,29 | 167.670.045,29 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 166.506.507,80 | 166.506.507,80 | 166.506.507,80 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 9.106.355,80 | 9.106.355,80 | 9.106.355,80 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62.157.440,00 | 62.157.440,00 | 62.157.440,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 95.242.712,00 | 95.242.712,00 | 95.242.712,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 17.890.200,00 | 17.890.200,00 | 17.890.200,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10.620.200,00 | 10.620.200,00 | 10.620.200,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 7.270.000,00 | 7.270.000,00 | 7.270.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 770.046.995,17 | 770.046.995,17 | 641.601.404,19 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 68.329.150,80 | 68.329.150,80 | 103.329.150,80 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 784.215,00 | 784.215,00 | 784.215,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 784.215,00 | 784.215,00 | 784.215,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 784.215,00 | 784.215,00 | 784.215,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 63.744.935,80 | 63.744.935,80 | 98.744.935,80 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 63.744.935,80 | 63.744.935,80 | 98.744.935,80 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 63.744.935,80 | 63.744.935,80 | 98.744.935,80 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 701.717.844,37 | 701.717.844,37 | 538.272.253,39 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 701.717.844,37 | 701.717.844,37 | 538.272.253,39 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 701.717.844,37 | 701.717.844,37 | 538.272.253,39 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 701.717.844,37 | 701.717.844,37 | 538.272.253,39 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 31 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 31 | 04 | 2.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0000 | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | | | | | | UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR | 21.973.224,00 | 21.973.224,00 | 21.973.224,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 21.973.224,00 | 21.973.224,00 | 21.973.224,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 21.973.224,00 | 21.973.224,00 | 21.973.224,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 20.041.824,00 | 20.041.824,00 | 20.041.824,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 20.041.824,00 | 20.041.824,00 | 20.041.824,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | 20.041.824,00 | 20.041.824,00 | 20.041.824,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.931.400,00 | 1.931.400,00 | 1.931.400,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.931.400,00 | 1.931.400,00 | 1.931.400,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.931.400,00 | 1.931.400,00 | 1.931.400,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.30.01.0001 | 2 | 17 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2.07.3.31.01.0002 | | | | | | UPT METROLOGI LEGAL | 16.559.504,00 | 16.559.504,00 | 16.559.504,00 |
| 2.17.2.07.3.31.01.0002 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 16.559.504,00 | 16.559.504,00 | 16.559.504,00 |
| 2.17.2.07.3.31.01.0002 | 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 16.559.504,00 | 16.559.504,00 | 16.559.504,00 |
| 2.17.2.07.3.31.01.0002 | 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 14.440.000,00 | 14.440.000,00 | 14.440.000,00 |
| 2.17.2.07.3.31.01.0002 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 14.440.000,00 | 14.440.000,00 | 14.440.000,00 |
| 2.17.2.07.3.31.01.0002 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 14.440.000,00 | 14.440.000,00 | 14.440.000,00 |
| 2.17.2.07.3.31.01.0002 | 3 | 30 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.119.504,00 | 2.119.504,00 | 2.119.504,00 |
| 2.17.2.07.3.31.01.0002 | 3 | 30 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.119.504,00 | 2.119.504,00 | 2.119.504,00 |
| 2.17.2.07.3.31.01.0002 | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.119.504,00 | 2.119.504,00 | 2.119.504,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4.598.993.625,08 | 4.598.993.625,08 | 4.598.993.625,08 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 4.598.993.625,08 | 4.598.993.625,08 | 4.598.993.625,08 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 4.598.993.625,08 | 4.598.993.625,08 | 4.598.993.625,08 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.01 | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 224.607.000,00 | 224.607.000,00 | 224.607.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 224.607.000,00 | 224.607.000,00 | 224.607.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 203.680.000,00 | 203.680.000,00 | 203.680.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | 20.927.000,00 | 20.927.000,00 | 20.927.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.374.386.625,08 | 4.374.386.625,08 | 4.374.386.625,08 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11.878.000,00 | 11.878.000,00 | 11.878.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.878.000,00 | 11.878.000,00 | 11.878.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.122.684.757,98 | 4.122.684.757,98 | 4.117.594.757,98 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.015.844.757,98 | 4.015.844.757,98 | 3.990.124.757,98 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 106.840.000,00 | 106.840.000,00 | 127.470.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 17.116.000,00 | 17.116.000,00 | 22.206.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 17.116.000,00 | 17.116.000,00 | 22.206.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 132.841.831,10 | 132.841.831,10 | 132.841.831,10 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.197.263,00 | 1.197.263,00 | 1.197.263,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.352.644,00 | 3.352.644,00 | 3.352.644,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.203.924,10 | 10.203.924,10 | 10.203.924,10 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 101.738.000,00 | 101.738.000,00 | 101.738.000,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 27.803.100,00 | 27.803.100,00 | 27.803.100,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 27.803.100,00 | 27.803.100,00 | 27.803.100,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50.523.477,00 | 50.523.477,00 | 50.523.477,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.481.605,00 | 16.481.605,00 | 16.481.605,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.723.392,00 | 1.723.392,00 | 1.723.392,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 32.318.480,00 | 32.318.480,00 | 32.318.480,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11.539.459,00 | 11.539.459,00 | 11.539.459,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7.029.459,00 | 7.029.459,00 | 7.029.459,00 |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 3.985.368.301,79 | 3.985.368.301,79 | 4.025.368.301,79 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 3.904.417.305,79 | 3.904.417.305,79 | 3.919.081.965,79 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 209.606.072,00 | 209.606.072,00 | 477.819.834,50 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 131.013.737,00 | 131.013.737,00 | 260.468.152,50 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 109.409.237,00 | 109.409.237,00 | 192.309.652,50 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 17.046.000,00 | 17.046.000,00 | 38.138.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | 4.558.500,00 | 4.558.500,00 | 30.020.500,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 78.592.335,00 | 78.592.335,00 | 217.351.682,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 40.644.975,00 | 40.644.975,00 | 69.939.980,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 37.947.360,00 | 37.947.360,00 | 147.411.702,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.694.811.233,79 | 3.694.811.233,79 | 3.441.262.131,29 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.179.696,00 | 8.179.696,00 | 47.644.976,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.179.696,00 | 8.179.696,00 | 47.644.976,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.057.588.557,79 | 3.057.588.557,79 | 2.647.283.264,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.951.172.557,79 | 2.951.172.557,79 | 2.540.867.264,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 106.416.000,00 | 106.416.000,00 | 106.416.000,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 252.999.836,00 | 252.999.836,00 | 370.281.352,20 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36.155.869,00 | 36.155.869,00 | 57.248.924,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 39.217.437,00 | 39.217.437,00 | 59.819.698,20 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19.624.380,00 | 19.624.380,00 | 31.974.380,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.057.150,00 | 25.057.150,00 | 32.259.750,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 132.945.000,00 | 132.945.000,00 | 188.978.600,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 300.026.364,00 | 300.026.364,00 | 300.026.364,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 300.026.364,00 | 300.026.364,00 | 300.026.364,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 76.016.780,00 | 76.016.780,00 | 76.026.175,09 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 46.481.860,00 | 46.481.860,00 | 46.491.255,09 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 29.534.920,00 | 29.534.920,00 | 29.534.920,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 80.950.996,00 | 80.950.996,00 | 106.286.336,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 80.950.996,00 | 80.950.996,00 | 106.286.336,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 80.950.996,00 | 80.950.996,00 | 106.286.336,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 51.864.096,00 | 51.864.096,00 | 76.285.814,00 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 29.086.900,00 | 29.086.900,00 | 30.000.522,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | | | | | | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 12.585.993.889,29 | 12.585.993.889,29 | 12.600.974.389,29 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 3.581.000,00 | 3.581.000,00 | 3.579.500,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 3.179.500,00 | 3.179.500,00 | 3.179.500,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 3.179.500,00 | 3.179.500,00 | 3.179.500,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 3.179.500,00 | 3.179.500,00 | 3.179.500,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 04 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 12.582.412.889,29 | 12.582.412.889,29 | 12.597.394.889,29 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN  DAN PERIKANAN | 12.495.679.009,29 | 12.495.679.009,29 | 12.510.668.509,29 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 72.913.000,00 | 72.913.000,00 | 87.913.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 72.913.000,00 | 72.913.000,00 | 87.913.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 68.213.000,00 | 68.213.000,00 | 83.213.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 40.803.000,00 | 40.803.000,00 | 40.800.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 40.801.500,00 | 40.801.500,00 | 40.800.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 2.151.500,00 | 2.151.500,00 | 2.150.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.01 | | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.01 | 0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.03 | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.379.811.509,29 | 12.379.811.509,29 | 12.379.805.509,29 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11.467.908.765,71 | 11.467.908.765,71 | 11.467.908.765,71 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 11.316.428.765,71 | 11.316.428.765,71 | 11.316.428.765,71 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 151.480.000,00 | 151.480.000,00 | 151.480.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 54.968.000,00 | 54.968.000,00 | 54.968.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 54.968.000,00 | 54.968.000,00 | 54.968.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 141.794.412,58 | 141.794.412,58 | 141.792.412,58 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 10.247.384,00 | 10.247.384,00 | 10.247.384,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 111.545.028,58 | 111.545.028,58 | 111.545.028,58 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 343.077.095,00 | 343.077.095,00 | 343.076.095,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 342.876.095,00 | 342.876.095,00 | 342.876.095,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 372.060.236,00 | 372.060.236,00 | 372.060.236,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 41.612.000,00 | 41.612.000,00 | 41.612.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.516.445,00 | 50.516.445,00 | 50.516.445,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 279.931.791,00 | 279.931.791,00 | 279.931.791,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 86.733.880,00 | 86.733.880,00 | 86.726.380,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 35.927.880,00 | 35.927.880,00 | 35.927.880,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 35.927.880,00 | 35.927.880,00 | 35.927.880,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 35.927.880,00 | 35.927.880,00 | 35.927.880,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 25.001.500,00 | 25.001.500,00 | 24.998.500,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.03 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.998.500,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.998.500,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0006 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 5.534.974.687,00 | 5.534.974.687,00 | 5.634.974.687,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 56.850.000,00 | 56.850.000,00 | 56.850.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 56.850.000,00 | 56.850.000,00 | 56.850.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 55.850.000,00 | 55.850.000,00 | 55.850.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 55.850.000,00 | 55.850.000,00 | 55.850.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 55.850.000,00 | 55.850.000,00 | 55.850.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 5.478.124.687,00 | 5.478.124.687,00 | 5.578.124.687,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 5.478.124.687,00 | 5.478.124.687,00 | 5.578.124.687,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 350.387.753,00 | 350.387.753,00 | 415.387.753,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.01 | 0009 | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 349.387.753,00 | 349.387.753,00 | 384.387.753,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 347.987.753,00 | 347.987.753,00 | 347.987.753,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 36.400.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 56.140.557,00 | 56.140.557,00 | 56.140.557,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 56.140.557,00 | 56.140.557,00 | 56.140.557,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 56.140.557,00 | 56.140.557,00 | 56.140.557,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.071.596.377,00 | 5.071.596.377,00 | 5.106.596.377,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.316.749.692,00 | 4.316.749.692,00 | 4.316.749.692,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.166.749.692,00 | 4.166.749.692,00 | 4.166.749.692,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 216.143.642,38 | 216.143.642,38 | 226.143.642,38 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.362.318,00 | 10.362.318,00 | 10.362.318,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 16.280.615,00 | 16.280.615,00 | 16.280.615,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.014.000,00 | 28.014.000,00 | 28.014.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.086.515,00 | 6.086.515,00 | 6.086.515,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 153.000.194,38 | 153.000.194,38 | 163.000.194,38 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 166.843.129,00 | 166.843.129,00 | 191.843.129,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.037.040,00 | 35.037.040,00 | 35.037.040,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60.049.265,00 | 60.049.265,00 | 60.049.265,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.974.000,00 | 2.974.000,00 | 27.974.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 68.782.824,00 | 68.782.824,00 | 68.782.824,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 358.459.913,62 | 358.459.913,62 | 358.459.913,62 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.242.530,00 | 5.242.530,00 | 5.242.530,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.420.000,00 | 9.420.000,00 | 9.420.000,00 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 343.797.383,62 | 343.797.383,62 | 343.797.383,62 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 43.105.730.216,63 | 43.105.730.216,63 | 43.349.022.063,31 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 43.105.730.216,63 | 43.105.730.216,63 | 43.349.022.063,31 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 43.105.730.216,63 | 43.105.730.216,63 | 43.349.022.063,31 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 6.179.964.216,93 | 6.179.964.216,93 | 6.096.331.607,58 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | 133.544.571,00 | 133.544.571,00 | 133.544.571,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 104.696.571,00 | 104.696.571,00 | 104.696.571,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 28.848.000,00 | 28.848.000,00 | 28.848.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 5.129.230.373,00 | 5.129.230.373,00 | 5.045.597.763,65 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 2.173.041.871,00 | 2.173.041.871,00 | 2.273.308.917,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 2.956.188.502,00 | 2.956.188.502,00 | 2.772.288.846,65 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 917.189.272,93 | 917.189.272,93 | 917.189.272,93 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 438.303.700,00 | 438.303.700,00 | 184.823.700,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 363.969.572,93 | 363.969.572,93 | 637.117.472,93 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 114.916.000,00 | 114.916.000,00 | 95.248.100,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.145.402.204,00 | 1.145.402.204,00 | 1.508.892.204,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 77.578.000,00 | 77.578.000,00 | 77.578.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 76.203.000,00 | 76.203.000,00 | 76.203.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 112.425.680,00 | 112.425.680,00 | 112.425.680,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 19.387.000,00 | 19.387.000,00 | 19.387.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 59.995.980,00 | 59.995.980,00 | 59.995.980,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 33.042.700,00 | 33.042.700,00 | 33.042.700,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 905.760.524,00 | 905.760.524,00 | 1.269.250.524,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 128.003.900,00 | 128.003.900,00 | 491.493.900,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 631.431.553,00 | 631.431.553,00 | 631.431.553,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 146.325.071,00 | 146.325.071,00 | 146.325.071,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 49.638.000,00 | 49.638.000,00 | 49.638.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 24.890.000,00 | 24.890.000,00 | 24.890.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 24.748.000,00 | 24.748.000,00 | 24.748.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 35.780.363.795,70 | 35.780.363.795,70 | 35.743.798.251,73 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 23.548.002.855,27 | 23.548.002.855,27 | 22.614.502.858,85 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 22.892.623.495,27 | 22.892.623.495,27 | 21.959.123.498,85 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 655.379.360,00 | 655.379.360,00 | 655.379.360,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 70.331.140,00 | 70.331.140,00 | 77.475.528,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 70.331.140,00 | 70.331.140,00 | 77.475.528,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 4.849.926.111,00 | 4.849.926.111,00 | 5.365.954.663,43 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 136.243.039,00 | 136.243.039,00 | 136.243.039,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 147.187.486,00 | 147.187.486,00 | 189.436.538,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 149.498.928,00 | 149.498.928,00 | 92.727.652,41 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.316.285.214,00 | 1.316.285.214,00 | 1.690.726.446,02 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 96.742.000,00 | 96.742.000,00 | 96.742.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 742.219.241,00 | 742.219.241,00 | 704.486.985,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2.261.750.203,00 | 2.261.750.203,00 | 2.455.592.003,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 944.898.601,00 | 944.898.601,00 | 1.000.878.601,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 944.898.601,00 | 944.898.601,00 | 1.000.878.601,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.037.114.259,00 | 2.037.114.259,00 | 2.243.115.891,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 89.611.977,00 | 89.611.977,00 | 89.611.977,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.354.159.014,00 | 1.354.159.014,00 | 1.456.599.014,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 593.343.268,00 | 593.343.268,00 | 696.904.900,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.648.751.617,99 | 1.648.751.617,99 | 1.660.716.498,01 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 582.770.780,00 | 582.770.780,00 | 444.735.660,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 188.152.700,00 | 188.152.700,00 | 188.152.700,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 877.828.137,99 | 877.828.137,99 | 1.027.828.138,01 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 669.262.030,00 | 669.262.030,00 | 675.525.430,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 177.988.160,00 | 177.988.160,00 | 177.988.160,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 171.273.870,00 | 171.273.870,00 | 177.537.270,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 397.592.220,00 | 397.592.220,00 | 397.592.220,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 143.737.020,00 | 143.737.020,00 | 143.737.020,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 102.744.000,00 | 102.744.000,00 | 102.744.000,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 151.111.200,00 | 151.111.200,00 | 151.111.200,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | 404.526.587,94 | 404.526.587,94 | 404.526.587,94 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 140.200.820,94 | 140.200.820,94 | 140.200.820,94 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 202.806.779,00 | 202.806.779,00 | 202.806.779,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 61.518.988,00 | 61.518.988,00 | 61.518.988,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.209.958.373,50 | 1.209.958.373,50 | 1.303.509.973,50 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | 489.187.011,00 | 489.187.011,00 | 618.046.011,00 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 280.422.869,50 | 280.422.869,50 | 357.088.869,50 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 440.348.493,00 | 440.348.493,00 | 328.375.093,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 24.791.407.561,00 | 27.845.185.675,00 | 27.734.635.761,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | | | | SEKRETARIAT DPRD | 24.791.407.561,00 | 27.845.185.675,00 | 27.734.635.761,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 6.346.251.049,00 | 6.346.251.049,00 | 9.120.322.508,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 932.453.059,00 | 932.453.059,00 | 1.386.022.099,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 932.411.859,00 | 932.411.859,00 | 1.385.980.899,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 530.518.000,00 | 530.518.000,00 | 530.518.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | 124.010.000,00 | 124.010.000,00 | 124.010.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD | 201.522.000,00 | 201.522.000,00 | 201.522.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan | 135.986.000,00 | 135.986.000,00 | 135.986.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | 2.124.483.196,00 | 2.124.483.196,00 | 2.465.661.750,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Orientasi DPRD | 155.442.000,00 | 155.442.000,00 | 155.442.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | 722.427.800,00 | 722.427.800,00 | 958.547.800,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 381.200.000,00 | 381.200.000,00 | 451.200.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 5.446,00 | 5.446,00 | 0,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 865.407.950,00 | 865.407.950,00 | 900.471.950,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 507.184.600,00 | 507.184.600,00 | 1.305.505.465,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 228.272.500,00 | 228.272.500,00 | 228.272.500,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 37.937.600,00 | 37.937.600,00 | 37.937.600,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | 240.974.500,00 | 240.974.500,00 | 1.039.295.365,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | 2.251.612.194,00 | 2.251.612.194,00 | 3.432.615.194,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1.603.701.606,00 | 1.603.701.606,00 | 2.536.878.606,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 647.910.588,00 | 647.910.588,00 | 895.736.588,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 18.445.156.512,00 | 21.498.934.626,00 | 18.614.313.253,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.369.896,00 | 5.369.896,00 | 5.369.896,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 188.700,00 | 188.700,00 | 188.700,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 34.496,00 | 34.496,00 | 34.496,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 188.700,00 | 188.700,00 | 188.700,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.861.060.033,00 | 5.861.060.033,00 | 5.760.312.781,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.653.756.033,00 | 5.653.756.033,00 | 5.553.008.781,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 206.963.000,00 | 206.963.000,00 | 206.963.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 341.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 88.013.823,00 | 88.013.823,00 | 88.013.823,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 87.890.000,00 | 87.890.000,00 | 87.890.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 123.823,00 | 123.823,00 | 123.823,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 271.076.880,00 | 3.324.854.994,00 | 495.470.848,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30.396.140,00 | 30.396.140,00 | 30.396.140,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.862.859,00 | 6.862.859,00 | 204.454.827,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 26.763.538,00 | 26.763.538,00 | 26.763.538,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 54.148.930,00 | 54.148.930,00 | 59.390.930,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 162.460,00 | 162.460,00 | 162.460,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 176.953,00 | 176.953,00 | 176.953,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 62.560.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 111.566.000,00 | 3.165.344.114,00 | 111.566.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 405.424.674,00 | 405.424.674,00 | 450.934.699,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 97.871.290,00 | 97.871.290,00 | 102.859.180,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 160.438.956,00 | 160.438.956,00 | 200.961.091,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 147.114.428,00 | 147.114.428,00 | 147.114.428,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 251.192.376,00 | 251.192.376,00 | 251.192.376,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 28.660.000,00 | 28.660.000,00 | 28.660.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.470.000,00 | 39.470.000,00 | 39.470.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 183.062.376,00 | 183.062.376,00 | 183.062.376,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 11.185.699.999,00 | 11.185.699.999,00 | 11.185.699.999,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 10.388.997.441,00 | 10.388.997.441,00 | 10.388.997.441,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 530.529.000,00 | 530.529.000,00 | 530.529.000,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 266.173.558,00 | 266.173.558,00 | 266.173.558,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | | Layanan Administrasi DPRD | 377.247.431,00 | 377.247.431,00 | 377.247.431,00 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 377.092.431,00 | 377.092.431,00 | 377.092.431,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 10.981.679.037,60 | 10.981.679.037,60 | 11.390.118.955,60 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 10.981.679.037,60 | 10.981.679.037,60 | 11.390.118.955,60 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | | | | PERENCANAAN | 10.981.479.037,60 | 10.981.479.037,60 | 11.040.018.955,60 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 2.552.513.326,40 | 2.552.513.326,40 | 2.572.513.326,40 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 2.242.924.920,40 | 2.242.924.920,40 | 2.262.924.920,40 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 303.082.760,40 | 303.082.760,40 | 300.082.760,40 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 1.939.842.160,00 | 1.939.842.160,00 | 1.962.842.160,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 22.698.600,00 | 22.698.600,00 | 22.698.600,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 22.698.600,00 | 22.698.600,00 | 22.698.600,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 286.889.806,00 | 286.889.806,00 | 286.889.806,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 286.889.806,00 | 286.889.806,00 | 286.889.806,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 173.847.260,00 | 173.847.260,00 | 232.257.178,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 91.685.000,00 | 91.685.000,00 | 150.094.918,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 22.276.000,00 | 22.276.000,00 | 71.865.918,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 8.748.400,00 | 8.748.400,00 | 8.748.400,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 14.915.600,00 | 14.915.600,00 | 14.915.600,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 25.970.000,00 | 25.970.000,00 | 25.970.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 15.325.000,00 | 15.325.000,00 | 24.145.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 32.272.490,00 | 32.272.490,00 | 32.272.490,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 12.695.020,00 | 12.695.020,00 | 12.695.020,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 15.862.270,00 | 15.862.270,00 | 15.862.270,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3.715.200,00 | 3.715.200,00 | 3.715.200,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 49.889.770,00 | 49.889.770,00 | 49.889.770,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 18.687.960,00 | 18.687.960,00 | 18.687.960,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 17.003.810,00 | 17.003.810,00 | 17.003.810,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 10.098.000,00 | 10.098.000,00 | 10.098.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.255.118.451,20 | 8.255.118.451,20 | 8.235.248.451,20 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 606.645.126,00 | 606.645.126,00 | 606.645.126,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 580.855.126,00 | 580.855.126,00 | 580.855.126,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.790.000,00 | 25.790.000,00 | 25.790.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.634.861.422,42 | 6.634.861.422,42 | 6.531.001.008,42 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.369.161.542,42 | 6.369.161.542,42 | 6.265.301.128,42 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 257.280.000,00 | 257.280.000,00 | 257.280.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.419.880,00 | 8.419.880,00 | 8.419.880,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 582.011.764,18 | 582.011.764,18 | 666.002.178,18 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.236.634,00 | 11.236.634,00 | 30.756.083,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 84.703.581,00 | 84.703.581,00 | 84.703.581,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20.552.913,00 | 20.552.913,00 | 20.552.913,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 94.197.000,00 | 94.197.000,00 | 94.197.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 62.780.000,00 | 62.780.000,00 | 67.252.265,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 290.441.636,18 | 290.441.636,18 | 350.440.336,18 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 143.899.874,60 | 143.899.874,60 | 143.899.874,60 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 116.900.000,00 | 116.900.000,00 | 116.900.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.999.874,60 | 26.999.874,60 | 26.999.874,60 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 271.260.619,00 | 271.260.619,00 | 271.260.619,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 139.149.450,00 | 139.149.450,00 | 139.149.450,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 129.611.169,00 | 129.611.169,00 | 129.611.169,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16.439.645,00 | 16.439.645,00 | 16.439.645,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6.560.025,00 | 6.560.025,00 | 6.560.025,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.879.620,00 | 9.879.620,00 | 9.879.620,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 200.000,00 | 200.000,00 | 350.100.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 200.000,00 | 200.000,00 | 350.100.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 100.000,00 | 100.000,00 | 350.000.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 100.000,00 | 100.000,00 | 350.000.000,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 131.258.840.343,21 | 128.205.062.229,21 | 128.620.156.189,16 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | | | | KEUANGAN | 131.258.840.343,21 | 128.205.062.229,21 | 128.620.156.189,16 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 116.737.616.037,83 | 113.683.837.923,83 | 113.827.840.819,35 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.041.384.518,00 | 1.041.384.518,00 | 1.089.953.518,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 25.663.100,00 | 25.663.100,00 | 25.663.100,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 24.188.000,00 | 24.188.000,00 | 24.188.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 12.142.970,00 | 12.142.970,00 | 12.142.970,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 461.469.448,00 | 461.469.448,00 | 542.072.448,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 447.707.000,00 | 447.707.000,00 | 384.189.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 24.956.000,00 | 24.956.000,00 | 24.956.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 37.098.000,00 | 37.098.000,00 | 68.582.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 67.172.000,00 | 67.172.000,00 | 67.172.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 66.776.000,00 | 66.776.000,00 | 66.776.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 396.000,00 | 396.000,00 | 396.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 250.790.500,00 | 250.790.500,00 | 250.790.500,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 146.784.500,00 | 146.784.500,00 | 146.784.500,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 82.828.000,00 | 82.828.000,00 | 82.828.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 10.678.000,00 | 10.678.000,00 | 10.678.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 115.231.749.019,83 | 112.177.970.905,83 | 112.193.404.801,35 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 13.147.263.978,83 | 10.093.485.864,83 | 8.608.707.406,35 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | 102.084.485.041,00 | 102.084.485.041,00 | 103.584.697.395,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.05 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 146.520.000,00 | 146.520.000,00 | 226.520.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 146.520.000,00 | 146.520.000,00 | 226.520.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 315.124.900,81 | 315.124.900,81 | 335.121.700,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 315.124.900,81 | 315.124.900,81 | 335.121.700,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 185.031.000,00 | 185.031.000,00 | 185.031.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 49.213.200,81 | 49.213.200,81 | 69.210.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 57.973.800,00 | 57.973.800,00 | 57.973.800,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 22.906.900,00 | 22.906.900,00 | 22.906.900,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 320.710.058,00 | 320.710.058,00 | 320.710.058,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 320.710.058,00 | 320.710.058,00 | 320.710.058,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 19.260.000,00 | 19.260.000,00 | 19.260.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 291.975.078,00 | 291.975.078,00 | 291.975.078,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 7.569.000,00 | 7.569.000,00 | 7.569.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 1.905.980,00 | 1.905.980,00 | 1.905.980,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.885.389.346,57 | 13.885.389.346,57 | 14.136.483.611,81 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12.641.356.603,21 | 12.641.356.603,21 | 12.837.593.468,45 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.149.168.603,21 | 12.149.168.603,21 | 12.342.675.468,45 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 492.038.000,00 | 492.038.000,00 | 494.918.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 450.967.966,00 | 450.967.966,00 | 506.125.366,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 25.686.696,00 | 25.686.696,00 | 25.686.696,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 72.303.170,00 | 72.303.170,00 | 72.303.170,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 58.312.500,00 | 58.312.500,00 | 67.770.900,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 248.465.600,00 | 248.465.600,00 | 294.164.600,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 305.102.445,36 | 305.102.445,36 | 305.102.445,36 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 79.800.000,00 | 79.800.000,00 | 79.800.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 225.302.445,36 | 225.302.445,36 | 225.302.445,36 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 314.090.832,00 | 314.090.832,00 | 314.090.832,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 72.316.000,00 | 72.316.000,00 | 72.316.000,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.719.392,00 | 67.719.392,00 | 67.719.392,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 174.055.440,00 | 174.055.440,00 | 174.055.440,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 173.571.500,00 | 173.571.500,00 | 173.571.500,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.947.500,00 | 43.947.500,00 | 43.947.500,00 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.530.000,00 | 29.530.000,00 | 29.530.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.094.000,00 | 100.094.000,00 | 100.094.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 7.575.023.467,11 | 7.575.023.467,11 | 7.242.192.567,10 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | | | | KEPEGAWAIAN | 7.540.069.889,11 | 7.540.069.889,11 | 7.207.238.989,10 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 996.442.205,00 | 996.442.205,00 | 1.146.207.205,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 319.419.305,00 | 319.419.305,00 | 319.418.305,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 275.168.305,00 | 275.168.305,00 | 275.168.305,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 44.250.000,00 | 44.250.000,00 | 44.250.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | 539.315.400,00 | 539.315.400,00 | 689.081.400,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | 539.314.400,00 | 539.314.400,00 | 561.980.400,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1.000,00 | 1.000,00 | 127.101.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 77.707.500,00 | 77.707.500,00 | 77.707.500,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 5.772.500,00 | 5.772.500,00 | 5.772.500,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN | 71.935.000,00 | 71.935.000,00 | 71.935.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.543.627.684,11 | 6.543.627.684,11 | 6.061.031.784,10 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.251.000,00 | 2.251.000,00 | 2.250.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.310.707.861,91 | 6.310.707.861,91 | 5.802.727.437,90 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.124.993.861,91 | 6.124.993.861,91 | 5.617.013.437,90 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 185.714.000,00 | 185.714.000,00 | 185.714.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 145.953.878,00 | 145.953.878,00 | 171.339.402,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.901.250,00 | 6.901.250,00 | 6.901.250,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.694.228,00 | 4.694.228,00 | 4.694.228,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.995.000,00 | 11.995.000,00 | 11.995.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.052.800,00 | 10.052.800,00 | 10.052.800,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 112.310.600,00 | 112.310.600,00 | 137.696.124,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 16.503.169,20 | 16.503.169,20 | 16.503.169,20 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 16.503.169,20 | 16.503.169,20 | 16.503.169,20 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 57.076.700,00 | 57.076.700,00 | 57.076.700,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 54.076.700,00 | 54.076.700,00 | 54.076.700,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11.135.075,00 | 11.135.075,00 | 11.135.075,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 11.135.075,00 | 11.135.075,00 | 11.135.075,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 34.953.578,00 | 34.953.578,00 | 34.953.578,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 34.953.578,00 | 34.953.578,00 | 34.953.578,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 34.953.578,00 | 34.953.578,00 | 34.953.578,00 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 34.953.578,00 | 34.953.578,00 | 34.953.578,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | | | | | | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | 3.436.173.416,31 | 3.436.173.416,31 | 3.436.173.416,31 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | | | | PENGELOLAAN PERBATASAN | 3.436.173.416,31 | 3.436.173.416,31 | 3.436.173.416,31 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | 76.431.300,00 | 76.431.300,00 | 76.431.300,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.01 | | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | 12.970.300,00 | 12.970.300,00 | 12.970.300,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan | 12.970.300,00 | 12.970.300,00 | 12.970.300,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | 23.122.900,00 | 23.122.900,00 | 23.122.900,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.02 | 0003 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara | 23.122.900,00 | 23.122.900,00 | 23.122.900,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.03 | | Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan | 40.338.100,00 | 40.338.100,00 | 40.338.100,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | 40.338.100,00 | 40.338.100,00 | 40.338.100,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.359.742.116,31 | 3.359.742.116,31 | 3.359.742.116,31 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.696.250.711,31 | 2.696.250.711,31 | 2.780.265.059,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.568.296.211,31 | 2.568.296.211,31 | 2.652.310.559,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 121.480.000,00 | 121.480.000,00 | 121.480.000,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.474.500,00 | 6.474.500,00 | 6.474.500,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 9.744.000,00 | 9.744.000,00 | 9.744.000,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.744.000,00 | 9.744.000,00 | 9.744.000,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 286.231.433,00 | 286.231.433,00 | 200.597.970,31 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.873.810,00 | 11.873.810,00 | 11.873.810,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.578.996,00 | 7.578.996,00 | 7.578.996,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 83.847.320,00 | 83.847.320,00 | 58.148.774,31 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 32.718.190,00 | 32.718.190,00 | 32.718.190,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.213.117,00 | 150.213.117,00 | 90.278.200,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 245.198.710,00 | 245.198.710,00 | 245.198.710,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 79.614.000,00 | 79.614.000,00 | 79.614.000,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.049.862,00 | 33.049.862,00 | 33.049.862,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 94.534.848,00 | 94.534.848,00 | 94.534.848,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 105.796.362,00 | 105.796.362,00 | 107.415.477,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 61.414.362,00 | 61.414.362,00 | 61.414.362,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 28.682.000,00 | 28.682.000,00 | 28.682.000,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 17.319.115,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12.770.900,00 | 12.770.900,00 | 12.770.900,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7.531.500,00 | 7.531.500,00 | 7.531.500,00 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.239.400,00 | 5.239.400,00 | 5.239.400,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | INSPEKTORAT DAERAH | 12.388.366.387,76 | 12.388.366.387,76 | 12.388.366.387,76 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 12.388.366.387,76 | 12.388.366.387,76 | 12.388.366.387,76 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | | | | INSPEKTORAT DAERAH | 12.388.366.387,76 | 12.388.366.387,76 | 12.388.366.387,76 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 635.101.575,01 | 635.101.575,01 | 696.184.528,01 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 547.506.898,12 | 547.506.898,12 | 550.956.898,12 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 50.021.555,00 | 50.021.555,00 | 50.021.555,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 114.198.801,05 | 114.198.801,05 | 117.648.801,05 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja | 22.078.929,00 | 22.078.929,00 | 22.078.929,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | 19.977.500,01 | 19.977.500,01 | 19.977.500,01 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa | 56.675.000,00 | 56.675.000,00 | 56.675.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | 98.340.037,00 | 98.340.037,00 | 98.340.037,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 186.215.076,06 | 186.215.076,06 | 186.215.076,06 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 87.594.676,89 | 87.594.676,89 | 145.227.629,89 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br><br>Negara/Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 87.594.676,89 | 87.594.676,89 | 145.227.629,89 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 405.607.550,26 | 405.607.550,26 | 344.669.597,26 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | 405.607.550,26 | 405.607.550,26 | 344.669.597,26 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 17.114.472,00 | 17.114.472,00 | 17.114.472,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 48.247.600,94 | 48.247.600,94 | 33.006.840,94 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 338.887.177,32 | 338.887.177,32 | 289.568.984,32 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 1.358.300,00 | 1.358.300,00 | 4.979.300,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.347.657.262,49 | 11.347.657.262,49 | 11.347.512.262,49 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.150.000,00 | 12.150.000,00 | 12.150.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.150.000,00 | 12.150.000,00 | 12.150.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.358.313.979,39 | 10.358.313.979,39 | 10.353.513.979,39 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.323.873.379,39 | 10.323.873.379,39 | 10.269.703.379,39 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 24.490.000,00 | 24.490.000,00 | 73.860.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.950.600,00 | 9.950.600,00 | 9.950.600,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 | 37.428.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 297.605.660,00 | 297.605.660,00 | 193.735.660,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 293.455.660,00 | 293.455.660,00 | 189.585.660,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 299.478.301,00 | 299.478.301,00 | 389.224.962,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 52.126.847,00 | 52.126.847,00 | 54.146.847,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.979.400,00 | 4.979.400,00 | 4.979.400,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.160.300,00 | 9.160.300,00 | 9.676.420,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.125.000,00 | 6.125.000,00 | 20.325.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 227.086.754,00 | 227.086.754,00 | 300.097.295,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 202.139.991,00 | 202.139.991,00 | 202.139.991,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 148.416.400,00 | 148.416.400,00 | 148.416.400,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 53.723.591,00 | 53.723.591,00 | 53.723.591,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 87.726.983,00 | 87.726.983,00 | 101.915.187,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 9.388.204,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 87.726.983,00 | 87.726.983,00 | 92.526.983,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 52.814.348,10 | 52.814.348,10 | 57.404.483,10 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 6.330.135,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 49.724.348,10 | 49.724.348,10 | 49.724.348,10 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | KECAMATAN SIANTAN | 4.256.767.307,41 | 4.256.767.307,41 | 4.256.767.307,41 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 4.256.767.307,41 | 4.256.767.307,41 | 4.256.767.307,41 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 4.256.767.307,41 | 4.256.767.307,41 | 4.256.767.307,41 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 66.239.100,00 | 66.239.100,00 | 66.239.100,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 66.239.100,00 | 66.239.100,00 | 66.239.100,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 66.239.100,00 | 66.239.100,00 | 66.239.100,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 13.827.000,00 | 13.827.000,00 | 13.827.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 13.827.000,00 | 13.827.000,00 | 13.827.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 13.827.000,00 | 13.827.000,00 | 13.827.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 34.355.000,00 | 34.355.000,00 | 34.355.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 34.355.000,00 | 34.355.000,00 | 34.355.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 27.530.000,00 | 27.530.000,00 | 27.530.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.142.346.207,41 | 4.142.346.207,41 | 4.142.346.207,41 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.274.500,00 | 3.274.500,00 | 3.274.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.268.600,00 | 3.268.600,00 | 3.268.600,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.920.612.747,11 | 3.920.612.747,11 | 3.920.612.747,11 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.699.751.747,11 | 3.699.751.747,11 | 3.699.751.747,11 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 220.836.000,00 | 220.836.000,00 | 220.836.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1.348.000,00 | 1.348.000,00 | 1.348.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.323.000,00 | 1.323.000,00 | 1.323.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1.433.500,00 | 1.433.500,00 | 1.433.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1.347.500,00 | 1.347.500,00 | 1.347.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 38.131.310,30 | 38.131.310,30 | 38.131.310,30 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 34.950,30 | 34.950,30 | 34.950,30 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.652.480,00 | 2.652.480,00 | 2.652.480,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.191.480,00 | 2.191.480,00 | 2.191.480,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 18.961.100,00 | 18.961.100,00 | 18.961.100,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 731.000,00 | 731.000,00 | 731.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12.215.300,00 | 12.215.300,00 | 12.215.300,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 33.143.000,00 | 33.143.000,00 | 33.143.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 140.854.650,00 | 140.854.650,00 | 140.854.650,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 28.613.803,00 | 28.613.803,00 | 28.613.803,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 57.233.320,00 | 57.233.320,00 | 57.233.320,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 55.007.527,00 | 55.007.527,00 | 55.007.527,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.548.500,00 | 3.548.500,00 | 3.548.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.184.100,00 | 2.184.100,00 | 2.184.100,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | | | | | | KELURAHAN TAREMPA | 653.410.799,00 | 653.410.799,00 | 689.410.799,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 653.410.799,00 | 653.410.799,00 | 689.410.799,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 653.410.799,00 | 653.410.799,00 | 689.410.799,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 34.365.000,00 | 34.365.000,00 | 34.365.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 619.045.799,00 | 619.045.799,00 | 655.045.799,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | | | | | | KELURAHAN TAREMPA | 66.071.471,00 | 66.071.471,00 | 66.071.471,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5.103.824,00 | 5.103.824,00 | 5.103.824,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 60.967.647,00 | 60.967.647,00 | 60.967.647,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 16.423.236,00 | 16.423.236,00 | 16.423.236,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.230.116,00 | 1.230.116,00 | 1.230.116,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.546.480,00 | 4.546.480,00 | 4.546.480,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9.659.740,00 | 9.659.740,00 | 9.659.740,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 725.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31.989.411,00 | 31.989.411,00 | 31.989.411,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.269.916,00 | 12.269.916,00 | 12.269.916,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 19.719.495,00 | 19.719.495,00 | 19.719.495,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12.530.000,00 | 12.530.000,00 | 12.530.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 | 3.530.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.01 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | | | | | | KECAMATAN JEMAJA | 4.964.909.148,80 | 4.964.909.148,80 | 5.094.330.555,80 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 49.828.999,00 | 49.828.999,00 | 35.755.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 49.805.000,00 | 49.805.000,00 | 35.755.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 49.805.000,00 | 49.805.000,00 | 35.755.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 23.999,00 | 23.999,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 23.999,00 | 23.999,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 31.092.400,00 | 31.092.400,00 | 31.092.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 31.092.400,00 | 31.092.400,00 | 31.092.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 31.092.400,00 | 31.092.400,00 | 31.092.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.881.887.749,80 | 4.881.887.749,80 | 5.025.383.155,80 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.470.000,00 | 3.470.000,00 | 3.470.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.548.610.240,80 | 4.548.610.240,80 | 4.678.225.646,80 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.334.135.240,80 | 4.334.135.240,80 | 4.463.750.646,80 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 211.970.000,00 | 211.970.000,00 | 211.970.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.983.000,00 | 1.983.000,00 | 1.983.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 522.000,00 | 522.000,00 | 522.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 130.141.463,00 | 130.141.463,00 | 144.121.463,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.890,00 | 5.000.890,00 | 5.000.890,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.023.773,00 | 8.023.773,00 | 8.023.773,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.385.400,00 | 25.385.400,00 | 25.385.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.532.400,00 | 9.532.400,00 | 9.532.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 73.449.000,00 | 73.449.000,00 | 87.429.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 61.650.000,00 | 61.650.000,00 | 61.650.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 61.650.000,00 | 61.650.000,00 | 61.650.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 121.816.046,00 | 121.816.046,00 | 121.816.046,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 32.164.583,00 | 32.164.583,00 | 32.164.583,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.684.000,00 | 9.684.000,00 | 9.684.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 79.967.463,00 | 79.967.463,00 | 79.967.463,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10.860.000,00 | 10.860.000,00 | 10.860.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.970.000,00 | 5.970.000,00 | 5.970.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | | | | | | KELURAHAN LETUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | | | | | | KELURAHAN LETUNG | 785.585.688,00 | 785.585.688,00 | 767.085.688,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 693.030.000,00 | 693.030.000,00 | 674.530.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 693.030.000,00 | 693.030.000,00 | 674.530.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 492.942.000,00 | 492.942.000,00 | 474.442.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 92.555.688,00 | 92.555.688,00 | 92.555.688,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 60.668.860,00 | 60.668.860,00 | 60.668.860,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.898.000,00 | 4.898.000,00 | 4.898.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9.599.680,00 | 9.599.680,00 | 9.599.680,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.271.180,00 | 5.271.180,00 | 5.271.180,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22.006.828,00 | 22.006.828,00 | 22.006.828,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15.007.900,00 | 15.007.900,00 | 15.007.900,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.998.928,00 | 6.998.928,00 | 6.998.928,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9.880.000,00 | 9.880.000,00 | 9.880.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.01 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | | | | | | KECAMATAN PALMATAK | 4.278.725.103,11 | 4.278.725.103,11 | 4.278.725.103,11 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 38.632.000,00 | 38.632.000,00 | 38.432.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 38.632.000,00 | 38.632.000,00 | 38.432.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 38.632.000,00 | 38.632.000,00 | 38.432.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 37.043.681,00 | 37.043.681,00 | 50.053.485,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 37.043.681,00 | 37.043.681,00 | 50.053.485,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 37.043.681,00 | 37.043.681,00 | 50.053.485,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 6.024.000,00 | 6.024.000,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 6.024.000,00 | 6.024.000,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 6.024.000,00 | 6.024.000,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.197.025.422,11 | 4.197.025.422,11 | 4.190.239.618,11 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.922.489.736,11 | 3.922.489.736,11 | 3.916.194.709,91 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.841.489.736,11 | 3.841.489.736,11 | 3.835.194.709,91 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 78.308.539,00 | 78.308.539,00 | 72.556.539,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.514.285,00 | 6.514.285,00 | 6.514.285,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 14.643.924,00 | 14.643.924,00 | 14.643.924,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.306.330,00 | 3.306.330,00 | 3.306.330,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 18.166.000,00 | 18.166.000,00 | 12.480.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35.678.000,00 | 35.678.000,00 | 35.612.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 173.427.147,00 | 173.427.147,00 | 172.108.369,20 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 26.656.948,00 | 26.656.948,00 | 25.338.170,20 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 43.434.000,00 | 43.434.000,00 | 43.434.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 103.336.199,00 | 103.336.199,00 | 103.336.199,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | 0,00 | 6.580.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 6.580.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | | | | | | KECAMATAN SIANTAN TIMUR | 2.163.272.086,93 | 2.163.272.086,93 | 2.238.785.639,38 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 45.251.520,00 | 45.251.520,00 | 22.823.520,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 45.251.520,00 | 45.251.520,00 | 22.823.520,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 45.251.520,00 | 45.251.520,00 | 22.823.520,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 73.073.473,00 | 73.073.473,00 | 36.090.842,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 73.073.473,00 | 73.073.473,00 | 36.090.842,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 73.073.473,00 | 73.073.473,00 | 36.090.842,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 35.339.120,00 | 35.339.120,00 | 35.339.120,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 35.339.120,00 | 35.339.120,00 | 35.339.120,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 8.189.120,00 | 8.189.120,00 | 8.189.120,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 27.150.000,00 | 27.150.000,00 | 27.150.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.009.607.973,93 | 2.009.607.973,93 | 2.144.532.157,38 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.829.361.747,94 | 1.829.361.747,94 | 1.988.744.931,39 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.705.451.747,94 | 1.705.451.747,94 | 1.864.834.931,39 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 123.910.000,00 | 123.910.000,00 | 123.910.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 8.712.000,00 | 8.712.000,00 | 3.010.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8.712.000,00 | 8.712.000,00 | 3.010.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 80.721.420,00 | 80.721.420,00 | 61.964.420,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.042.474,00 | 8.042.474,00 | 8.042.474,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.819.648,00 | 3.819.648,00 | 3.819.648,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 23.316.298,00 | 23.316.298,00 | 23.316.298,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.175.000,00 | 10.175.000,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35.368.000,00 | 35.368.000,00 | 26.786.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90.812.805,99 | 90.812.805,99 | 90.812.805,99 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 41.971.645,99 | 41.971.645,99 | 41.971.645,99 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.672.000,00 | 6.672.000,00 | 6.672.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 42.169.160,00 | 42.169.160,00 | 42.169.160,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | | | | | | KECAMATAN SIANTAN SELATAN | 2.501.307.217,91 | 2.501.307.217,91 | 2.501.307.217,91 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 31.391.900,00 | 31.391.900,00 | 31.391.900,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 31.391.900,00 | 31.391.900,00 | 31.391.900,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 31.391.900,00 | 31.391.900,00 | 31.391.900,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 19.881.900,00 | 19.881.900,00 | 19.881.900,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 19.881.900,00 | 19.881.900,00 | 19.881.900,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 16.231.900,00 | 16.231.900,00 | 16.231.900,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 8.461.140,00 | 8.461.140,00 | 8.461.140,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 8.461.140,00 | 8.461.140,00 | 8.461.140,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 211.140,00 | 211.140,00 | 211.140,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.441.572.277,91 | 2.441.572.277,91 | 2.441.572.277,91 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.151.422.150,91 | 2.151.422.150,91 | 2.158.290.344,91 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.034.782.150,91 | 2.034.782.150,91 | 2.041.650.344,91 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 116.640.000,00 | 116.640.000,00 | 116.640.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 112.152.973,00 | 112.152.973,00 | 105.284.779,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 17.103.870,00 | 17.103.870,00 | 17.103.870,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36.252.251,00 | 36.252.251,00 | 32.834.057,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.780.743,00 | 12.780.743,00 | 12.780.743,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9.710.109,00 | 9.710.109,00 | 9.710.109,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 | 8.150.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 28.156.000,00 | 28.156.000,00 | 24.706.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 63.200.000,00 | 63.200.000,00 | 63.200.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 51.800.000,00 | 51.800.000,00 | 51.800.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31.260.450,00 | 31.260.450,00 | 31.260.450,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7.042.000,00 | 7.042.000,00 | 7.042.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 24.218.450,00 | 24.218.450,00 | 24.218.450,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 53.736.704,00 | 53.736.704,00 | 53.736.704,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.546.704,00 | 45.546.704,00 | 45.546.704,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 8.190.000,00 | 8.190.000,00 | 8.190.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | | | | | | KECAMATAN JEMAJA TIMUR | 2.752.855.036,71 | 2.752.855.036,71 | 2.752.829.036,71 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 21.818.208,71 | 21.818.208,71 | 21.818.208,71 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 21.818.208,71 | 21.818.208,71 | 21.818.208,71 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 21.818.208,71 | 21.818.208,71 | 21.818.208,71 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 59.775.000,00 | 59.775.000,00 | 59.775.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 59.775.000,00 | 59.775.000,00 | 59.775.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 59.775.000,00 | 59.775.000,00 | 59.775.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.671.261.828,00 | 2.671.261.828,00 | 2.671.235.828,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.488.631.146,00 | 2.488.631.146,00 | 2.488.631.146,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.341.581.146,00 | 2.341.581.146,00 | 2.341.581.146,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 147.050.000,00 | 147.050.000,00 | 147.050.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 130.414.020,00 | 130.414.020,00 | 130.388.020,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.383.300,00 | 15.383.300,00 | 15.383.300,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.576.060,00 | 16.576.060,00 | 16.576.060,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9.598.160,00 | 9.598.160,00 | 9.598.160,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.539.000,00 | 4.539.000,00 | 4.539.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 16.941.500,00 | 16.941.500,00 | 16.941.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 67.376.000,00 | 67.376.000,00 | 67.350.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 52.216.662,00 | 52.216.662,00 | 52.216.662,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.072.000,00 | 12.072.000,00 | 12.072.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40.144.662,00 | 40.144.662,00 | 40.144.662,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | | | | | | KECAMATAN SIANTAN TENGAH | 2.849.329.935,88 | 2.849.329.935,88 | 2.849.329.935,88 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 106.152.525,00 | 106.152.525,00 | 20.025.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 106.152.525,00 | 106.152.525,00 | 20.025.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 106.152.525,00 | 106.152.525,00 | 20.025.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.743.177.410,88 | 2.743.177.410,88 | 2.806.304.935,88 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.555.464.262,89 | 2.555.464.262,89 | 2.596.915.528,16 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.427.132.262,89 | 2.427.132.262,89 | 2.470.983.528,16 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 128.332.000,00 | 128.332.000,00 | 125.932.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 88.297.642,99 | 88.297.642,99 | 109.973.902,72 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.046.967,99 | 7.046.967,99 | 7.046.967,99 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37.530.740,00 | 37.530.740,00 | 23.099.999,73 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.965.580,00 | 7.965.580,00 | 7.965.580,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.988.355,00 | 4.988.355,00 | 4.988.355,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0,00 | 0,00 | 31.148.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30.766.000,00 | 30.766.000,00 | 35.725.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 99.415.505,00 | 99.415.505,00 | 99.415.505,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.452.200,00 | 26.452.200,00 | 26.452.200,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 72.963.305,00 | 72.963.305,00 | 72.963.305,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | | | | | | KECAMATAN SIANTAN UTARA | 2.337.489.852,05 | 2.337.489.852,05 | 2.337.489.852,05 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 30.209.470,00 | 30.209.470,00 | 30.209.470,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 30.209.470,00 | 30.209.470,00 | 30.209.470,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 30.209.470,00 | 30.209.470,00 | 30.209.470,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.280.530.382,05 | 2.280.530.382,05 | 2.280.530.382,05 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.137.460.088,78 | 2.137.460.088,78 | 2.137.460.088,78 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.050.280.088,78 | 2.050.280.088,78 | 2.050.280.088,78 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 87.180.000,00 | 87.180.000,00 | 87.180.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12.586.000,00 | 12.586.000,00 | 12.586.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12.586.000,00 | 12.586.000,00 | 12.586.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 28.634.836,27 | 28.634.836,27 | 28.634.836,27 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.242.888,12 | 7.242.888,12 | 7.242.888,12 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.391.948,15 | 21.391.948,15 | 21.391.948,15 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 50.224.495,00 | 50.224.495,00 | 50.224.495,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.224.495,00 | 50.224.495,00 | 50.224.495,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 51.624.962,00 | 51.624.962,00 | 51.624.962,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.172.910,00 | 16.172.910,00 | 16.172.910,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 32.652.052,00 | 32.652.052,00 | 32.652.052,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | | | | | | KECAMATAN JEMAJA BARAT | 2.096.520.790,63 | 2.096.520.790,63 | 2.104.120.790,63 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 56.318.496,00 | 56.318.496,00 | 46.206.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 56.318.496,00 | 56.318.496,00 | 46.206.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 56.318.496,00 | 56.318.496,00 | 46.206.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 31.404.000,00 | 31.404.000,00 | 26.553.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 31.404.000,00 | 31.404.000,00 | 26.553.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 31.404.000,00 | 31.404.000,00 | 26.553.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.004.598.294,63 | 2.004.598.294,63 | 2.027.161.390,63 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.336.309,00 | 8.336.309,00 | 8.336.309,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.740.909,00 | 1.740.909,00 | 1.740.909,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.870.400,00 | 1.870.400,00 | 1.870.400,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.777.307.197,63 | 1.777.307.197,63 | 1.795.846.963,63 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.646.322.197,63 | 1.646.322.197,63 | 1.664.861.963,63 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 128.440.000,00 | 128.440.000,00 | 128.440.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 | 2.545.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 145.826.862,00 | 145.826.862,00 | 145.826.862,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.123.376,00 | 2.123.376,00 | 2.123.376,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 16.259.076,00 | 16.259.076,00 | 16.259.076,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.274.410,00 | 5.274.410,00 | 5.274.410,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 110.118.000,00 | 110.118.000,00 | 110.118.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 40.931.574,00 | 40.931.574,00 | 44.954.904,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 14.538.434,00 | 14.538.434,00 | 18.561.764,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 26.393.140,00 | 26.393.140,00 | 26.393.140,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 27.996.352,00 | 27.996.352,00 | 27.996.352,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.440.000,00 | 11.440.000,00 | 11.440.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 16.556.352,00 | 16.556.352,00 | 16.556.352,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | | | | | | KECAMATAN KUTE SIANTAN | 3.546.215.925,08 | 3.546.215.925,08 | 3.546.215.925,08 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 46.115.200,00 | 46.115.200,00 | 42.165.200,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 46.115.200,00 | 46.115.200,00 | 42.165.200,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 46.115.200,00 | 46.115.200,00 | 42.165.200,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 30.018.100,00 | 30.018.100,00 | 29.786.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 30.018.100,00 | 30.018.100,00 | 29.786.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 30.018.100,00 | 30.018.100,00 | 29.786.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 87.196.000,00 | 87.196.000,00 | 86.136.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 87.196.000,00 | 87.196.000,00 | 86.136.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 81.250.000,00 | 81.250.000,00 | 80.340.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 5.946.000,00 | 5.946.000,00 | 5.796.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 38.767.438,22 | 38.767.438,22 | 27.640.800,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 38.767.438,22 | 38.767.438,22 | 27.640.800,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 5.240.800,00 | 5.240.800,00 | 5.240.800,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 33.526.638,22 | 33.526.638,22 | 22.400.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.344.119.186,86 | 3.344.119.186,86 | 3.360.487.425,08 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29.675.000,00 | 29.675.000,00 | 16.115.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.180.000,00 | 7.180.000,00 | 3.790.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 2.270.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.480.000,00 | 6.480.000,00 | 3.090.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 2.250.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.570.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.535.000,00 | 5.535.000,00 | 2.145.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.746.431.459,97 | 2.746.431.459,97 | 2.850.790.523,55 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.608.004.665,24 | 2.608.004.665,24 | 2.712.466.333,51 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 127.789.600,00 | 127.789.600,00 | 127.789.600,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 10.637.194,73 | 10.637.194,73 | 10.534.590,04 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4.567.244,00 | 4.567.244,00 | 4.567.244,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.567.244,00 | 4.567.244,00 | 4.567.244,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 27.511.000,00 | 27.511.000,00 | 14.598.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 3.710.000,00 | 3.710.000,00 | 3.700.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 12.883.000,00 | 12.883.000,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10.918.000,00 | 10.918.000,00 | 10.898.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 236.337.540,00 | 236.337.540,00 | 236.329.052,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 75.761.153,00 | 75.761.153,00 | 75.761.153,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.600.875,00 | 6.600.875,00 | 6.600.875,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.678.680,00 | 25.678.680,00 | 25.678.680,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.066.660,00 | 12.066.660,00 | 12.066.660,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 31.309.440,00 | 31.309.440,00 | 31.300.952,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 84.920.732,00 | 84.920.732,00 | 84.920.732,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 187.617.017,89 | 187.617.017,89 | 126.107.680,53 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.501.501,00 | 43.501.501,00 | 0,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 144.115.516,89 | 144.115.516,89 | 126.107.680,53 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97.063.860,00 | 97.063.860,00 | 97.063.860,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.168.000,00 | 18.168.000,00 | 18.168.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 78.895.860,00 | 78.895.860,00 | 78.895.860,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 14.916.065,00 | 14.916.065,00 | 14.916.065,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8.286.065,00 | 8.286.065,00 | 8.286.065,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.630.000,00 | 6.630.000,00 | 6.630.000,00 |
| | | | | | | **TOTAL** | **847.118.199.810,74** | **837.118.199.810,74** | **837.118.199.810,74** |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati



ANENG

Lampiran IX
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025

# KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
# SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 1 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | RSUD Tarempa | 3.745.556.652,00 | 5.325.776.522,20 | 320.000.000,00 | 204.043.896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065.556.652,00 | 5.529.820.418,70 |
| 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 551.358.914,00 | 35.927.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.358.914,00 | 35.927.880,00 |
| 3 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Siantan Selatan | 619.703.174,44 | 485.013.409,00 | 36.921.036,00 | 36.921.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.624.210,44 | 521.934.445,00 |
| 4 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 379.967.017,80 | 18.960.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.967.017,80 | 18.960.900,00 |
| 5 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 387.170.541,00 | 290.168.305,00 | 0,00 | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.170.541,00 | 319.418.305,00 |
| 6 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 253.266.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.266.680,00 | 0,00 |
| 7 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | 548.496.000,00 | 749.619.900,00 | 708.059.105,00 | 373.305.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256.555.105,00 | 1.122.925.453,00 |
| 10 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 637.574.822,00 | 56.140.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.574.822,00 | 56.140.557,00 |
| 11 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 12.483.563.876,00 | 9.567.935.542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.483.563.876,00 | 9.567.935.542,50 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 12 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPTD SPAM SIANTAN | 269.314.448,49 | 0,00 | 30.685.551,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 |
| 13 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0,00 | 51.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.450.000,00 |
| 14 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Kute Siantan | 650.271.800,00 | 650.271.800,00 | 19.392.000,00 | 19.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669.663.800,00 | 669.663.800,00 |
| 15 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 87.077.500,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.077.500,00 | 3.800.000,00 |
| 16 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.179.342.000,00 | 1.639.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179.342.000,00 | 1.639.142.000,00 |
| 17 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 180.245.458,00 | 138.029.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.245.458,00 | 138.029.658,00 |
| 18 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 370.000.000,00 | 14.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000.000,00 | 14.868.000,00 |
| 19 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 28.624.435.447,35 | 29.071.754.799,36 | 20.369.810.823,60 | 22.405.286.830,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.994.246.270,95 | 51.477.041.630,06 |
| 20 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 16.326.860,00 | 784.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.326.860,00 | 784.215,00 |
| 21 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.981.012.988,52 | 8.608.707.406,35 | 105.213.314.659,00 | 103.584.697.395,00 | 114.194.327.647,52 | 112.193.404.801,35 |
| 22 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 185.963.655.562,78 | 181.045.252.766,60 | 831.504.491,00 | 112.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.795.160.053,78 | 181.157.752.766,60 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 25 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | UPT METROLOGI LEGAL | 95.363.067,00 | 14.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.363.067,00 | 14.440.000,00 |
| 26 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 527.632.975,00 | 83.642.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527.632.975,00 | 83.642.574,00 |
| 27 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Siantan Utara | 369.499.000,00 | 385.699.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.499.000,00 | 385.699.000,00 |
| 28 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENATAAN DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 363.168.733,00 | 292.321.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.168.733,00 | 292.321.733,00 |
| 29 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 51.276.829,08 | 15.931.418,95 | 5.874.661,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.151.490,70 | 15.931.418,95 |
| 30 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 934.942.143,00 | 399.825.493,09 | 70.452.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.394.225,00 | 399.825.493,09 |
| 31 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 1.568.266.901,50 | 0,00 | 1.733.098,50 | 20.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000.000,00 | 20.400.000,00 |
| 32 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI | 592.046.538,62 | 256.782.004,00 | 16.024.665,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.071.204,58 | 256.782.004,00 |
| 33 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 230.000.000,00 | 24.998.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000.000,00 | 24.998.500,00 |
| 34 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 816.363.635,13 | 232.257.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.363.635,13 | 232.257.178,00 |
| 35 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 232.400.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.400.000,00 | 2.150.000,00 |
| 36 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Jemaja Timur | 274.032.010,00 | 294.032.010,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.032.010,00 | 344.032.010,00 |
| 37 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 200.000.000,00 | 133.403.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 133.403.200,00 |
| 38 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 542.572.785,00 | 169.005.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.572.785,00 | 169.005.300,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 39 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | 103.043.707,00 | 13.494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.043.707,00 | 13.494.000,00 |
| 40 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 62.423.424,00 | 13.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.423.424,00 | 13.215.000,00 |
| 41 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.287.906.000,00 | 118.372.000,00 | 4.108.824.565,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.396.730.565,00 | 268.372.000,00 |
| 42 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DAERAH | 35.990.336.839,07 | 33.071.745.152,72 | 0,00 | 10.458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.990.336.839,07 | 33.082.203.152,72 |
| 43 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Tarempa | 597.005.000,00 | 597.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.005.000,00 | 597.005.000,00 |
| 44 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | 48.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.350.000,00 | 0,00 |
| 45 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 113.567.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.567.931,00 | 0,00 |
| 46 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | RSUD Palmatak | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 47 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.103.813.453,03 | 533.573.629,18 | 243.615.506,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347.428.959,03 | 603.573.629,18 |
| 48 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 13.922.611.309,00 | 9.727.379.811,15 | 33.578.079,42 | 55.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.956.189.388,42 | 9.783.179.811,15 |
| 49 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEKRETARIAT DAERAH | 1.166.546.272,93 | 917.189.272,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.546.272,93 | 917.189.272,93 |
| 51 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.901.000,00 | 549.901.000,00 |
| 52 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 32.427.894,59 | 37.931.416,00 | 331.735.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.163.528,00 | 37.931.416,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 53 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | UPTD SPAM SIANTAN | 826.700.432,70 | 266.961.482,70 | 27.660.567,30 | 34.592.517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.361.000,00 | 301.554.000,00 |
| 54 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 39.307.500,00 | 6.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.307.500,00 | 6.450.000,00 |
| 55 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR | 226.061.968,00 | 20.041.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.061.968,00 | 20.041.824,00 |
| 56 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 151.888.000,00 | 694.867.220,00 | 186.700.000,00 | 147.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.588.000,00 | 841.867.220,00 |
| 58 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Siantan Tengah | 673.113.963,00 | 822.737.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.113.963,00 | 822.737.968,75 |
| 60 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 0,00 |
| 61 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 161.627.161,00 | 106.286.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.627.161,00 | 106.286.336,00 |
| 62 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT PENGELOLAAN DANA BERGULIR | 13.988.115,67 | 1.931.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988.115,67 | 1.931.400,00 |
| 63 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.607.844.368,00 | 2.645.470.439,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607.844.368,00 | 2.645.470.439,70 |
| 64 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 14.502.352.046,00 | 12.379.805.509,29 | 129.680.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.632.032.455,00 | 12.379.805.509,29 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 66 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 584.466.659,00 | 320.710.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.466.659,00 | 320.710.058,00 |
| 67 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2.371.867.200,00 | 2.572.513.326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371.867.200,00 | 2.572.513.326,40 |
| 68 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.040.307.000,00 | 820.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.307.000,00 | 820.065.000,00 |
| 69 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.809.114.613,00 | 350.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809.114.613,00 | 350.100.000,00 |
| 70 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 466.648.092,77 | 458.063.653,39 | 0,00 | 80.208.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.648.092,77 | 538.272.253,39 |
| 71 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Jemaja Barat | 144.838.600,00 | 88.749.950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.838.600,00 | 88.749.950,50 |
| 72 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 190.000.000,00 | 243.551.298,00 | 1.259.631.955,00 | 137.538.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.631.955,00 | 381.089.728,00 |
| 73 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 6.282.769.613,00 | 4.113.021.608,93 | 8.978.000.000,00 | 194.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.260.769.613,00 | 4.307.901.608,93 |
| 74 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Tarempa | 1.046.514.000,00 | 1.218.130.027,00 | 210.391.059,00 | 125.909.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256.905.059,00 | 1.344.039.447,00 |
| 75 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 283.117.422,00 | 36.400.000,00 | 13.934.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.051.454,00 | 36.400.000,00 |
| 76 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 359.731.418,00 | 98.744.935,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.731.418,00 | 98.744.935,80 |
| 77 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DPRD | 452.358.597,00 | 297.878.880,00 | 397.924.471,00 | 197.591.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.283.068,00 | 495.470.848,00 |
| 78 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 25.080.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.080.000,00 | 2.600.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 79 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 187.778.000,00 | 150.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.778.000,00 | 150.000,00 |
| 80 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5.137.136.000,00 | 356.958.850,00 | 32.358.681.840,00 | 1.318.708.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.495.817.840,00 | 1.675.667.539,00 |
| 81 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 272.050.000,00 | 202.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.050.000,00 | 202.252.000,00 |
| 82 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Kute Siantan | 55.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 46.000.000,00 |
| 83 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DAERAH | 1.614.077.118,00 | 1.660.716.498,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614.077.118,00 | 1.660.716.498,01 |
| 84 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | INSPEKTORAT DAERAH | 2.222.269.634,13 | 696.184.528,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222.269.634,13 | 696.184.528,01 |
| 85 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 412.320.889,00 | 35.000.000,00 | 4.988.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.309.389,00 | 35.000.000,00 |
| 86 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 4.402.928.733,39 | 253.327.360,00 | 9.700.098.736,01 | 1.784.785.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.103.027.469,40 | 2.038.112.364,00 |
| 87 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 342.228.000,00 | 98.112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.228.000,00 | 98.112.200,00 |
| 88 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 1.814.301.440,00 | 335.121.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.814.301.440,00 | 335.121.700,00 |
| 89 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 4.673.699.675,00 | 1.634.436.018,00 | 231.457.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905.157.075,00 | 1.634.436.018,00 |
| 90 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | 236.176.560,00 | 146.325.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.176.560,00 | 146.325.071,00 |
| 92 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 180.620.025,15 | 17.325.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.620.025,15 | 17.325.155,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 93 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 75.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 95 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 96 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 99.205.800,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.205.800,00 | 31.000.000,00 |
| 97 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KECAMATAN SIANTAN TIMUR | 581.279.376,01 | 22.823.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.279.376,01 | 22.823.520,00 |
| 98 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 22.568.516,00 | 0,00 | 3.431.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 0,00 |
| 99 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 50.000.000,00 | 299.967.948,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 299.967.948,20 |
| 100 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 101 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Palmatak | 486.301.000,00 | 486.301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.301.000,00 | 486.301.000,00 |
| 102 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | INSPEKTORAT DAERAH | 11.477.928.642,87 | 11.199.095.862,49 | 374.935.542,00 | 148.416.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.852.864.184,87 | 11.347.512.262,49 |
| 103 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 4.765.143.516,00 | 4.329.649.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765.143.516,00 | 4.329.649.692,00 |
| 104 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | RSUD Jemaja | 820.980.109,00 | 895.930.109,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.980.109,00 | 895.930.109,00 |
| 105 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 333.640.000,00 | 333.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.640.000,00 | 333.640.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 106 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Siantan Utara | 110.212.976,00 | 90.861.394,04 | 11.681.085,00 | 14.832.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.894.061,00 | 105.694.061,04 |
| 107 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | INSPEKTORAT DAERAH | 1.246.690.964,87 | 344.669.597,26 | 15.176.567,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.867.532,00 | 344.669.597,26 |
| 108 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | 208.220.580,00 | 53.308.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.220.580,00 | 53.308.400,00 |
| 110 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 150.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000,00 |
| 111 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 62.127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.127.500,00 | 0,00 |
| 112 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | 620.715.900,00 | 112.425.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.715.900,00 | 112.425.680,00 |
| 113 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | 45.400.000,00 | 24.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400.000,00 | 24.890.000,00 |
| 114 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | RSUD Jemaja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 115 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Siantan Selatan | 623.718.000,00 | 623.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.718.000,00 | 623.718.000,00 |
| 116 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 3.525.949.800,03 | 210.918.712,00 | 40.818.267.600,00 | 10.097.999.503,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.344.217.400,03 | 10.308.918.215,14 |
| 117 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT PENGELOLAAN SAMPAH | 522.265.477,00 | 328.977.188,00 | 410.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.265.477,00 | 328.977.188,00 |
| 118 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DPRD | 626.840.000,00 | 266.173.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.840.000,00 | 266.173.558,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 119 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 23.676.714.387,99 | 14.047.783.611,81 | 168.430.464,00 | 88.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.845.144.851,99 | 14.136.483.611,81 |
| 120 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 66.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.070.000,00 | 0,00 |
| 121 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | 168.536.768,00 | 156.536.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.536.768,00 | 156.536.768,00 |
| 122 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 111.818.000,00 | 170.636.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.818.000,00 | 170.636.000,00 |
| 123 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT METROLOGI LEGAL | 4.000.000,00 | 2.119.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 2.119.504,00 |
| 124 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 4.477.235.362,20 | 5.339.672.257,20 | 1.568.204.260,20 | 2.940.423.569,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.045.439.622,40 | 8.280.095.826,47 |
| 125 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 585.383.110,00 | 121.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.383.110,00 | 121.456.000,00 |
| 126 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Siantan Tengah | 415.790.000,00 | 415.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.790.000,00 | 415.790.000,00 |
| 128 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 170.710.500,00 | 19.910.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.710.500,00 | 19.910.050,00 |
| 129 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 14.112.443.317,02 | 10.503.412.516,75 | 0,00 | 29.542.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.112.443.317,02 | 10.532.955.166,75 |
| 130 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEKRETARIAT DAERAH | 8.492.544.846,00 | 5.179.142.334,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.492.544.846,00 | 5.179.142.334,65 |
| 131 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 150.000.000,00 | 24.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 24.014.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 132 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4.556.427.024,96 | 4.973.309.223,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.556.427.024,96 | 4.973.309.223,46 |
| 133 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH | 392.853.110,00 | 102.326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.853.110,00 | 102.326.000,00 |
| 134 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 458.103.950,00 | 109.196.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.103.950,00 | 109.196.364,00 |
| 135 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9.594.735.950,00 | 7.622.088.947,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.594.735.950,00 | 7.622.088.947,15 |
| 136 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 10.096.173.664,06 | 6.287.664.564,96 | 132.031.849,15 | 112.271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.228.205.513,21 | 6.399.935.564,96 |
| 137 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Letung | 481.937.000,00 | 500.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.937.000,00 | 500.832.000,00 |
| 138 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 3.469.924.065,00 | 3.441.262.131,29 | 53.842.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523.766.828,00 | 3.441.262.131,29 |
| 139 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 1.104.560.081,00 | 477.819.834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.560.081,00 | 477.819.834,50 |
| 140 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4.544.817.315,00 | 4.129.472.757,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.544.817.315,00 | 4.129.472.757,98 |
| 142 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | RSUD Palmatak | 2.364.700.000,00 | 2.459.850.000,00 | 300.000.000,00 | 230.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664.700.000,00 | 2.689.850.000,00 |
| 144 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Jemaja Barat | 402.254.000,00 | 423.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.254.000,00 | 423.854.000,00 |
| 145 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | RSUD Tarempa | 1.000.000,00 | 87.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 87.700.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 146 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 393.682.420,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.682.420,37 | 0,00 |
| 147 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 27.375.421.057,21 | 26.981.068.091,97 | 13.212.007.040,54 | 23.722.442.418,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.587.428.097,75 | 50.703.510.510,58 |
| 148 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 149 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 80.265.700,00 | 3.179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.265.700,00 | 3.179.500,00 |
| 150 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Siantan Timur | 368.592.163,00 | 389.352.163,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.592.163,00 | 389.352.163,00 |
| 152 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 815.845.329,00 | 524.314.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815.845.329,00 | 524.314.409,00 |
| 153 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 46.412.000,00 | 14.747.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.412.000,00 | 14.747.400,00 |
| 154 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 512.450.000,00 | 55.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.450.000,00 | 55.850.000,00 |
| 155 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 175.105.000,00 | 22.411.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.105.000,00 | 22.411.800,00 |
| 156 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000.000,00 | 192.000.000,00 |
| 157 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 6.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730.000,00 | 0,00 |
| 158 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 8.007.102.517,77 | 6.200.790.465,77 | 0,00 | 21.007.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.007.102.517,77 | 6.221.797.481,77 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 159 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DPRD | 18.898.774.942,00 | 17.852.668.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.898.774.942,00 | 17.852.668.847,00 |
| 161 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 435.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000.000,00 | 0,00 |
| 162 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2.589.575.061,00 | 1.447.249.574,33 | 0,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589.575.061,00 | 1.457.849.574,33 |
| 163 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0,00 | 0,00 | 26.393.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.393.820,00 | 0,00 |
| 164 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 205.018.228,00 | 260.065.524,00 | 54.981.772,00 | 15.349.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000.000,00 | 275.415.324,00 |
| 165 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 49.781.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.781.000,00 | 0,00 |
| 167 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850.000,00 |
| 168 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Jemaja Timur | 430.246.000,00 | 430.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.246.000,00 | 430.246.000,00 |
| 169 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 170 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Siantan Timur | 466.997.000,00 | 466.997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.997.000,00 | 466.997.000,00 |
| 171 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT PENGELOLAAN SAMPAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 172 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 142.671.413,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.671.413,50 | 0,00 |
| 173 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 449.141.298,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.141.298,00 | 0,00 |
| 174 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 68.986.400,00 | 14.135.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.986.400,00 | 14.135.200,00 |
| 175 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Pembangunan Infrastruktur Wilayah | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | 89.836.045,00 | 23.122.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.836.045,00 | 23.122.900,00 |
| 176 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Palmatak | 938.922.298,00 | 1.302.922.298,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968.922.298,00 | 1.302.922.298,00 |
| 177 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | SEKRETARIAT DPRD | 12.310.884.738,00 | 6.654.660.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.310.884.738,00 | 6.654.660.758,00 |
| 178 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 1.198.978.578,00 | 776.446.685,00 | 20.664.632,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.643.210,00 | 776.946.685,00 |
| 179 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1.230.454.400,00 | 1.097.476.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.454.400,00 | 1.097.476.400,00 |
| 180 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 14.559.900,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.559.900,00 | 400.000,00 |
| 181 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 49.754.542,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.754.542,00 | 51.000,00 |
| 182 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 300.196.339,00 | 86.017.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.196.339,00 | 86.017.000,00 |
| 183 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 11.716.380.654,00 | 9.008.894.841,00 | 15.210.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.731.591.164,00 | 9.008.894.841,00 |
| 184 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 100.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 186 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN | 5.022.734.200,00 | 87.913.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.022.734.200,00 | 87.913.000,00 |
| 187 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Puskesmas Letung | 554.773.474,00 | 649.564.839,00 | 80.787.642,00 | 215.676.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.561.116,00 | 865.241.384,00 |
| 188 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |
| 189 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 944.618.000,00 | 714.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.618.000,00 | 714.870.000,00 |
| 190 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 11.006.284.905,12 | 8.122.248.576,60 | 534.697.149,00 | 86.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.540.982.054,12 | 8.208.248.576,60 |
| 191 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DAERAH | 34.806.252,00 | 621.609.833,00 | 239.982.092,00 | 379.268.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.788.344,00 | 1.000.878.601,00 |
| 192 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 289.687.650,01 | 1.122.670.417,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.687.650,01 | 1.122.670.417,80 |
| TOTAL | | | | | 579.883.847.158,61 | 481.590.475.296,37 | 139.129.086.540,35 | 65.671.602.281,52 | 8.981.012.988,52 | 8.603.707.406,35 | 105.213.314.659,00 | 103.584.697.395,00 | 833.207.261.347,48 | 659.455.482.379,24 |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati

ANENG

Lampiran X : Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tanggal : 29 Agustus 2025

# KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
## DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

| GOLONGAN / RUANG | ESELON | | | | | NON ESELON | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | TENAGA FUNGSIONAL | STAF | |
| Golongan IV/e | | | | | | | | |
| Golongan IV/d | | 1 | | | | | | 1 |
| Golongan IV/c | | 18 | 1 | | | 2 | 1 | 22 |
| Golongan IV/b | | 8 | 15 | | | 16 | 1 | 40 |
| Golongan IV/a | | | 31 | | | 21 | 2 | 54 |
| Golongan III/e | | | | | | | | |
| Golongan III/d | | | 62 | 63 | | 209 | 13 | 347 |
| Golongan III/c | | | 1 | 50 | | 147 | 19 | 217 |
| Golongan III/b | | | | 30 | | 352 | 96 | 478 |
| Golongan III/a | | | | 2 | | 149 | 154 | 305 |
| Golongan II/e | | | | | | | | |
| Golongan II/d | | | | | | 105 | 84 | 189 |
| Golongan II/c | | | | | | 64 | 49 | 113 |
| Golongan II/b | | | | | | 1 | 14 | 15 |
| Golongan II/a | | | | | | 17 | 5 | 22 |
| Golongan I/e | | | | | | | | |
| Golongan I/d | | | | | | | 1 | 1 |
| Golongan I/c | | | | | | | 2 | 2 |
| Golongan I/b | | | | | | | | |
| Golongan I/a | | | | | | | | |
| PPPK | | | | | | 640 | 1805 | 2445 |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati

ANENG

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 29 Agustus 2025

# KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
# DAFTAR PIUTANG DAERAH
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Uraian Rincian Piutang | Tahun Pengakuan Piutang | Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2 | Perkiraan Penambahan Tahun N-1 | Perkiraan Pengurangan Tahun N-1 | Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Lain-lain PAD yang SAH | 2024 | 590.980.517,00 | 0,00 | 419.906.381,32 | 171.074.135,68 |
| 2 | Piutang Lainnya | 2024 | 214.473.933,32 | 0,00 | 214.473.933,32 | 0,00 |
| 3 | Piutang Pajak Restoran | 2024 | 14.345.634,00 | 0,00 | 1.434.563,00 | 12.911.071,00 |
| 4 | Piutang PBB-P2 (Pokok) | 2024 | 1.513.474.900,00 | 0,00 | 633.069.028,69 | 880.405.871,31 |
| 5 | Piutang Transfer | 2024 | 12.454.416.671,00 | 0,00 | 0,00 | 12.454.416.671,00 |
| | | Total | 14.787.691.655,32 | 0,00 | 1.268.883.906,33 | 13.518.807.748,99 |

Kab. Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Bupati

ANENG

Lampiran XII
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahTahun Anggaran 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Tahun Penyertaan Modal | Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga | Dasar Hukum Penyertaan | Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Jumlah Penyertaan Modal Daerah | Jumlah Modal yang telah disertakan s.d Awal Tahun | Penyertaan Modal Tahun Ini | Jumlah Modal yang telah disertakan s.d Akhir Tahun Ini | Sisa Modal yang belum disertakan | Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini | Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali Tahun Ini | Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan s.d Tahun Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=6-9 | 11 | 12 | 13=9-12 |
| 1 | 2012 | PT. BPD Bank Riau Kepri | Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 | Investasi Jangka Panjang | Rp 7.500.000.000,00 | Rp 7.500.000.000,00 | Rp - | Rp 7.500.000.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 7.500.000.000,00 |
| 2 | 2012 | Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera | Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 | Investasi Jangka Panjang | Rp 7.500.000.000,00 | Rp 7.500.000.000,00 | Rp - | Rp 7.500.000.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 7.500.000.000,00 |
| 3 | 2018 | PT. BPD Bank Riau Kepri | Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2018 | Investasi Jangka Panjang | Rp 323.700.000,00 | Rp 323.700.000,00 | Rp - | Rp 323.700.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 323.700.000,00 |
| **Jumlah** | | | | | Rp 15.323.700.000,00 | Rp 15.323.700.000,00 | Rp - | Rp 15.323.700.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp 15.323.700.000,00 |

Bupati Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Aneng

Lampiran XIII
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahTahun Anggaran 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET TETAP LAINNYA**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Jenis Aset Tetap Daerah | Saldo Akhir 2024 | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| 1 | Tanah | Rp 171.615.482.367,00 | Rp 147.000.000,00 | Rp - | Rp 171.762.482.367,00 |
| 2 | Peralatan Dan Mesin | Rp 489.893.829.957,46 | Rp 19.849.344.129,23 | Rp - | Rp 509.743.174.086,69 |
| 3 | Gedung Dan Bangunan | Rp 967.493.302.016,28 | Rp 32.284.017.574,88 | Rp - | Rp 999.777.319.591,16 |
| 4 | Jalan, Irigasi Dan Jaringan | Rp 1.364.357.985.227,14 | Rp 14.510.780.626,14 | Rp - | Rp 1.378.868.765.853,28 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp 17.607.033.192,16 | Rp 1.038.170.475,00 | Rp - | Rp 18.645.203.667,16 |
| 6 | Kontruksi Dalam Pekerjaan | Rp 114.008.496.706,80 | Rp - | Rp - | Rp 114.008.496.706,80 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | -Rp 1.150.571.959.997,60 | Rp - | Rp - | -Rp 1.150.571.959.997,60 |
| **J u m l a h** | | **Rp 1.974.404.169.469,24** | **Rp 67.829.312.805,25** | **Rp -** | **Rp 2.042.233.482.274,49** |

Bupati Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Aneng

Lampiran XIV
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahTahun Anggaran 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Kode Kegiatan | Judul Kegiatan | Jumlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1 dan Tahun n | | | Jumlah Akumulasi Realisasi s.d. Akhir Tahun n | Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Realisasi Tahun n-2 | Realisasi Tahun n-1 | Realisasi Tahun n | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (4+5+6) | 8 |
| 1 | | NIHIL | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | |

Bupati Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Aneng

Lampiran XV
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahTahun Anggaran 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**DAFTAR DANA CADANGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Tujuan Pembentukan Dana Cadangan | Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan | Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan | Saldo Awal | Transfer dari Kas Daerah | Transfer ke Kas Daerah | Saldo Akhir | Sisa Dana yang Belum Dicadangkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7+8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | |

N I H I L

Bupati Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Aneng

Lampiran XVI
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahTahun Anggaran 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**DAFTAR PINJAMAN DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No. | Sumber Pinjaman Daerah | Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi | Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi | Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas) | Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) | Persentase Bunga Pinjaman % | Tujuan Penggunaan Pinjaman | Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini | | Jumlah Sisa Pembayaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pokok Pinjaman Daerah (Rp) | Bunga (Rp) | Pokok Pinjaman Daerah (Rp) | Bunga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | |

**N I H I L**

Bupati Kepulauan Anambas, 29 Agustus 2025

Aneng